



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2022**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 26.A/LHP/XIX.PNK/5/2023**  
**Tanggal : 9 Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124, Telp. 0561 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id  
Website: <http://kalbar.bpk.go.id>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Nomor : 26.A/LHP/XIX.PNK/5/2023**

**Tanggal : 9 Mei 2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>1</b>
<b>GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....</b>	<b>3</b>
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
2. Standar Pemeriksaan.....	3
3. Tujuan Pemeriksaan.....	3
4. Entitas yang Diperiksa .....	3
5. Lingkup Pemeriksaan.....	3
6. Metodologi Pemeriksaan .....	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan .....	4
8. Batasan Pemeriksaan .....	5
<b>LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH AUDITED</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

### A

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### B

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

### C

CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan

### L

LAK : Laporan Arus Kas

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LO : Laporan Operasional

LPE : Laporan Perubahan Ekuitas

LPSAL : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

### S

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SPI : Sistem Pengendalian Intern

SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

### T

TA : Tahun Anggaran

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 terdiri dari dua laporan, yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
  - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
  - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
  - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
  - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
  - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung Jawab Pemerintah atas laporan keuangan**

Pemerintah Kabupaten Sintang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 9 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

**Pontianak, 9 Mei 2023**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. *W***  
**Register Negara Akuntan Nomor 718**

## GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

### 3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

### 4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### 5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut diatas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO, dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;



- f. Efektifitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

## **6. Metodologi Pemeriksaan**

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

## **7. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan selama 19 hari mulai tanggal 27 Maret 2023 s.d. 14 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 242/ST/VIII/3/2023 tanggal 21 Maret 2023.

## **8. Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



## BUPATI SINTANG

Sintang, 9 Mei 2023

Nomor : 700.1.1.1/ 964 /ITKAB/2023

Lampiran : -

Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada

Yth. Kepala BPK RI Perwakilan  
Kalimantan Barat

di

Pontianak

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran (TA) 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca per 31 Desember 2022, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang memengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Sintang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan.

  
**Pemerintah Kabupaten Sintang**  
**Bupati,**  
**dr. H. JAROT WINARNO, M. Med. PH.**

# LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG (AUDITED)



TAHUN ANGGARAN 2022



## **BUPATI SINTANG**

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Neraca; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sintang, 9 Mei 2023



*Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21004 – 22002 Fax. (0565) 21003*

**LAPORAN KEUANGAN POKOK****1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>4.1.1</b>	<b>1.793.874.643.623,00</b>	<b>1.780.017.927.520,58</b>	<b>99,23</b>	<b>2.004.696.822.617,10</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>200.370.858.275,00</b>	<b>162.366.717.402,46</b>	<b>81,03</b>	<b>176.520.346.650,22</b>
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.1.1.1.1	97.322.000.000,00	41.665.868.567,10	42,81	44.901.339.051,50
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.1.1.1.2	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.1.1.1.3	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	4.1.1.1.4	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32
<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>1.593.503.785.348,00</b>	<b>1.613.631.210.118,12</b>	<b>101,26</b>	<b>1.733.440.627.820,57</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA</b>	<b>4.1.1.2.1</b>	<b>1.186.505.672.287,00</b>	<b>1.178.604.716.170,00</b>	<b>99,33</b>	<b>1.287.092.362.149,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	4.1.1.2.1.1	36.483.507.000,00	46.478.342.269,00	127,40	69.057.394.705,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	4.1.1.2.1.2	9.926.431.000,00	16.115.553.000,00	162,35	30.134.354.819,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	4.1.1.2.1.3	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	4.1.1.2.1.4	301.935.299.287,00	279.634.924.483,00	92,61	350.710.971.625,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA</b>	<b>4.1.1.2.2</b>	<b>353.724.663.000,00</b>	<b>353.507.373.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>356.047.288.000,00</b>
Dana Penyesuaian – LRA	4.1.1.2.2.1	343.060.757.000,00	342.843.467.000,00	99,94	348.528.098.000,00
Dana Insentif Daerah – LRA	4.1.1.2.2.2	10.663.906.000,00	10.663.906.000,00	100,00	7.519.190.000,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi– LRA</b>	<b>4.1.1.2.3</b>	<b>53.273.450.061,00</b>	<b>81.519.120.948,12</b>	<b>153,02</b>	<b>90.300.977.671,57</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	4.1.1.2.3.1	49.923.450.061,00	79.535.557.148,12	159,32	77.200.977.671,57
Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	4.1.1.2.3.2	3.350.000.000,00	1.983.563.800,00	59,21	13.100.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94.735.848.146,31</b>
Pendapatan Hibah – LRA	4.1.1.3.1	0,00	4.020.000.000,00	100,00	40.000.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	4.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	94.695.848.146,31



Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
<b>BELANJA</b>	<b>4.1.2</b>	<b>1.501.361.888.623,00</b>	<b>1.328.977.136.222,31</b>	<b>88,52</b>	<b>1.385.318.654.052,20</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>1.292.397.711.785,00</b>	<b>1.137.829.897.279,31</b>	<b>88,04</b>	<b>1.109.822.778.027,28</b>
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	516.673.365.976,00	472.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28
Belanja Subsidi	4.1.2.1.3	1.545.015.581,00	753.471.164,00	48,77	0,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.4	35.821.552.000,00	34.080.803.392,00	95,14	64.288.633.554,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.5	2.854.000.000,00	2.756.050.000,00	96,57	980.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	4.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>204.497.711.888,00</b>	<b>189.346.459.659,00</b>	<b>92,59</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
Belanja Tanah	4.1.2.2.1	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	3.114.842.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00
Belanja Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00
Belanja Aset Lainnya	4.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.1.2.3</b>	<b>4.466.464.950,00</b>	<b>1.800.779.284,00</b>	<b>40,32</b>	<b>2.345.211.737,92</b>
Belanja Tak Terduga	4.1.2.3.1	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
<b>TRANSFER</b>	<b>4.1.3</b>	<b>473.767.923.111,00</b>	<b>473.510.079.549,00</b>	<b>99,95</b>	<b>474.753.555.657,00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>4.1.3.1</b>	<b>10.342.901.835,00</b>	<b>10.342.901.835,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.168.586.580,00</b>
Bagi Hasil Pajak Daerah	4.1.3.1.1	9.732.200.000,00	9.732.200.000,00	100,00	5.722.989.894,00
Bagi Hasil Retribusi	4.1.3.1.2	610.701.835,00	610.701.835,00	100,00	445.596.686,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>4.1.3.2</b>	<b>463.425.021.276,00</b>	<b>463.167.177.714,00</b>	<b>99,94</b>	<b>468.584.969.077,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.1.3.2.1	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.1.3.2.2	463.375.021.276,00	463.117.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>		<b>1.975.129.811.734,00</b>	<b>1.802.487.215.771,31</b>	<b>91,26</b>	<b>1.860.072.209.709,20</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(181.255.168.111,00)</b>	<b>(22.469.288.250,73)</b>	<b>12,40</b>	<b>144.624.612.907,90</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>4.1.5</b>	<b>181.255.168.111,00</b>	<b>181.255.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.1.5.1</b>	<b>190.755.168.111,00</b>	<b>190.755.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
Penggunaan SiLPA	4.1.5.1.1	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.1.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00





Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.1.5.2</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.5.2.1	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>4.1.6</b>	<b>0,00</b>	<b>158.786.429.685,40</b>		<b>190.755.168.111,93</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

  
**BUPATI SINTANG**  
**JAROT WINARNO**

**2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH****PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	4.2.1	190.755.168.111,93	46.130.555.204,03
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.2.2	190.755.717.936,13	46.130.555.204,03
3	<b>Subtotal (1 - 2)</b>		<b>(549.824,20)</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	4.2.3	158.786.429.685,40	190.755.168.111,93
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>158.785.879.861,20</b>	<b>190.755.168.111,93</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	4.2.4	549.824,20	0,00
7	Lain-lain	4.2.5	0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>4.2.6</b>	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>190.755.168.111,93</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**BUPATI SINTANG**  
**JAROT WINARNO**

**3. NERACA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
<b>ASET</b>	<b>4.3.1</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>4.3.1.1</b>		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	15.110.850,00	19.957.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	16.416.564,00	35.822.368,00
Kas di Kas BLUD	4.3.1.1.4	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98
Kas di Kas BOS	4.3.1.1.5	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.3.1.1.6	63.926.200,00	18.491.000,00
Kas di Kas Lainnya	4.3.1.1.7	0,00	0,00
Piutang Pajak	4.3.1.1.8	12.760.957.498,10	11.475.858.221,10
Penyisihan Piutang Pajak		(8.105.327.813,61)	(7.393.662.390,48)
Piutang Pajak Netto		4.655.629.684,49	4.082.195.830,62
Piutang Retribusi	4.3.1.1.9	109.734.225,00	160.837.425,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(30.314.492,50)	(11.884.980,00)
Piutang Retribusi Netto		79.419.732,50	148.952.445,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang di Pisahkan	4.3.1.1.10	0,00	10.709.858.275,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	4.3.1.1.11	10.608.656.692,89	32.676.912.323,43
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		(4.405.877.895,72)	(4.125.893.815,85)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		6.202.778.797,17	28.551.018.507,58
Piutang Transfer Dari Provinsi	4.3.1.1.12	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12
Piutang Lainnya	4.3.1.1.13	997.424.698,57	1.055.236.614,19
Penyisihan Piutang Lainnya		(700.476.510,29)	(827.411.513,17)
Piutang Lainnya Netto		296.948.188,28	227.825.101,02
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.14	30.152.054,79	9.140.450.822,04
Persediaan	4.3.1.1.15	37.568.784.131,18	46.373.142.253,80
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>220.427.195.651,02</b>	<b>294.014.410.564,11</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>4.3.1.2</b>		
Investasi Permanen	4.3.1.2.1		
Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar	4.3.1.2.1.1	91.275.105.600,00	86.275.105.600,00
Penyertaan Modal pada PDAM	4.3.1.2.1.2	44.135.454.774,75	48.958.541.477,05
Penyertaan Modal pada PT Jamkrida	4.3.1.2.1.3	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>138.035.560.374,75</b>	<b>137.858.647.077,05</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>138.035.560.374,75</b>	<b>137.858.647.077,05</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>4.3.1.3</b>		
Tanah	4.3.1.3.1	1.958.349.574.833,73	1.396.702.204.020,93
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	771.140.705.376,93	711.433.112.673,61
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	1.519.936.667.357,11	1.455.239.479.202,32



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Ref	2022	2021
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	2.348.788.049.614,46	2.097.313.682.205,59
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	101.110.951.016,77	92.210.305.830,98
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	44.097.055.120,14	122.675.724.941,85
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(2.175.478.910.696,56)	(1.893.280.582.871,71)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>4.567.944.092.622,58</b>	<b>3.982.293.926.003,57</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>4.3.1.4</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	4.3.1.4.1	2.176.984.630,97	2.468.880.115,35
Aset Tak Berwujud	4.3.1.4.2	16.307.656.752,11	16.307.656.752,11
Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.3.1.4.3	(15.609.343.718,10)	(14.981.603.082,13)
Aset Tak Berwujud Netto		698.313.034,01	1.326.053.669,98
Aset Lain-Lain	4.3.1.4.4	8.061.270.378,52	8.061.270.378,52
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	4.3.1.4.5	(6.500.579.150,60)	(6.370.640.667,64)
Aset Lain-Lain Netto		1.560.691.227,92	1.690.629.710,88
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	4.3.1.4.6	23.954.469.567,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>28.390.458.459,90</b>	<b>5.485.563.496,21</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.954.797.307.108,25</b>	<b>4.419.652.547.140,94</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>4.3.2</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>4.3.2.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.2	74.512.278,81	176.885.582,39
Utang Belanja	4.3.2.1.3	18.848.101.448,00	42.302.539.394,00
Utang Lain-lain	4.3.2.1.4	5.320.667.000,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.5	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>24.243.280.726,81</b>	<b>42.479.424.976,39</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>24.243.280.726,81</b>	<b>42.479.424.976,39</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>4.3.3</b>	<b>4.930.554.026.381,44</b>	<b>4.377.173.122.164,55</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>4.954.797.307.108,25</b>	<b>4.419.652.547.140,94</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

  
**BUPATI SINTANG**  
**JAROT WINARNO**



## 4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>PENDAPATAN – LO</b>	<b>4.4.1</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</b>	<b>4.4.1.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	4.4.1.1.1	42.969.138.309,10	46.520.029.218,50
Hasil Retribusi Daerah – LO	4.4.1.1.2	3.491.454.622,76	3.271.734.190,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.4.1.1.3	0,00	10.709.858.275,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	4.4.1.1.4	84.096.178.823,75	131.002.778.626,55
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO</b>		<b>130.556.771.755,61</b>	<b>191.504.400.310,64</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>4.4.1.2</b>		
<b>Transfer Pemerintah Pusat –LO</b>	<b>4.4.1.2.1</b>	<b>1.202.559.185.737,00</b>	<b>1.287.092.362.149,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak – LO	4.4.1.2.1.1	56.647.627.923,00	69.057.394.705,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	4.4.1.2.1.2	29.900.736.913,00	30.134.354.819,00
Dana Alokasi Umum – LO	4.4.1.2.1.3	836.375.896.418,00	837.189.641.000,00
Dana Alokasi Khusus. – LO	4.4.1.2.1.4	279.634.924.483,00	350.710.971.625,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO</b>	<b>4.4.1.2.2</b>	<b>10.663.906.000,00</b>	<b>7.519.190.000,00</b>
Dana Insentif Daerah – LO	4.4.1.2.2.1	10.663.906.000,00	7.519.190.000,00
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO</b>	<b>4.4.1.2.3</b>	<b>90.300.375.108,20</b>	<b>82.777.777.004,11</b>
Dana Bagi Hasil Pajak – LO	4.4.1.2.3.1	88.316.811.308,20	69.677.777.004,11
Bantuan Keuangan – LO	4.4.1.2.3.2	1.983.563.800,00	13.100.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer – LO</b>		<b>1.303.523.466.845,20</b>	<b>1.377.389.329.153,11</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH –LO</b>	<b>4.4.1.3</b>		
Pendapatan Hibah –LO	4.4.1.3.1	632.768.570.912,83	36.278.200.309,65
Pendapatan Lainnya – LO	4.4.1.3.2	0,00	94.695.806.646,31
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LO</b>		<b>632.768.570.912,83</b>	<b>130.974.006.955,96</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN – LO</b>		<b>2.066.848.809.513,64</b>	<b>1.699.867.736.419,71</b>
<b>BEBAN – LO</b>	<b>4.4.2</b>		
<b>BEBAN OPERASI – LO</b>	<b>4.4.2.1</b>		
Beban Pegawai	4.4.2.1.1	617.380.287.686,56	614.173.898.876,92
Beban Persediaan	4.4.2.1.2	191.400.112.126,39	194.435.539.828,38
Beban Jasa	4.4.2.1.3	200.595.040.920,58	228.010.569.161,53
Beban Pemeliharaan	4.4.2.1.4	28.603.773.909,35	21.554.423.676,00



Uraian	Ref	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Perjalanan Dinas	4.4.2.1.5	57.846.503.334,00	53.216.095.871,53
Beban Subsidi	4.4.2.1.6	753.471.164,00	0,00
Beban Hibah	4.4.2.1.7	28.697.721.000,00	31.419.679.900,00
Beban Bantuan Sosial	4.4.2.1.8	2.756.050.000,00	1.277.200.000,00
Beban Bantuan Keuangan	4.4.2.1.9	0,00	0,00
Beban Transfer	4.4.2.1.10	130.666.612.549,00	126.225.457.657,00
Beban Penyusutan	4.4.2.1.11	231.653.322.902,35	220.313.402.076,29
Beban Amortisasi	4.4.2.1.12	627.740.635,97	1.048.842.259,24
Beban Penyisihan Piutang	4.4.2.1.13	1.169.537.021,73	1.055.297.314,55
Beban Lain-lain	4.4.2.1.14	1.790.779.284,00	0,00
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.493.940.952.533,93</b>	<b>1.492.730.406.621,44</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>		<b>572.907.856.979,71</b>	<b>207.137.329.798,27</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Aset Non Lancar		0,00	45.925.622,28
Surplus Penyelesaian Kewajiban		0,00	30.581.000,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		293.669.239,12	172.815.387,13
<b>KEGIATAN NON ANGGARAN</b>			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban		0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.126.221.904,23	7.044.642.067,26
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>4.4.3</b>	<b>(3.832.552.665,11)</b>	<b>(6.795.320.057,85)</b>
<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>4.4.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>4.4.5</b>	<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

  
BUPATI SINTANG  
JAROT WINARNO

**5. LAPORAN ARUS KAS**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>4.5.1</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>	<b>4.5.1.1</b>		
Penerimaan Pajak Daerah		41.665.868.567,10	44.901.339.051,50
Penerimaan Retribusi Daerah		3.511.868.658,24	3.165.373.258,40
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.709.858.275,00	10.862.613.298,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		106.056.313.252,12	117.281.263.942,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		46.478.342.269,00	69.057.394.705,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		16.115.553.000,00	30.134.354.819,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		836.375.896.418,00	837.189.641.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		279.634.924.483,00	350.710.971.625,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		342.843.467.000,00	348.528.098.000,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		10.663.906.000,00	7.519.190.000,00
Penerimaan Dana Transfer Provinsi		81.519.120.948,12	90.300.977.671,57
Penerimaan Hibah		4.020.000.000,00	40.000.000,00
Penerimaan Lainnya		0,00	94.695.848.146,31
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.779.595.118.870,58</b>	<b>2.004.387.065.517,10</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>	<b>4.5.1.2</b>		
Pembayaran Pegawai		627.666.020.862,56	648.859.358.337,00
Pembayaran Barang dan jasa		472.573.551.860,75	395.694.786.136,28
Pembayaran Subsidi		753.471.164,00	0,00
Pembayaran Hibah		34.080.803.392,00	64.288.633.554,00
Pembayaran Bantuan Sosial		2.756.050.000,00	980.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga		1.800.779.284,00	2.345.211.737,92
Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		10.342.901.835,00	6.168.586.580,00
Pembayaran Transfer Dana Desa		463.167.177.714,00	468.584.969.077,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>1.613.140.756.112,31</b>	<b>1.586.921.545.422,20</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>4.5.1.3</b>	<b>166.454.362.758,27</b>	<b>417.465.520.094,90</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>4.5.2</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>	<b>4.5.2.1</b>		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		50.200.000,00	7.953.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		372.608.650,00	301.804.100,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>422.808.650,00</b>	<b>309.757.100,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Ref	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>ARUS KAS KELUAR</b>	<b>4.5.2.2</b>		
Perolehan atas Tanah		760.147.200,00	3.114.842.800,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		40.565.232.108,00	72.458.838.616,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		39.754.346.725,00	66.687.416.666,00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		99.293.037.810,00	121.390.855.062,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya		8.973.695.816,00	9.498.711.143,00
Perolehan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		9.500.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>198.846.459.659,00</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>4.5.2.3</b>	<b>(198.423.651.009,00)</b>	<b>(272.840.907.187,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>4.5.3</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>	<b>4.5.3.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		96.635.443.357,34	124.655.747.895,23
Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.655.747.895,23</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>	<b>4.5.3.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		96.635.443.357,34	124.669.871.318,23
Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.669.871.318,23</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>4.5.3.3</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.123.423,00)</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>4.5.4</b>	<b>(31.969.288.250,73)</b>	<b>144.610.489.484,90</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP</b>		<b>190.755.717.936,13</b>	<b>46.144.678.627,03</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara</b>		<b>158.786.429.685,40</b>	<b>190.755.168.111,93</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

  
**BUPATI SINTANG**  
**JAROT WINARNO**



**6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

*(dalam Rupiah)*

Uraian	Ref	2022	2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>4.6.1</b>	<b>4.377.173.122.164,55</b>	<b>4.170.852.771.920,78</b>
<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b>4.6.2</b>	<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>4.6.3</b>	<b>(15.694.400.097,72)</b>	<b>5.978.340.503,35</b>
- Penyesuaian Kas		549.824,20	0,00
- Penyesuaian Piutang		(18.170.465,00)	14.173.355.153,00
- Penyesuaian Beban dibayar Dimuka		0,00	0,00
- Penyesuaian Penyisihan Piutang		(217.280,00)	(159.493.797,43)
- Penyesuaian Investasi Permanen		(6.525.601.817,26)	6.076.359.182,23
- Penyesuaian Aset Tetap		(2.438.302.921,07)	9.334.908.000,00
- Penyesuaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
- Penyesuaian Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap		(1.376.339.508,98)	(15.405.649.567,52)
- Penyesuaian Amortisasi		0,00	(199.715.600,00)
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		0,00	91.932.500,00
- Penyesuaian Aset Lainnya		(52.315.116,49)	0,00
- Penyesuaian Pengakuan Hutang		36.664.186,88	(7.933.355.366,92)
- Lain-lain		(5.320.667.000,00)	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>4.6.4</b>	<b>4.930.554.026.381,44</b>	<b>4.377.173.122.164,55</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

  
**BUPATI SINTANG**  
**JAROT WINARNO**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah telah membuat sebuah sistem yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat.

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 32 dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II, dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

## **I.2 Maksud Dan Tujuan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: (i) *Laporan Realisasi Anggaran*, (ii) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*, (iii) *Laporan Operasional*, (iv) *Laporan Perubahan Ekuitas*, (v) *Neraca*, (vi) *Laporan Arus Kas*, dan (vii) *Catatan atas Laporan Keuangan*. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang selama Tahun anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang serta hasil-hasil yang dicapai;



4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; dan
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

### **I.3 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79)



27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 97)

#### **I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **I.4.1. Unsur Laporan Keuangan**

LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

##### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

##### **3. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

##### **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



## **5. Neraca**

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

## **6. Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2022.

## **7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### **I.4.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.





Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan :

- a) Perubahan tampilan akun Kas Lainnya yang sebelumnya terdapat akun Kas Dana BOS maka untuk perubahan terbaru akan dimunculkan tersendiri, dan akun Kas Lainnya hanya berisi Kas Lainnya - Kas di Bendara Pengeluaran.
- b) Perubahan pada tampilan Laporan Keuangan Neraca pada Akun Piutang yang sebelumnya semua piutang selain pajak dan retribusi dikelompokkan dalam satu akun piutang lainnya. Sedangkan dalam perubahan kebijakan akuntansi ini akun piutang sudah dirinci berdasarkan akun piutang terbaru.
- c) Perhitungan penyisihan piutang bagian lancer tagihan angsuran pada kebijakan sebelumnya tidak dikenakan beban penyisihan karena rentang pelunasan jatuh tempo lebih dari 10 tahun, maka untuk perubahan yang baru ini dikenakan beban penyisihan piutang berdasarkan jatuh tempo per periode angsuran.
- d) Piutang yang sudah disisihkan pada waktu pelunasan diakui sebagai surplus non operasional lainnya yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LO.

#### **I.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

##### **BAB I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

##### **BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 2.4. Hambatan dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan



**BAB III. Kebijakan Akuntansi**

- 3.1. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi

**BAB IV. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan**

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas

**BAB V. Pengungkapan Penting Lainnya**

**BAB VI. Penutup**



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar: 8,57 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar: 2,97 persen
- c. Gini Ratio sebesar: 0,277
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar: 67,86 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar: ... persen (*data belum tersedia*)
- f. Tingkat Inflasi sebesar: 6,50 persen
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2022 Menurut Lapangan Usaha sebesar: 9.731,98 miliar

##### **2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis



kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(turun)
1	Kabupaten Sintang (%)	9,28	8,57	-0,57
2	Kabupaten Sintang (Ribu Orang)	39,4	36,76	-0,42
3	Provinsi Kalimantan Barat (%)	7,15	6,73	-2,64
4	Nasional (%)	10,14		
5	Peringkat Provinsi	-	-	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang pada Tahun 2022 sebesar 8,57% mengalami penurunan 0,057, dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 9,28% dan diharapkan pada Tahun 2022 terus meningkat hingga angka 8,21%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun anggaran 2022 sebagaimana tema RKPD adalah *Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Infrastruktur, Dan Sumber Daya Manusia Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Menuju Kabupaten Sintang Yang Berkelanjutan*, yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2024.

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	Uraian	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,47	1,56	0,44
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	1,03	1,04	0,01
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,56	0,15
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	Uraian	Tahun 2021(%)	Tahun 2022(%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan	0,34	0,43	0,09
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	0,23	0,24	0,01
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,04
4	Peringkat Provinsi	-		
5	Peringkat Nasional	-		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang



### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:(i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 2,97%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)* (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	3,95	2,97	-0,98
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat (%)	5,81	5,82	4,86	-0,96
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
4	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar)	9	6	21	-
	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil)	6	9	14	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,97%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,95% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Namun demikian TPT Kabupaten Sintang masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan angka 4,86% pada tahun 2022 dan 5,82% pada tahun 2021, sedangkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86% dan tahun 2021 sebesar 6,49%.

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:



- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,271 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Gini Ratio Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Sintang	0,248	0,277	
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	0,313	0,315	
3	Tingkat Nasional	0,384	0,381	
3	Peringkat Provinsi	-		
4	Peringkat Nasional	-		

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sintang yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,277 Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,315 dan Gini Ratio Nasional sebesar 0,381.

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 67,86 poin dengan kategori Sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Sintang	66,93	67,86	-0,07
2	Provinsi Kalimantan Barat	67,90	68,63	-0,73
3	Nasional	72,29	72,92	-0,63
4	Peringkat Provinsi	7	7	0
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

**Tabel 2.7**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) <i>Life Expectancy (e<sub>0</sub>)</i>	71,84	72,12	0,28
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	12,04	12,29	-0,25
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	7,08	7,36	0,28
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah) <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	8.708	8.858	150
5	IPM	66,93	67,89	0,96

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 66,86 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 66,93 poin mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH) dimana pada Tahun 2021 sebesar 71,84 poin dan pada tahun 2022 sebesar 72,12 poin, harapan lama sekolah (HLS) Tahun 2022 sebesar 12,29 poin, pada Tahun 2021 sebesar 12,04 poin serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2022 sebesar 7,36 poin. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp8.858.000,00 atau naik sebesar Rp150.000,00 dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar Rp8.708.000,00. IPM di Kabupaten Sintang pada saat ini berada pada urutan 7 (Tujuh) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

### 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.



Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	Uraian	Kabupaten Sintang			Provinsi Kalimantan Barat (Miliar)	Nasional (Triliun)
		2019	2020*	2021**	2021	2021
1	PDRB (juta rupiah)	9.586.051,5	9.375.708,4	9.731.976,4	141.187,0	10.669,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	-2,19	3,80	4,78	3,69
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan: \* Angka sementara, \*\* Angka sangat sementara pada tahun 2022 data belum rilis.

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Sintang mengalami peningkatan rata-rata 5,29% Pada periode Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten Sintang sebesar 5,33%, Tahun 2018 sebesar 5,47%, namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 5,09% atau turun sebesar -0,38% dari Tahun 2018. Namun secara skala Provinsi Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebesar 5,00% sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2020 sebesar 5,05%.

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i)





inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 6,50% dengan kategori *ringan* sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.9**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang (%)	1,88	6,50	4,62
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)	1,45	6,30	4,86
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,50%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,88% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Inflasi Kabupaten Sintang hampir sama dengan tingkat Inflasi Provinsi sebesar 6,30% pada Tahun 2022.

### 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.446,31	2.512,41	2.590,79
2	Pertambangan dan Penggalian	658,00	683,56	702,39
3	Industri Pengolahan	870,90	853,97	894,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,08	2,35	2,39
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,74	5,96	6,25
6	Konstruksi	1.239,58	1.133,53	1.195,20



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.709,87	1.528,55	1.562,37
8	Transportasi dan Pergudangan	191,46	174,98	162,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236,33	191,93	207,00
10	Informasi dan Komunikasi	638,30	685,36	721,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270,95	267,56	279,10
12	Real Estat	255,55	257,23	261,84
13	Jasa Perusahaan	39,54	37,83	37,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	308,62	311,89	305,85
15	Jasa Pendidikan	423,55	395,57	403,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217,20	273,69	339,00
17	Jasa Lainnya	72,08	59,34	59,86

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan: \* Angka sementara, \*\* Angka sangat sementara

Tabel diatas tersebut memperlihatkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi perekonomian Kabupaten Sintang yakni Rp2.590,79 miliar. Sektor perekonomian dominan berikutnya di Kabupaten Sintang adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Yakni Rp1.562,37 miliar,serta kategori Konstruksi yakni Rp1.195,20 miliar. dan Industri Pengolahan sebesar Rp894,09 miliar.

Dilihat dari dominannya peranan sektoral dalam pembentukan PDRB, maka struktur perekonomian Kabupaten Sintang terdiri dari:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Konstruksi; dan
- Industri Pengolahan.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRBatas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp32,53 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesarRp 32,53 juta atau sebesar Rp2,71 juta per bulan.Jikadibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp 2,42 juta atau 8,04 persen. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan.Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.



## 2.2 Kebijakan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaharuan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2022
- f) Peraturan Bupati Sintang Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah ke 6 (enam) kali dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 92 Tahun 2022.



## **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### **1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh perangkat lunak yaitu peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang harus dibuat se-sederhana mungkin, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; perangkat keras berupa personil, peralatan dan sarana/prasarana yang diperlukan harus memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; wajib pajak diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan *tax discipline*; kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah)



adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan proyek baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Beranjak dari uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit SKPD yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh secara optimal.
- b. Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- c. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.



Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang termasuk larangan melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, pembatasan pinjaman dilakukan dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Selain dana hibah dan lain-lain pendapatan yang sah, terdapat pula dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi dan dimungkinkan pencantuman pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mengoptimalkan potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada.

- e. Menghitung secara cermat Celah Fiskal berupa kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah berupa kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), demikian pula dengan Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) secara optimal dan tepat.

## 2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

**Tabel 2.11**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang**  
**Tahun 2022**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>1.793.874.643.623,00</b>	<b>1.780.017.927.520,58</b>	<b>99,23</b>	<b>2.004.696.822.617,10</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>200.370.858.275,00</b>	<b>162.366.717.402,46</b>	<b>81,03</b>	<b>176.520.346.650,22</b>
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	97.322.000.000,00	41.665.868.567,10	42,81	44.901.339.051,50
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32
<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>1.593.503.785.348,00</b>	<b>1.613.631.210.118,12</b>	<b>101,26</b>	<b>1.733.440.627.820,57</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA</b>	<b>1.186.505.672.287,00</b>	<b>1.178.604.716.170,00</b>	<b>99,33</b>	<b>1.287.092.362.149,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	36.483.507.000,00	46.478.342.269,00	127,40	69.057.394.705,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	9.926.431.000,00	16.115.553.000,00	162,35	30.134.354.819,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	301.935.299.287,00	279.634.924.483,00	92,61	350.710.971.625,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA</b>	<b>353.724.663.000,00</b>	<b>353.507.373.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>356.047.288.000,00</b>
Dana Penyesuaian – LRA	343.060.757.000,00	342.843.467.000,00	99,94	348.528.098.000,00
Dana Insentif Daerah – LRA	10.663.906.000,00	10.663.906.000,00	100,00	7.519.190.000,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi– LRA</b>	<b>53.273.450.061,00</b>	<b>81.519.120.948,12</b>	<b>153,02</b>	<b>90.300.977.671,57</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	49.923.450.061,00	79.535.557.148,12	159,32	77.200.977.671,57
Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	3.350.000.000,00	1.983.563.800,00	59,21	13.100.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94.735.848.146,31</b>
Pendapatan Hibah – LRA	0,00	4.020.000.000,00	100,00	40.000.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00		94.695.848.146,31

Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp1.793.874.643.623,00. Dari target tersebut dapat tercapai sebesar Rp1.780.017.927.520,58 atau 99,23%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 realisasi Pendapatan Daerah menurun sebesar Rp.224.678.895.096,52 atau 11,21%.

## B. Pengelolaan Belanja Daerah

### 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, dimana pemerintah daerah dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke pelaporan sudah wajib menggunakan sistem yang terintegrasi atau dengan sistem *e-planning* dan *e-budgetting*, disamping itu juga masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *value for money*. Pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung





belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik dan *stakeholders*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kemudian pada Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun untuk pengelolaan Penatausahaan dan Pelaporan masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), dengan melakukan migrasi data pada tahap penganggaran Tahun 2021 dari SIPD ke SIMRAL.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan belanja daerah harus digunakan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan berdasarkan kepada analisa standar belanja, indikator dan tolok ukur kinerja, serta standar pelayanan minimal dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak



terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selanjutnya, APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta aktifitas yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
- b. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan berperan sebagai *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah



(Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).

- c. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- d. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat SKPD dan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial serta rincian belanja daerah menurut jenis antara lain terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah.

### 2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

**Tabel 2.12**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
<b>BELANJA</b>	<b>1.501.361.888.623,00</b>	<b>1.328.977.136.222,31</b>	<b>88,52</b>	<b>1.385.318.654.052,20</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.292.397.711.785,00</b>	<b>1.137.829.897.279,31</b>	<b>88,04</b>	<b>1.109.822.778.027,28</b>
Belanja Pegawai	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
Belanja Barang dan Jasa	516.673.365.976,00	475.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28
Belanja Subsidi	1.545.015.581,00	753.471.164,00	48,77	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
Belanja Hibah	35.821.552.000,00	34.080.807.392,00	95,14	64.288.633.554,00
Belanja Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	2.756.050.000,00	96,57	980.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>204.497.711.888,00</b>	<b>189.346.459.659,00</b>	<b>92,59</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
Belanja Tanah	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	3.114.842.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00
Belanja Gedung dan Bangunan	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.466.464.950,00</b>	<b>1.800.779.284,00</b>	<b>40,32</b>	<b>2.345.211.737,92</b>
Belanja Tak Terduga	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
<b>TRANSFER</b>	<b>473.767.923.111,00</b>	<b>473.510.079.549,00</b>	<b>99,95</b>	<b>474.753.555.657,00</b>
<b>TRANSFERBAGI HASIL KE DESA</b>	<b>10.342.901.835,00</b>	<b>10.342.901.835,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.168.586.580,00</b>
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.732.200.000,00	6.168.586.580,00	100,00	5.722.989.894,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	610.701.835,00	610.701.835,00	100,00	445.596.686,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>463.425.021.276,00</b>	<b>463.167.177.714,00</b>	<b>99,94</b>	<b>468.584.969.077,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	463.375.021.276,00	463.117.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
<b>TOTAL BELANJA TRANSFER</b> +	<b>1.975.129.811.734,00</b>	<b>1.802.487.215.771,31</b>	<b>91,26</b>	<b>1.860.072.209.709,20</b>

Realisasi belanja dan transfer pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp1.501.361.888.623,00 dapat terserap sebesar Rp1.328.977.136.222,31 atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,52%. Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 56.341.517.829,89 atau sebesar 4,07%.

Realisasi belanja daerah menurut urusan Pemerintahan tiap SKPD berdasarkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.



**2.4 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

**1. Permasalahan utama kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah adalah antara lain :**

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan masih perlu ditingkatkan secara optimal sehingga dapat menjangkau sumber-sumber pendapatan yang belum tersentuh.
- b. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Belum dilaksanakannya secara maksimal sanksi penegakan supremasi hukum terhadap para penunggak pajak.
- d. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal/transfer dana dari pusat ke daerah.
- e. Belum berperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan PAD.
- f. Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal.
- g. Masih rendahnya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam rangka pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Mengurangi tingkat ketergantungan dengan mencari dan menggali potensi penerimaan daerah dengan cara:
- b. Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah terutama dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- c. Mengusahakan adanya efisiensi dalam menetapkan besaran belanja dengan cara menyediakan alat analisis belanja yang menghubungkan setiap rupiah yang dibelanjakan dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan.
- d. Sosialisasi lebih digiatkan lagi setiap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan.
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan terhadap pendapatan daerah



**2. Adapun permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah, antara lain:**

- a. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang ada dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah.
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan Renja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban belanja yang sering terlambat, merupakan masalah-masalah yang harus segera diatasi.
- d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sering berubah-ubah membuat masalah tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditempuh dalam rangka pengelolaan belanja daerah terhadap kebijakan umum keuangan daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus dan konsisten melalui pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis atau workshop terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan belanja daerah.
- b. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lain secara intensif dan komprehensif dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2.5 Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sebagai berikut:**

**1. Urusan Umum/Non urusan**

**a. Non urusan**

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemerintahan Non Urusan yang merupakan urusan yang berkaitan dengan Subsidi Pemerintah daerah, Hibah pemerintah daerah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kepada masyarakat, bagi hasil kepada desa, bantuan keuangan kepada desa serta partai politik, adalah:

- 1) regulasi terkait pemberian subsidi pemerintah daerah kepada BUMD yang tersusun serta perhitungan-perhitungan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian subsidi tersebut.



- 2) Pemberian hibah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih belum dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang sering terlambat penyerapannya serta belum tepatnya penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Penyiapan regulasi serta perhitungan yang tepat guna penyelesaian permasalahan subsidi pemerintah daerah kepada BUMD untuk ke depannya.
- 2) Menyiapkan regulasi serta adanya komitmen Bersama antara para pengambil kebijakan terhadap pemberian hibah dan bansos.
- 3) Perlunya pengawasan dari semua masyarakat serta adanya sinergisitas dalam perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintahan Desa guna memantau penggunaan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.

## **2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

### **a. Urusan Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan adalah:

- 1) Pengalihan urusan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Rendahnya pemerataan pendidikan akibat sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan
- 3) Angka melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi masih rendah akibat sulitnya ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan;
- 4) Angka mengulang dan putus sekolah perlu diturunkan sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi kasar dan murni;
- 5) APK dan APM yang masih rendah, terutama SMP dan SMA.
- 6) Masih banyak gedung SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kerusakan.
- 7) Masih banyak SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kekurangan ruang belajar



- 8) Banyak SD dan SMP yang belum memiliki gedung perpustakaan dan laboratorium
- 9) Masalah kekurangan guru terutama pada sekolah-sekolah di perhuluan dan pada unit-unit sekolah baru.
- 10) Penyebaran guru yang belum/tidak merata.
- 11) Kualifikasi Akademik/latar belakang pendidikan guru sebagian besar tergolong belum layak dan semi layak.
- 12) Masih terdapat sebagian penduduk Kabupaten Sintang tidak/belum bisa baca tulis.
- 13) Tempat tinggal sebagian besar siswa di daerah perhuluan sangat jauh dari lokasi sekolah, di pihak lain transportasi jalan kondisinya kurang mendukung.
- 14) Adanya keinginan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan gratis

Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sintang, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan khusus untuk meningkatkan APK, APM dan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh;
- 2) Untuk menangani rendahnya angka melanjutkan sekolah maka perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah;
- 3) Mendirikan taman kanak-kanak dan meningkatkan tenaga guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.

**b. Urusan Kesehatan**

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah adanya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan UKP dan UKM Daerah,

Beberapa contoh konstruksi yang dapat diatur dalam SKD misalnya pada sub sistem pembiayaan kesehatan. Sebagai upaya untuk mendukung program JKN, penguatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pengelolaan dana kapitasi JKN juga penting untuk dilakukan. Hal ini misalnya dengan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan secara fungsional kepada FKTP dalam pengelolaan dana kapitasi JKN sesuai dengan





ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana kapitasi JKN harus dipastikan penggunaannya hanya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat potensi dana kapitasi yang rawan untuk di korupsi. Dan juga rendahnya kemampuan manajemen puskesmas yang berdampak pada capaian kinerja serta mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya. Tenaga medis yang belum mencukupi untuk melayani seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Sintang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang menempuh langkah-langkah:

- a) dengan membangun kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya untuk menopang dan menguatkan SKN dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Yakni diusahakan untuk membangun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai kebijakan penyelenggaraan kesehatan di daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, dan swasta memiliki acuan dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah bagi yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sintang.
- b) Pengusulan kebutuhan Bidan, khususnya jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat ke Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan dengan PNS untuk tenaga dokter, bidan perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, analis laboratorium dll ke BKN/Menpan melalui BKPSDM.
- c) Mengusulkan pelatihan serta penyegaran pada SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi.

**c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian permukaan berupa jalan tanah.
- 2) Masih banyaknya jembatan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi rusak.
- 3) Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan.



- 4) Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan.
- 5) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan pada wilayah tertentu agar segera dilakukan penanganan, padahal wilayah tersebut belum termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam tahun berjalan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- 4) Berupaya dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum terkait jalan dan jembatan yang bersumber dari dana DAK dan DAU serta prioritas utama pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan.
- 5) Pengalokasian anggaran yang terbatas guna prioritas untuk pembangunan jalan dan jembatan.
- 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada pada Urusan Pekerjaan Umum dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 7) Berupaya untuk pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban.
- 8) Pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempersiapkan regulasi-regulasi.

**d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni
- 2) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
- 3) Kurangnya data base tentang perumahan, air bersih dan sanitasi;
- 4) Masih terdapat sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai;
- 5) Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik;
- 6) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang teknis

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :



- 1) Memaksimalkan anggaran yang ada serta perencanaan yang tepat guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat serta sarana dan prasarana akan air bersih.
- 2) Terus berkelanjutan perencanaan database terkait perumahan. Air bersih dan sanitasi.
- 3) Terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana sanitasi untuk kebersihan lingkungan, serta selalu kampanye untuk penurunan tingkat *stunting*.

**e. Urusan Sosial**

Permasalahan di urusan sosial adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang, minimnya anggaran untuk merehabilitasi penyandang gangguan sosial akibat keterbatasan fisik, belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidanan dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah Urusan Sosial tersebut adalah dengan meningkatkan penurunan angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan pembangunan rumah layak huni, pemenuhan air bersih dan sanitasi serta penyediaan Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat pendudukan miskin di wilayah Kabupaten Sintang, melalui program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk miskin di wilayah kabupaten Sintang sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.

**3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

**a. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Tenaga Kerja adalah masih terbatasnya upaya penciptaan lapangan kerja serta kualitas pekerja masih tergolong rendah hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berpendidikan SLTP ke bawah, pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan angkatan kerja yang berdampak pada bertambahnya angka pengangguran, angkatan kerja yang ada sebagian besar masih rendah kualitasnya dan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pangsa pasar.

Solusi yang diambil dalam masalah urusan tenaga kerja ini adalah dengan



banyak memberikan pelatihan di balai pusat pelatihan bagi para pencari kerja agar mereka memiliki keterampilan, di maksudkan adalah agar mereka memiliki keterampilan dan dapat membuat usaha sendiri.

**b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Yang masih menjadi permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masih belum tersedianya *database* yang akurat sehinggalah menyulitkan dalam penyusunan kebijakan serta program dan kegiatan, masih adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya, jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi serta belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terhadap permasalahan ini langkah-langkah yang diambil adalah dengan terus melakukan upaya perbaikan *database* dan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan KDRT, memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya laporan KDRT ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Kabupaten Sintang.

**c. Urusan Pangan**

Permasalahan yang dihadapi terhadap urusan pangan adalah adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet, kurangnya ketersediaan pangan, belum dioptimalkan potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan, tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.

Langkah yang diambil untuk permasalahan tersebut adalah dengan upaya terus melakukan pembinaan kepada petani khususnya petani tanaman pangan untuk pengolahan lahan guna menunjang kebutuhan pangan daerah, serta berupaya membantu masyarakat petani untuk mendapatkan bibit serta pengelolaan lahan produktif untuk dapat diolah.

**d. Urusan Pertanahan**

Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian pengelolaan pertanahan, belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen Data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pertanahan.



Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dan pengendalian pengelolaan pertanahan, serta persiapan penyusunan database terkait pertanahan.

**e. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup.
- 3) Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
- 4) Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
- 5) Terjadinya perubahan iklim.

Solusi yang dilakukan untuk urusan lingkungan hidup ini adalah, dengan memaksimalkan penggunaan sisa dana DBH DR sebagaimana arahan Kementerian LHK terhadap penggunaannya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Melakukan koordinasi dengan APH terkait penertiban PETI, dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persampahan di dalam kota dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

**f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

Terdapat permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil solusi yang diambil pemerintah daerah adalah :

- 1) Peningkatan SDM Aparatur pengelola Administrasi kependudukan
- 2) Peningkatan Sarana pelayanan.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.



- 4) Terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan desa terkait data penduduk.

**g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih belum optimalnya pembinaan dan penataan terhadap pemerintahan desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya, belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara partisipatif untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, masih rendahnya tingkat pemahaman aparat desa tentang tugas dan fungsi serta belum tersedia sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi untuk menelaah/menelaah tugas-tugas kepala desa.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembinaan yang menyeluruh kepada perangkat desa, baik dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan dan lainnya.

Memberikan pelatihan/bimbingan teknis bagi aparat desa dan BPD, terutama kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola ADD dan DD yang mana besaran jumlah dana desa setiap tahun semakin meningkat.

**h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih didominasi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah, masih belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana, masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera serta kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja. Terus menggalakkan program Keluarga Berencana.

**i. Urusan Perhubungan**

Permasalahan urusan Perhubungan adalah masih terbatasnya anggaran dibidang perhubungan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang, masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas, luasnya jangkauan dan kondisi geografis



yang sulit, serta kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memaksimalkan anggaran yang ada guna pembangunan infrastruktur perhubungan, terus berkoordinasi dengan perhubungan provinsi terkait pengawasan terhadap kendaraan truk yang melebihi tonase ketika melalui jalan/lalu lintas di kabupaten Sintang.

**j. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Masih terdapat daerah yang belum terpasang jaringantelekomunikasi.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan kontrol terhadap system informasi yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Melakukan survey dan pemenuhan akses komunikasi bagi daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sintang.

**k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rendahnya serta lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tata laksana, lemahnya koperasi, UMKM terhadap akses pasar dan lemahnya akses koperasi, UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah meningkatkan pembinaan bagi Lembaga-lembaga UKM untuk dapat berusaha dengan baik dan memberikan bantuan pinjaman dengan tingkat bunga kecil melalui dana bergulir pemerintah daerah.

**l. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan urusan penanaman modal yang menjadi masalah adalah belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal, belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor serta belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi akan potensi daerah



kabupaten sintang dari semua lini, bagi sumber daya alam, sektor pariwisata, perhotelan dan lainnya, guna meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang.

**m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sintang terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Masih rendahnya aktivitas kepemudaan dan kualitas kepemudaan, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Terhadap permasalahan urusan kepemudaan dan Olahraga, maka langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melaksanakan kompetisi olahraga baik ditingkat desa, kecamatan dan tingkat Kabupaten, melakukan tournament untuk meningkatkan semangat generasi muda sintang dalam berkeaktivitas.

**n. Urusan Statistik**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah proses pengolahan data memerlukan waktu yang relatif lama karena harus menunggu data dari instansi terkait, belum adanya pusat data yang menangani secara khusus tentang data kinerja di Kabupaten Sintang,

untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Statistik, ditempuh langkah-langkah yakni : meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait untuk mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan data statistik, meningkatkan kecepatan proses pengolahan data statistik agar dapat segera digunakan oleh pihak yang berkompeten, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil yang menangani aplikasi program komputer guna percepatan dan keakuratan data statistik yang akan diterbitkan.

**o. Urusan Persandian**

Masih terjadi gangguan frekuensi dalam pengiriman dan penerimaan berita disebabkan factor cuaca dan gangguan listrik. Masih kurangnya tenaga teknis dan operator dalam pengoperasian peralatan radio SSB sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Solusi yang dilakukan untuk permasalahan urusan persandian adalah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi calon operator radio. Memberikan TP ASN yang lebih kepada ASN bidang persandian.

**p. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan urusan kebudayaan adalah:





- 1) Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
- 2) Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film.
- 4) Belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk permasalahan kebudayaan adalah dengan mempromosikan kebudayaan kabupaten Sintang baik di tingkat Nasional maupun Internasional melalui ajang-ajang Nasional dan Internasional. Pelaksanaan pagelaran seni dan budaya, baik Gawai Dayak, Festival Budaya Melayu dan lainnya, serta dengan terus melanjutkan pembangunan Rumah Adat Betang dan Rumah Adat Melayu.

**q. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan urusan perpustakaan pada yakni, masih kurangnya gemar membaca, masih kurangnya bahan pustaka, belum dimanfaatkan secara optimal bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian, belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi perpustakaan.

Terhadap permasalahan urusan perpustakaan tersebut solusi yang dilakukan adalah membuka pelayanan perpustakaan daerah pada hari-hari libur. Berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan budaya baca.

**r. Urusan kearsipan**

Masih kurangnya penyampaian dokumen daerah untuk diarsipkan. Masih belum optimalnya pemanfaatan arsip. belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi kearsipan.

Terhadap permasalahan urusan kearsipan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan kepada penata arsip setiap SKPD guna pengelolaan arsip yang lebih baik.

**4. Urusan-urusan Pilihan**

**a. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan Urusan kelautan dan perikanan yakni, kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum, minimnya sarana dan prasarana perikanan, masih sangat rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi.

Terhadap permasalahan urusan kelautan dan perikanan tersebut solusi yang dilakukan adalah memberikan bibit ikan kepada petani yang membudidaya



ikan, baik yang kolam maupun yang menggunakan keramba di sungai.

**b. Urusan Pariwisata**

Permasalahan-permasalahan urusan pariwisata yakni, belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata, kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih kurang baik, keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan objek wisata.

Langkah yang diambil terkait urusan pariwisata adalah terus melakukan promosi pariwisata kabupaten sintang, terutama wisata unggulan, seperti wisata rumah Panjang Ensaid dengan produksi kain tenunnya dan wisata bukit kelam di tingkat nasional maupun international, serta mengadakan *event* Kelam Festival.

**c. Urusan Pertanian**

Yang menjadi permasalahan urusan pertanian adalah:

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia petani
- 2) Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- 3) Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 4) Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim.
- 5) Rendahnya tingkat kesuburan tanah.
- 6) Belum optimalnya penerapan ekonomi pertanian.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
- 9) Infrastruktur transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian.

Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah urusan pertanian adalah Melakukan bimbingan/penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan pertanian yang ada dengan mengubah pola lading berpindah menjadi kebun/sawah dan mengoptimalkan kelembagaan petani

**d. Urusan Perdagangan**

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah, kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga, belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah urusan pertanian adalah



melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya terutama produk makanan yang sudah *expired* yang masih dijual di supermarket dan toko-toko. Mengoptimalkan pasar-pasar baru yang dibangun.

**e. Urusan Perindustrian**

Permasalahan Urusan Perdagangan yakni adanya keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri rakyat serta terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri.

Langkah yang dilakukan terkait urusan Perindustrian adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna mendukung pengembangan asentra industri rakyat serta melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait produksi dan industri.

**f. Urusan Transmigrasi**

Permasalahan urusan transmigrasi yakni, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, belum dimanfaatkan secara optimal sumber daya alam di kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Perlu peningkatan pelayanan jaminan hidup melalui pelatihan keterampilan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi ini adalah dengan membuat program transmigrasi lokal, yakni transmigrasi di lingkungan satu daerah di kabupaten Sintang dipindahkan di kawasan program daerah transmigrasi yang belum dimanfaatkan.

**5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

**a. Perencanaan**

Yang menjadi permasalahan perencanaan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana.
2. Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pelaporan.
3. Masih rendahnya ketersediaan data dalam menyusun perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah.

Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap urusan perencanaan adalah, peningkatan aparatur di bidang perencanaan.



Penggunaan sistem informasi yang sudah teritegrasi dengan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Sintang memulai melaksanakan *e-planning* dan *e-budgetting* menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), untuk proses Penatausahaan dan Pelaporan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan sekarang BPPT melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021. Kerjasama sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala terhadap data perencanaan di SKPD, masih belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran namun dengan sistem tersebut bisa ditekan lebih kecil.

**b. Urusan Keuangan**

Permasalahan Urusan Keuangan yakni, masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran, SDM Pengelola Keuangan masih rendah, regulasi terkait keuangan yang cepat berubah namun masih banyak juga regulasi-regulasi yang harusnya segera dilakukan perubahan belum dilakukan, transparansi keuangan yang belum optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- 1) Menerapkan e-planning dan e-budgetting guna konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelatihan-pelatihan bagi pejabat pengelolaan keuangan di SKPD.
- 3) Melakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

**c. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Masih terbatasnya jumlah ASN.
- 2) Tingginya penerimaan tenaga kontrak di SKPD yang tidak melihat kebutuhan organisasi.
- 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- 4) Masih rendahnya kesejahteraan pegawai/insentif yang memadai berdasarkan beban kerja.
- 5) Masih banyaknya ASN yang menduduki jabatan Eselon namun belum mengikuti diklat perjenjangan, disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasinya adalah:

- 1) Dengan adanya pelaksanaan Penerimaan CPNS diusulkan kepada pemerintah akan kebutuhan tenaga, terutama dibidang Pendidikan dan kesehatan.



- 2) Mengontrol penerimaan tenaga kontrak daerah
- 3) Pelatihan aparatur kepegawaian daerah
- 4) Menyusun regulasi terkait pemberian TP ASN
- 5) Mengirim pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon untuk pelatihan diklat perjenjangan.

**d. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan adalah masih belum dimanfaatkan secara optimal hasil penelitian serta minimnya anggaran dalam penyusunan dokumen penelitian.

Langkah yang dilakukan untuk urusan penelitian dan pengembangan ini adalah dengan mengkaji kembali hasil penelitian yang ada untuk kemajuan daerah. Memaksimalkan anggaran untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan.

Terhadap permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan tersebut, langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang adalah dengan memaksimalkan penelitian dan pengembangan dengan anggaran yang tersedia, melihat kembali kajian-kajian terdahulu untuk dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan era informasi dan teknologi.

**e. Urusan Pemerintah Umum**

Permasalahan pada urusan Pemerintah Umum adalah

- 1) Belum optimalnya kinerja birokrasi sehingga rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
- 2) Masih terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan belum memiliki rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Langkah yang dilakukan untuk permasalahan urusan Pemerintahan Umum adalah :

- 1) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna menciptakan pelayanan yang cepat bagi masyarakat.
- 2) Terus melanjutkan upaya pemekaran daerah, walaupun masih dimoratorium oleh pemerintah pusat, mengingat luasnya wilayah kabupaten Sintang, sehingga tidak maksimalnya anggaran pembangunan.



## 2.6 Pemenuhan *Mandatory Spending*

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
- b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun APBD TA 2022 terdapat hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU HKPD. Belanja wajib tersebut meliputi:

### a. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 29,91% dari belanja daerah. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan program prioritas bidang pendidikan dalam RKPD dengan komponen anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 413.920.678.846,00 dengan realisasi sebesar Rp 339.483.694.788,00 atau 82,02%; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.71.485.384.676,00 dengan realisasi sebesar Rp73.146.430.095,50 atau 102,32%; anggaran Belanja Hibah sebesar Rp5.863.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.592.025.000,00 atau 95,38%,; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp45.310.847.912,00 dengan realisasi sebesar Rp43.778.667.550,00 atau 96,62%. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.13 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)		PERUBAHAN APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)	
			JUMLAH		JUMLAH
1	a Belanja pada Dinas Pendidikan:		494,176,388,861.00		536,579,912,434.00
	1) Belanja Operasi:				
	a Belanja Pegawai	377,833,851,169.00		413,920,678,846.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	66,803,415,657.00		71,485,385,676.00	
	c Belanja Hibah	5,587,700,000.00		5,863,000,000.00	
2) Belanja Modal	43,951,422,035.00		45,310,847,912.00		
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		494,176,388,861.00		536,579,912,434.00
3	Total Belanja Daerah		1,793,874,643,623.00		1,793,874,643,623.00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%		23,54%		29,91%

### b. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 19,97% dari total belanja APBD diluar belanja gaji. Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan anggaran lebih dari 10% maka tidak perlu untuk menurunkan anggarannya, serta apabila belum memiliki kemampuan maka dapat dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program kesehatan lainnya. Anggaran fungsi kesehatan dengan komponen anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp109.219.803.982,00 dengan realisasi sebesar Rp103.472.340.683,33 atau 94,74%; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp200.792.179.016,00 dengan realisasi sebesar Rp168.874.270.875,00 atau 84,10%; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp36.643.279.989,00 dengan realisasi sebesar Rp32.139.934.126,00 atau 87,71%. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)		PERUBAHAN APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)	
			JUMLAH		JUMLAH
1	a Belanja pada Dinas Kesehatan:		287,036,437,230.00		347,185,262,987.00
	1) Belanja Operasi:				
	a Belanja Pegawai	107,996,863,798.00		109,219,803,982.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	152,614,694,466.00		200,792,179,016.00	
	c Belanja Hibah	-		530,000,000.00	
2) Belanja Modal	26,424,878,966.00		36,643,279,989.00		
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)		287,036,437,230.00		347,185,262,987.00
3	Total Belanja Daerah		1,793,874,643,623.00		1,793,874,643,623.00
4	Rasio Anggaran Kesehatan (2:3) x 100%		16,00%		19,35%



**c. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur**

Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil/transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi infrastruktur daerah dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur Daerah**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD 2022		Perubahan APBD 2022	
			JUMLAH		JUMLAH	
1	a)	Belanja Modal:		177,122,686,753.00		204,497,711,888.00
	1)	Tanah	1,078,000,000.00		1,576,000,000.00	
	2)	Peralatan dan Mesin	39,728,069,673.00		44,035,909,183.00	
	3)	Bangunan dan Gedung	40,218,396,981.00		44,605,282,924.00	
	4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	92,236,959,550.00		105,274,673,915.00	
	5)	Aset tetap lainnya	3,321,100,000.00		9,005,845,866.00	
	6)	Aset Lainnya	540,160,549.00		0,00	
	b)	Belanja Pemeliharaan	0,00		0,00	
2	a)	Belanja Hibah	19,614,903,000.00		35,821,552,000.00	
	b)	Belanja Bantuan Sosial	-	19,614,903,000.00	2,854,000,000.00	38,675,552,000.00
	c)	Belanja Bantuan Keuangan	0,00		0,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		177,122,686,753.00	196,737,589,753.00	204,497,711,888.00	243,173,263,888.00
4	<b>Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum</b>			<b>21,05%</b>		<b>21,88%</b>

**d. Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) TA dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara





Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Alokasi DAU disusun menggunakan indikasi antara lain : a. perkiraan celah fiskal Daerah secara nasional; b. kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional dan pembangunan layanan publik. c. perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan d. perkiraan penerimaan dalam negeri netto.

Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah sebesar Rp1.593.503.785.348,00 setelah perubahan sementara realisasi sebesar Rp1.613.631.210.118,12 atau 101,26%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH seringkali dikaitkan sebagai dana yang menyangkut 'hajat hidup' daerah sebab digunakan mendanai kebutuhan daerah, Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Secara umum DBH bertujuan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Prinsip penyaluran DBH dilakukan *by origin*, yaitu daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil. Selain itu, penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Artinya, penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan TA berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp46409.938.000,00 setelah anggaran perubahan sementara realisasi sebesar Rp62.593.895.269,00 atau 134,87%. Adapun rincian sebagai berikut:



Tabel 2.16 Rincian Penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA

	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah	Hasil Perhitungan ulang	Selisih
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	838,160,435,000.00	836,375,896,418.00	(1,784,538,582.00)
	b) DBH	46,409,938,000.00	62,593,895,269.00	16,183,957,269.00
	Jumlah Penerimaan	<b>884,570,373,000.00</b>	<b>898,969,791,687.00</b>	<b>14,399,418,687.00</b>
	<b>PALING SEDIKIT 10 % DARI TOTAL DTU</b>	<b>88,457,037,300.00</b>	<b>89,896,979,168.70</b>	<b>1,439,941,868.70</b>

## 2.7 Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Sintang

*Stunting* adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*sumber : Perpres 72 Tahun 2021*)

Penanganan *stunting* di Kabupaten Sintang sudah berlangsung sejak Tahun 2018, dimulai sejak *Launching* 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Bulan Februari 2018. Pada Tahun 2019 dibentuklah Tim Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* (KPPS). Namun sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting* dan BKKBN sebagai *Leading Sector* penanganan *stunting*, semua kegiatan percepatan penurunan *stunting* mengacu pada Perpres tersebut, sehingga pada Tahun 2022 Tim KPPS berubah nama menjadi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sintang yang diketuai oleh Wakil Bupati Sintang

Menurut Perpres No. 72 Tahun 2021, ada beberapa hal yang bias menyebabkan terjadinya *stunting*, diantaranya:

### 1. **Praktek Pengasuhan Anak yang Kurang Baik atau Tidak Tepat.**

Sejak di dalam kandungan, nutrisi yang ibu konsumsi turut mendukung tumbuh kembang janin. Makanya, seorang ibu perlu memiliki pengetahuan tentang makanan bergizi supaya nutrisi harian ibu dan janin tercukupi dengan baik. Begitu pula setelah Si Kecil lahir, 1.000 hari pertama kehidupan (0–2 tahun) adalah waktu yang sangat *krusial* untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan setelah usia 6 bulan mendapatkan bahan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat sesuai usia dan memenuhi gizi seimbang. Oleh karenanya, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak.



Faktor lainnya yang juga mendukung dalam praktek pengasuhan yang baik adalah peran ayah, yang membantu juga dalam tumbuh kembang anak secara optimal.

## **2. Infeksi Berulang atau Kronis**

Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak pun akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan *stunting*.

Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak. Sebab, tidak semua ibu memahami makanan apa saja yang baik untuk tumbuh kembang buah hati dan seberapa banyak porsi yang harus diberikan kepada anak sesuai usianya

## **3. Sanitasi dan Lingkungan yang Buruk**

Sulitnya sumber air bersih dan *sanitasi* yang buruk dapat menyebabkan *stunting* pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum, disertai kurangnya ketersediaan WC Sehat serta kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Hal ini bias meningkatkan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus (cacingan)

## **4. Terbatasnya Layanan Kesehatan**

Hingga saat ini, di Indonesia masih terdapat daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya.

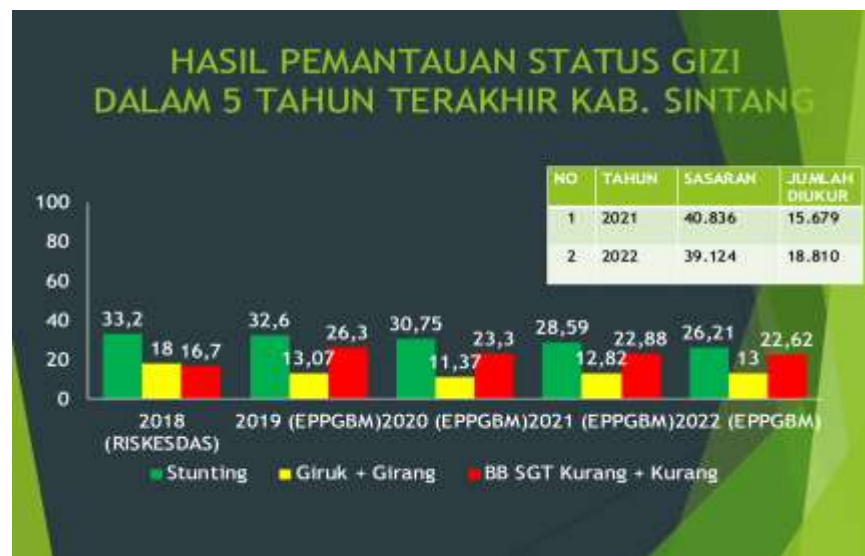
## **5. Kurangnya Akses Makanan Bergizi**

Belum semua masyarakat memahami bahwa makanan yang bergizi seimbang tidak harus makanan yang mahal, pemanfaatan pekarangan untuk kebun, kandang dan kolam merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Minimnya pengetahuan dan ketidakmampuan dalam memanfaatkan sumberdaya lokal/pangan lokal yang diolah menjadi pangan sehat bergizi menjadi salah satu penyebab permasalahan *stunting*.

*Stunting* pada anak dapat memengaruhi kesehatan serta tumbuh kembangnya dari ia kecil hingga sampai lanjut dewasa. Dalam jangka pendek, *stunting* pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak *stunting* mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya, seiring dengan bertambahnya

usia anak, *stunting* dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya, Kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisamaksimal, Anak jadi mudah sakit karena system imunnya tidakbaik dan Anak berisiko tinggi memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Gambaran kondisi kasus *stunting* melalui Pemantauan Status Gizi lewat Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) di Kabupaten Sintang sebagai berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022

Gambar 2.2  
Pemantauan Status Gizi di Kab. Sintang pada Tahun 2018-2022

Dari hasil Pemantauan Satus Gizi (RISKESDAS & E-PPGBM) seperti gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada tren penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Sintang dari kurun waktu Tahun 2018 – 2022 sebesar  $\pm 2\%$ . Namun melalui metode lain yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, *Prevalensi Stunting* di Kabupaten Sintang sebesar 38,2% dan berdasarkan SSGI Tahun 2022 Prevalensi *Stunting* di Kab. Sintang mengalami penurunan sebesar 19,5% menjadi 18,7% seperti gambar di bawah ini :



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022

**Gambar 2.2**  
**Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kab. Sintang pada Tahun 2021 Dan 2022**

Sesuai dengan Hasil SSGI Tahun 2022, Kab. Sintang mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap kasus *stunting* sehingga Prevalensi Stunting terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian tidak berarti penanganan *stunting* di Kabupaten Sintang selesai karena masih harus terus menurunkan Prevalensi *Stunting* sampai dengan 14% di Tahun 2024 sesuai dengan target nasional.

Berhasil atau tidaknya penanganan *stunting* di suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kerjasama *multisector* dan komitmen berbagai pihak serta ketersediaan dana yang memadai dalam mendukung program dan kegiatan penanganan *stunting*. Kab. Sintang sendiri selama ini sangat didukung dana penanganan *stunting* yang terbesar adalah dari dana APBN, disamping dana APBD sebagai dana pendamping.

**Tabel 2.17**  
**Anggaran Penanganan Stunting Pada DKBP3A Kabupaten SINTANG TAHUN 2022**

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persentase Output
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%
	<b>Operasional Penurunan Stunting</b>			<b>2.982.740.000,00</b>			<b>2.101.916.000,00</b>	<b>70,47%</b>
1	Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa	3.046	Calon pengantin/ Calon PUS	60.920.000,00	458	Calon pengantin/ Calon PUS	4.580.000,00	7,52%
2	Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa	9.121	Ibu hamil	729.680.000,00	7631	Ibu hamil	76.310.000,00	10,46%



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persen tase Output
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%
3	Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa	9.121	Ibu paska salin	182.420.000,00	1945	Ibu paska salin	19.450.000,00	10,66%
4	Operasional Surveillance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan)	975	Pendamping g Keluarga (3 orang)	1.170.000.000,00	975	Pendamping g Keluarga (3 orang)	1.170.000.000,00	100,00%
5	Mini lokakarya Kecamatan	14	Kecamatan	218.400.000,00	14	Kecamatan	218.080.000,00	99,85%
6	Audit kasus Stunting	1	OPD KB	40.000.000,00	1	OPD KB	39.964.000,00	99,91%
7	Biaya cetak Data Keluarga (berisiko stunting)	3.064	Rukun Tetangga (RT)	15.320.000,00	3064	Rukun Tetangga (RT)	15.320.000,00	100,00%
8	Pengadaan BKB Kit Stunting	12	Desa	204.000.000,00	12	Desa	204.000.000,00	100,00%
9	Pengadaan Kit Siap Nikah	12	Desa	162.000.000,00	12	Desa	154.512.000,00	95,38%
10	Belanja penunjang (DAU)			200.000.000,00			199.700.000,00	99,85%

Sumber: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Sintang Tahun 2022



### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan



laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kabupaten Sintang. SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menyusun Laporan Keuangannya adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 11) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 15) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 16) Dinas Perhubungan
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21) Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 22) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 24) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 27) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 28) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 29) Sekretariat Daerah





- 30) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 31) Inspektorat
- 32) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
- 33) Kantor Kecamatan Kelam Permai
- 34) Kantor Kecamatan Binjai Hulu
- 35) Kantor Kecamatan Tempunak
- 36) Kantor Kecamatan Dedai
- 37) Kantor Kecamatan Sepauk
- 38) Kantor Kecamatan Ketungau Hilir
- 39) Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
- 40) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu
- 41) Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 42) Kantor Kecamatan Kayan Hulu
- 43) Kantor Kecamatan Serawai
- 44) Kantor Kecamatan Ambalau
- 45) Kantor Kecamatan Sintang
- 46) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

### **3.1 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau



entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah



untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

### 3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

#### a. *Pencatatan Persediaan*

- 1) Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.
- 2) Barang persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian, dan satuan pendidikan) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material maka diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan,



- 3) Dikecualikan untuk persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang dan sub bagianserta UPT) Pelayanan berupa :
  - a) barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - b) obat-obatan, bahan pakai habis penunjang pelayanan kesehatan, pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu kesehatan,
  - c) barang cetakan seperti blangko, karcis, dan form penunjang pelayanan SKPD kepada masyarakat dan SKPD lainnya.

pada akhir periode sisa stok tetap diakui sebagai persediaan.

- 4) Dengan menggunakan pengakuan beban persediaan diakui setiap terjadi penerimaan persediaan (pendekatan pengakuan persediaan sebagai beban) maka pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada sekretariat/bagian umum yang dicatat oleh pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

**b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini berlaku untuk semua piutang:

Umur Piutang	Kategori	% diragukan Tertagih
0 tahun s/d 1 tahun	Lancar	0%
Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	Kurang Lancar	25%
Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	Kurang Lancar	50%
Lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun	Tidak Lancar	75%
Lebih dari 4 tahun	Macet	100%

**c. Aset Tetap**

- 1) Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2) Penyusutan Aset Tetap

Suatu asset disebut sebagai asset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Penyusutan dengan menggunakan hitungan per tahun tanpa ada nilai residu.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berikut tabel masa manfaat berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang

**Tabel 3.1 Masa Manfaat**

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>02</b>			<b>Peralatandanmesin</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>		<b>AlatBesar</b>	
02	02	01	Alat-alatbesardarat	10
02	02	02	Alat-alatbesarapung	8
02	02	03	Alat-alatbesar bantu	7
<b>02</b>	<b>03</b>		<b>Alat-alatangkutan</b>	
02	03	01	Alatangkutanandaratbermotor	7
02	03	02	Alatangkutanberattakbermotor	2
02	03	03	Alatangkutapungbermotor	10
02	03	04	Alatangkutapungtakbermotor	3
02	03	05	Alatangkutbermotorudara	20
<b>02</b>	<b>04</b>		<b>Alatbengkel</b>	
02	04	01	Alatbengkelbermesin	10
02	04	02	Alatbengkeltakbermesin	5
02	04	03	Alatukur	5
<b>02</b>	<b>05</b>		<b>Bidangalatpertanian</b>	
02	05	01	Alatpengolahan	4
02	05	02	Alatpemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	4
<b>02</b>	<b>06</b>		<b>Alatkantordanrumah tangga</b>	
02	06	01	Alatkantor	5
02	06	02	Alatrumah tangga	5
02	06	03	Komputer	4
02	06	04	Mejadankursikerja / rapatpejabat	5
<b>02</b>	<b>07</b>		<b>Alat-alat studio dankomunikasi</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02	07	01	Alat studio	5
02	07	02	Alat komunikasi	5
02	07	03	Peralatan pemancar	10
<b>02</b>	<b>08</b>		<b>Alat-alat kedokteran</b>	
02	08	01	Alat kedokteran	5
02	08	02	Alat kesehatan	5
<b>02</b>	<b>09</b>		<b>Alat-alat laboratorium</b>	
02	09	01	Unit-unit laboratorium	8
02	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	10
02	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
02	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15
02	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	10
02	09	06	Radiation application and non destructive testing laboratory	10
02	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
02	09	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
<b>02</b>	<b>10</b>		<b>Alat-alat keamanan</b>	
02	10	01	Senjata api	10
02	10	02	Persenjataan non senjata api	3
02	10	03	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>03</b>			<b>Gedung dan bangunan</b>	
<b>03</b>	<b>11</b>		<b>Bangunan gedung</b>	
03	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	50
03	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	50
03	11	03	Bangunan menara	40
<b>03</b>	<b>12</b>		<b>Monumen</b>	
03	12	01	Bangunan bersejarah	50
03	12	02	Tugu peringatan	50
03	12	03	Candi	50
03	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	50
03	12	05	Tugu peringatan	50
03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	50
03	12	07	Rambu-rambu	50
03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas Udara	50
<b>04</b>			<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>	
<b>04</b>	<b>13</b>		<b>Jalan dan jembatan</b>	
04	13	01	Jalan	10
04	13	02	Jembatan	50
<b>04</b>	<b>14</b>		<b>Bangunan air</b>	
04	14	01	Bangunan air / irigasi	50
04	14	02	Bangunan air pasang surut	50
04	14	03	Bangunan air pengembang wadanan polder	25
04	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
04	14	05	Bangunanpengembangansumber air dan air tanah	30
04	14	06	Bangunan air bersih / baku	40
04	14	07	Bangunan air kotor	40
04	14	08	Bangunan air	40
<b>04</b>	<b>15</b>		<b>Instalasi</b>	
04	15	01	Instalasi air minum / bersih	30
04	15	02	Instalasi air kotor	30
04	15	03	Instalasiolahansampah non organic	10
04	15	04	Instalasiolahanhambangunan	10
04	15	05	Inslatasiembangkitlistrik	40
04	15	06	Instalasiardulistrik	40
04	15	07	Instalasiertahanan	30
04	15	08	Instalasi gas	30
04	15	09	InstalasiPengaman	20
<b>04</b>	<b>16</b>		<b>Jaringan</b>	
04	16	01	Jaringan air minum	30
04	16	02	Jaringanlistrik	40
04	16	03	Jaringantelepon	20
04	16	04	Jaringan gas	30

3) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a) Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- b) Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.
- c) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
  - (1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
  - (2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
  - (3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.



- d) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya pada peliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
  - e) Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.
- 4) Reklasifikasi Pengadaan Aset Tahun Berjalan dibawah nilai kapitalisasi  
Untuk aset pengadaan tahun berjalan akan dilakukan reklasifikasi menjadi beban operasional dengan menyesuaikan berdasarkan fisik barang
- 5) Aset Tetap yang Non Aktif  
Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2022 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.

**d. Amortisasi Aset tidak berwujud**

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode penyusutan adalah hitungan per satu tahun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:





$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 tahun.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen ;

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang.

**e. *Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi***

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



## BAB IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2022 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut.

### 4.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>1.793.874.643.623,00</b>	<b>1.780.017.927.520,58</b>	<b>99,23</b>	<b>2.004.696.822.617,10</b>
	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Pendapatan Asli Daerah – LRA	200.370.858.275,00	162.366.717.402,46	81,03	176.520.346.650,22
	▪ Pendapatan Transfer – LRA	1.593.503.785.348,00	1.613.631.210.118,12	101,26	1.733.440.627.820,57
	▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	0,00	4.020.000.000,00	-	94.735.848.146,31
	<b>Jumlah</b>	<b>1.793.874.643.623,00</b>	<b>1.780.017.927.520,58</b>	<b>99,23</b>	<b>2.004.696.822.617,10</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 99,23% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp224.678.895.096,52 atau 11,21%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	(62.735.600,00)	-	0,00
2.	Dinas Kesehatan	83.484.000.000,00	97.569.943.267,58	116,87	111.457.260.034,90
3.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	18.104.000,00	-	0,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	241.605.000,00	48,32	257.265.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
7.	Dinas Perhubungan	1.500.000.000,00	247.512.700,00	16,50	256.732.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	370.444.934,40
10.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.250.000.000,00	1.164.974.400,00	93,20	1.031.936.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	12. Sekretariat Daerah	250.000.000,00	153.050.000,00	61,22	136.175.000,00
	13. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.061.000.000,00	42.392.828.554,10	43,23	45.630.613.100,56
	14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.606.279.643.623,00	1.636.435.770.440,66	101,88	1.844.262.044.023,24
	<b>Jumlah</b>	<b>1.793.874.643.623,00</b>	<b>1.780.017.927.520,58</b>	<b>99,23</b>	<b>2.004.696.822.617,10</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah – LRA</b>	<b>200.370.858.275,00</b>	<b>162.366.717.402,46</b>	<b>81,03</b>	<b>176.520.346.650,22</b>
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari				
	▪ Pendapatan Pajak Daerah – LRA	97.322.000.000,00	41.665.868.567,10	42,81	44.901.339.051,50
	▪ Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40
	▪ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
	▪ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32
	<b>Jumlah</b>	<b>200.370.858.275,00</b>	<b>162.366.717.402,46</b>	<b>81,03</b>	<b>176.520.346.650,22</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 81,03% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp14.153.629.247,76 atau 8,02%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	48.072.720,00	-	0,00
2.	Dinas Kesehatan	83.484.000.000,00	97.569.943.267,58	116,87	111.438.769.034,90
3.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	18.104.000,00	-	0,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	241.605.000,00	48,32	257.265.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
7.	Dinas Perhubungan	1.500.000.000,00	247.512.700,00	16,50	256.732.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	370.444.934,40
10.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.250.000.000,00	1.164.974.400,00	93,20	1.031.936.100,00
12.	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	153.050.000,00	61,22	136.175.000,00
13.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.061.000.000,00	42.392.828.554,10	43,23	45.630.613.100,56
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.775.858.275,00	18.673.752.002,54	146,16	16.104.059.056,36



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>200.370.858.275,00</b>	<b>162.366.717.402,46</b>	<b>81,03</b>	<b>176.520.346.650,22</b>
<b>4.1.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah – LRA</b>	<b>97.322.000.000,00</b>	<b>41.665.868.567,10</b>	<b>42,81</b>	<b>44.901.339.051,50</b>
	Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.185.077.472,00	79,01	695.993.394,00
	▪ Pajak Restoran	4.455.000.000,00	4.317.593.010,10	96,92	3.458.438.038,00
	▪ Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	872.059.695,00	87,21	602.554.930,00
	▪ Pajak Reklame	850.000.000,00	630.911.450,00	74,22	656.086.349,00
	▪ Pajak Penerangan Jalan Umum	13.500.000.000,00	14.614.832.657,00	108,26	13.193.034.327,00
	▪ Pajak Parkir	200.000.000,00	129.434.900,00	64,72	122.712.828,00
	▪ Pajak Air Tanah	80.000.000,00	32.605.968,00	40,76	26.185.960,00
	▪ Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	59.518.000,00	39,68	44.930.000,00
	▪ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00	1.891.965.971,00	34,40	1.830.578.497,50
	▪ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.080.000.000,00	4.362.082.574,00	106,91	3.507.859.977,00
	▪ Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	66.007.000.000,00	13.569.786.870,00	20,56	20.762.964.751,00
	<b>Jumlah</b>	<b>97.322.000.000,00</b>	<b>41.665.868.567,10</b>	<b>42,81</b>	<b>44.901.339.051,50</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar 42,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp3.235.470.484,40 atau 7,21%.

Pelampauan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dari anggaran terjadi pada Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp1.114.832.657,00 atau 8,26% dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Rp282.082.574 atau 6,91%. Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum mencapai target yang telah ditetapkan TA 2022.

<b>1. Pajak Hotel</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.185.077.472,00</b>	<b>79,01</b>	<b>695.993.394,00</b>
Anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
▪ Hotel	1.107.258.200,00	872.781.130,00	78,82	485.889.447,00
▪ Losmen	273.426.800,00	266.201.342,00	97,36	165.326.447,00
▪ Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	119.315.000,00	46.095.000,00	38,63	44.777.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.185.077.472,00</b>	<b>79,01</b>	<b>695.993.394,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hotel TA 2022 terealisasi sebesar 79,01% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp489.084.078,00 atau 70,27%. Pada TA 2022 Pajak Hotel tidak diklasifikasi berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>2.</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>4.455.000.000,00</b>	<b>4.317.593.010,10</b>	<b>96,92</b>	<b>3.458.438.038,00</b>
	Anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Rumah Makan dan Sejenisnya	557.585.000,00	419.380.116,00	75,21	341.824.540,00
	▪ Kafetaria dan Sejenisnya	450.020.000,00	598.938.007,00	133,09	481.346.512,00
	▪ Warung dan Sejenisnya	873.395.000,00	155.915.480,00	17,85	114.631.600,00
	▪ Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.574.000.000,00	3.143.359.407,10	122,12	2.520.635.386,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.455.000.000,00</b>	<b>4.317.593.010,10</b>	<b>96,92</b>	<b>3.458.438.038,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pajak Restoran TA 2022 terealisasi sebesar 96,92% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp859.154.972,10 atau 24,84%.

Pelampauan realisasi TA 2022 dibandingkan anggaran terjadi pada Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp148.918.007,00 atau 33,09% dan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar Rp569.359.407,10 atau 22,12. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran.

<b>3.</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>872.059.695,00</b>	<b>87,21</b>	<b>602.554.930,00</b>
	Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	16.000.000,00	23.558.500,00	147,24	0,00
	▪ Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	710.000.000,00	493.532.820,00	69,51	409.585.055,00
	▪ Permainan Biliar dan Bowling	11.400.000,00	5.664.000,00	49,68	4.991.000,00
	▪ Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	89.600.000,00	216.818.250,00	241,98	106.656.750,00
	▪ Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	170.000.000,00	129.551.125,00	76,21	81.322.125,00
	▪ Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	2.935.000,00	97,83	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>872.059.695,00</b>	<b>87,21</b>	<b>602.554.930,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hiburan TA 2022 terealisasi sebesar 87,21% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp269.504.765,00 atau 44,73%.

Pelampauan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dari anggaran terjadi pada Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana sebesar Rp7.558.500,00 atau 47,24% dan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp127.218.250,00 atau 141,98%.

Sedangkan Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya, Permainan Biliar dan Bowling, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) dan Pertandingan Olahraga belum mencapai target yang telah ditetapkan TA 2022.

<b>4.</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>630.911.450,00</b>	<b>74,22</b>	<b>656.086.349,00</b>
	Anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Reklame Papan/ Billboard/	630.000.000,00	497.585.440,00	78,98	526.388.339,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Videotron/ Megatron				
	▪ Reklame Kain	158.000.000,00	129.629.350,00	82,04	126.843.960,00
	▪ Reklame Melekat/Stiker	75.000,00	0,00	-	0,00
	▪ Reklame Berjalan	61.925.000,00	3.696.660,00	5,97	2.854.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>630.911.450,00</b>	<b>74,22</b>	<b>656.086.349,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pajak Reklame TA 2022 terealisasi sebesar 74,22% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp25.174.899,00 atau 3,84%. Reklame Melekat/Stiker tidak ada realisasi dan realisasi Pajak Reklame belum mencapai target yang telah ditetapkan.

**5. Pajak Penerangan Jalan 13.500.000.000,00 14.614.832.657,00 108,26 13.193.034.327,00**

Pajak Penerangan Jalan TA 2022 terealisasi sebesar 108,26% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 kenaikan sebesar Rp1.421.798.330,00 atau 10,78%.

**6. Pajak Parkir 200.000.000,00 129.434.900,00 64,72 122.712.828,00**

Pajak Parkir TA 2022 terealisasi sebesar 64,72% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 kenaikan sebesar Rp6.722.072,00 atau 5,48%.

**7. Pajak Air Tanah 80.000.000,00 32.605.968,00 40,76 26.185.960,00**

Pajak Air Tanah TA 2022 terealisasi sebesar 40,76% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.420.008,00 atau 24,52%.

**8. Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000,00 59.518.000,00 39,68 44.930.000,00**

Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 terealisasi sebesar 39,68% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp14.588.000,00 atau 32,47%.

**9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.500.000.000,00 1.891.965.971,00 34,40 1.830.578.497,50**

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:

▪ Granit/Andesit	1.845.000.000,00	941.390.147,00	51,02	899.483.810,50
▪ Pasir dan Kerikil	1.967.750.000,00	602.133.804,00	30,60	675.375.731,00
▪ Pasir Kuarsa	1.263.525.000,00	136.209.632,00	10,78	194.790.936,00
▪ Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )	348.225.000,00	209.724.388,00	60,23	37.981.860,00
▪ Tanah Liat ( <i>clayball</i> )	75.500.000,00	0,00	-	342.000,00
▪ Mineral bukan logam lainnya	0,00	2.508.000,00	-	22.604.160,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>1.891.965.971,00</b>	<b>34,40</b>	<b>1.830.578.497,50</b>

Tabel di atas menunjukkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 terealisasi sebesar 34,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp61.387.473,50 atau 3,35%. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 4.080.000.000,00 4.362.082.574,00 106,91 3.507.859.977,00**

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:

▪ Pajak Bumi dan Bangunan	4.080.000.000,00	4.362.082.574,00	106,91	3.507.859.977,00
---------------------------	------------------	------------------	--------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				
	<b>Jumlah</b>	<b>4.080.000.000,00</b>	<b>4.362.082.574,00</b>	<b>106,91</b>	<b>3.507.859.977,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2022 terealisasi sebesar 106,91% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 kenaikan sebesar Rp854.222.597,00 atau 24,35%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya sejak 30 Desember 2014 dari pemerintah pusat melalui KPP Pratama Sintang kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

<b>11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>66.007.000.000,00</b>	<b>13.569.786.870,00</b>	<b>20,56</b>	<b>20.762.964.751,00</b>
Anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
▪ BPHTB – Pemindahan Hak	16.000.000.000,00	7.113.320.540,00	44,46	6.400.551.200,00
▪ BPHTB – Pemberian Hak Baru	50.007.000.000,00	6.456.466.330,00	12,91	14.362.413.551,00
<b>Jumlah</b>	<b>66.007.000.000,00</b>	<b>13.569.786.870,00</b>	<b>20,56</b>	<b>20.762.964.751,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2022 terealisasi sebesar 20,56% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp7.193.177.881,00 atau 34,64%.

<b>4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</b>	<b>6.107.018.345,00</b>	<b>3.511.868.658,24</b>	<b>57,51</b>	<b>3.165.373.258,40</b>
Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah adalah Dinas kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Sekretariat Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
▪ Pendapatan Retribusi Jasa Umum	3.980.073.345,00	2.578.546.700,00	64,79	2.391.902.300,00
▪ Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	1.370.645.000,00	418.898.700,00	30,56	333.606.000,00
▪ Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	756.300.000,00	514.423.258,24	68,02	439.864.958,40
<b>Jumlah</b>	<b>6.107.018.345,00</b>	<b>3.511.868.658,24</b>	<b>57,51</b>	<b>3.165.373.258,40</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 57,51% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp346.495.399,84 atau 10,95%.

Pendapatan Retribusi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan	757.018.345,00	387.229.800,00	51,15	443.781.800,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
3. Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	241.605.000,00	48,32	257.265.000,00
4. Dinas Perhubungan	1.500.000.000,00	247.512.700,00	16,50	256.732.000,00
5. Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	370.444.934,40
7.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1.250.000.000,00	1.147.586.400,00	91,81	1.031.936.100,00
9.	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	153.050.000,00	61,22	136.175.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.107.018.345,00</b>	<b>3.511.868.658,24</b>	<b>57,51</b>	<b>3.165.373.258,40</b>
<b>1.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.980.073.345,00</b>	<b>2.578.546.700,00</b>	<b>64,79</b>	<b>2.391.902.300,00</b>
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Retribusi Pelayanan Kesehatan	757.018.345,00	387.229.800,00	51,15	443.781.800,00
	▪ Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00	241.605.000,00	60,40	257.265.000,00
	▪ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	351.720.000,00	96.817.000,00	27,53	100.910.000,00
	▪ Retribusi Pelayanan Pasar	1.146.000.000,00	1.035.795.000,00	90,38	881.371.500,00
	▪ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	421.335.000,00	13.267.000,00	3,15	33.771.000,00
	▪ Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	104.000.000,00	111.791.400,00	107,49	140.260.600,00
	▪ Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.980.073.345,00</b>	<b>2.578.546.700,00</b>	<b>64,79</b>	<b>2.391.902.300,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2022 teralisasi sebesar 64,79% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp186.644.400,00 atau 7,80%.				
	Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Umum adalah Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pelampuan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 dari anggaran terjadi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp7.791.400,00 atau 7,49%.				
	Sedangkan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan kesehatan, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi belum mencapai target yang ditetapkan.				
<b>2.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.370.645.000,00</b>	<b>418.898.700,00</b>	<b>30,56</b>	<b>333.606.000,00</b>
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	161.000.000,00	35.350.000,00	21,96	39.450.000,00
	▪ Retribusi Terminal	221.760.000,00	40.612.000,00	18,31	31.843.000,00
	▪ Retribusi Tempat Khusus Parkir	219.600.000,00	76.841.000,00	34,99	42.590.000,00
	▪ Retribusi Tempat Penginapan/	189.000.000,00	117.700.000,00	62,28	96.725.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pesanggrahan/ Villa				
	▪ Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	279.285.000,00	19.975.700,00	7,15	47.618.000,00
	▪ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.370.645.000,00</b>	<b>418.898.700,00</b>	<b>30,56</b>	<b>333.606.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 terealisasi sebesar 30,56% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp85.292.700,00 atau 25,57%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

<b>3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu</b>	<b>756.300.000,00</b>	<b>514.423.258,24</b>	<b>68,02</b>	<b>439.864.958,40</b>
Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
▪ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	-	370.444.934,40
▪ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.300.000,00	0,00	-	0,00
▪ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
▪ Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>756.300.000,00</b>	<b>514.423.258,24</b>	<b>68,02</b>	<b>439.864.958,40</b>

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 terealisasi sebesar 68,02% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp74.558.299,84 atau 16,95%.

Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tidak ada realisasi pada Retribusi Izin Trayek sedangkan pada Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Ref	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.1.3		10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai keputusan RUPS dengan Akta Nomor 25, tanggal 25 Februari 2022, deviden untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Buku 2021 sebesar Rp10.709.858.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Pendapatan Deviden PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
--	-------------------	-------------------	--------	-------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.1.4	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA</b>	<b>86.231.981.655,00</b>	<b>106.479.121.902,12</b>	<b>123,48</b>	<b>117.591.021.042,32</b>
	Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	257.000.000,00	422.808.650,00	164,52	309.757.100,00
	▪ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	27.992.000,00	-	223.243.610,00
	▪ Jasa Giro	1.500.000.000,00	4.336.303.913,21	289,09	3.582.555.974,90
	▪ Pendapatan Bunga	0,00	607.020.547,88	-	0,00
	▪ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.000.000,00	1.174.536.946,89	7.340,86	233.453.186,60
	▪ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	140.132.747,08	-	262.622.671,17
	▪ Pendapatan Denda Pajak Daerah	482.000.000,00	316.976.099,00	65,76	206.577.339,06
	▪ Pendapatan dari Pengembalian	550.000.000,00	1.748.647.530,48	317,94	1.162.813.925,69
	▪ Pendapatan BLUD	82.726.981.655,00	97.137.278.267,58	117,42	110.994.987.234,90
	▪ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	45.435.200,00	-	0,00
	▪ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>86.231.981.655,00</b>	<b>106.479.121.902,12</b>	<b>123,48</b>	<b>117.591.021.042,32</b>

Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 terealisasi 123,48% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp11.111.899.140,20 atau sebesar 9,45%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	48.072.720,00	-	0,00
2.	Dinas Kesehatan	82.726.981.655,00	97.182.713.467,58	117,47	110.994.987.234,90
3.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	18.104.000,00	-	0,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	0,00	17.388.000,00	-	10.304.000,00
6.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	739.000.000,00	726.959.987,00	98,37	729.274.049,06
7.	Badan Pengelola Keuangan	2.066.000.000,00	7.963.893.727,54	385,47	5.241.445.758,36



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dan Aset Daerah				
	<b>Jumlah</b>	<b>86.231.981.655,00</b>	<b>106.479.121.902,12</b>	<b>123,48</b>	<b>117.591.021.042,32</b>

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang maka mulai tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Sintang.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.

1. Realisasi pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp422.808.650,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp113.051.550,00 atau 36,50%. Merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.200.000,00 dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp372.608.650,00 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

2. Realisasi pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp27.992.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp195.251.610,00 atau 87,46%. Merupakan Hasil Sewa BMD pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp10.604.000,00 dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa Bagi Hasil Retribusi Tera/Tera Ulang 40% dari UTTP Kabupaten Kapuas Hulu (Disperindagkop Kabupaten Kapuas Hulu) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebesar Rp17.388.000,00.

3. Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp4.336.303.913,21 dan TA 2021 sebesar Rp3.582.555.974,90 terdiri dari :

▪ Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	4.277.126.451,55	285,14	3.521.627.269,62
▪ Jasa Giro Kas Bendahara	0,00	59.124.774,89	-	60.928.705,28
▪ Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	52.686,77	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>4.336.303.913,21</b>	<b>289,09</b>	<b>3.582.555.974,90</b>

Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp4.336.303.913,21 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp753.747.938,31 atau 21,04%.

4. Realisasi pendapatan dari Pendapatan Bunga Deposito dan Dana Bergulir TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari :

▪ Deposito Bank Pembangunan Daerah Kalbar	0,00	551.883.561,58	-	0,00
▪ Deposito Bilyet C11785	0,00	23.630.136,98	-	0,00
▪ Koreksi Kurang Bayar Bunga Deposito Bilyet C11785	0,00	31.506.849,32	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>607.020.547,88</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Tabel diatas menunjukkan tidak ada realisasi pada Pendapatan Bunga Deposito dan Dana Bergulir TA 2021.

5. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2022 sebesar Rp1.174.536.946,89 merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan pembayaran yang melewati tahun berjalan ke rekening Kas Daerah. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp941.083.760,29 atau 403,11%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6.	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 sebesar Rp140.132.747,08 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp122.489.924,09 atau 46,64%.				
7.	Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp316.976.099,00 dan TA 2021 sebesar Rp206.577.339,06. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp110.398.759,94 atau 53,44%. Merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran Pajak terdiri dari:				
	▪ Pendapatan Denda Pajak Hotel	400.000.000,00	7.563.807,00	1,89	6.305.500,06
	▪ Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.000.000,00	25.407.882,00	635,20	16.515.444,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.800.000,00	11.900.656,00	661,15	20.913.572,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	2.418.514,00	241,85	518.071,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	425.850,00	-	6.644.839,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	231.736,00	-	393.582,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000,00	27.853.339,00	55.706,68	14.963.441,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.140.000,00	144.618.895,00	192,47	140.322.890,00
	▪ Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000,00	96.555.420,00	965.554,20	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>482.000.000,00</b>	<b>316.976.099,00</b>	<b>65,76</b>	<b>206.577.339,06</b>
8.	Realisasi pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya pada TA 2022 sebesar Rp1.748.647.530,48 dan TA 2021 sebesar Rp1.162.813.925,69. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp585.833.604,79 atau 50,38% dengan rincian sebagai berikut :				
	▪ Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	550.000.000,00	113.405.447,33	20,62	73.142.330,00
	▪ Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	29.495.892,00	-	28.710.200,00
	▪ Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,00	1.605.746.191,15	-	1.060.961.395,69
	<b>Jumlah</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>1.748.647.530,48</b>	<b>317,94</b>	<b>1.162.813.925,69</b>
	Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:				
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Januari 2022, susulan Desember 2021, Non Dapem Desember 2021.				1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	▪ Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Februari 2022, susulan Januari 2022, Non Dapem Januari 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Maret 2022, susulan Februari 2022, Non Dapem Februari 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran Potongan Hutang Kasda Induk April 2022, susulan Maret 2022, Non Dapem Maret 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Mei 2022, susulan April 2022, Non Dapem April 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Juni 2022, Susulan Mei 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Juli 2022, Susulan Juni 2022, Non Dapem Mei 2022.				1.200.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Agustus 2022, susulan Juli 2022, Non Dapem Juli 2022.				700.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk September 2022, susulan Agustus 2022 dan Non Dapem Agustus 2022.				700.000,00
	▪ Setoran potongan Hutang Kasda Induk Oktober 2022, susulan September 2022, Non Dapem September 2022.				400.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk November 2022, susulan Oktober 2022 dan Non Dapem Oktober 2022.				400.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Desember 2022, Susulan November 2022, Non Dapem November 2022.				400.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dari PT. TASPEN</b>				<b>9.800.000,00</b>

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp105.080.347,33 dianggap sebagai pendapatan karena merupakan pengembalian tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

▪ Berdasarkan SKPP No 991/222/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. B. Itten pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	12.638.000,00
▪ Berdasarkan SKPP No 991/229/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Wasis pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 15 SP 3 Pandan Kecamatan Tempunak)	4.966.400,00
▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan September 2021 an. Aef Sutardi, ST, MT pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang	765.000,00
▪ Berdasarkan SKPP No 991/011/SKPP/BPKAD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Ludiah Guru SMP Muhammadiyah Kabupaten Sintang	8.828.000,00
▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/1952/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji guru kontrak daerah an. Margareta Titin Maryati, S.Pd Guru SDN No 3 Kenuak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang	10.361.597,33
▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan Oktober - Desember 2021 an. Aef Sutardi, ST, MT pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang	2.295.000,00
▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Februari – Desember 2021 an. Mardiwiyana pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Puskesmas Pandan)	1.578.302,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras bulan Juni – Desember 2021 an. Pio Agatho Patriadi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ( Puskesmas Sungai Durian )				1.199.856,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan April 2020 – Desember 2021 an. Kolumba Enun pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ( Puskesmas Serawai )				2.966.064,00
	▪ Berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 182/BPBD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Desember 2021 an. Kusba pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang				157.170,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga Tahun 2020 – 2021 an. Linisius Aho pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN 20 Sepauk )				1.715.038,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2348/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Desember 2020 – Desember 2021 an. Agustino pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				2.478.300,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan September 2018 – Juli 2021 an. Mursidi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SMPN 1 Binjai Hulu )				4.000.000,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Agustus – September 2021 an. Darko pegawai				321.508,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Februari – Juli 2021 an. Tupan Syaifudin pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN 17 Paoh Kecamatan Sepauk )				964.524,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Juni – Desember 2021 an. Bambang pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ( Puskesmas Kemangai )				1.112.524,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Juli – Agustus 2021 an. Elisa Situmorang pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN Kecamatan Sepauk )				1.731.656,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan November – Desember 2021 an. Fridawati pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SMPN 1 Serawai )				309.164,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2362/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak Tahun 2018 – Desember 2021 an. Suparman pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN Kecamatan Sungai Tebelian )				6.599.258,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan November 2019 – Oktober 2021 an. Ledi. A. STH pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN 06 Ransi Dakan Kecamatan Sungai Tebelian )				3.820.324,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Maret – Oktober 2021 an. Subur pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN 21 Emparu Kecamatan Dedai )				1.308.288,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor				160.754,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	900/2370/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan Desember 2021 an. Israil pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SMPN 1 Ketungau Hulu )				
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Agustus – September 2021 an. Asapatius pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN Kecamatan Ketungau Tengah )				316.112,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan Juli 2020 – Juli 2021 an. Jamilah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( Madrasah Al Hikmah Sintang )				2.371.124,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan September 2018 – Juli 2021 an. Mursidi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SMPN 1 Binjai Hulu )				1.357.258,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan Juli 2019 – Desember 2021 an. Bilor Tampubolon pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN 24 Bonet Baru Kecamatan Sungai Tebelian )				4.768.660,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan September 2020 – Agustus 2021 an. Yusni pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( SDN Kecamatan Sepauk )				1.888.830,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan an. Supriyatni pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN Kayan Hilir, Desa Melingkat, Kecamatan Kayan Hilir )				1.545.820,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan an. Mariyono pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SMPN 09 Sepauk )				2.863.894,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Mei – Desember 2021 an. Titayasa pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN Kecamatan Ketungau Hulu )				1.185.562,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2865/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Februari 2020, dan bulan Maret – Agustus 2021 an. Lusia Nogo pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				3.000.450,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan keluarga bulan November – Desember 2021 an. Sopianingsih, S.Pd pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SMPN 1 Kelam Permai )				299.280,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan November 2020 – Oktober 2021 an. Ledi, A. STH				1.923.652,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2362/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Desember 2020 – Juli 2021 an. Rosmiati, S.Pd.K pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ( SDN Kecamatan Kelam Permai )				1.119.408,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 05/DLH/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan jabatan bulan an. Hermanus, S,Sos, M.Si				980.000,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga tahun 2021 an. Panus				1.383.570,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan tahun 2021 an. Siti				4.868.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Aisah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan tahun 2021 an. Ridha Lutfi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				3.456.500,00
	<b>Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun lau yang setor Kas Daerah</b>				<b>103.605.447,33</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>				<b>113.405.447,33</b>
	Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagai berikut:				
▪	Berdasarkan Surat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nomor 001/Bend/Set-DKPP/2022 tanggal 21 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa berdasarkan temuan BPK RI TA 2021				1.426.800,00
▪	Pengembalian tanggal 22 Maret 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa an. Ir. Endang Ginawan, M.Si dan Sri Hartati, SE, M.Si pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang				2.142.200,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 400/BEN-PENGELUARAN/02/SETDPRD tanggal 24 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021 an. Drs. Anang Hidayat, M.Si				401.000,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 400/BEN-PENGELUARAN/03/SETDPRD tanggal 24 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021 an. Ari Agus Sudiar				753.200,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 400/BEN-PENGELUARAN/04/SETDPRD tanggal 24 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021 an. Joko Mardiantono				677.600,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 900/108/Disnakertrans TU.1/202 tanggal 28 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021				5.826.200,00
▪	Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 900/147/Kesbangpol-A/2022 tanggal 4 April 2022 pengembalian atas kelebihan perjalanan dinas biasa TA 2021				1.133.892,00
▪	Berdasarkan Surat Kantor Camat Dedai Nomor 1/PKM DEDAI/2022 tanggal 22 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dalam satu kali penugasan dalam periode TA 2021 Nomor 700/43/BID.WAS II/2022 tanggal 12 Juli 2022				17.135.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas</b>				<b>29.495.892,00</b>
	Rincian Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:				
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 01/SET-DPRD/2022 tanggal 5 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran dan perhitungan harga tidak wajar serta denda keterlambatan pada pekerjaan gedung kantor DPRD Kabupaten Sintang an. PT. Sari Yasa Renjana berdasarkan LHP BPK RI Nomor 16.B/HP/XIX.PNK				25.000.000,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 2/SET-DPRD/2022 tanggal 7 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ( tagihan hotel ) tahun 2018 an. Hardoyo, SE berdasarkan LHP BPK RI Nomor				2.300.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				
	▪ Pengembalian tanggal 25 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Rumah Kopi oleh CV. Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				5.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 25 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Rumah Kopi oleh CV. Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				5.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 26 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran sisa kontrak CV. Decorindo yaitu pekerjaan/rekonstruksi jalan Sungai Ana Desa Sungai Ana berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				1.500.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 26 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran uang muka paket pekerjaan pembangunan Masjid Jami' Nurul Iman ( tahap I ) dari CV. Zona Konstruksi Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir				85.260.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 4/SET-DPRD/2022 tanggal 31 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ( tagihan hotel ) tahun 2018 an. Agustinus berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				5.250.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 3/SET-DPRD/2022 tanggal 31 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses anggota DPRD tahun 2018 berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 28 Mei 2018				16.850.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 21 Februari 2022 atas kelebihan pembayaran biaya pekerjaan konsultasi yang lebih bayar kegiatan GIS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan LHP BPK RI Nomor 150/S/XIV.6/12/2004 tanggal 28 Desember 2004				3.000.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Nomor 004/Ben-Pen/DISHUB.2022 tanggal 7 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan/peningkatan Dermaga Sungai Durian TA 2010 berdasarkan LHM Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor LHM-700/91/ITKAB/2014 atas TLHP BPK RI dari PT. Kreasindo Putra Bangsa				3.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 9 Maret 2022 atas kelebihan pembayaran selisih perhitungan volume JUT oleh CV. Tembawang Nambang di Desa Pagal Baru Kecamatan Tempunak berdasarkan LHP BPK RI				5.154.477,36
	▪ Pengembalian tanggal 9 Maret 2022 atas kelebihan pembayaran selisih perhitungan volume JUT oleh CV. Tuah Raya di Desa Terusan Baru Kecamatan Dedai berdasarkan LHP BPK RI				4.579.170,74
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Nomor 01/BEND PENG/01/DISKOMINFO/2022 tanggal 16 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Sintang TA 2021				1.090.828,00
	▪ Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 02/BP/2022 tanggal 18 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas TA 2021 an. Ledy Nilma Reza, ST berdasarkan temuan LHP BPK RI				667.200,00
	▪ Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 01/BP/2022 tanggal 18 Maret 2022				400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas TA 2021 an. Jidan, S.Sos berdasarkan temuan LHP BPK RI				
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/01/DPU/2022 tanggal 22 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang TA 2021				2.804.961,00
	▪ Pengembalian tanggal 14 April 2022 atas kelebihan pembayaran dari Desa Kemantan Kecamatan Sepauk berdasarkan LHP Kasus Nomor 700/61/ITKAB/2012 tanggal 7 Juni 2012				500.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 06/DINKES/2022 tanggal 14 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan bangunan RD Puskesmas Nanga Ketungau berdasarkan temuan LHP BPK RI				152.745,53
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 07/DINKES/2022 tanggal 14 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan bangunan RD Puskesmas Tanjung Puri berdasarkan temuan LHP BPK RI				9.231.514,38
	▪ Berdasarkan Surat Nomor 02/KEU/2022 18 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran dari Desa Nanga Segudang Kecamatan Serawai kegiatan TA 2016 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Kasus Nomor 700/95/ITKAB/2020 tanggal 24 April 2020				2.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 21 April 2022 atas kelebihan pembayaran kegiatan an. PT. Sari Yasa Renjana				25.000.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Nomor 140/152/PEM/2022 tanggal 22 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan honorarium tim pelaksana kegiatan pada kegiatan pembangunan renovasi sumber daya air bersih TA 2019 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Nomor 700/440/				1.825.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Nomor 140/51/IV/PEM/2022 tanggal 22 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun Semelaban TA 2017 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Nomor 700/440/ITKAB/2020 tanggal 2 Desember 2020				10.388.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 08/DINKES/2022 tanggal 25 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran keterlambatan kegiatan pengadaan bangunan mess PSC 119 Kabupaten Sintang berdasarkan temuan BPK RI Nomor 900/298/DINKES/2022 tanggal 6 April 2022				16.666.793,18
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 09/DINKES/2022 tanggal 25 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran keterlambatan kegiatan pengadaan bangunan perluasan instalasi farmasi Kabupaten Sintang berdasarkan temuan BPK RI Nomor 900/298.3/DINKES/2022 tanggal 6 April 2022				32.679.152,58
	▪ Berdasarkan Surat Nomor 140/52/IV/PEM/2022 tanggal 26 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan rehabilitasi balai Desa Senibung Dusun Sebakong TA 2017 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Nomor 700/440/ITKAB/2020 tanggal 2 Desember 2020				19.130.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 10/DINKES/2022 tanggal 18 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pembayaran tunjangan keluarga an. Gunadi berdasarkan temuan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/05/2022				1.031.690,00
	▪ Pengembalian tanggal 18 Mei 2022 atas kelebihan pembayaran Desa Jungai				2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kecamatan Ambalau berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/184/ITKAB/2013 tanggal 16 September 2013				
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2241/DISDIKBUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume yang tidak terpasang pada kegiatan pembangunan ruang perpustakaan SDN 30 Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022 dari CV. Shaka Perkasa				3.319.012,65
	▪ Berdasarkan Surat Kantor Desa Senibung Nomor 140/41/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kelalaian Plt. Kepala Desa Senibung kegiatan APBDes tahun 2018 – 2019 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/440/ITKAB/2020				18.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 19 Mei 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Titin Minarti pegawai Inspektorat Kabupaten Sintang				451.290,00
	▪ Pengembalian tanggal 19 Mei 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Panus, S.Sos pegawai Inspektorat Kabupaten Sintang				604.992,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2240/DISDIKBUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume yang tidak terpasang pada kegiatan rehabilitasi ruang kelas SDN 01 Sintang berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022 dari CV. Tri Putra				9.258.986,60
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 11/DINKES/2022 tanggal 24 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan penambahan gedung Labkesda Kabupaten Sintang berdasarkan LHP BPK RI Nomor 900/298.2/DINKES/2022 tanggal 6 Mei 2022				16.113.420,73
	▪ Berdasarkan Surat Puskesmas Sepauk Nomor 01/PKM.SEPAUK/2022 tanggal 27 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Bernadeta pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ( Puskesmas Sepauk ) berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022				1.342.044,00
	▪ Berdasarkan Surat Puskesmas Sepauk Nomor 02/PKM.SEPAUK/2022 tanggal 27 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Aki pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ( Puskesmas Sepauk ) berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/05/2022				760.360,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/02/PT.PJA/DENDA BPK/DPU/2022 tanggal 2 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Semubuk – SPG Nanga Merakai pada kegiatan rekonstruksi jalan ( DAK – Penugasan ) yang dilaksanakan oleh PT. Pubagot Jaya Abadi				9.407.171,60
	▪ Berdasarkan Surat Kantor Desa Senibung 140/53/VI/PEM/2022 tanggal 2 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan gedung PAUD Desa Senibung Dusun Sebakong TA 2019 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/440/ITKAB/2020 tanggal 2 Desember 2020				63.000.500,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/300/DPRKP/2022 tanggal 3 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran				4.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	kekurangan volume pekerjaan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/928/ITKAB/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI				
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/01/PT.HPM/DENDA BPK/DPU/2022 tanggal 6 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Seputau III – Nanga Merakai I pada kegiatan rekonstruksi jalan ( DAK – Penugasan ) yang dilaksanakan oleh PT. Hendra Putra Mandiri				24.729.901,16
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/07/PT.PMK/DENDA PU/DPU/2022 tanggal 7 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan SP. II ( Buluh Kuning ) – Desa Nanga Pari pada kegiatan rekonstruksi jalan ( DAK – Reguler ) yang dilaksanakan oleh PT. Prima Mulia Karya				80.372.099,35
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 13/DINKES/2022 tanggal 7 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan pengadaan bangunan kesehatan gedung Puskesmas Tanjung Puri kontrak nomor 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan LHP BPK RI				101.995.392,31
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 12/DINKES/2022 tanggal 7 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan pengadaan bangunan aula PSC 119 Kabupaten Sintang kontrak nomor 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan LHP BPK RI				12.010.258,75
	▪ Berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 212/BPBD/2022 tanggal 9 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan September – Oktober 2021 an. Agus Usman Sopandi, A. Md berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022				297.680,00
	▪ Pengembalian tanggal 10 Juni 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras an. Hamdani pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor 17B/LHP/XIX.PNK/05/2022				540.188,00
	▪ Pengembalian tanggal 22 Juni 2022 atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Seputau II – Nanga Beloh ( DAK – Penugasan ) kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh PT. Novalindo Karya Indonesia				17.846.030,49
	▪ Berdasarkan Surat Kantor Desa Senibung Nomor 140/57/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kelalaian Plt. Kepala Desa Senibung yang tidak melaksanakan APBDes tahun 2018 – 2019 sesuai ketentuan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/440/ITKAB/2020				16.060.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 900/725/DPRP-A/2022 tanggal 24 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan penyusunan sistem informasi tata ruang tahun 2017 berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembalian tanggal 15 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran ADD yang tidak sesuai dengan peruntukannya TA 2012 berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/93/ITKAB/2013 tanggal 10 Juni 2013</li></ul>				5.642.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/400/DPRKP/2022 tanggal 15 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tidak dilakukannya klaim atas jaminan pelaksanaan berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kristen center</li></ul>				20.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/399/DPRKP/2022 tanggal 15 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan mengalami kerusakan dan tidak dapat dimanfaatkan/dilanjutkan pada tahap berikutnya berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 26 Juni 2022</li></ul>				10.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/414/DPRKP/2022 tanggal 18 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran klaim atas jaminan pelaksanaan berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah</li></ul>				20.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/415/DPRKP/2022 tanggal 18 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah</li></ul>				10.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/423/DPRKP/2022 tanggal 19 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan mengalami kerusakan dan pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahap pekerjaan berikutnya berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang</li></ul>				50.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/422/DPRKP/2022 tanggal 19 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tidak dilakukannya klaim atas jaminan pelaksanaan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung</li></ul>				70.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembalian tanggal 19 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran APBDes dan belanja yang tidak dilaksanakan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/185/ITKAB/2016 tanggal 9 Desember 2016</li></ul>				8.371.700,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembalian tanggal 20 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran kegiatan Dusun Lengkong RT 03 Desa Nanga Jetak berdasarkan LHAK Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/195/ITKAB/2019</li></ul>				12.360.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berdasarkan Surat Kantor Desa Baras Nomor 089/KEU/2022 tanggal 25 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pembangunan lapangan volley Desa Baras Kecamatan Dedai yang tidak direalisasikan TA 2018 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/34/ITKAB/2021 tanggal 9 April 2021</li></ul>				3.720.000,00
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembalian tanggal 25 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi</li></ul>				2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	insentif anggota DPRD Kabupaten Sintang tahun 2017 an. Hardoyo, SE berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/443/DPRKP/2022 tanggal 26 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022				55.000.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/457/DPRKP/2022 tanggal 25 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022				53.625.694,35
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/473/DPRKP/2022 tanggal 1 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tidak dilakukannya klaim atas jaminan pelaksanaan pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 26 Juni 2022				41.850.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 2 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan reses anggota DPRD Kabupaten Sintang tahun 2017 an. Hardoyo, SE berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				14.850.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Kantor Desa Nomor 216/KEU/2022 tanggal 5 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran ADD yang tidak sesuai peruntukannya tahun 2014 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/175/ITKAB/2015 tanggal 21 Desember 2015				3.886.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 152/BPBD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Agus Usman Sopandi, A.Md berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/224/ITKAB/2019 tanggal 9 Oktober 2019				1.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 12 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran pembangunan pagar kantor Desa Begendang Mal berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/36/ITKAB/2016 tanggal 6 April 2016				1.020.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/351/DPRKP/2022 tanggal 16 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan konstruksi pembangunan rab berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				35.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 18 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas rangkap bulan Juni – Desember 2021 dan kelebihan insentif vaksin Covid-19 pada Puskesmas Nanga Mau				17.840.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 22 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Dinas Kesehatan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/77/BID.WAS.11/ITKAB/2022 tanggal 29 Juli 2022				25.282.000,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	▪ Pengembalian tanggal 26 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran pembangunan balai Dusun Maung Darat dan Dusun Maung Tengah tahun 2017 – 2018 dan belanja APBDes TA 2017 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/174/ITKAB/2019 tanggal 13 Agustus 2019				6.600.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/680/DPRKP/2022 tanggal 1 September 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan TA 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 dari CV. Ehsan Putra				1.199.852,04
	▪ Pengembalian tanggal 20 September 2022 atas kelebihan pembayaran pekerjaan sumur bos kantor Desa Baras Kecamatan Dedai yang tidak direalisasikan TA 2018 berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/341/ITKAB/2021 tanggal 9 April 2021				1.252.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/680/DPRKP/2022 tanggal 21 September 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran volume pekerjaan berdasarkan LHE Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 oleh CV. Rupin Dio				10.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 28 September 2022 atas kelebihan pembayaran pekerjaan oleh PT. Sari Yasa Renjana				50.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 6 Oktober 2022 atas kelebihan pembayaran pembangunan kantor Desa Riam Sejawak TA 2013 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/184/ITKAB/2016 tanggal 9 Desember 2016				10.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 7 Oktober 2022 atas kelebihan pembayaran honorarium kegiatan pada Desa Nanga Segulang Kecamatan Serawai TA 2016 – 2018 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/95/ITKAB/2022 tanggal 7 Oktober 2022				3.000.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 15/DINKES/2022 tanggal 14 Oktober 2022 pengembalian atas ketidaksesuaian analisa ( koefiensi ) dari harga satuan upah dan bahan yang tidak sesuai pada pekerjaan pembangunan rumah dinas Puskesmas Nanga Mau berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/13/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				10.727.391,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 16/DINKES/2022 tanggal 19 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan paket pekerjaan pengadaan rumah dinas Puskesmas Kemangai berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/13/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				14.792.656,70
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/744/DPRKP/2022 tanggal 19 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan konstruksi pengingkatan jalan berdasarkan LHE Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				2.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 28 Oktober 2022 atas setoran Hasil Evaluasi Kabupaten Sintang				45.651.800,00
	▪ Pengembalian tanggal 3 November 2022 atas kelebihan pembayaran dari Desa Kemantan Kecamatan Sepauk berdasarkan LHP Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/61/ITKAB/2012 tanggal 7 Juni 2012				500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Sosial Nomor 912/142A/STS-Dinsos/2022 tanggal 11 November 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran selisih perhitungan biaya penginapan dalam rangka program RASTRA tahun 2018 berdasarkan LHP Regular Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/76/ITKAB/2019 tanggal 4 April 2019				360.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran belanja kegiatan Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah				4.522.700,00
	▪ Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah				5.445.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran kemahalan harga satuan belanja modal perlengkapan kantor Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah				1.800.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Desa Repak Sari TA 2018 berdasarkan LHP PDDT Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/468/ITKAB/2020 tanggal 21 Desember 2020				115.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 900/426/Disnakertrans TU. I/202 tanggal 16 November 2022 Pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa tahun 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang				85.500,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Nomor 053/DISHUB/2022 tanggal 17 November 2022 Pengembalian atas ketidakwajaran harga pada pekerjaan belanja modal pengadaan alat keamanan lampu suar/penerangan di dermaga susilo dan sungai durian TA 2016 oleh CV. Tolas berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/169/ITKAB/2016				2.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 29 November 2022 atas kelebihan pembayaran TPAPD atas jabatan rangkap Pj. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Menantak Kecamatan Ambalau berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/64/ITKAB/2015 tanggal 15 Mei 2015				1.800.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/868/DPRKP/2022 tanggal 13 Desember 2022 Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan Surat Bupati Nomor 700/928/ITKAB/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal surat perintah penyelesaian TLHP BPK RI TA 2021				22.597.692,16
	▪ Pengembalian tanggal 23 November 2022 atas kelebihan pembayaran belanja modal dengan harga tidak wajar berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/22/ITKAB/2019 tanggal 12 Maret 2019 rekomendasi 3				3.329.909,00
	▪ Pengembalian tanggal 28 November 2022 atas kelebihan pembayaran kegiatan yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Dusun Gembala dan Dusun Belunkak TA 2017 dan APBDes Dusun Sungai Buaya TA 2018 berdasarkan LHP Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022				173.471.700,40
	▪ Pengembalian tanggal 15 Desember 2022 atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Rumah Kopi oleh CV Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				5.453.444,33
	▪ Pengembalian tanggal 15 Desember 2022 atas kekurangan volume pekerjaan jalan Rumah Kopi Lanjutan oleh CV Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				21.442.565,19





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/906/DPRKP/2022 tanggal 28 Desember 2022 Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan LH Evaluasi Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 pada pekerjaan konstruksi peningkatan jalan</li> <li>▪ Penyetoran: Pengembalian biaya perjadi dalam daerah PKM Nanga Lebang yang lebih dalam satu kali penugasan dalam periode hari yang sama (rangkap) TA 2021 berdasarkan LHP No: 700/71/BID.WAS II/ITKAB/20</li> <li>▪ Pengembalian atas kelebihan transfer oleh Bendahara BOS di Satuan Pendidikan SD dan SMP</li> <li>▪ Pengembalian atas kelebihan transfer pengelolaan Dana BOS TA 2021 sebanyak 12 Sekolah</li> </ul>				<p>7.273.105,57</p> <p>26.560.000,00</p> <p>35.990.320,00</p> <p>3.757.300,00</p>
	<b>Jumlah Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</b>				<b>1.605.746.191,15</b>
9.	Realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas TA 2022 sebesar Rp97.137.278.267,58 dan TA 2021 sebesar Rp110.994.987.234,90 mengalami penurunan sebesar Rp13.857.708.967,32 atau 12,48% dari realisasi tahun anggaran 2021, terdiri dari:				
	- Pendapatan BLUD	82.726.981.655,00	97.137.278.267,58	117,42	110.994.987.234,90
	<b>Jumlah</b>	<b>82.726.981.655,00</b>	<b>97.137.278.267,58</b>	<b>117,42</b>	<b>110.994.987.234,90</b>
	Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.				
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas.				
	Penerimaan Pendapatan BLUD sebesar Rp97.137.278.267,58 berupa pendapatan yang berasal dari bunga jasa giro, pelayanan kesehatan, retribusi puskesmas, dan penerimaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:				
	- RSUD Ade M.Djoen	61.000.000.000,00	79.302.277.371,60		90.805.247.247,80
	- Dinas Kesehatan	21.726.981.655,00	0,00		0,00
	- Puskesmas Serawai	0,00	1.185.989.516,86		1.636.231.822,35
	- Puskesmas Kemangai	0,00	792.519.482,06		1.305.899.453,64
	- Puskesmas Nanga Tebidah	0,00	936.638.876,99		1.096.219.687,74
	- Puskesmas Sepauk	0,00	1.956.945.386,67		1.858.163.147,45
	- Puskesmas Tempunak	0,00	504.445.370,00		601.369.347,46
	- Puskesmas Jelimpau	0,00	281.455.103,41		315.658.580,32
	- Puskesmas Pandan	0,00	848.731.654,22		1.074.648.650,29
	- Puskesmas Sungai Durian	0,00	1.542.123.877,92		1.338.584.016,57
	- Puskesmas Tanjung Puri	0,00	1.486.431.434,01		1.378.746.409,91
	- Puskesmas Dara Juanti	0,00	416.681.912,47		391.690.693,09
	- Puskesmas Dedai	0,00	697.317.328,62		764.897.989,02
	- Puskesmas Emparu	0,00	523.717.900,12		505.608.539,27
	- Puskesmas Nanga Mau	0,00	1.163.680.059,06		1.750.459.007,90
	- Puskesmas Kebong	0,00	1.031.397.589,08		1.084.013.887,65
	- Puskesmas Nanga Lebang	0,00	207.841.956,42		317.430.198,84



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Puskesmas Mensiku	0,00	746.883.055,94		732.645.036,93
	- Puskesmas Nanga Ketungau	0,00	559.230.585,14		587.617.887,23
	- Puskesmas Serangas	0,00	716.580.126,29		719.624.112,99
	- Puskesmas Senaning	0,00	1.014.753.742,56		1.112.828.982,76
	- Rumah Sakit Pratama Serawai	0,00		0,00	0,00
	- LABKESDA	0,00		0,00	0,00
	- Puskesmas Merakai	0,00	1.221.635.938,14		1.617.402.535,69
	<b>Jumlah</b>	<b>82.726.981.655,00</b>	<b>97.137.278.267,58</b>		<b>110.994.987.234,90</b>

10. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TA 2022 sebesar Rp45.435.200,00 merupakan pendapatan yang diterima dari Rumah Sakit Pratama Serawai.

11. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 sebesar Rp521.990.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa setoran uang tunai denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa penting. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp93.020.000,00 atau 15,12%.

4.1.1.2	Pendapatan Transfer – LRA	1.593.503.785.348,00	1.613.631.210.118,12	101,26	1.733.440.627.820,57
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.593.503.785.348,00 dengan realisasi sebesar Rp1.613.631.210.118,12, mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp119.809.417.702,45 atau 6,91% . Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari :					
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.186.505.672.287,00	1.178.604.716.170,00	99,33	1.287.092.362.149,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	353.724.663.000,00	353.507.373.000,00	99,94	356.047.288.000,00
	- Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	53.273.450.061,00	81.519.120.948,12	153,02	90.300.977.671,57
	<b>Jumlah</b>	<b>1.593.503.785.348,00</b>	<b>1.613.631.210.118,12</b>	<b>101,26</b>	<b>1.733.440.627.820,57</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 101,26% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi mencapai target sebesar 153,02%, sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.186.505.672.287,00	1.178.604.716.170,00	99,33	1.287.092.362.149,00
Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 terdiri dari:					
	- Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	36.483.507.000,00	46.478.342.269,00	127,40	69.057.394.705,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	9.926.431.000,00	16.115.553.000,00	162,35	30.134.354.819,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	301.935.299.287,00	279.634.924.483,00	92,61	350.710.971.625,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.186.505.672.287,00</b>	<b>1.178.604.716.170,00</b>	<b>99,33</b>	<b>1.287.092.362.149,00</b>

Tabel atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terealisasi sebesar 99,33% dari anggaran sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp108.487.645.979,00 atau 8,43%. Pelampauan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terjadi pada Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp9.994.835.269,00 atau 27,40% dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp6.189.122.000,00 atau 62,35%. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum belum mencapai target yang ditetapkan.				
	Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).				
<b>4.1.1.2.1.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak – LRA</b>	<b>36.483.507.000,00</b>	<b>46.478.342.269,00</b>	<b>127,40</b>	<b>69.057.394.705,00</b>
	Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	29.017.314.000,00	38.760.273.024,00	133,58	60.026.933.727,00
	- Bagi Hasil PPh Pasal 21	6.972.068.730,00	7.294.898.000,00	104,63	8.606.271.400,00
	- Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	484.689.270,00	414.434.000,00	85,51	418.265.400,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.435.000,00	8.737.245,00	92,60	5.924.178,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.483.507.000,00</b>	<b>46.478.342.269,00</b>	<b>127,40</b>	<b>69.057.394.705,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 127,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp22.579.052.436,00 atau 32,70%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak terjadi pada Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp9.742.959.024,00 atau 33,58% dan Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp322.829.270,00 atau 4,63%.				
	Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum mencapai target yang ditetapkan.				
<b>4.1.1.2.1.2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA</b>	<b>9.926.431.000,00</b>	<b>16.115.553.000,00</b>	<b>162,35</b>	<b>30.134.354.819,00</b>
	Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 serta realisasi TA terdiri dari:				
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent	886.791.731,00	184.767.000,00	20,84	562.612.875,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara <i>Royalty</i>	5.780.815.269,00	12.630.621.000,00	218,49	23.535.702.806,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH	1.038.632.450,00	1.341.854.000,00	129,19	3.988.629.988,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH	301.365.550,00	0,00	-	689.790.000,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.357.619.150,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.926.431.000,00</b>	<b>16.115.553.000,00</b>	<b>162,35</b>	<b>30.134.354.819,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 162,35% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp14.018.801.819,00 atau 46,52%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dari anggaran terjadi pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Perikanan sebesar Rp39.485.000,00 atau 2,06%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH sebesar Rp303.221.550,00 atau 29,19%, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalty sebesar Rp6.849.805.731,00 atau 118,49%.				
	Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent belum mencapai target yang ditetapkan.				
<b>4.1.1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA</b>	<b>838.160.435.000,00</b>	<b>836.375.896.418,00</b>	<b>99,79</b>	<b>837.189.641.000,00</b>
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dibandingkan dengan TA 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp813.744.582,00 atau 0,10%. Dengan rincian sebagai berikut :				
	Dana Alokasi Umum	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>838.160.435.000,00</b>	<b>836.375.896.418,00</b>	<b>99,79</b>	<b>837.189.641.000,00</b>
<b>4.1.1.2.1.4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA</b>	<b>301.935.299.287,00</b>	<b>279.634.924.483,00</b>	<b>92,61</b>	<b>350.710.971.625,00</b>
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya serta realisasi TA 2021 terdiri dari :				
	- <b>DAK Fisik</b>	<b>71.988.688.000,00</b>	<b>65.839.821.565,00</b>	<b>91,46</b>	<b>191.818.417.978,00</b>
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.174.500.000,00	1.172.000.000,00	99,79	238.318.270,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.806.770.000,00	15.803.266.000,00	99,98	12.941.441.979,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.724.758.000,00	6.724.758.000,00	100,00	5.896.082.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	-	535.914.110,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	-	130.667.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	-	28.031.118.883,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	-	7.462.510.293,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.023.530.000,00	5.009.765.475,00	99,73	7.141.488.094,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.403.893.000,00	1.950.750.300,00	81,15	39.151.766.055,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	379.475.000,00	379.450.000,00	99,99	60.122.790,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan	1.447.892.000,00	45.000.000,00	3,11	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	860.700.000,00	818.646.300,00	95,11	1.018.466.500,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	-	364.947.000,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	-	3.497.762.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	-	768.845.000,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.420.389.000,00	7.294.272.300,00	70,00	37.226.008.754,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan	0,00	0,00	-	17.360.168.831,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.849.011.000,00	6.404.149.680,00	81,59	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan	0,00	0,00	-	9.165.990.865,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.014.353.000,00	6.007.353.000,00	99,88	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	-	8.805.699.000,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	1.287.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	13.883.417.000,00	12.662.794.630,00	91,21	4.903.924.644,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	-	4.599.439.910,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	-	1.230.736.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	404.352.580,00	-	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	1.163.263.300,00	-	0,00
	<b>- DAK Non Fisik</b>	<b>229.946.611.287,00</b>	<b>213.795.102.918,00</b>	<b>92,98</b>	<b>158.892.553.647,00</b>
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	84.784.660.000,00	77.203.805.682,00	91,06	0,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.395.000.000,00	758.904.000,00	22,35	0,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD	75.778.648.000,00	69.783.112.335,00	92,09	78.817.119.000,00
	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.070.000.000,00	2.070.000.000,00	100,00	1.326.000.000,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNSD	42.694.761.000,00	42.694.761.000,00	100,00	42.576.655.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.200.760.000,00	3.127.038.000,00	97,70	3.234.300.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.573.700.000,00	1.573.700.000,00	100,00	1.349.150.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Museum	776.264.000,00	776.264.000,00	100,00	670.518.850,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Bantuan Operasional Kesehatan	7.513.016.483,00	9.520.416.097,00	126,72	23.054.466.831,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Akreditasi Puskesmas	864.560.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	601.264.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.304.664.600,00	5.304.664.600,00	100,00	5.306.955.400,00
	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	400.800.000,00	400.800.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	-	2.077.787.566,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	-	98.218.000,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	382.237.204,00	382.237.204,00	100,00	381.383.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	199.400.000,00	199.400.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah DAK</b>	<b>301.935.299.287,00</b>	<b>279.634.924.483,00</b>	<b>92,61</b>	<b>350.710.971.625,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar 92,61% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp71.076.047.142,00 atau 20,27%.

**4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA**      **353.724.663.000,00**      **353.507.373.000,00**      **99,94**      **356.047.288.000,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran TA 2022 Dana Penyesuaian Dana Desa sebesar Rp343.060.757.000,00 terealisasi sebesar Rp342.843.467.000,00 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.663.906.000,00 terealisasi sebesar Rp10.663.906.000,00 serta realisasi TA 2021 sebesar Rp7.519.190.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.539.915.000,00 atau 0,71%.

**4.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian – LRA**      **343.060.757.000,00**      **342.843.467.000,00**      **99,94**      **348.528.098.000,00**  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme penerimaan ke Kas Daerah maka Pendapatan Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) terealisasi sebesar 99,94% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat Penurunan sebesar Rp5.684.631.000,00 atau 1,63%. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Transfer Pusat Dana Desa TA 2022 Nomor 900/231/III.A-BPKAD dan Nomor BA-29/KPN.1705/2023 tanggal 8 Maret 2023 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang pencairan transfer dana desa sebesar Rp342.843.467.000,00, dengan rincian penyaluran sebagai berikut :				
	- Tahap I		86.334.984.000,00		100.636.582.520,00
	- Tahap II		264.134.389.760,00		70.501.825.680,00
	- Tahap III		342.843.467.000,00		177.389.689.800,00
	<b>Jumlah</b>		<b>342.843.467.000,00</b>		<b>348.528.098.000,00</b>
<b>4.1.1.2.2.2</b>	<b>Dana Insentif Daerah-LRA</b>	<b>10.663.906.000,00</b>	<b>10.663.906.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.519.190.000,00</b>
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebagai berikut :				
	Dana Insentif Daerah (DID)	10.663.906.000,00	10.663.906.000,00	100,00	7.519.190.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.663.906.000,00</b>	<b>10.663.906.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.519.190.000,00</b>
<b>4.1.1.2.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi – LRA</b>	<b>53.273.450.061,00</b>	<b>81.519.120.948,12</b>	<b>153,02</b>	<b>90.300.977.671,57</b>
	Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	49.923.450.061,00	79.535.557.148,12	159,32	77.200.977.671,57
	- Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	3.350.000.000,00	1.983.563.800,00	59,21	13.100.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>53.273.450.061,00</b>	<b>81.519.120.948,12</b>	<b>153,02</b>	<b>90.300.977.671,57</b>
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 153,02% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.781.856.723,45 atau 9,73%.				
<b>4.1.1.2.3.1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA</b>	<b>49.923.450.061,00</b>	<b>79.535.557.148,12</b>	<b>159,32</b>	<b>77.200.977.671,57</b>
	Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:				
	1. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.				
	2. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 116/BAPENDA/2022 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.				
3.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Mei 2022.				
4.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 838/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Agustus 2022.				
5.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1285/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Oktober 2022.				
6.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1422/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022.				
	Dengan rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut :				
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.399.000.000,00	13.160.056.879,60	106,14	14.562.705.759,10
	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.761.227.906,00	13.426.074.302,02	114,16	13.737.077.549,59
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.239.772.094,00	29.909.769.612,30	210,04	29.043.670.974,37
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	250.000.000,00	560.652.145,20	224,26	402.348.082,51
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.273.450.061,00	22.479.004.209,00	199,40	19.455.175.306,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.923.450.061,00</b>	<b>79.535.557.148,12</b>	<b>159,32</b>	<b>77.200.977.671,57</b>
	Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 159,32% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.334.579.476,55 atau 3,02%.				
4.1.1.2.3.3	<b>Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya –LRA</b>	<b>3.350.000.000,00</b>	<b>1.983.563.800,00</b>	<b>59,21</b>	<b>13.100.000.000,00</b>
	Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 257/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1341/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 November 2022 sebesar Rp3.350.000.000,00.				
4.1.1.3	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>94.735.848.146,31</b>
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah– LRA	0,00	4.020.000.000,00	-	40.000.000,00
	- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	94.695.848.146,31





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>	-	<b>94.735.848.146,31</b>
Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp90.715.848.146,31 atau 95,76%.					
<b>4.1.1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	4.020.000.000,00	-	0,00
	- Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	-	40.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
TA 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.					
<b>4.1.1.3.1.1</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp4.020.000.000,00 merupakan hibah Air Minum Perkotaan, Tahap ke-1 Tahun Anggaran 2022.				
<b>4.1.1.3.1.2</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				
<b>4.1.1.3.2</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>94.695.848.146,31</b>
	- Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	90.597.426.240,00
	- Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	-	4.079.930.906,31
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BL	0,00	0,00	-	18.491.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>94.695.848.146,31</b>
Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.					
<b>4.1.1.3.2.1</b>	<b>Pendapatan Hibah Dana BOS – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>90.597.426.240,00</b>
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				
<b>4.1.1.3.2.2</b>	<b>Pendapatan atas Pengembalian Hibah – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>4.079.930.906,31</b>
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.3.2.3	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BL – LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>18.491.000,00</b>
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				
4.1.2	<b>BELANJA</b>	<b>1.501.361.888.623,00</b>	<b>1.328.977.136.222,31</b>	<b>88,52</b>	<b>1.385.318.654.052,20</b>
	Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi sesuai jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut.				
	- Belanja Operasi	1.292.397.711.785,00	1.137.829.897.279,31	88,04	1.109.822.778.027,28
	- Belanja Modal	204.497.711.888,00	189.346.459.659,00	92,59	273.150.664.287,00
	- Belanja Tak Terduga	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
	<b>Jumlah</b>	<b>1.501.361.888.623,00</b>	<b>1.328.977.136.222,31</b>	<b>88,52</b>	<b>1.385.318.654.052,20</b>

Secara keseluruhan dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021, realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp56.341.517.829,89 atau 4,07%. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp28.007.199.252,03 atau 2,52%, Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp83.804.204.628,00 atau 30,68% dan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp544.432.453,92 atau 23,21% dari TA 2021. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536.579.911.434,00	462.672.872.874,50	86,23	487.614.304.428,43
- Dinas Kesehatan	347.185.262.987,00	305.061.713.683,33	87,87	362.632.390.253,32
- Dinas Pekerjaan Umum	86.843.100.882,00	80.016.264.979,98	92,14	93.741.337.407,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	78.708.404.208,00	73.236.329.428,00	93,05	70.128.103.627,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.196.544.890,00	4.962.431.388,00	80,08	3.772.263.537,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	14.857.057.714,00	13.932.066.600,64	93,77	12.107.222.922,00
- Dinas Sosial	26.073.936.379,00	25.011.334.067,01	95,92	21.399.520.063,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.443.918.093,00	4.713.382.487,00	86,58	3.680.021.345,00
- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.755.601.172,00	11.063.052.683,00	86,73	10.328.197.888,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.168.284.022,00	12.906.693.388,00	91,10	7.835.563.786,00
- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.489.455.547,00	5.836.216.588,00	77,93	8.104.682.586,00
- Dinas Lingkungan Hidup	17.722.281.460,00	16.117.391.503,60	90,94	17.831.555.686,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.670.524.233,00	7.908.385.379,00	91,21	7.371.033.869,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.886.898.856,00	10.493.660.364,00	88,28	12.530.055.451,00
- Dinas Perhubungan	8.121.772.291,00	7.461.425.486,00	91,87	6.567.906.532,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	7.570.428.679,00	6.647.017.876,00	87,80	7.410.337.978,00
- Dinas Penanaman Modal dan	5.026.171.789,00	4.342.604.574,00	86,40	3.660.189.455,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.367.065.788,00	12.639.290.911,00	94,56	4.929.331.535,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.982.475.146,00	3.376.328.886,00	84,78	3.245.465.968,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.720.102.242,00	28.566.450.618,00	92,99	42.414.937.412,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.062.358.301,00	9.832.425.548,00	88,88	8.779.175.295,53
-	Sekretariat Daerah	60.515.112.128,00	55.733.610.890,00	92,10	53.028.474.857,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	58.115.252.898,00	55.516.487.364,00	95,53	34.543.846.850,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.745.970.706,00	7.793.404.651,00	89,11	6.399.390.124,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	16.507.063.821,00	12.059.340.455,25	73,06	10.179.770.374,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.736.503.947,00	14.531.545.612,00	77,56	10.962.444.733,92
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.488.588.673,00	8.737.951.073,00	92,09	8.499.302.172,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.526.556.915,00	3.216.110.313,00	91,20	2.348.230.250,00
-	Inspektorat	11.561.848.916,00	11.068.713.015,00	95,73	9.386.622.898,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	18.888.063.581,00	17.021.808.663,00	90,12	22.780.951.634,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	2.354.787.393,00	2.224.854.059,00	94,48	1.710.296.218,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	3.062.359.761,00	2.771.191.929,00	90,49	2.421.580.321,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.146.011.474,00	1.894.386.226,00	88,27	1.616.209.448,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.785.995.204,00	2.399.470.129,00	86,13	2.170.359.395,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	2.434.928.821,00	2.150.973.480,00	88,34	1.942.102.422,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	3.462.596.797,00	3.153.803.453,00	91,08	2.685.446.756,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.332.198.512,00	2.125.460.439,00	91,14	1.713.772.268,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.360.431.287,00	2.003.351.812,00	84,87	1.610.383.734,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.327.083.181,00	2.053.276.510,00	88,23	1.676.509.565,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.178.997.768,00	2.878.320.192,00	90,54	2.312.348.376,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.899.450.043,00	2.550.577.538,00	87,97	2.290.602.047,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.961.767.365,00	2.583.993.081,00	87,24	2.220.471.229,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.918.449.445,00	2.567.943.749,00	87,99	2.192.047.933,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.620.313.874,00	5.143.222.276,00	91,51	4.543.893.423,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.501.361.888.623,00</b>	<b>1.328.977.136.222,31</b>	<b>88,52</b>	<b>1.385.318.654.052,20</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.292.397.711.785,00</b>	<b>1.137.829.897.279,31</b>	<b>88,04</b>	<b>1.109.822.778.027,28</b>
	Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
-	Belanja Pegawai	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
-	Belanja Barang dan Jasa	516.673.365.976,00	472.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28
-	Belanja Subsidi	1.545.015.581,00	753.471.164,00	48,77	0,00
-	Belanja Hibah	35.821.552.000,00	34.080.803.392,00	95,14	64.288.633.554,00
-	Belanja Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	2.756.050.000,00	96,57	980.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.292.397.711.785,00</b>	<b>1.137.829.897.279,31</b>	<b>88,04</b>	<b>1.109.822.778.027,28</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi terealisasi sebesar 88,04% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp28.007.119.252,03 atau 2,52%. Dengan rincian Belanja Operasi per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	491.269.063.522,00	418.823.036.383,50	85,25	434.870.117.007,43
- Dinas Kesehatan	310.541.982.998,00	272.921.779.557,33	87,89	274.263.547.826,32
- Dinas Pekerjaan Umum	32.403.594.017,00	30.776.406.857,98	94,98	19.553.869.645,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.998.916.658,00	28.036.627.768,00	90,44	37.300.514.127,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.006.997.416,00	3.933.827.388,00	78,57	3.717.533.537,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	13.197.356.714,00	12.300.610.000,64	93,21	11.678.297.922,00
- Dinas Sosial	25.845.235.229,00	24.785.658.067,01	95,90	21.355.030.063,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.238.693.093,00	4.527.392.487,00	86,42	3.680.021.345,00
- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.299.603.172,00	10.640.839.183,00	86,51	9.072.041.888,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.117.344.022,00	12.859.233.388,00	91,09	7.834.938.786,00
- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.889.958.047,00	5.052.571.888,00	85,78	4.769.713.086,00
- Dinas Lingkungan Hidup	16.270.256.860,00	14.918.331.153,60	91,69	15.096.124.186,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.385.792.393,00	7.624.149.479,00	90,92	7.317.333.869,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.564.352.856,00	10.187.853.364,00	88,10	12.423.270.451,00
- Dinas Perhubungan	7.074.621.311,00	6.432.775.221,00	90,93	5.428.926.532,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	7.037.972.679,00	6.117.241.876,00	86,92	7.296.035.478,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.908.142.789,00	4.224.575.574,00	86,07	3.592.374.455,00
- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.235.275.788,00	12.489.998.911,00	94,37	4.874.250.535,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.867.900.146,00	3.262.811.386,00	84,36	3.022.040.160,00
- Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.519.671.742,00	28.367.579.118,00	92,95	42.277.091.412,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	10.369.619.551,00	9.141.157.348,00	88,15	5.256.618.295,53
- Sekretariat Daerah	58.381.372.088,00	53.658.192.960,00	91,91	52.489.961.038,00
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	56.588.861.890,00	54.022.979.984,00	95,47	33.631.722.950,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.462.401.448,00	7.517.501.701,00	88,83	6.345.040.124,00
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.676.033.428,00	11.230.516.955,25	71,64	10.125.307.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.112.389.997,00	12.573.205.328,00	89,09	8.495.907.996,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.362.868.673,00	8.612.451.073,00	91,99	8.177.811.872,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.450.358.415,00	3.140.186.313,00	91,01	2.348.230.250,00
-	Inspektorat	11.233.767.666,00	10.740.955.515,00	95,61	9.350.357.898,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	15.286.816.021,00	13.442.832.027,00	87,94	13.320.361.784,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	2.212.084.623,00	2.083.563.209,00	94,19	1.696.106.218,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.983.522.261,00	2.694.504.429,00	90,31	2.421.580.321,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.086.596.474,00	1.835.411.226,00	87,96	1.607.559.448,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.743.425.204,00	2.357.280.129,00	85,92	2.158.709.395,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	2.425.468.821,00	2.141.513.480,00	88,29	1.942.102.422,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	3.313.896.797,00	3.005.103.453,00	90,68	2.685.446.756,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.324.198.512,00	2.117.460.439,00	91,10	1.611.362.268,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.321.257.538,00	1.964.178.063,00	84,62	1.582.976.234,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.320.483.181,00	2.046.676.510,00	88,20	1.666.279.565,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.153.597.768,00	2.852.920.192,00	90,47	2.312.348.376,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.694.511.793,00	2.348.341.288,00	87,15	2.256.402.047,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.813.144.865,00	2.435.730.581,00	86,58	2.198.071.229,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.831.989.445,00	2.484.713.749,00	87,74	2.192.047.933,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.576.313.874,00	5.099.222.276,00	91,44	4.527.393.423,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.292.397.711.785,00</b>	<b>1.137.829.897.279,31</b>	<b>88,04</b>	<b>1.109.822.778.027,28</b>
<b>4.1.2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>735.503.778.228,00</b>	<b>627.666.020.862,56</b>	<b>85,34</b>	<b>648.859.358.337,00</b>
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Pegawai. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
-	Belanja Pegawai	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
	<b>Jumlah</b>	<b>735.503.778.228,00</b>	<b>627.666.020.862,56</b>	<b>85,34</b>	<b>648.859.358.337,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 85,34% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp21.193.337.474,44 atau 3,27%. Dengan rincian Belanja Pegawai per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :				
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	413.920.678.846,00	339.492.019.888,00	82,02	365.969.912.118,00
-	Dinas Kesehatan	109.219.803.982,00	103.472.340.683,33	94,74	107.383.126.248,00
-	Dinas Pekerjaan Umum	8.521.251.412,00	7.600.608.852,98	89,20	7.585.671.223,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.305.521.831,00	2.896.946.863,00	87,64	2.824.389.648,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.610.142.849,00	2.287.895.103,00	87,65	2.139.742.758,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	6.767.412.527,00	6.084.842.425,00	89,91	5.910.522.928,00
-	Dinas Sosial	2.826.807.032,00	2.349.873.896,00	83,13	2.288.234.724,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan	3.754.092.900,00	3.107.085.528,00	82,77	3.081.170.912,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Transmigrasi				
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.648.338.172,00	3.157.178.417,00	86,54	3.007.568.744,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.367.052.133,00	2.887.209.255,00	85,75	2.730.842.760,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.888.470.267,00	3.215.647.433,00	82,70	3.345.369.998,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	6.069.839.339,00	5.334.007.547,00	87,88	5.126.868.955,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.535.984.419,00	3.792.939.742,00	83,62	3.848.306.083,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.294.675.151,00	2.729.380.334,00	82,84	2.812.556.328,00
-	Dinas Perhubungan	4.692.212.450,00	4.150.789.182,00	88,46	3.882.035.481,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.481.310.586,00	3.615.699.968,00	80,68	3.511.089.921,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.046.242.543,00	2.380.840.338,00	78,16	2.488.392.649,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.565.622.541,00	3.164.948.706,00	88,76	3.036.694.746,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.961.328.332,00	2.400.208.604,00	81,05	2.455.153.950,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.483.749.013,00	14.429.674.595,00	93,19	14.058.097.722,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.103.052.955,00	4.131.578.540,00	80,96	4.115.944.883,00
-	Sekretariat Daerah	16.469.085.039,00	14.187.782.549,00	86,15	12.768.295.959,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.082.565.559,00	26.908.861.303,00	95,82	23.142.830.819,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.297.970.118,00	3.584.041.862,00	83,39	3.715.126.817,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	9.348.063.238,00	5.569.877.513,25	59,58	5.798.463.409,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.916.886.328,00	4.484.043.652,00	91,20	4.279.907.001,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.815.347.575,00	4.140.228.194,00	85,98	3.991.001.489,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.997.393.934,00	1.715.560.137,00	85,89	1.591.625.655,00
-	Inspektorat	7.946.854.687,00	7.485.234.476,00	94,19	6.401.569.816,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	12.462.265.499,00	10.779.621.887,00	86,50	10.530.934.770,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	1.696.622.007,00	1.586.192.487,00	93,49	1.402.389.642,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.541.011.746,00	2.256.913.499,00	88,82	2.134.522.667,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.549.159.404,00	1.308.390.966,00	84,46	1.301.070.622,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.286.734.969,00	1.926.957.694,00	84,27	1.960.590.487,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	1.940.679.561,00	1.709.577.219,00	88,09	1.687.338.139,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	2.786.799.549,00	2.501.782.646,00	89,77	2.403.769.653,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.745.869.699,00	1.541.222.650,00	88,28	1.436.200.808,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	1.693.731.738,00	1.366.085.009,00	80,66	1.302.089.590,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.688.352.174,00	1.430.827.454,00	84,75	1.374.119.873,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.471.745.272,00	2.172.776.696,00	87,90	2.026.064.666,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.181.634.174,00	1.841.115.669,00	84,39	1.895.187.047,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.309.380.971,00	1.966.364.621,00	85,15	1.946.849.389,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.299.327.836,00	1.956.922.855,00	85,11	1.903.572.238,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.912.707.871,00	2.563.923.924,00	88,03	2.264.145.002,00
	<b>Jumlah</b>	<b>735.503.778.228,00</b>	<b>627.666.020.862,56</b>	<b>85,34</b>	<b>648.859.358.337,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 85,34% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp21.193.337.474,44 atau 3,27%.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:

-	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	443.584.553.713,00	376.577.910.313,98	84,89	381.658.376.263,00
-	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	114.048.620.000,00	99.481.892.052,33	87,23	88.371.027.046,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.675.829.509,00	121.832.418.591,25	91,83	137.386.371.643,00
-	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.317.376.900,00	22.593.962.391,00	96,90	19.057.842.460,00
-	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	514.596.106,00	218.269.014,00	42,42	246.840.914,00
-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	648.148.500,00	80,86	691.302.454,00
-	Belanja Pegawai BOS	19.794.692.000,00	6.000.000.000,00	30,31	21.064.462.557,00
-	Belanja Pegawai BLUD	766.510.000,00	313.420.000,00	40,89	383.135.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>735.503.778.228,00</b>	<b>627.666.020.862,56</b>	<b>85,34</b>	<b>648.859.358.337,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2022 terealisasi sebesar 85,34% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp21.193.337.474,44 atau 3,27%.

**4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 516.673.365.976,00 472.573.551.860,75 91,46 395.694.786.136,28**

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Barang	101.658.944.432,00	93.823.942.778,00	92,28	89.738.636.617,00
-	Belanja Jasa	152.487.768.303,00	138.163.444.610,58	90,61	135.267.593.264,10
-	Belanja Pemeliharaan	29.850.284.755,00	29.709.400.492,00	99,53	13.439.466.633,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	60.653.677.100,00	55.904.168.545,00	92,17	39.954.902.804,53
-	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.789.750.000,00	2.684.994.619,00	96,24	5.712.079.800,00
-	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.351.278.019,00	56.186.437.477,17	105,31	45.570.367.668,43



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.881.663.367,00	96.101.163.339,00	82,93	66.011.739.349,22
	<b>Jumlah</b>	<b>516.673.365.976,00</b>	<b>472.573.551.860,75</b>	<b>91,46</b>	<b>395.694.786.136,28</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 91,46% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp76.878.765.724,47 atau 19,43%. Dengan rincian Belanja Barang dan Jasa per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.485.384.676,00	73.432.559.495,50	102,72	63.289.233.639,43
-	Dinas Kesehatan	200.792.179.016,00	168.920.943.374,00	84,13	166.880.421.578,32
-	Dinas Pekerjaan Umum	23.882.342.605,00	23.175.798.005,00	97,04	11.968.198.422,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.283.474.827,00	23.734.066.905,00	90,30	27.538.887.279,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.396.854.567,00	1.645.932.285,00	68,67	1.577.790.779,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	5.679.944.187,00	5.465.767.575,64	96,23	5.767.774.994,00
-	Dinas Sosial	21.668.428.197,00	21.179.534.171,01	97,74	19.066.795.339,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.484.600.193,00	1.420.306.959,00	95,67	598.850.433,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.651.265.000,00	7.483.660.766,00	86,50	6.064.473.144,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.478.835.889,00	8.700.568.133,00	91,79	1.631.423.113,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.001.487.780,00	1.836.924.455,00	91,78	1.424.343.088,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	7.786.224.521,00	7.509.475.714,60	96,45	6.515.844.381,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.849.807.974,00	3.831.209.737,00	99,52	3.469.027.786,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.269.677.705,00	7.458.473.030,00	90,19	9.335.714.123,00
-	Dinas Perhubungan	2.237.408.861,00	2.140.636.039,00	95,67	948.766.051,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.556.662.093,00	2.501.541.908,00	97,84	3.784.945.557,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.861.900.246,00	1.843.735.236,00	99,02	1.103.981.806,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.229.653.247,00	3.985.050.205,00	94,22	1.687.555.789,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	906.571.814,00	862.602.782,00	95,15	566.886.210,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.550.372.729,00	12.470.354.523,00	92,03	4.481.358.090,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.976.566.596,00	4.723.778.808,00	94,92	1.140.673.412,53
-	Sekretariat Daerah	24.947.488.049,00	23.743.611.411,00	95,17	19.594.472.429,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.506.296.331,00	27.114.118.681,00	95,12	10.488.892.131,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.164.431.330,00	3.933.459.839,00	94,45	2.629.913.307,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.327.970.190,00	5.660.639.442,00	89,45	4.326.844.465,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.695.488.088,00	7.377.090.512,00	95,86	4.216.000.995,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.547.521.098,00	4.472.222.879,00	98,34	4.186.810.383,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.452.964.481,00	1.424.626.176,00	98,05	756.604.595,00
-	Inspektorat	3.286.912.979,00	3.255.721.039,00	99,05	2.948.788.082,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	2.824.550.522,00	2.663.210.140,00	94,29	2.649.672.923,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	515.462.616,00	497.370.722,00	96,49	293.716.576,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	442.510.515,00	437.590.930,00	98,89	287.057.654,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	537.437.070,00	527.020.260,00	98,06	306.488.826,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	456.690.235,00	430.322.435,00	94,23	198.118.908,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	484.789.260,00	431.936.261,00	89,10	254.764.283,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	527.097.248,00	503.320.807,00	95,49	281.677.103,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	578.328.813,00	576.237.789,00	99,64	175.161.460,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	627.525.800,00	598.093.054,00	95,31	280.886.644,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	632.131.007,00	615.849.056,00	97,42	292.159.692,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	681.852.496,00	680.143.496,00	99,75	286.283.710,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	512.877.619,00	507.225.619,00	98,90	361.215.000,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	503.763.894,00	469.365.960,00	93,17	251.221.840,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	532.661.609,00	527.790.894,00	99,09	288.475.695,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.856.972.003,00	1.803.664.352,00	97,13	1.496.614.421,00
	<b>Jumlah</b>	<b>516.673.365.976,00</b>	<b>472.573.551.860,75</b>	<b>91,46</b>	<b>395.694.786.136,28</b>

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:

-	Belanja Barang Pakai Habis	101.650.272.432,00	93.815.270.778,00	92,29	89.738.636.617,00
-	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.672.000,00	8.672.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Jasa Kantor	108.598.373.968,00	98.471.192.816,33	90,67	101.272.089.099,10
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.387.716.350,00	30.719.314.950,25	94,85	27.762.079.014,00
-	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	-	121.640.000,00
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	925.971.000,00	835.540.500,00	90,23	207.020.000,00
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.034.400.000,00	1.005.362.000,00	97,19	883.014.000,00
-	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	99.250.000,00	89.198.000,00	89,87	42.500.000,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.706.160.000,00	2.238.889.820,00	82,73	1.942.738.500,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.827.906.120,00	2.565.765.650,00	67,03	1.789.954.800,00
-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	667.800.000,00	644.015.000,00	96,44	632.400.000,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.458.300.000,00	1.396.356.550,00	95,75	385.130.000,00
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	723.364.500,00	172.565.625,00	23,86	216.838.011,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	58.526.365,00	25.243.699,00	43,13	12.189.840,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.847.947.320,00	5.745.377.145,00	98,25	3.529.436.230,00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.601.581.700,00	5.525.147.097,00	98,64	700.098.323,00
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.400.755.735,00	18.438.876.250,00	100,21	9.209.932.080,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.653.677.100,00	55.904.168.545,00	92,17	39.954.902.804,53
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.464.250.000,00	2.372.888.619,00	96,29	5.485.571.800,00
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	325.500.000,00	312.106.000,00	95,89	226.508.000,00
-	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.351.278.019,00	56.186.437.477,17	105,31	45.570.367.668,43
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.881.663.367,00	96.101.163.339,00	82,93	66.011.739.349,22
	<b>Jumlah</b>	<b>516.673.365.976,00</b>	<b>472.573.551.860,75</b>	<b>91,46</b>	<b>395.694.786.136,28</b>

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp76.878.765.724,47 atau 19,43%.

Rincian anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	159.900.000,00	159.900.000,00	100,00	28.150.000,00
-	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Beasiswa	993.450.000,00	933.983.300,00	94,01	945.950.000,00
-	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	97.898.019,00	97,90	1.180.000.000,00
-	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.200.000.000,00	1.170.207.300,00	97,52	3.331.471.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.464.250.000,00</b>	<b>2.372.888.619,00</b>	<b>96,29</b>	<b>5.485.571.800,00</b>

Rincian anggaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan TA 2022 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.900.000,00	60.900.000,00	100,00	
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	
-	Kelurahan Ulak Jaya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
-	Kecamatan Ketungau Hilir	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Kecamatan Ketungau Tengah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>159.900.000,0</b>	<b>159.900.000,00</b>	<b>100,00</b>	

Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi TA 2022 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata anggaran sebesar Rp10.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.900.000,00 atau 100,00%. Untuk kegiatan Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) TA 2022.

Rincian anggaran Belanja Beasiswa TA 2022 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah	873.850.000,00	814.400.000,00	93,20	
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	119.600.000,00	119.583.300,00	99,99	
<b>Jumlah</b>	<b>993.450.000,00</b>	<b>933.983.300,00</b>	<b>94,01</b>	

Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan TA 2022 pada Dinas Sosial anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp97.898.019,00 atau 97,90%. Untuk kegiatan Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan RSJ Provinsi Kalimantan Barat.

Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) TA 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.170.207.300,00 atau 97,52%. Untuk diberikan kepada pihak ketiga untuk Bantuan Operasional dan Logistik Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sintang TA 2022.

Rincian anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebagai berikut :

- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	0,00
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	288.000.000,00	274.606.000,00	95,35	226.508.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>325.500.000,00</b>	<b>312.106.000,00</b>	<b>95,89</b>	<b>226.508.000,00</b>

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2022 pada Dinas Sosial anggaran sebesar Rp37.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.500.000,00 atau 100,00%. Untuk keperluan Belanja Sosial Tunai dan Biaya Administrasi Wesel Pos untuk Penyaluran BST BBM.

Rincian anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat TA 2022 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	90.000.000,00	84.631.000,00	94,03	
- Kecamatan Sintang	198.000.000,00	189.975.000,00	95,95	
<b>Jumlah</b>	<b>288.000.000,00</b>	<b>274.606.000,00</b>	<b>95,35</b>	

Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2022 sebagai berikut :

- Belanja BOS Kinerja Semester I	225.324.914,00
- Belanja BOS Reguler Semester I	41.672.114.723,17
- Belanja BOS Kinerja Semester II	429.036.203,00
- Belanja BOS Reguler Semester II	13.573.832.237,00
- Kurang Catat Belanja Barang dan Jasa pada 25 Satuan Sekolah SD dan SMP	286.129.400,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Jumlah</b>		<b>56.186.437.477,17</b>		
	Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022 sebagai berikut :				
	- RSUD Ade M. Djoen		78.854.546.814,00		
	- Puskesmas Serawai		1.279.871.347,00		
	- Puskesmas Kemangai		848.819.880,00		
	- Puskesmas Nanga Tebidah		900.692.518,00		
	- Puskesmas Sepauk		1.634.819.137,00		
	- Puskesmas Tempunak		485.990.859,00		
	- Puskesmas Jelimpau		299.188.840,00		
	- Puskesmas Pandan		804.309.305,00		
	- Puskesmas Sungai Durian		1.423.844.231,00		
	- Puskesmas Tanjung Puri		1.361.036.138,00		
	- Puskesmas Dara Juanti		297.825.386,00		
	- Puskesmas Dedai		752.184.330,00		
	- Puskesmas Emparu		451.754.872,00		
	- Puskesmas Nanga Mau		1.049.685.393,00		
	- Puskesmas Kebong		1.010.301.435,00		
	- Puskesmas Nanga Lebang		195.022.300,00		
	- Puskesmas Mensiku		804.913.902,00		
	- Puskesmas Nanga Ketungau		662.414.085,00		
	- Puskesmas Serangas		666.622.402,00		
	- Puskesmas Senaning		921.060.307,00		
	- Puskesmas Merakai		1.396.259.858,00		
	<b>Jumlah</b>		<b>96.101.163.339,00</b>		
<b>4.1.2.1.3</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>1.545.015.581,00</b>	<b>753.471.164,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Subsidi TA 2022 terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD dan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan rincian sebagai berikut :				
	- Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.015.581,00	712.071.164,00	47,47	0,00
	- Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	45.000.000,00	41.400.000,00	92,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.545.015.581,00</b>	<b>753.471.164,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>

Belanja Subsidi kepada BUMD merupakan Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 690/1259/KEP-DPRKP/2022 tanggal 24 November 2022, tentang Penetapan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dengan dasar perhitungan Laporan Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Buku 2021 Nomor : PE.01.03/LEV-162/PW14/4/2022 tanggal 31 Mei 2022 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/10432/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp712.071.164,00.

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta merupakan bantuan subsidi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan bidang transportasi darat kepada pengemudi angkutan umum dan bidang transportasi sungai yang ada di Kecamatan Sintang berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Surat Penetapan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 551.2/798/Dishub-B/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan pencairan SP2D Nomor : 02.19/04.0/09725/LS/2.15.5.04.2.13.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp41.400.000,00.				
<b>4.1.2.1.4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>35.821.552.000,00</b>	<b>34.080.803.392,00</b>	<b>95,14</b>	<b>64.288.633.554,00</b>
	Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	1.645.956.500,00
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.089.918.000,00	33.349.169.392,00	95,04	61.911.043.054,00
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	731.634.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.821.552.000,00</b>	<b>34.080.803.392,00</b>	<b>95,14</b>	<b>64.288.633.554,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 95,14% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp30.207.830.162,00 atau 46,99%.

<b>1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.645.956.500,00</b>
Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2022 terdiri dari :				
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	275.000.000,00
- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	1.370.956.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.645.956.500,00</b>

Tidak ada realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2022.

<b>2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>35.089.918.000,00</b>	<b>33.349.169.392,00</b>	<b>95,04</b>	<b>61.911.043.054,00</b>
Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 terdiri dari :				
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.754.920.000,00	3.748.546.567,00	99,83	9.328.655.700,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan	28.964.448.000,00	27.323.072.825,00	93,28	48.677.788.063,00



Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.370.550.000,00	2.277.550.000,00	96,08	3.904.599.291,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.089.918.000,00</b>	<b>33.349.169.392,00</b>	<b>95,04</b>	<b>61.911.043.054,00</b>

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 terdiri dari :

-	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00	100,00	4.045.250.000,00
-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.189.920.000,00	2.183.546.567,00	99,71	5.283.405.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.754.920.000,00</b>	<b>3.748.546.567,00</b>	<b>99,83</b>	<b>9.328.655.700,00</b>

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Sekretariat Daerah	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00	100,00	
---	--------------------	------------------	------------------	--------	--

Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diberikan kepada Lembaga Anti Narkotika, Karang Taruna Desa Senangan Jaya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sintang, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang, serta Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Dinas Kesehatan	530.000.000,00	528.495.500,00	99,72	
---	-----------------	----------------	----------------	-------	--

Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk keperluan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial dan Karoseri Ambulance Yayasan Gotong Royong (YGR) Sepauk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/61/ASET-DINKES/2022 tanggal 28 Desember 2022.



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.409.920.000,00	1.405.614.000,00	99,69	
	Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk pembangunan Rumah Adat Melayu, pembangunan Gedung Griya GKII Wilayah II Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, pembangunan Rumah Adat Dayak Linoh Pudau Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian, rehabilitasi Rumah Betang Sebetung Paluk Kecamatan Ketungau Hulu, lanjutan pembangunan Rumah Betang Menamar Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir, pembangunan Rumah Adat Dayak Betang Desa Sungai Jaung Dusun Tanah Kaya Kecamatan Sepauk, rehabilitasi Betang Dusun Sungai Puang Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah, pembangunan Pagar Makam Muslim RT 4 RW 2 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang, pembangunan Gedung Pentas Seni Dusun Tanah Kaya Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, serta pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an Khoirul Umah Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian.				
-	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	149.487.067,00	99,66	
	Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk pembangunan Pagar Makam Muslim RT 4 RW 2 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang dan pembangunan Makam Muslim Al-Hijrah Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 604/1305/KEP-DLH/2022 tentang Penetapan Penerima, Jenis Barang, dan Nilai Belanja Barang yang Dihilahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022.				
-	Dinas Perhubungan	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	
	Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk pengadaan Speed Boat 40 PK yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Ruhan Bersemi di Desa Nanga Ruhan Kecamatan Serawai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 550/27/KEP-DISHUB/2022 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sintang sebagai Penerima Hibah Moda Transportasi Perairan Tahun 2022 tanggal 1 November 2022.				
	Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2022 terdiri dari :				
-	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.292.799.000,00	24.684.205.000,00	93,88	24.525.318.900,00
-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.671.649.000,00	2.332.435.825,00	87,30	24.152.469.163,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.964.448.000,00</b>	<b>27.016.640.825,00</b>	<b>93,28</b>	<b>48.677.788.063,00</b>

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan	5.513.000.000,00	5.242.406.000,00	95,09
---	----------------------	------------------	------------------	-------



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Kebudayaan</b>				
	Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 900/129/Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Oktober 2022.				
	Berupa bantuan uang pada bidang pendidikan kepada 7 PAUD dan Taman Kanak-Kanak, pengadaan sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar dan bantuan operasional untuk MTs. Serta bantuan bidang kebudayaan pada 16 Sanggar, Komunitas dan Paguyuban serta Lembaga Swadaya Masyarakat.				
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.440.000.000,00	5.340.000.000,00	98,16	
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1187/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1106/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Oktober 2022.				
	Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Sekretariat Pengurus Organisasi Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) cabang Sintang, Nano Futsal Academy (NAFUSA), Karang Taruna Pemuda Merdeka, Club Basket Panca Setya Sintang, King Rattle Club cabang Sintang, Sintang Hard Enduro Community (SHERCO), Club Basket UNKA, Karang Taruna Mutiara Jaya, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sintang, Majelis Pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sintang, Ikatan Pemuda Dayak Desa Wilayah Kayan (IPDDWK), dan Kwatir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang.				
	- Sekretariat Daerah	15.339.799.000,00	14.101.799.000,00	91,93	
	Merupakan Belanja Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non profesional, dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022.				
	Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000,00	349.619.000,00	99,89	
	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 900/129/Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Oktober 2022.				
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk rehabilitasi Gedung 1 Paket SMP Swasta Karya Bhakti Tontang Serawai Desa Tontang Kecamatan Serawai, pembangunan MCK/WC Sekolah 1 Paket pada TK Taman Karya Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah, dan penambahan Ruang Kelas Baru 1 Paket MIS Sultan Nata Kecamatan Sintang.				
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	57.456.000,00	57.456.000,00	100,00	
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1205/KEP-DKPP/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok				





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Oktober 2022 berupa pengadaan speed body dan alat tangkap ikan kepada KUB Nelayan Tanjung Puri. Serta Belanja Hibah Barang berupa pengadaan bibit tanaman hortikultura dan sarana produksi lainnya pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.				
	- Dinas Lingkungan Hidup	2.264.193.000,00	1.925.360.825,00	85,04	
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk pengadaan bibit tanaman MPTS KTH pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (DBHDR) serta kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (DBHDR).				
	Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2022 terdiri dari:				
	- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.620.550.000,00	1.527.550.000,00	94,26	1.842.477.000,00
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	2.062.122.291,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.370.550.000,00</b>	<b>2.277.550.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>3.904.599.291,00</b>

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

- Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.485.550.000,00	1.467.550.000,00	98,79
----------------------------------	------------------	------------------	-------

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 520/1001/KEP-DPP/2022 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Agustus 2022 berupa sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik dan pupuk kompos dan magang/pelatihan pembuatan pupuk organik dan pupuk kompos serta pembangunan perkebunan rakyat (sawit, karet dan kopi).

- Sekretariat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
----------------------	---------------	---------------	--------

Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Komunitas Baca Perpustakaan Apung di Batas Negeri.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
------------------------------	----------------	----------------	--------

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/741/KEP-BPKAD/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1275/KEP-BPKAD/2021 tentang Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>3.</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>731.634.000,00</b>	<b>731.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>731.634.000,00</b>
	Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 213/668/KEP-KESBANGPOL-D/2022 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 TA 2022. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian realisasi sebagai berikut :				
	- Parta Nasional Demokrat	120.783.000,00	120.783.000,00	100,00	120.783.000,00
	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	113.643.000,00	113.643.000,00	100,00	113.643.000,00
	- Partai Hati Nurani Rakyat	81.585.000,00	81.585.000,00	100,00	81.585.000,00
	- Partai Gerakan Indonesia Raya	76.116.000,00	76.116.000,00	100,00	76.116.000,00
	- Partai Golongan Karya	69.213.000,00	69.213.000,00	100,00	69.213.000,00
	- Partai Kebangkitan Bangsa	62.079.000,00	62.079.000,00	100,00	62.079.000,00
	- Partai Demokrat	59.901.000,00	59.901.000,00	100,00	59.901.000,00
	- Partai Amanat Nasional	53.883.000,00	53.883.000,00	100,00	53.883.000,00
	- Partai Persatuan Indonesia	45.150.000,00	45.150.000,00	100,00	45.150.000,00
	- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	36.138.000,00	36.138.000,00	100,00	36.138.000,00
	- Partai Persatuan Pembangunan	13.143.000,00	13.143.000,00	100,00	13.143.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>731.634.000,00</b>	<b>731.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>731.634.000,00</b>
<b>4.1.2.1.5</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2.854.000.000,00</b>	<b>2.756.050.000,00</b>	<b>96,57</b>	<b>980.000.000,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial diberikan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat diupayakan untuk dilakukan secara selektif dan tidak terus menerus atau berulang setiap tahun pada organisasi yang sama. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebagai berikut :				
	- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.020.000.000,00	936.000.000,00	91,76	0,00
	- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	450.000.000,00	436.050.000,00	96,90	0,00
	- Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.384.000.000,00	1.384.000.000,00	100,00	980.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.854.000.000,00</b>	<b>2.756.050.000,00</b>	<b>96,57</b>	<b>980.000.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 96,57% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp1.776.050.000,00 atau 181,23%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2022 sebagai berikut :

- Dinas Sosial	900.000.000,00	820.200.000,00	91,13
----------------	----------------	----------------	-------

Merupakan bantuan sosial tunai dan biaya administrasi wesel pos untuk penyaluran BST BBM pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- Dinas Perindustrian,	120.000.000,00	115.800.000,00	96,50
------------------------	----------------	----------------	-------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Perdagangan, Koperasi dan UKM				
	Merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dalam rangka penanggulangan inflasi (DAU-DTU 2%).				
	Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2022 sebagai berikut :				
	- Dinas Sosial	450.000.000,00	436.050.000,00	96,90	
	Merupakan bantuan sosial tunai dan biaya administrasi wesel pos untuk penyaluran BST BBM pada kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.				
	Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2022 sebagai berikut :				
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.214.000.000,00	1.214.000.000,00	100,00	
	Merupakan bantuan sosial berupa uang kepada kelompok masyarakat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal serta pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.				
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	
	Merupakan bantuan sosial berupa uang kepada 12 KUB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 530/1257/KEP-INDAGKOP/2022 tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil Menengah Penerima Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah TA 2022 tanggal 17 November 2022.				
<b>4.1.2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>204.497.711.888,00</b>	<b>189.346.459.659,00</b>	<b>92,59</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
	Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, pengadaan Peralatan dan Mesin, pengadaan Gedung dan Bangunan, pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, pengadaan Aset Tetap Lainnya serta pengadaan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari :				
	- Belanja Tanah	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	3.114.842.800,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
	- Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00
	<b>Jumlah</b>	<b>204.497.711.888,00</b>	<b>189.346.459.659,00</b>	<b>92,59</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal terealisasi sebesar 92,59% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp83.804.204.628,00 atau 30,68%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.310.847.912,00	43.849.836.491,00	96,78	52.744.187.421,00
	- Dinas Kesehatan	36.643.279.989,00	32.139.934.126,00	87,71	88.368.842.427,00
	- Dinas Pekerjaan Umum	54.439.506.865,00	49.239.858.122,00	90,45	74.187.467.762,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47.709.487.550,00	45.199.701.660,00	94,74	32.827.589.500,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.189.547.474,00	1.028.604.000,00	86,47	54.730.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Satuan Polisi Pamong Praja	1.659.701.000,00	1.631.456.600,00	98,30	428.925.000,00
-	Dinas Sosial	228.701.150,00	225.676.000,00	98,68	44.490.000,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	205.225.000,00	185.990.000,00	90,63	0,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	455.998.000,00	422.213.500,00	92,59	1.256.156.000,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	50.940.000,00	47.460.000,00	93,17	625.000,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.599.497.500,00	783.644.700,00	48,99	3.334.969.500,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.452.024.600,00	1.199.060.350,00	82,58	2.735.431.500,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	284.731.840,00	284.235.900,00	99,83	53.700.000,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	322.546.000,00	305.807.000,00	94,81	106.785.000,00
-	Dinas Perhubungan	1.047.150.980,00	1.028.650.265,00	98,23	1.138.980.000,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	532.456.000,00	529.776.000,00	99,50	114.302.500,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.029.000,00	118.029.000,00	100,00	67.815.000,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	131.790.000,00	149.292.000,00	113,28	55.081.000,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	114.575.000,00	113.517.500,00	99,08	223.425.808,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.430.500,00	198.871.500,00	99,22	137.846.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	692.738.750,00	691.268.200,00	99,79	3.522.557.000,00
-	Sekretariat Daerah	2.133.740.040,00	2.075.417.930,00	97,27	538.513.819,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.526.391.008,00	1.493.507.380,00	97,85	912.123.900,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	283.569.258,00	275.902.950,00	97,30	54.350.000,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	831.030.393,00	828.823.500,00	99,73	54.462.500,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	157.649.000,00	157.561.000,00	99,94	121.325.000,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.720.000,00	125.500.000,00	99,83	321.490.300,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	76.198.500,00	75.924.000,00	99,64	0,00
-	Inspektorat	328.081.250,00	327.757.500,00	99,90	36.265.000,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	3.601.247.560,00	3.578.976.636,00	99,38	9.460.589.850,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	142.702.770,00	141.290.850,00	99,01	14.190.000,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	78.837.500,00	76.687.500,00	97,27	0,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	59.415.000,00	58.975.000,00	99,26	8.650.000,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Kantor Kecamatan Tempunak	42.570.000,00	42.190.000,00	99,11	11.650.000,00
	- Kantor Kecamatan Dedai	9.460.000,00	9.460.000,00	100,00	0,00
	- Kantor Kecamatan Sepauk	148.700.000,00	148.700.000,00	100,00	0,00
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	102.410.000,00
	- Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	39.173.749,00	39.173.749,00	100,00	27.407.500,00
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	10.230.000,00
	- Kantor Kecamatan Kayan Hilir	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00	0,00
	- Kantor Kecamatan Kayan Hulu	204.938.250,00	202.236.250,00	98,68	34.200.000,00
	- Kantor Kecamatan Serawai	148.622.500,00	148.262.500,00	99,76	22.400.000,00
	- Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	86.460.000,00	83.230.000,00	96,26	0,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	16.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>204.497.711.888,00</b>	<b>189.346.459.659,00</b>	<b>92,59</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
<b>4.1.2.2.1</b>	<b>Belanja Tanah</b>	<b>1.576.000.000,00</b>	<b>760.147.200,00</b>	<b>48,23</b>	<b>3.114.842.800,00</b>
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Tanah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Tanah Persil	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	0,00
	- Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	-	3.114.842.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.576.000.000,00</b>	<b>760.147.200,00</b>	<b>48,23</b>	<b>3.114.842.800,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tanah terealisasi sebesar 48,23% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp2.354.695.600,00 atau 75,60% . Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah Persil berupa pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang dianggarkan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp760.147.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hulu sebesar Rp360.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04013/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.03/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
  - b. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp39.710.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08941/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
  - c. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp15.457.500,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08944/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
  - d. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp5.848.200,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08943/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
  - e. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp39.640.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08942/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
  - f. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp46.280.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08940/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
  - g. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk instalasi pengelolaan air (IPA) PDAM Unit Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir sebesar Rp126.800.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09263/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.06/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
  - h. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp64.180.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09261/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.06/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
  - i. Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp62.231.500,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09262/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.06/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
2. Tidak ada realisasi Belanja Modal Lapangan TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.2.2.2	<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>44.035.909.183,00</b>	<b>40.565.232.108,00</b>	<b>92,12</b>	<b>72.458.838.616,00</b>
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Alat Besar	106.840.474,00	21.473.000,00	20,10	168.440.000,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan	7.362.767.208,00	7.212.306.253,00	97,96	1.879.558.919,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.600.000,00	0,00	-	69.100.000,00
	- Belanja Modal Alat Pertanian	57.647.500,00	57.647.500,00	100,00	65.702.500,00
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.573.589.223,00	5.394.342.876,00	96,78	3.375.474.314,00
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	234.601.200,00	221.467.350,00	94,40	357.520.815,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.613.016.750,00	3.418.967.835,00	94,63	37.044.488.428,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium	3.305.281.500,00	3.276.669.560,00	99,13	6.680.337.727,00
	- Belanja Modal Komputer	6.185.073.360,00	5.989.923.671,00	96,84	2.493.997.828,00
	- Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	750.000.000,00	748.245.000,00	99,77	2.419.172.550,00
	- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	135.025.000,00	134.650.000,00	99,72	154.002.500,00
	- Belanja Modal Rambu-Rambu	23.000.000,00	19.600.000,00	85,22	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.280.000,00	5.170.000,00	97,92	0,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.703.126.511,00	7.114.295.425,00	92,36	15.200.444.808,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.979.060.457,00	6.950.473.638,00	77,41	2.550.598.227,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.035.909.183,00</b>	<b>40.565.232.108,00</b>	<b>92,12</b>	<b>72.458.838.616,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 92,12% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp31.893.606.508,00 atau 44,02%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.745.005.546,00	9.122.326.125,00	93,61	16.827.273.528,00
- Dinas Kesehatan	21.758.495.715,00	19.252.234.358,00	88,48	49.410.746.311,00
- Dinas Pekerjaan Umum	62.598.000,00	62.598.000,00	100,00	22.850.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.060.000,00	26.930.000,00	99,52	0,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	264.547.474,00	146.310.000,00	55,31	54.730.000,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	1.359.701.000,00	1.331.861.600,00	97,95	428.925.000,00
- Dinas Sosial	180.001.150,00	177.032.000,00	98,35	44.490.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	205.225.000,00	185.990.000,00	90,63	0,00
- Dinas Keluarga Berencana,	455.998.000,00	422.213.500,00	92,59	1.256.156.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	50.940.000,00	47.460.000,00	93,17	625.000,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	23.497.500,00	23.497.500,00	100,00	111.776.700,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	999.946.700,00	998.337.350,00	99,84	1.357.973.500,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	284.731.840,00	284.235.900,00	99,83	53.700.000,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	322.546.000,00	305.807.000,00	94,81	106.785.000,00
-	Dinas Perhubungan	722.150.980,00	705.306.265,00	97,67	28.517.500,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	532.456.000,00	529.776.000,00	99,50	114.302.500,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.029.000,00	118.029.000,00	100,00	67.815.000,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	131.790.000,00	149.292.000,00	113,28	14.300.000,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	114.575.000,00	113.517.500,00	99,08	223.425.808,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.430.500,00	198.871.500,00	99,22	137.846.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.943.000,00	3.943.000,00	100,00	0,00
-	Sekretariat Daerah	1.913.740.040,00	1.857.186.795,00	97,04	538.513.819,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.484.371.008,00	1.451.487.380,00	97,78	762.573.900,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	263.569.258,00	255.902.950,00	97,09	54.350.000,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	831.030.393,00	828.823.500,00	99,73	54.462.500,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	148.769.000,00	148.681.000,00	99,94	99.325.000,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	100.795.000,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	76.198.500,00	75.924.000,00	99,64	0,00
-	Inspektorat	153.081.250,00	152.777.500,00	99,80	36.265.000,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	508.601.560,00	506.674.536,00	99,62	302.678.050,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	142.702.770,00	141.290.850,00	99,01	14.190.000,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	72.837.500,00	70.687.500,00	97,05	0,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	59.415.000,00	58.975.000,00	99,26	8.650.000,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	42.570.000,00	42.190.000,00	99,11	11.650.000,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	9.460.000,00	9.460.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	148.700.000,00	148.700.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	102.410.000,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	39.173.749,00	39.173.749,00	100,00	27.407.500,00



Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	10.230.000,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	204.938.250,00	202.236.250,00	98,68	34.200.000,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	148.622.500,00	148.262.500,00	99,76	22.400.000,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	86.460.000,00	83.230.000,00	96,26	0,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	16.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.035.909.183,00</b>	<b>40.565.232.108,00</b>	<b>92,12</b>	<b>72.458.838.616,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp146.967.000,00 atau 87,25% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Alat Besar TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Alat Bantu dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	-	167.010.000,00
-	Belanja Modal Pompa	106.840.474,00	21.473.000,00	20,10	1.430.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>106.840.474,00</b>	<b>21.473.000,00</b>	<b>20,10</b>	<b>168.440.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.332.747.334,00 atau 283,72% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Angkutan TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.089.507.208,00	6.950.529.253,00	98,04	1.633.158.919,00
-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	93.080.000,00	92.550.000,00	99,43	0,00
-	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	180.180.000,00	169.227.000,00	93,92	246.400.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.362.767.208,00</b>	<b>7.212.306.253,00</b>	<b>97,96</b>	<b>1.879.558.919,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	-	62.450.000,00
-	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	-	3.000.000,00
-	Belanja Modal Alat Ukur	1.600.000,00	0,00	-	3.650.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>69.100.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.055.000,00 atau 12,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Pertanian TA 2022 sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran berupa Pengadaan Alat Spraycan dari dana DAKF.
2. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau 100,00%.
3. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan terealisasi sebesar Rp6.420.000,00 atau 100,00% berupa Alat Pengolahan Lainnya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
4. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Kecamatan Kelam Permai sebesar Rp4.427.500,00 atau 100,00%.





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.018.868.562,00 atau 59,81% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022 sebagai berikut :				
	- Belanja Modal Alat Kantor	695.270.043,00	683.706.622,00	98,34	439.592.800,00
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.249.216.180,00	4.145.084.240,00	97,55	2.907.391.514,00
	- Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	629.103.000,00	565.552.014,00	89,90	28.490.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.573.589.223,00</b>	<b>5.394.342.876,00</b>	<b>96,78</b>	<b>3.375.474.314,00</b>
	Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp136.053.465,00 atau 38,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022 sebagai berikut :				
	- Belanja Modal Alat Studio	139.533.700,00	135.196.350,00	96,89	174.093.815,00
	- Belanja Modal Alat Komunikasi	86.467.500,00	77.671.000,00	89,83	183.427.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Pemancar	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>234.601.200,00</b>	<b>221.467.350,00</b>	<b>94,40</b>	<b>357.520.815,00</b>
	Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp33.625.520.593,00 atau 90,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2022 sebagai berikut :				
	- Belanja Modal Alat Kedokteran	3.215.410.350,00	3.038.235.298,00	94,49	33.756.740.686,00
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	397.606.400,00	380.732.537,00	95,76	3.287.747.742,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.613.016.750,00</b>	<b>3.418.967.835,00</b>	<b>94,63</b>	<b>37.044.488.428,00</b>
	Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.403.668.167,00 atau 50,95% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Laboratorium TA 2022 sebagai berikut :				
	- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.000.000.000,00	2.999.595.560,00	99,99	6.671.660.727,00
	- Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	268.207.500,00	240.000.000,00	89,48	8.677.000,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	37.074.000,00	37.074.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.305.281.500,00</b>	<b>3.276.669.560,00</b>	<b>99,13</b>	<b>6.680.337.727,00</b>
	Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 140,17% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Komputer TA 2022 sebagai berikut :				
	- Belanja Modal Komputer Unit	5.050.096.752,00	4.887.139.675,00	96,77	2.059.189.578,00
	- Belanja Modal Peralatan Komputer	1.134.976.608,00	1.102.783.996,00	97,16	434.808.250,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.185.073.360,00</b>	<b>5.989.923.671,00</b>	<b>96,84</b>	<b>2.493.997.828,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 69,07% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Pengolahan dan Pemurnian dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak	0,00	0,00	-	7.245.550,00
-	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	750.000.000,00	748.245.000,00	99,77	2.411.927.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>748.245.000,00</b>	<b>99,77</b>	<b>2.419.172.550,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12,57% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Keselamatan Kerja TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Pelindung	113.025.000,00	112.650.000,00	99,67	74.002.500,00
-	Belanja Modal Alat SAR	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	80.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>135.025.000,00</b>	<b>134.650.000,00</b>	<b>99,72</b>	<b>154.002.500,00</b>

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pada Dinas Perhubungan berupa Rambu Bersuar (Warning Light).

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar 100,00% dan Kecamatan Ambalau terealisasi sebesar 100,00%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.086.149.383,00 atau 53,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Peralatan dan Mesin BOS TA 2022 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nomor Bukti 10/BOSKIN/TA2022 Belanja BOS Kinerja Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp32.280.000,00.
2. Berdasarkan Nomor Bukti 12/BOSREG/2022 Belanja BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp4.958.994.192,00.
3. Berdasarkan Nomor Bukti 14/BOSKINSMT1/2022 Belanja BOS Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp139.681.000,00.
4. Berdasarkan Nomor Bukti 17/BOSREG/SMT2/2022 Belanja BOS Reguler SMP Semester II tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.949.985.792,00.
5. Koreksi kurang catat Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.354.441,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.399.875.411,00 atau 172,50% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022 sebagai berikut :

-	RSUD Ade M. Djoen	5.264.550.000,00	4.237.250.105,00	80,49	620.978.997,00
-	Puskesmas Serawai	200.000.000,00	189.706.000,00	94,85	81.100.000,00
-	Puskesmas Kemangai	500.000.000,00	345.601.307,00	69,12	249.913.194,00
-	Puskesmas Nanga Tebidah	100.000.000,00	97.265.435,00	97,27	97.200.000,00
-	Puskesmas Sepauk	272.640.676,00	143.429.550,00	52,61	249.101.000,00
-	Puskesmas Tempunak	95.000.000,00	67.924.994,00	71,50	36.090.000,00
-	Puskesmas Jelimpau	70.000.000,00	34.800.000,00	49,71	19.000.000,00
-	Puskesmas Pandan	400.000.000,00	391.181.500,00	97,80	27.010.000,00
-	Puskesmas Sungai Durian	77.350.000,00	75.810.000,00	98,01	148.177.000,00
-	Puskesmas Tanjung Puri	459.915.000,00	358.314.080,00	77,91	102.963.250,00
-	Puskesmas Dara Juanti	150.000.000,00	126.531.963,00	84,35	72.000.000,00
-	Puskesmas Dedai	121.033.486,00	41.139.000,00	33,99	193.504.286,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Puskesmas Emparu	93.841.161,00	59.882.000,00	63,81	79.479.000,00
	- Puskesmas Nanga Mau	166.708.957,00	0,00	-	144.892.000,00
	- Puskesmas Kebong	240.000.000,00	221.910.000,00	92,46	64.774.500,00
	- Puskesmas Nanga Lebang	50.000.000,00	14.500.000,00	29,00	50.270.000,00
	- Puskesmas Mensiku	150.000.000,00	70.840.000,00	47,23	63.620.000,00
	- Puskesmas Nanga Ketungau	129.651.177,00	103.490.000,00	79,82	55.150.000,00
	- Puskesmas Serangas	172.500.000,00	171.848.669,00	99,62	59.800.000,00
	- Puskesmas Senaning	93.870.000,00	46.250.000,00	49,27	31.180.000,00
	- Puskesmas Merakai	172.000.000,00	152.799.035,00	88,84	104.395.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.979.060.457,00</b>	<b>6.950.473.638,00</b>	<b>77,41</b>	<b>2.550.598.227,00</b>
<b>4.1.2.2.3</b>	<b>Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>44.605.282.924,00</b>	<b>39.754.346.725,00</b>	<b>89,12</b>	<b>66.687.416.666,00</b>
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Bangunan Gedung	38.428.361.150,00	34.351.701.125,00	89,39	64.826.010.166,00
	- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.942.498.000,00	1.938.324.900,00	99,79	922.834.000,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.234.423.774,00	3.464.320.700,00	81,81	938.572.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.605.282.924,00</b>	<b>39.754.346.725,00</b>	<b>89,12</b>	<b>66.687.416.666,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 89,12% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp26.933.069.941,00 atau 40,39%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.179.412.100,00	25.367.803.100,00	96,90	25.814.374.750,00
	- Dinas Kesehatan	12.369.624.774,00	10.425.691.740,00	84,28	33.799.531.116,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.624.000.000,00	2.550.474.100,00	55,16	934.055.000,00
	- Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000,00	89.795.000,00	99,77	0,00
	- Dinas Sosial	48.700.000,00	48.644.000,00	99,89	0,00
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	-	108.350.000,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	61.000.000,00	60.723.000,00	99,55	0,00
	- Dinas Perhubungan	0,00	0,00	-	173.348.300,00
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	-	26.981.000,00
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	331.042.150,00	330.242.600,00	99,76	3.522.557.000,00
	- Sekretariat Daerah	50.000.000,00	49.951.185,00	99,90	0,00
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	-	149.550.000,00
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	71.720.000,00	71.500.000,00	99,69	220.695.300,00
-	Inspektorat	175.000.000,00	174.980.000,00	99,99	0,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	584.783.900,00	564.542.000,00	96,54	1.937.974.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.605.282.924,00</b>	<b>39.754.346.725,00</b>	<b>89,12</b>	<b>66.687.416.666,00</b>
Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp30.474.309.041,00 atau 47,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Bangunan Gedung TA 2022 sebagai berikut :					
-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.582.756.450,00	31.158.404.425,00	90,10	56.690.262.017,00
-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.845.604.700,00	3.193.296.700,00	83,04	8.135.748.149,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.428.361.150,00</b>	<b>34.351.701.125,00</b>	<b>89,39</b>	<b>64.826.010.166,00</b>
Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.015.490.900,00 atau 110,04% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Tugu/Tanda Batas dengan rincian sebagai berikut :					
-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	-	113.200.000,00
-	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Modal Pagar	1.935.698.000,00	1.931.524.900,00	99,78	690.815.000,00
-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	-	118.819.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.942.498.000,00</b>	<b>1.938.324.900,00</b>	<b>99,79</b>	<b>922.834.000,00</b>
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 269,11% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD TA 2022 sebagai berikut :					
-	RSUD Ade M.Djoen	2.821.000.000,00	2.626.387.200,00	93,10	0,00
-	Puskesmas Serawai	250.000.000,00	0,00	-	0,00
-	Puskesmas Kemangai	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
-	Puskesmas Sepauk	150.000.000,00	149.883.500,00	99,92	596.769.500,00
-	Puskesmas Sungai Durian	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
-	Puskesmas Nanga Mau	464.923.774,00	403.550.000,00	86,80	261.906.000,00
-	Puskesmas Senaning	45.000.000,00	34.600.000,00	76,89	79.897.000,00
-	Puskesmas Merakai	253.500.000,00	0,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.234.423.774,00</b>	<b>3.464.320.700,00</b>	<b>81,81</b>	<b>938.572.500,00</b>
<b>4.1.2.2.4</b>	<b>Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>105.274.673.915,00</b>	<b>99.293.037.810,00</b>	<b>94,32</b>	<b>121.390.855.062,00</b>
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:					
-	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	81.692.292.515,00	76.205.870.682,00	93,28	104.336.464.362,00
-	Belanja Modal Bangunan Air	20.505.380.900,00	20.058.471.390,00	97,82	13.285.780.700,00
-	Belanja Modal Instalasi	2.098.595.000,00	2.094.312.450,00	99,80	3.712.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Modal Jaringan	438.405.500,00	435.699.288,00	99,38	35.800.000,00
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	540.000.000,00	498.684.000,00	92,35	19.850.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>105.274.673.915,00</b>	<b>99.293.037.810,00</b>	<b>94,32</b>	<b>121.390.855.062,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar 94,32% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp22.097.817.252,00 atau 18,20%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	503.704.400,00	503.561.400,00	99,97	792.298.000,00
-	Dinas Kesehatan	2.509.609.500,00	2.462.008.028,00	98,10	4.970.095.000,00
-	Dinas Pekerjaan Umum	54.376.908.865,00	49.177.260.122,00	90,44	74.164.617.762,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.058.427.550,00	42.622.297.560,00	98,99	31.893.534.500,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	925.000.000,00	882.294.000,00	95,38	0,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	210.000.000,00	209.800.000,00	99,90	0,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	391.077.900,00	140.000.000,00	35,80	1.377.458.000,00
-	Dinas Perhubungan	325.000.000,00	323.344.000,00	99,49	937.114.200,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	-	13.800.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	357.753.600,00	357.082.600,00	99,81	0,00
-	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	98.300.000,00	98,30	0,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	22.000.000,00
-	Kecamatan Sintang	2.502.312.100,00	2.502.210.100,00	100,00	7.219.937.600,00
-	Kecamatan Kelam Permai	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>105.274.673.915,00</b>	<b>99.293.037.810,00</b>	<b>94,32</b>	<b>121.390.855.062,00</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 26,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Jalan dan Jembatan TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Jalan	67.643.836.957,00	63.109.070.192,00	93,30	93.028.367.802,00
-	Belanja Modal Jembatan	14.048.455.558,00	13.096.800.490,00	93,23	11.308.096.560,00
	<b>Jumlah</b>	<b>81.692.292.515,00</b>	<b>76.205.870.682,00</b>	<b>93,28</b>	<b>104.336.464.362,00</b>

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 50,98% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Bangunan Air TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.154.419.000,00	10.148.666.090,00	99,94	3.432.488.700,00
-	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.420.502.500,00	1.415.333.500,00	99,64	168.539.000,00
-	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	391.077.900,00	140.000.000,00	35,80	1.187.588.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.239.704.400,00	1.238.151.400,00	97,87	2.919.949.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.299.677.100,00	7.116.320.400,00	97,49	5.577.216.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.505.380.900,00</b>	<b>20.058.471.390,00</b>	<b>97,82</b>	<b>13.285.780.700,00</b>
Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 43,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Instalasi TA 2022 sebagai berikut :					
	- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	-	75.800.000,00
	- Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	-	638.700.000,00
	- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	1.604.760.000,00
	- Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	950.000.000,00	946.312.190,00	99,61	1.393.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.098.595.000,00</b>	<b>2.094.312.450,00</b>	<b>99,80</b>	<b>3.712.960.000,00</b>
Belanja Modal Jaringan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp399.899.288,00 atau 1.117,04% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Jaringan TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Jaringan Distribusi dan Jaringan Listrik Lainnya dengan rincian sebagai berikut :					
1. Pengadaan Jaringan Distribusi untuk pemasangan jaringan listrik Puskesmas Sekubang dan Puskesmas Jelimpau pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp105.484.288,00 atau 99,95% dari anggaran.					
2. Pengadaan Jaringan Distribusi untuk keperluan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.					
3. Pengadaan Jaringan Distribusi untuk pemasangan jaringan listrik Pasar Terminal Tanjung Puri dan Pasar Seni Galeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp20.535.000,00 atau 100,00% dari anggaran.					
4. Pengadaan Jaringan Distribusi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp8.880.000,00 atau 100,00% dari anggaran.					
5. Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya untuk pemasangan stabilizer LABKESDA pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp172.500.000,00 atau 99,45% dari anggaran.					
6. Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya untuk pemasangan jaringan lampu PJU Dusun Tanah Putih Desa Sepulut Kecamatan Sepauk pada Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp98.300.000,00 atau 98,30% dari anggaran.					
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.412,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2022 sebagai berikut :					
	- RSUD Ade M.Djoen	280.000.000,00	279.438.000,00	99,80	0,00
	- Puskesmas Sepauk	0,00	0,00	-	19.850.000,00
	- Puskesmas Tanjung Puri	220.000.000,00	219.246.000,00	99,66	0,00
	- Puskesmas Merakai	40.000.000,00	0,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>498.684.000,00</b>	<b>92,35</b>	<b>19.850.000,00</b>
<b>4.1.2.2.5</b>	<b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<b>9.005.845.866,00</b>	<b>8.973.695.816,00</b>	<b>99,64</b>	<b>9.498.711.143,00</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Bahan Perpustakaan	125.220.000,00	117.549.950,00	93,87	144.156.889,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.880.625.866,00	8.856.145.866,00	99,72	9.166.084.254,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	-	188.470.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.005.845.866,00</b>	<b>8.973.695.816,00</b>	<b>99,64</b>	<b>9.498.711.143,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 99,64% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp525.015.327,00 atau 5,53%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.882.725.866,00	8.856.145.866,00	99,70	9.310.241.143,00
-	Dinas Kesehatan	5.550.000,00	0,00	-	0,00
-	RSUD Ade M. Djoen	0,00	0,00	-	188.470.000,00
-	Sekretariat Daerah	70.000.000,00	69.979.950,00	99,97	0,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.020.000,00	42.020.000,00	100,00	0,00
-	Kecamatan Sintang	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.005.845.866,00</b>	<b>8.973.695.816,00</b>	<b>99,64</b>	<b>9.498.711.143,00</b>

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.606.939,00 atau 18,46% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Bahan Perpustakaan TA 2022 terdiri atas realisasi pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak dan pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

Tidak ada realisasi pada pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2022 dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Modal Buku Umum	2.100.000,00	0,00	-	127.970.589,00
-	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	-	9.848.800,00
-	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	-	6.337.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>144.156.889,00</b>

Realisasi pada pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Audio Visual untuk pengadaan sound Pendopo dan sound Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang pada Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp69.979.950,00 atau 99,97% dari anggaran.
2. Pengadaan Audio Visual untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terealisasi sebesar Rp42.020.000,00 atau 100,00% dari anggaran.
3. Pengadaan Audio Visual untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kantor Lurah Mekar Jaya pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp5.550.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp309.938.388,00 atau 3,38% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS TA 2022 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nomor Bukti 10/BOSKIN/TA2022 Belanja BOS Kinerja Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp201.242.819,00.
2. Berdasarkan Nomor Bukti 12/BOSREG/2022 Belanja BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	sebesar Rp5.320.976.050,00.				
3.	Berdasarkan Nomor Bukti 14/BOSKINSMT1/2022 Belanja BOS Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp140.890.797,00.				
4.	Berdasarkan Nomor Bukti 17/BOSREG/SMT2/2022 Belanja BOS Reguler SMP Semester II tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp3.155.221.700,00.				
5.	Koreksi kurang catat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.814.500,00.				
	Tidak ada realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD TA 2022.				
	- Dinas Kesehatan	0,00	0,00	-	188.470.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>188.470.000,00</b>
<b>4.1.2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>4.466.464.950,00</b>	<b>1.800.779.284,00</b>	<b>40,32</b>	<b>2.345.211.737,92</b>
	Belanja Tak Terduga ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD dalam rangka atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, bantuan sosial kesehatan kepada masyarakat dan pengembalian atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 serta realisasi TA 2021.				
<b>4.1.2.3.1</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>4.466.464.950,00</b>	<b>1.800.779.284,00</b>	<b>40,32</b>	<b>2.345.211.737,92</b>
	Belanja Tak Terduga TA 2022 terealisasi sebesar 40,32% dari anggaran terdiri dari:				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sonitius Warga Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Mikhael Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Entingan Warga Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sylva Bagi Barwa Warga Desa Gandis Hulu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. A.M. Rian Bas Warga Desa Baras Nabun Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				3.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Kenedi Warga Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Kuyung, Warga Desa Wirayuda Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Harumi Aisya Hanania, Warga Griya Sengkuang Batara RT 011 RW 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. A. Edis Menalang Warga Dusun Mungguk Manding Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pembayaran Pengembalian Kelebihan Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalbar kepada Kabupaten Sintang dari Tahun 2013 – 2021.				1.205.284,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pembayaran Pengembalian Kelebihan Salur Bantuan Keuangan Provinsi Kalbar kepada Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar TA 2021.				600.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Anjela Latajua, Warga Dusun Telaga Menyurai Desa Padung Kumang Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Aleksius Warga Desa Nanga Masau Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Pelangka Warga Desa Nanga Masau Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Suriyanti Warga Dusun Dahtah Desa Nanga Kesange Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT BPBD Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04194/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII.				476.905.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ema Sulastri, Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				8.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Edap, Warga Dusun Tanjung Paoh Desa Sungai Emang Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Vetronela Erdawati Qyki, Warga Dusun Pekau Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Charitas Stela Rossa, Warga Jalan Kedabang RT 002 RW 001 Kelurahan Kedabang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk k keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk				5.000.000,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Randai Warga Desa Nanga Masau Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Apon, Warga Dusun Malaban Meriak Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Badut, Warga Dusun Temiang Layang Desa Tunas Harapan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Zaleha Warga D Jalan Bintara RT 004 RW 002 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Rendi Dwi Setiansyah, Warga Dusun Sukosari Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Nason, Warga Dusun Tapang Mada Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Jemat Warga Dusun Riguk Desa Riguk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sabariyah, Warga Jalan Pangeran Kuning RT 003 RW 008 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Sakun Warga Dusun Wonosari RT 002 RW 001 Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Pajar Rio Hiro, Warga Dusun Ekan Pajan RT 002 Desa Luting Mingan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/06775/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI.				204.351.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sunarto, Warga Desa Nanga Menantak Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				4.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk				500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Eva Ervina, Warga Jalan Akcaya II RT 010 RW 004 Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Susana Magdalena Ayang, Warga Desa Merimpit Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Aryandi Kory, Warga Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Lusiana, Warga Dusun Umin Iring Jaya RT 006 / RW 003 Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk k keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Suyoto, Warga Jalan Dharma Putra RT 026 / RW 001 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Alexandir Bilau, Warga Dusun Umin Mungguk Manding Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Vania Adelia, Warga Dusun Lalang 2 Desa Lalang Inggar Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Biata, Warga Dusun Sungai Binjuh Desa Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Revan Christianto, Warga Jalan Masuka Darat Gang Aneka II RT 012 / RW 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Salu, Warga Dusun Engkidau Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Arsila Nova, Warga Desa Senibung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Kupan, Warga Desa Tontang Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Susiana Leni, Warga Dusun Betung Desa Mungguk Lawang Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Andi, Warga Dusun Jengkarang Desa Jengkarang Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Nala Sofia, Warga Dusun Temiang RT 001 RW 001 Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Bayi Yulia Drini, Warga Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Joni Iskandar, Warga Jalan Mensiku Jaya RT 008 RW 002 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Dionisius Liang, Warga Dusun Kerapa Laut Desa Tanjung Keliling Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Untat, Warga Dusun Melibun Jaya Desa Buluk Jegara Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Clayton Azero, Warga Dusun Tanjung Sari Desa Pampang Dua Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Magdalena Mimita, Warga Dusun Sungai Labi RT 002 / RW 001 Desa Sungai Labi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Tutik Supriyani, Warga Jalan Bintara RT 004 RW 002 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Tertimpa Pohon Durian Kepada Masyarakat An. Antonius Adong, Warga Desa Linggam Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk				5.000.000,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Simpan, Warga Dusun Terusan I Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Kisil Hariyanto, Warga Jalan Mensiku Jaya RT 008 RW 002 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Nisimus, Warga Jalan Sengkuang RT 009 / RW 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Marius Anum, Warga Dusun Tertung Mau Desa Tertung Mau Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Prinda Anjeli, Warga Dusun Beganuk Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Sosial Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 SP2D Nomor 02.19/04.0/08602/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/MI/2022.				26.773.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Tri Wahyudi, Warga RT 004 RW 002 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Muhammad Hafizh Alfarizqi, Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Yopiter, Warga Dusun Sibau Manis Desa Air Nyuruk Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Joya Julaeha, Warga Desa Senangan Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Yohanes Jonio, Warga Dusun Merimpit Baru Desa Merimpit Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Deki				7.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Derpandi, Warga Dusun Mungguk Kubu Hulu Desa Kubu Berangan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Desti, Warga Dusun Teluk Mudin Desa Purut Beribit Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk k keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Udu, Warga Jalan Laksamana Dipa Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Dusandi, Warga Dusun Tapang Lemayung Desa Penjernang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Sosial Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09060/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII				52.545.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>1.800.779.284,00</b>

Berdasarkan rincian tersebut realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp544.432.453,92 atau 23,21%.

<b>4.1.3</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>473.767.923.111,00</b>	<b>473.510.079.549,00</b>	<b>99,95</b>	<b>474.753.555.657,00</b>
	Transfer merupakan pendapatan desa yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah yang ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2022 realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Transfer Bagi Hasil	10.342.901.835,00	10.342.901.835,00	100,00	6.168.586.580,00
	- Transfer Bantuan Keuangan	463.425.021.276,00	463.167.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
	<b>Jumlah</b>	<b>473.767.923.111,00</b>	<b>473.510.079.549,00</b>	<b>99,95</b>	<b>474.753.555.657,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Transfer terealisasi sebesar 99,95% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp1.243.476.108,00 atau 0,26%. Rincian Transfer dapat dilihat pada **Lampiran**.

<b>4.1.3.1</b>	<b>Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>	<b>10.342.901.835,00</b>	<b>10.342.901.835,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.168.586.580,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 serta realisasi TA 2021. Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.174.315.255,00 atau 67,67%.				
<b>4.1.3.1.01</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>9.732.200.000,00</b>	<b>9.732.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.722.989.894,00</b>
	Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 252 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 973/326/KEP-BEPPENDA/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa				



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	di Wilayah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Maret 2022. Bagi Hasil Pajak TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.009.210.106,00 atau 70,05%.				
<b>4.1.3.1.02</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	<b>610.701.835,00</b>	<b>610.701.835,00</b>	<b>100,00</b>	<b>445.596.686,00</b>
	Merupakan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya berupa bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa TA 2022. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp165.105.149,00 atau 37,05%.				
<b>4.1.3.2</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>463.425.021.276,00</b>	<b>463.167.177.714,00</b>	<b>99,94</b>	<b>468.584.969.077,00</b>
	Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 serta realisasi dan 2021 terdiri dari:				
	- Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	463.375.021.276,00	463.117.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
	<b>Jumlah</b>	<b>463.425.021.276,00</b>	<b>463.167.177.714,00</b>	<b>99,94</b>	<b>468.584.969.077,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 99,94% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp5.417.791.363,00 atau 1,16%. Besarnya penurunan tersebut dipengaruhi oleh program pemerintah pusat yang memberikan alokasi dana desa melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.				
<b>4.1.3.2.1</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kabupaten lainnya dalam rangka pemberian bantuan terdampak bencana alam. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/8479/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sintang Cianjur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam tanggal 28 November 2022. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Berdasarkan Pencairan SP2D Nomor : 02.19/04.0/10433/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.				
<b>4.1.3.2.2</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>463.375.021.276,00</b>	<b>463.117.177.714,00</b>	<b>99,94</b>	<b>468.584.969.077,00</b>
	Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor Peraturan Bupati Sintang Nomor 252 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan.				
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 anggaran sebesar Rp463.375.021.276,00, terealisasi sebesar Rp463.117.177.714,00 atau 99,94% dari anggaran, yang terdiri dari anggaran dan realisasi :				
	a. Alokasi Dana Desa	120.314.264.276,00	120.273.710.714,00	99,97	120.056.871.077,00
	b. Dana Desa (APBN)	343.060.757.000,00	342.843.467.000,00	99,94	348.528.098.000,00
	Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp5.467.791.363,00 atau 1,17%.				

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Transfer Pusat Dana Desa TA 2022 Nomor 900/231/III.A-BPKAD dan Nomor BA-29/KPN.1705/2023 tanggal 8 Maret 2023 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang pencairan transfer dana desa sebesar Rp342.843.467.000,00.

Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK..07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme penerimaan ke Kas Daerah maka Belanja Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) terealisasi sebesar 99,94%.				
<b>4.1.4</b>	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(181.255.168.111,00)</b>	<b>(22.469.288.250,73)</b>	<b>12,40</b>	<b>144.624.612.907,90</b>
	Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut.				
	- Pendapatan (1)	1.793.874.643.623,00	1.780.017.927.520,58	99,23	2.004.696.822.617,10
	- Belanja (2)	1.501.361.888.623,00	1.328.977.136.222,31	88,52	1.385.318.654.052,20
	- Transfer (3)	473.767.923.111,00	473.510.079.549,00	99,95	474.753.555.657,00
	<b>Surplus (Defisit) (4 = 1 – (2 + 3))</b>	<b>(181.255.168.111,00)</b>	<b>(22.469.288.250,73)</b>	<b>12,40</b>	<b>144.624.612.907,90</b>
	Tabel di atas menunjukkan Surplus (Defisit) terealisasi sebesar 12,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp167.093.901.158,63 atau 115,54%.				
<b>4.1.5</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>181.255.168.111,00</b>	<b>181.255.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penerimaan Pembiayaan	190.755.168.111,93	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	- Pengeluaran Pembiayaan	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>181.255.168.111,00</b>	<b>181.255.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
	Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp135.124.612.907,90 atau 292,92%.				
<b>4.1.5.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>190.755.168.111,00</b>	<b>190.755.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
	Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penggunaan SiLPA	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	<b>Jumlah</b>	<b>190.755.168.111,00</b>	<b>190.755.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
	Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp144.625.162.732,10 atau 313,51%.				
<b>4.1.5.1.1</b>	<b>Penggunaan SiLPA</b>	<b>190.755.168.111,00</b>	<b>190.755.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
	Penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp144.625.162.732,10 atau 313,51%. Dengan rincian sebagai berikut :				
	- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	-	37.112.008.822,32





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Penghematan Belanja	141.237.932.618,00	0,00	-	0,00
	- Sisa Belanja Transfer	701.542.700,0	549.824,20		0,00
	- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	141.219.441.618,97	-	0,00
	- Sisa Belanja Lainnya	49.517.235.493,00	49.535.726.492,96	100,04	9.018.546.381,71
	<b>Jumlah</b>	<b>190.755.168.111,00</b>	<b>190.755.717.936,13</b>	<b>100,00</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
<b>4.1.5.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan TA 2022 tidak ada realisasi Pengeluaran Pembiayaan.				
<b>4.1.5.2.1</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
	- Penyertaan Modal kepada PDAM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar berdasarkan Pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/00199/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dan Penyertaan Modal kepada PDAM berdasarkan Pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/00456/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.				
<b>4.1.6</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>190.755.168.111,93</b>
	Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) merupakan kelebihan atau kekurangan Surplus (Defisit) dibandingkan dengan Pembiayaan Neto. Anggaran dan realisasi SiLPA TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut.				
	- Surplus (Defisit) (1)	(181.255.168.111,00)	(22.469.288.250,73)	12,40	144.624.612.907,90
	- Penerimaan Pembiayaan (2)	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	- Pengeluaran Pembiayaan (3)	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	- Pembiayaan Neto (4 = 2 – 3)	181.255.168.111,00	181.255.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	- <b>SiLPA (1 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>-</b>	<b>190.755.168.111,93</b>

Tabel di atas menunjukkan rasio SiLPA TA 2022 dibandingkan dengan APBD TA 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp31.968.738.426,53 atau sebesar 16,76%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

#### 4.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.2.1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b> Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2022 sebesar Rp190.755.168.111,93 mengalami kenaikan sebesar Rp144.624.612.907,90 atau 313,51% dibandingkan dengan SAL Tahun 2021.	<b>190.755.168.111,93</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
4.2.2	<b>Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b> Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp190.755.717.936,13 mengalami kenaikan sebesar Rp144.625.162.732,10 atau 313,51% dibandingkan dengan Penggunaan SAL Tahun 2021.	<b>190.755.717.936,13</b>	<b>46.130.555.204,03</b>
4.2.3	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)</b> Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang pada TA 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp158.786.429.685,40 mengalami penurunan Rp31.968.738.426,53 atau sebesar 16,76% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari :	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>190.755.168.111,93</b>
	1. Saldo Kas di Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
	2. Saldo Kas di Kas BLUD	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98
	3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	16.416.564,00	35.822.368,00
	4. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	15.110.850,00	19.957.500,00
	5. Saldo Kas di Kas BOS	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
	6. Saldo Kas Dana JKN	63.926.200,00	18.491.000,00
	7. Kas Lainnya	0,00	0,00
4.2.4	<b>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b> Merupakan koreksi atas kesalahan pembukuan yang mengakibatkan perbedaan nilai Sisa Lebih Anggaran. Untuk TA 2022 terdapat koreksi kurang catat Kas BOP atas PAUD dan Kesetaraan yang berstatus negeri dan merupakan saldo tahun sebelumnya yang belum dicatat sebesar Rp549.824,20 yang terdiri dari SKB Sintang Rp158.734,43, TKN 1 sebesar Rp119.482,50 dan TKN 2 Sintang sebesar Rp271.607,27. Sedangkan untuk TA 2021 tidak terdapat koreksi.	<b>549.824,20</b>	<b>0,00</b>
4.2.5	<b>Lain-lain</b> Pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak terdapat mutasi pada akun lain-lain pada laporan perubahan saldo anggaran lebih.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.6	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b> Merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yaitu sebesar Rp158.786.429.685,40. Saldo Anggaran Lebih mengalami penurunan sebesar Rp31.968.738.426,53 atau sebesar 16,76% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021.	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>190.755.168.111,93</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### 4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1	<b>ASET</b>	<b>4.954.797.307.108,25</b>	<b>4.419.652.547.140,94</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut.		
	- Aset Lancar	220.427.195.651,02	294.014.410.564,11
	- Investasi Jangka Panjang	138.035.560.374,75	137.858.647.077,05
	- Aset Tetap	4.567.944.092.622,58	3.982.293.926.003,57
	- Aset Lainnya	28.390.458.459,90	5.485.563.496,21
	<b>Jumlah</b>	<b>4.954.797.307.108,25</b>	<b>4.419.652.547.140,94</b>

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 jumlah aset pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp535.144.759.967,31 atau sebesar 12,11%.

Penurunan pada Aset Lancar sebesar Rp73.587.214.913,09 atau 25,03%, disebabkan terdapat koreksi kurang catat dan lebih catat atas pembagian dividen PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021, pembagian *Collection Fee* PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Kenaikan terjadi pada Investasi jangka panjang sebesar Rp176.913.297,70 atau 0,13%, yang disebabkan oleh koreksi terhadap Cadangan Imbalan Kerja (Dana Pensiun) yang pada Laporan Keuangan Perumda Tirta Senentang sebelumnya pernah tercatat dikeluarkan dari Laporan Keuangan karena bukan bagian dari ekuitas dan kerugian tahun berjalan berdasarkan kepemilikan kabupaten Sintang pada Perumda Tirta Senentang.

Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp585.650.166.619,01 atau sebesar 14,71% disebabkan oleh antara lain pengadaan dan penerimaan hibah Aset Tetap dari pemerintahan maupun pihak swasta.

Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp22.904.894.963,69 atau 417,55%. Kenaikan disebabkan oleh dana penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA Non Tunai melalui *Treasury Deposit Facility* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

4.3.1.1	<b>ASET LANCAR</b>	<b>220.427.195.651,02</b>	<b>294.014.410.564,11</b>
	Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Saldo Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	- Kas di Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
	- Kas di Bendahara Penerimaan	15.110.850,00	19.957.500,00
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	16.416.564,00	35.822.368,00
	- Kas di Kas BLUD	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98
	- Kas Dana BOS	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
	- Kas Dana Kapitasi pada FKTP	63.926.200,00	18.491.000,00
	- Kas di Kas Lainnya	0,00	0,00
	- Piutang Pajak	12.760.957.498,10	11.475.858.221,10
	Penyisihan Piutang Pajak	(8.105.327.813,61)	(7.393.662.390,48)
	Piutang Pajak Netto	4.655.629.684,49	4.082.195.830,62
	- Piutang Retribusi Daerah	109.734.225,00	160.837.425,00
	Penyisihan Retribusi Netto	(30.314.492,50)	(11.884.980,00)



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
	Piutang Retribusi Netto	79.419.732,50	148.952.445,00
-	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	10.709.858.275,00
-	Piutang lain-lain PAD yang Sah	10.608.656.692,89	32.676.912.323,43
	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	(4.405.877.895,72)	(4.125.893.815,85)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	6.202.778.797,17	28.551.018.507,58
-	Piutang Transfer	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12
	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
	Piutang Transfer Netto	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12
-	Piutang Lainnya	997.424.698,57	1.055.236.614,19
	Penyisihan Piutang Lainnya	(700.476.510,29)	(827.411.513,17)
	Piutang Lainnya Netto	296.948.188,28	227.825.101,02
-	Beban Dibayar Dimuka	30.152.054,79	9.140.450.822,04
-	Persediaan	37.568.784.131,18	46.373.142.253,80
	<b>Jumlah</b>	<b>220.427.195.651,02</b>	<b>294.014.410.564,11</b>

Penurunan terjadi pada Aset Lancar sebesar Rp73.594.602.070,09 atau 25,03% dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan disebabkan karena koreksi kurang dan lebih catat atas pembagian dividen PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021, *Collection Fee* PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021, dan piutang pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi.

<b>4.3.1.1.1</b>	<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>119.518.395.629,83</b>	<b>141.163.661.750,97</b>
	Kas di Kas Daerah merupakan kas di Kas Daerah dan deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Sintang dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
-	Bank KalBar Rek. No. 4001009798 Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BPD	0,00	0,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BNI	0,00	0,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BRI	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>119.518.395.629,83</b>	<b>141.163.661.750,97</b>
<b>4.3.1.1.2</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>15.110.850,00</b>	<b>19.957.500,00</b>
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pada SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
-	Dinas Kesehatan	11.200.600,00	0,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.910.250,00	0,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	19.957.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.110.850,00</b>	<b>19.957.500,00</b>
<b>4.3.1.1.3</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>16.416.564,00</b>	<b>35.822.368,00</b>
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
<b>1.</b>	<b>Sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan</b>	<b>16.416.564,00</b>	<b>35.822.368,00</b>
a.	Dinas Lingkungan	0,00	371.800,00
b.	Dinas Sosial	15.600.000,00	0,00
c.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	569.564,00	0,00
d.	Kecamatan Sepauk	247.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
e.	Kantor Camat Dedai	0,00	212.922,00
f.	Kantor Camat Ketungau Tengah	0,00	35.237.646,00

Semua saldo Uang ang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2022 oleh SKPD sudah disetorkan ke Kas daerah.

**4.3.1.1.4 Kas di Kas BLUD 37.776.389.687,56 47.967.173.096,98**

Kas di Kas BLUD merupakan kas yang berada di BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri dari RSUD Ade M. Djoen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan 20 Puskesmas yang per 1 Januari 2017 menjadi BLUD penuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tanggal 15 Desember 2016. Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

**Kas BLUD RSUD Ade M. Djoen**

1.	Bank KalBar Rek. No. 4001014353 Kas Bank BLUD RSUD	14.082.125.683,80	10.222.835.804,20
2.	Bank BNI Rek. No. 4156522022 Kas Bank BLUD RSUD	20.651.724.557	31.307.494.319,00
3.	Kas Bendahara BLUD RSUD	0,00	0,00
4.	Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	21.504.865,00
	<b>Jumlah (1)</b>	<b>34.733.850.240,80</b>	<b>41.551.834.988,20</b>

**Kas BLUD di Puskesmas**

1.	Dara Juanti	8.582.413,37	16.257.849,90
2.	Dedai	13.950.107,08	109.956.108,46
3.	Emparu	29.669.824,44	33.688.796,32
4.	Jelimpau	33.083.985,95	85.617.722,54
5.	Kebong	106.722.107,23	318.485.953,15
6.	Kemangai	82.188.562,86	699.690.267,80
7.	Nanga Ketungau	6.041.801,34	218.515.301,20
8.	Nanga Lebang	1.509.912,70	3.190.256,28
9.	Mensiku	50.092.968,78	189.913.814,84
10.	Merakai	499.202.671,27	839.625.626,13
11.	Nanga Mau	104.442.163,52	406.997.497,46
12.	Pandan	508.979.964,50	874.539.115,28
13.	Senaning	34.514.427,02	28.870.991,46
14.	Sepauk	39.691.246,02	10.878.046,35
15.	Serangas	158.581.942,53	293.612.887,24
16.	Serawai	328.466.423,71	621.894.253,85
17.	Sungai Durian	163.755.674,89	201.586.027,97
18.	Tanjung Puri	311.033.248,48	776.198.032,47
19.	Nanga Tebidah	140.638.487,11	214.957.563,12
20.	Tempunak	421.391.513,96	470.861.996,96
	<b>Jumlah (2)</b>	<b>3.042.539.446,76</b>	<b>6.415.338.108,78</b>
	<b>Jumlah (1 + 2)</b>	<b>37.776.389.687,56</b>	<b>47.967.173.096,98</b>

Saldo Kas BLUD pada 20 Puskesmas tersebut seluruhnya berada di rekening bank BLUD puskesmas masing-masing.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>4.3.1.1.5</b>	<b>Kas Dana Bos</b>	<b>1.396.190.754,01</b>	<b>1.550.062.395,98</b>
	Kas Dana BOS merupakan Kas dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara langsung ke satuan sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	Kas di Kas Bank pada SDN dan SMP Kabupaten Sintang	1.198.716.284,81	1.550.062.395,98
	Kas di Kas Bendahara BOS pada pada SDN dan SMP Kabupaten Sintang	196.924.645,00	0,00
	Kas di Kas Bank pada satuan PAUD Negeri dan Kesetaraan Negeri Kabupaten Sintang	549.824,20	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.396.190.754,01</b>	<b>1.550.062.395,98</b>

<b>4.3.1.1.6</b>	<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>	<b>63.926.200,00</b>	<b>18.491.000,00</b>
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan kas yang terdapat di Rumah Sakit Pratama Serawai yang masih belum menerapkan pola pengelolaan BLUD sampai dengan 31 Desember 2022.		

<b>4.3.1.1.7</b>	<b>Kas di Kas Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kas di Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00.		

<b>4.3.1.1.8</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>12.760.957.498,10</b>	<b>11.475.858.221,10</b>
	Piutang Pajak merupakan piutang atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian saldo dan mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.		

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Piutang Pajak Hotel	214.494.783,60	232.994.783,60
Piutang Pajak Restoran	204.741.060,00	91.810.300,00
Piutang Pajak Hiburan	5.307.000,00	2.695.000,00
Piutang Pajak Reklame	44.734.655,00	27.365.630,00
Piutang Pajak Air Tanah	0,00	475.200,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	179.024.949,50	294.629.812,50
Piutang PBB P2	12.112.630.050,00	10.825.862.495,00
Piutang Pajak BPHTB	25.000,00	25.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.760.957.498,10</b>	<b>11.475.858.221,10</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(8.105.327.813,61)</b>	<b>(7.393.662.390,48)</b>
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>4.655.629.684,49</b>	<b>4.082.195.830,62</b>

Dari data diatas diketahui hal-hal:

- Terdapat Piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sintang pada Tahun 2013
- Tidak terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan karena belum ada dokumen yang dapat dijadikan dasar pengakuan piutang.
- Pengakuan Piutang Pajak Logam Bukan Batuan dan Mineral berdasarkan surat tagihan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang telah ditagihkan kepada pihak ketiga.

<b>4.3.1.1.9</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>109.734.225,00</b>	<b>160.837.425,00</b>
	Piutang Retribusi merupakan piutang atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<b>Uraian</b>	<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>Saldo 31 Desember 2021</b>
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	850.000,00	0,00
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.294.725,00	11.294.725,00
	Piutang Retribusi Gangguan/HO	1.284.500,00	1.284.500,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	76.363.200,00
	Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	96.305.000,00	71.895.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>109.734.225,00</b>	<b>160.837.425,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(30.314.492,50)</b>	<b>(11.884.980,00)</b>
	<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>79.419.732,50</b>	<b>148.952.445,00</b>

Saldo akhir piutang retribusi per 31 Desember 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp51.103.200,00 atau 31,77%.

**4.3.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden** **0,00** **10.709.858.275,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden merupakan piutang dari pendapatan pembagian keuntungan dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke BUMD berdasarkan RUPS yang telah diterbitkan. Namun Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Pemerintah Kabupaten Sintang tidak lagi menyajikan jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan. Sehingga per 31 Desember 2022, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden yang disajikan adalah sebesar Rp0,00.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	10.709.858.275,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>10.709.858.275,00</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>10.709.858.275,00</b>

**4.3.1.1.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah** **10.608.656.692,89** **32.676.912.323,43**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79), maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Lain-Lain PAD tahun 2021. Sehingga, saldo akhir Pendapatan lain-lain PAD yang Sah Angsuran per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp22.068.255.630,54 atau 67,53%. Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari Piutang Jasa Giro, Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir, Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain, Piutang Pendapatan Denda, Piutang dari Pengembalian dan Piutang Pendapatan BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
	Piutang Jasa Giro	7.387.157,00	0,00
	Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir	1.226.509.680,00	1.226.509.680,00
	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain	602.185.434,00	636.671.405,54
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.900.298,41	15.900.298,41
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	8.775.026,00	8.775.026,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak	767.377.902,20	767.377.902,20
	Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemberian Hak Baru	12.028.742,28	108.584.162,28
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.947.588,00	1.947.588,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjadin Dalam Kota	2.476.968,00	2.476.968,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	1.428.344.408,00	1.428.344.408,00
	Piutang Pendapatan BLUD	6.535.723.489,00	28.480.324.885,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.608.656.692,89</b>	<b>32.676.912.323,43</b>
	<b>Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah</b>	<b>(4.405.877.895,72)</b>	<b>(4.125.893.815,85)</b>
	<b>Piutang Lainnya Netto</b>	<b>6.202.778.797,17</b>	<b>28.551.018.507,58</b>

Piutang Jasa Giro tahun 2022 merupakan piutang atas Pendapatan Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran Dana Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

**4.3.1.1.12 Piutang Transfer dari Provinsi 12.807.053.377,20 4.025.799.217,12**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79). Maka untuk komparatif perbandingan menggunakan Piutang Transfer tahun 2021.

Piutang pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Januari 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu sebesar Rp12.807.053.377,20.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	1.000.512.536,75	802.105.070,60
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.242.551.446,27	456.972.216,02
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	139.313.863,40	180.673.234,20
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.424.675.530,78	2.586.048.696,30
<b>Jumlah</b>	<b>12.807.053.377,20</b>	<b>4.025.799.217,12</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Transfer Netto</b>	<b>12.807.053.377,20</b>	<b>4.025.799.217,12</b>





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Saldo akhir piutang transfer provinsi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.781.254.160,08 atau 218,12% dibandingkan dengan tahun 2021.		

**4.3.1.1.13 Piutang Lainnya** **997.424.698,57** **1.055.236.614,19**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79) untuk Piutang Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 sudah dirinci berdasarkan akun piutang sesuai dengan lampiran pada kebijakan akuntansi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	339.666.677,57	347.278.593,19
2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	236.375.000,00	286.575.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>576.041.677,57</b>	<b>633.853.593,19</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(279.093.489,29)</b>	<b>(406.028.492,17)</b>
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</b>	<b>296.948.188,28</b>	<b>227.825.101,02</b>
3. Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
<b>Jumlah</b>	<b>421.383.021,00</b>	<b>421.383.021,00</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(421.383.021,00)</b>	<b>(421.383.021,00)</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>	<b>997.424.698,57</b>	<b>1.055.236.614,19</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>(700.476.510,29)</b>	<b>(827.411.513,17)</b>
<b>Jumlah Piutang Lainnya Netto</b>	<b>296.948.188,28</b>	<b>227.825.101,02</b>

**Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** **296.948.188,28** **227.825.101,02**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya untuk piutang tagihan penjualan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penjualan Aset Daerah. Rincian saldo dan mutasi Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	339.666.677,57	347.278.593,19
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	236.375.000,00	286.575.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>576.041.677,57</b>	<b>633.853.593,19</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(279.093.489,29)</b>	<b>(406.028.492,17)</b>
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</b>	<b>296.948.188,28</b>	<b>227.825.101,02</b>

Saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp69.123.087,26 atau 30,34%. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp7.611.915,62 atau 2,19% sedangkan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas mengalami penurunan Rp50.200.000,00 atau 17,52 %.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>421.383.021,00</b>	<b>421.383.021,00</b>

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
<b>Jumlah</b>	<b>421.383.021,00</b>	<b>421.383.021,00</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(421.383.021,00)</b>	<b>(421.383.021,00)</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo akhir Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

**4.3.1.1.14 Beban Dibayar di Muka** **30.152.054,79** **9.140.450.822,04**

Beban Dibayar di Muka merupakan nilai sisa atas pengeluaran untuk memperoleh aset yang masa manfaat ekonominya melebihi tahun anggaran yang berkenaan. Rincian saldo dan mutasi Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Rincian saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1) Sewa Gedung Kantor :		
- Kelurahan Rawa Mambok (Kantor Camat Sintang)	15.053.424,66	15.053.424,66
- Kelurahan Sengkuang (Kantor Camat Sintang)	15.098.630,14	15.098.630,14
2) Uang Muka Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:		
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau CV. Permata Perigi	0,00	62.872.039,53
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten Sintang CV.Herba	0,00	195.209.643,42
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Kesehatan Gedung Puskesmas Tanjung Puri PT. Baim Bian Konstruksi	0,00	1.433.649.900,00
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau (dokter) CV. Tovan Putra	0,00	124.882.059,12
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pembangunan Sentra IKM CV. Tegak Lurus Konstruksi	0,00	658.504.600,00
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan SP II (Buluh Kuning) - Sesa Nanga Pari PT. Prima Mulia Karya	0,00	2.077.965.721,00
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Baning Panjang - Ensaid Panjang CV. Napoh Kanau Permai	0,00	251.060.354,48
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau II - Nanga Beloh PT. Novalindo Karya Indonesia	0,00	432.735.052,50
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Tempunak – Sungai Ringin PT. Alam Kapuas Persada	0,00	519.007.498,81
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau III - Nanga Merakai PT. Hendra Putra Mandiri	0,00	3.354.411.898,39
<b>Jumlah</b>	<b>30.152.054,80</b>	<b>9.140.450.822,04</b>

Dari data diatas, tahun 2022 beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp9.110.298.767,25 atau 99,67% apabila dibandingkan dengan realisasi 2021.

Atas Sewa Gedung Bangunan Kantor pada Kantor Camat Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Kelurahan Rawa Mambok berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 011/345/SEKRT, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.500.000,00 dengan jangka waktu 30 November 2022 sampai dengan 30 November 2023 dibebankan pada tahun 2022 sebesar Rp1.446.575,34 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp15.053.424,66.		
	- Kelurahan Sengkuang berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 648/90/KS-Sekrt, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.500.000,00 dengan jangka waktu 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2023 dibebankan pada tahun 2022 sebesar Rp1.401.369,86 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp15.098.630,14.		
<b>4.3.1.1.15</b>	<b>Persediaan</b>	<b>37.568.784.131,18</b>	<b>46.373.142.253,80</b>
	Persediaan merupakan barang yang bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Penyajian saldo Persediaan pada Neraca dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan ( <i>stock opname</i> ) yang dinyatakan dengan berita acara dari masing-masing SKPD. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	- Bahan kimia	540.027.568,00	788.101.890,00
	- Isi Tabung Gas LPG dan Oksigen	146.063.897,00	337.711.415,00
	- Alat Tulis Kantor	172.390.871,00	203.638.318,00
	- Barang Cetak	112.340.708,00	117.140.150,00
	- Benda Pos	820.000,00	2.440.000,00
	- Bahan Komputer	60.675.475,02	56.404.000,00
	- Alat Listrik	35.939.055,00	14.706.980,00
	- Obat	6.909.876.717,37	7.300.120.287,26
	- Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.497.961.945,00	32.142.593.485,00
	- Bahan makanan Pokok	773.226.550,00	772.543.450,00
	- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	38.519.875,00
	- Perabot Kantor	402.940.939,00	0,00
	- BAKHP	3.725.175.537,60	3.576.557.404,54
	- Alat Perlengkapan Kesehatan	3.191.094.508,19	1.022.664.999,00
	- BBM	250.360,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.568.784.131,18</b>	<b>46.373.142.253,80</b>

Persediaan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp8.804.358.122,62 atau 18,99%. Persediaan mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan terdapat barang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang sudah tersalurkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian, Kantor Kecamatan Ketungau Tengah, Kantor Kecamatan Serawai dan Kantor Kecamatan Sintang.

Persediaan Per SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.820.000,00	830.000,00
Dinas Kesehatan	14.915.911.737,68	13.155.632.661,60
Dinas Pekerjaan Umum	960.000,00	1.365.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.746.537.400,00	30.342.629.145,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
	Satuan Polisi Pamong Praja	355.000,00	453.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	860.000,00	436.000,00
	Dinas Sosial	990.000,00	1.413.500,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	917.879.545,00	1.552.010.840,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.315.000,00	355.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	583.167.050,00	608.384.550,00
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	907.500,00	4.125.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	8.811.500,00	7.334.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58.693.545,00	50.439.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	500.000,00	770.000,00
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	212.297.685,48	304.387.547,20
	Dinas Perhubungan	10.497.858,00	7.129.957,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.150.000,00	200.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.100.000,00	308.000,00
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8.628.000,00	2.070.100,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.090.300,00	787.000,00
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.640.100,00	776.500,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.512.600,00	2.055.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.787.500,00	1.870.000,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.407.590,00	1.056.000,00
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	49.475.000,00	44.847.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80.000,00	150.000,00
	Sekretariat Daerah	3.592.141,02	2.147.853,00
	Sekretariat DPRD	1.221.000,00	858.000,00
	Inspektorat	1.909.600,00	561.000,00
	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	588.500,00	929.500,00
	Kantor Kecamatan Kelam Permai	610.000,00	300.000,00
	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	790.000,00	401.500,00
	Kantor Kecamatan Tempunak	793.000,00	484.000,00
	Kantor Kecamatan Dedai	829.860,00	725.000
	Kantor Kecamatan Sepauk	525.000,00	150.000,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	625.000,00	553.600,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	900.000,00	2.257.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	610.500,00	330.000,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	982.500,00	260.000,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	1.020.000,00	627.000
	Kantor Kecamatan Serawai	794.000,00	1.046.100,00
	Kantor Kecamatan Ambalau	600.000,00	330.000,00
	Kantor Kecamatan Sintang	20.892.079,00	269.168.900,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.126.040,00	198.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.568.784.131,18</b>	<b>46.373.142.253,80</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>138.035.560.374,75</b>	<b>137.858.647.077,05</b>

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Investasi Permanen	138.035.560.374,75	137.858.647.077,05
<b>Jumlah</b>	<b>138.035.560.374,75</b>	<b>137.858.647.077,05</b>

4.3.1.2.1	<b>Investasi Permanen</b>	<b>138.035.560.374,75</b>	<b>137.858.647.077,05</b>
-----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian saldo dan mutasi Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Investasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	91.275.105.600,00	86.275.105.600,00
Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang	44.135.454.774,75	48.958.541.477,05
Investasi pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>138.035.560.374,75</b>	<b>137.858.647.077,05</b>

Terdapat kenaikan investasi jangka panjang yang pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat naik sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 5,80%, sedangkan Investasi pada Perumda Tirta Senentang turun sebesar Rp4.823.086.702,30 atau 9,85% dan Investasi pada Jamkrida tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

4.3.1.2.1.1	<b>Penyertaan Modal Pada PT Bank Kalbar</b>	<b>91.275.105.600,00</b>	<b>86.275.105.600,00</b>
-------------	---	--------------------------	--------------------------

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900/717.A/III.A-BPKAD dan AKT/KP-AKT/115/2022 tanggal 27 Desember 2022 antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT Bank Kalbar menyatakan bahwa Saham Pemerintah Kabupaten berdasarkan nilai perolehan sebesar Rp91.275.105.600,00 sedangkan berdasarkan Nilai Nominal Saham sebesar Rp86.118.000.000,00 atau selisih sebesar Rp5.157.105.600,00. Perbedaan nilai nominal dan perolehan saham dikarenakan pengambilalihan saham dari pemerintah pusat (Divestasi) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Perlu Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/1607/Ekon-D tanggal 28 Juni 2004 Perihal Permohonan Pembelian Kembali Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pengambilalihan tersebut dengan melakukan pembelian saham di tambah premi dari Bunga Obligasi, Pemerintah Kabupaten Sintang pada saat itu dikenakan premi bunga obligasi sebesar Rp5.157.105.600,00 yang sampai dengan saat ini diakui sebagai perolehan saham, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah segala biaya penunjang sebagai akibat untuk memperoleh investasi, maka akan ditambahkan sebagai harga perolehan investasi.

4.3.1.2.1.2	<b>Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang</b>	<b>44.135.454.774,75</b>	<b>48.958.541.477,05</b>
-------------	--	--------------------------	--------------------------

Saldo Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang merupakan nilai penyertaan modal pada Perumda Tirta Senentang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Sintang Tahun Anggaran 2022. Menurut Laporan Keuangan PDAM Tirta Senentang Tahun 2022 (*Unaudited*), kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 79,15%, dari jumlah keseluruhan modal sehingga nilai penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas.

Penyertaan modal berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Pemkab Sintang dengan Perumda Tirta Senentang Nomor 900/702.D/III.A-BPKAD dan Nomor 103/01/21/SK-UM/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, jumlah keseluruhan peyertaan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang sampai dengan TA. 2022 sebesar Rp90.068.270.391,00.		
	Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2022 sesuai dengan Laporan Keuangan <i>unaudited</i> Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang Sintang Tahun Buku 2022 adalah sebesar Rp44.135.454.774,75. Berikut rincian perhitungan nilai Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang Sintang (dalam rupiah) :		

<b>Penyertaan Modal Pemkab Sintang s.d. Tahun 2022 (a)</b>	<b>90.068.270.391,00</b>
Kerugian Perumda Tirta Senentang s.d 2021 dengan Persentase Kepemilikan 79.15% x (46.250.831.044,49) (b)	(36.609.728.913,95)
Koreksi Kerugian Perumda Tirta Senentang Tahun 2021 (c)	(6.525.601.817,26)
Kerugian Perumda Tirta Senentang Tahun 2022 dengan Persentase Kepemilikan 79.99% (d)	(2.797.484.885,04)
<b>Total Kerugian yang dibebankan pada Pemkab. Sintang sd. Tahun 2022 kepenilikan 79,99% (e) = (b)+(c)+(d)</b>	<b>(45.932.815.616,25)</b>
<b>Nilai Investasi Pemkab Sintang berdasarkan Metode Ekuitas sd. Tahun 2022, (f) = (a)-(e)</b>	<b>44.135.454.774,75</b>

<b>4.3.1.2.1.3 Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida</b>	<b>2.625.000.000,00</b>	<b>2.625.000.000,00</b>
Tidak ada perubahan Penyertaan Modal oleh PT Jamkrida di TA 2022. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab. Sintang dengan PT Jamkrida Nomor 900/527.B/III.A-BPKAD dan Nomor 053/JKB/ADM/XII/2022 bahwa penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2022 kepada PT Jamkrida adalah sebesar Rp2.625.000.000,00.		

<b>4.3.1.3 ASET TETAP</b>	<b>4.567.944.092.622,58</b>	<b>3.982.293.926.003,57</b>
Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:		

Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	1.396.702.204.020,93	571.847.984.161,29	10.200.613.348,49	1.958.349.574.833,73
Peralatan dan Mesin	711.433.112.673,61	64.847.172.746,35	5.139.580.043,05	771.140.705.376,93
Gedung dan Bangunan	1.455.239.479.202,32	76.980.201.662,34	12.283.013.507,55	1.519.936.667.357,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.097.313.682.205,59	263.355.799.918,94	11.881.432.510,07	2.348.788.049.614,46
Aset Tetap Lainnya	92.210.305.830,98	9.018.195.136,00	117.549.950,21	101.110.951.016,77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.675.724.941,85	10.240.754.146,41	88.819.423.968,12	44.097.055.120,14
Akumulasi Penyusutan	(1.893.280.582.871,71)	289.383.234.453,87	7.184.906.629,02	(2.175.478.910.696,56)
<b>Jumlah</b>	<b>3.982.293.926.003,57</b>	<b>1.285.673.342.225,20</b>	<b>135.626.519.956,51</b>	<b>4.567.944.092.622,58</b>

<b>4.3.1.3.1 Tanah</b>	<b>1.958.349.574.833,73</b>	<b>1.396.702.204.020,93</b>
------------------------	-----------------------------	-----------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Tanah merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :		
-	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	22.107.936.537,81	23.779.747.787,85
-	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	59.039.032.474,94	58.994.930.802,81
-	Tanah untuk Bangunan Industri	37.500.000,00	37.500.000,00
-	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	148.594.257.804,56	145.327.009.650,44
-	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.529.800.000,00	0,00
-	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	976.915.912,06	971.239.582,86
-	Tanah Persil Lainnya	0,00	22.031.200,00
-	Tanah Kering	16.119.350.475,60	15.729.832.901,57
-	Tanah Perkebunan	1.910.035.836,21	2.083.357.086,21
-	Tanah Tandus	0,00	164.990.000,00
-	Tanah Pertanian	0,00	50.000.000,00
-	Tanah Non Persil Lainnya	190.329.000,00	280.338.250,00
-	Tanah Lapangan Olahraga	2.148.569.427,85	2.136.641.878,91
-	Tanah Lapangan Parkir	685.348.906,36	743.348.906,36
-	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	5.280.032.062,52	5.217.905.587,52
-	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	195.672.500,00	195.672.500,00
-	Tanah Lapangan Terbang	18.531.041.318,10	18.531.041.318,10
-	Tanah untuk Jalan	1.638.901.107.861,34	1.094.496.941.861,34
-	Tanah untuk Bangunan Air	856.051.980,00	856.051.980,00
-	Tanah untuk Bangunan Jaringan	329.589.852,16	324.460.000,00
-	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	1.581.707.239,40	1.581.707.239,40
-	Tanah untuk Makam	24.955.804.562,20	24.955.804.562,20
-	Tanah untuk Taman	12.157.840.157,26	0,00
-	Tanah Kampung	221.650.925,36	221.650.925,36
	<b>Jumlah</b>	<b>1.958.349.574.833,73</b>	<b>1.396.702.204.020,93</b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp561.647.370.812,80 atau 40,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :

<b>a. Mutasi bertambah</b>	<b>561.647.370.812,80</b>
1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022	1.166.287.200,00
2. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dari Puskesmas Merakai berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Gedung dan Bangunan-Taman.	184.200.000,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian berikut :	179.888.137,80
▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.680.031,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Kesehatan, berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</li><li>▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</li></ul>	77.486.106,80 49.722.000,00	
4.	Penambahan Hibah dengan rincian berikut :	560.054.869.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Masyarakat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 593/663.A/BPKAD/2022 tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 36 Sepan Kemantan Kecamatan Ketungau Hilir berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa.</li><li>▪ Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Bandar Udara Susilo – Sintang berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa.</li></ul>	90.000.000,00 559.964.869.000,00	
5.	Penambahan dari Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap dari Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi.	62.126.475,00	
<b>b.</b>	<b>Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>	
<b>c.</b>	<b>Mutasi Antar SKPD</b>	<b>10.200.613.348,49</b>	
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp10.200.613.348,49 dengan rincian sebagai berikut :		
1)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2929/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Tanah bangunan Kantor Pemerintah dengan harga perolehan Rp42.553.802,32 berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro.		
2)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6967/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Kesehatan berupa Tanah Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Dedai dengan harga perolehan Rp530.350.150,00 berlokasi di Dusun Bejangga Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai.		
3)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6966/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah untuk Pengamanan Situs Purbakala dengan harga perolehan Rp154.207.456,18 berlokasi di Kecamatan Sepauk, Tanah untuk Pengamanan Situs Purbakala Desa Tanjung Ria dengan harga perolehan Rp217.231.487,33 berlokasi di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk, Pensektifikatan Tanah		





Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	untuk Situs Purbakala Kecamatan Sepauk dengan harga perolehan Rp10.000.000,00 berlokasi di Kecamatan Sepauk, Tanah Pengamanan Situs Purbakala dengan harga perolehan Rp69.344.483,22 berlokasi di Desa Sepauk Kecamatan Sepauk, dan Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Sekolah dengan perolehan Rp66.387.955,18 berlokasi Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian.		
4)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6965/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Tanah untuk Pembangunan RPH dengan total harga perolehan Rp1.108.617.164,34 berlokasi di Desa Anggah Jaya Kecamatan Sintang, Sertifikasi Tanah RPH Desa Anggah Jaya dengan harga perolehan Rp71.797.673,33, dan biaya pendukung pembelian Tanah untuk Pembangunan BP3K di Kecamatan Serawai dengan harga perolehan Rp77.463.630,00 berlokasi di Jalan Dara Muning Desa Muara Kota Kecamatan Serawai.		
5)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6963/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Sintang berupa Tanah Kantor Kelurahan Mengkurai dengan harga perolehan Rp205.527.697,60, Tanah Kantor Kelurahan Kedabang dengan harga perolehan Rp205.609.941,58, Pensertifikatan Tanah untuk Kantor Lurah Kedabang dengan harga perolehan Rp10.000.000,00, Tanah Kantor Kelurahan Batu Lalau dengan harga perolehan Rp203.728.610,61, Pensertifikatan Tanah untuk Kantor Lurah Batu Lalau dengan harga perolehan Rp10.000.000,00, Tanah Kantor Kelurahan Mekar Jaya dengan harga perolehan Rp203.553.842,16, dan Pensertifikatan Tanah untuk Kantor Lurah Mekar Jaya dengan harga perolehan Rp10.000.000,00.		
6)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6968/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Gandis Hulu Kecamatan Dedai dengan harga perolehan Rp81.421.536,86, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Pagal Baru dengan harga perolehan Rp51.402.485,39 berlokasi di Kecamatan Tempunak, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Sungai Ana dengan harga perolehan Rp66.823.231,01 berlokasi di Sungai Ana, Desa Baning Kota Kecamatan Sintang, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah dengan harga perolehan Rp46.169.712,38, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Kenukut dengan harga perolehan Rp50.991.265,51, Tanah Pemakaman Umum Umat Kristen Desa Nanga Merkak dengan harga perolehan Rp50.970.704,52 berlokasi di Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir, Tanah Pemakanan Senaning Ketungau Hulu dengan harga perolehan Rp56.187.028,73, Makam/Kuburan Bandar Udara dengan harga perolehan Rp61.682.982,47 berlokasi di Jalan Patih Tengan Kecamatan Sungai Tebelian, Pensertifikatan Tanah untuk Pencacah Sampah Plastik dengan harga perolehan Rp10.000.000,00 berlokasi di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Tanah Pemakaman Desa Merarai Satu dengan harga perolehan Rp51.371.643,90 berlokasi di Kecamatan Sungai Tebelian, biaya pendukung pembelian Tanah Lapangan Penimbunan Sampah dengan harga perolehan Rp18.091.232,13 berlokasi di Kecamatan Sungai Tebelian, dan biaya pendukung pembelian Tanah Lapangan Penimbunan Sampah dengan harga perolehan Rp22.352.975,89.		
7)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7684/IV.B-BPKAD tanggal 28 November 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa Tanah Bangunan Gedung Indoor Volley Ball dengan harga perolehan Rp300.000.000,00 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Bangunan Olahraga Bulu Tangkis dengan harga perolehan Rp172.500.000,00 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Bangunan Olahraga Stadion Baning dengan harga perolehan Rp2.999.550.000,00, Tanah Bangunan Rekreasi dengan harga perolehan Rp184.784.157,26 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Lapangan Racing dengan harga perolehan Rp61.594.719,08 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Pembangunan Padepokan (Tahap I) dengan harga perolehan Rp446.983.540,26 berlokasi di Jalan Cadika Desa Baning Kota, Tanah untuk Gedung Padepokan dengan harga perolehan Rp101.064.434,24 berlokasi di Jalan Cadika Desa Baning Kota, Tanah untuk Pembangunan Rumah Adat Dayak Jerora 1 dengan harga perolehan Rp2.221.980.787,48 berlokasi di Jalan Sintang Putusibau Desa Jerora 1 Kecamatan Sintang, dan Pensertifikatan Tanah untuk Rumah Adat Dayak Jerora 1 dengan harga perolehan Rp10.000.000,00 berlokasi di Jalan Y.C. Oevang Oerang Kecamatan Sintang.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1.3.2	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>771.140.705.376,93</b>	<b>711.433.112.673,61</b>
	Peralatan dan mesin merupakan mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :		
	- Alat Besar	46.183.443.681,83	45.467.180.718,76
	- Alat Angkutan	146.557.575.482,62	134.766.196.331,57
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.447.517.056,61	4.045.000.620,62
	- Alat Pertanian	617.426.243,28	878.206.370,10
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	141.996.514.582,37	208.139.884.009,14
	- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.849.508.343,55	19.080.988.956,89
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	228.829.165.806,99	212.871.046.021,09
	- Alat Laboratorium	84.909.297.609,31	80.661.835.096,31
	- Alat Persenjataan	5.525.829.249,13	5.522.774.549,13
	- Komputer	92.228.557.321,24	0,00
	- Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	756.295.000,00	0,00
	- Alat Keselamatan Kerja	58.975.000,00	0,00
	- Rambu-rambu	180.600.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>771.140.705.376,93</b>	<b>711.433.112.673,61</b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp59.707.592.703,32 atau 8,39% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :

<b>a. Mutasi bertambah</b>	<b>61.316.689.511,89</b>
1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022	40.565.232.108,00
2. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	1.121.435.950,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Electric Generating Set dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	648.000.000,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Mesin Ketik sebesar Rp 46.630.000,00 dan Alat Pendingin sebesar Rp 107.030.000,00 dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Kesehatan merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD	153.660.000,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Alat Kantor Lainnya dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Kesehatan	29.726.000,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Alat Laboratorium Mikrobiologi dari Jalan,Irigasi dan Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	172.500.000,00
▪ Sekretariat Daerah, berupa Peralatan Studio Audio dari Aset Tetap Lainnya-Audio Visual	69.979.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berupa Peralatan Studio Gambar dari Aset Tetap Lainnya-Bentuk Mikro (Microform)</li><li>▪ Kecamatan Sintang, berupa Peralatan Studio Audio dari Aset Tetap Lainnya- Audio Visual</li></ul>	42.020.000,00 5.550.000,00	
3.	Penambahan atas Koreksi Saldo Awal Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :	0,29	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, koreksi saldo awal pada Alat Pendingin</li><li>▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, koreksi saldo awal pada Alat Produksi Perikanan</li><li>▪ Dinas Lingkungan Hidup, koreksi saldo awal pada Excavator</li><li>▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan, koreksi saldo awal pada Anak Timbangan/Biara</li><li>▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, koreksi saldo awal pada Lemari dan Arsip Pejabat</li><li>▪ Inspektorat, koreksi saldo awal Kendaraan Bermotor Penumpang</li></ul>	0,05 0,08 0,05 0,08 0,02 0,01	
4.	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Kode Barang dari Dinas Perhubungan berupa Rambu Tidak Bersuar dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	161.000.000,00	
5.	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	19.187.434.957,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Kesehatan, hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Nomor : KN.02.07/I.3/4208/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Tugas Pembantuan (TP-04) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berupa Alat Angkutan sebesar Rp2.475.628.400,00, Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp58.285.826,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.181.390.242,00, Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp11.624.607.377, dan Alat Laboratorium sebesar Rp473.023.533,00.</li><li>▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : BA.3/BNPB/4/2019 berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.</li><li>▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hibah dari Kementerian</li></ul>	18.812.935.378,00 185.000.000,00 17.528.500,00	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN Nomor : 136/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES -BKPM/2021 berupa Personal Computer sebesar Rp12.333.750,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp2.889.150,00 dan Peralatan Jaringan sebesar Rp2.305.600,00.		
	▪ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Pemerintah Daerah Nomor : 5687/4.2/PLK.03.07/XI/2022 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp152.051.019,00 dan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp19.920.060,00.	171.971.079,00	
6.	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	241.101.496,60	
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Printer dari Beban Habis Pakai-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.330.000,00	
	▪ Dinas Kesehatan, berupa Alat Kedokteran Gigi dari Beban Bahan-Bahan Kimia	11.535.997,95	
	▪ Sekretariat Daerah, berupa Meubelair dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.595.498,65	
	▪ Badan Pengelola Pendapatan Daerah berupa Mebel dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.640.000,00	
7.	Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Perikanan berupa Alat Pendingin	10.000.000,00	
8.	Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Laboratorium sebesar Rp4.000.000,00, Komputer sebesar Rp10.800.000,00 dan Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp15.685.000,00.	30.485.000,00	
<b>b.</b>	<b>Mutasi berkurang</b>	<b>1.609.096.808,57</b>	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pengurangan aset dari Pembayaran Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor tahun 2021 pada RSUD Ade M.Djoen	157.550.000,00	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	584.230.468,00	
	▪ Dinas Kesehatan, dari Perkakas Bengkel Listrik ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	24.662.068,00	
	▪ Puskesmas Kemangai, dari Alat Kantor Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Khusus merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00	
	▪ Puskesmas Serawai, dari Alat Kantor Lainnya ke Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung Garasi/Pool merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	145.156.000,00	
	▪ RSUD Ade M.Djoen, dari Alat Kantor Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan- Instalasi Jaringan Pipa Gas merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	199.427.400,00	
	▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Garasi/Pool	14.985.000,00	
3.	Pengurangan dari Koreksi Saldo Awal Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :	0,09	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja, koreksi saldo awal pada Alat Pendingin	0,05	
	▪ Dinas Komunikasi dan Informatika, koreksi saldo awal pada Peralatan Pemancar MF/MW	0,02	
	▪ Sekretariat Daerah, koreksi saldo awal pada Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,02	
4.	Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2022 menjadi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	272.848.255,00	
	▪ Puskesmas Kemangai, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dari Peralatan dan Mesin BLUD merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	5.364.505,00	
	▪ Dinas Pekerjaan Umum, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dari Alat Pembersih	8.000.000,00	
	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar	119.310.000,00	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Rp6.660.000,00 dan Beban Pakaian Pelatihan Kerja sebesar Rp112.650.000,00 dari Alat Pelindung Lainnya		
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor dari Alat Pembersih	14.510.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	115.600.000,00	
	▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	693.750,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dari Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dari Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dari Peralatan Olahraga Atletik	4.170.000,00	
	▪ Kecamatan Ambalau, Beban Pakaian Olahraga dari Peralatan Olahraga Atletik	1.000.000,00	
5.	Pengurangan dari Pengadaan Tahun 2022 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan rincian sebagai berikut :	360.368.929,85	
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	144.000,00	
	▪ Dinas Kesehatan, berupa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi sebesar Rp656.200,00, Peralatan Tukang Besi sebesar Rp932.400,00, Peralatan Ukur, Gip dan Feeting sebesar Rp1.610.542,00, Alat Ukur/Pembanding sebesar Rp3.168.875,00, Mebel sebesar Rp42.424.748,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp969.500,00, Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.799.148,00, Alat Kedokteran Umum sebesar Rp50.775.386,00, Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp15.419.573,95, Alat Kesehatan Kebidanan dan	206.596.396,05	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Penyakit Kandungan sebesar Rp1.414.000,00, Alat Kedokteran THT sebesar Rp8.279.440,00, Alat Kedokteran Mata sebesar Rp1.082.195,00, Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp20.619.172,00, Alat Kedokteran Anak sebesar Rp4.469.990,80, Alat Kedokteran Gawat Darurat sebesar Rp400.475,00, Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp2.371.200,00, Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp9.069.997,30, Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi sebesar Rp3.860.000,00, Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan sebesar Rp699.504,00, Alat Laboratorium Umum sebesar Rp899.000,00, Alat Laboratorium Immunologi sebesar Rp14.899.040,00, Alat Laboratorium Fisika sebesar Rp4.100.775,00, Laboratorium Kearsipan sebesar Rp10.000.972,00, Instrument Probe/Sensor sebesar Rp97.812,00, Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan sebesar Rp1.476.450,00, Personal Computer sebesar Rp2.500.000,00, Peralatan Mainframe sebesar Rp2.100.000,00, dan Peralatan Personal Computer sebesar Rp500.000,00.		
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja, berupa Mebel sebesar Rp1.800.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp700.000,00	2.500.000,00	
	▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, berupa Peralatan Komputer Lainnya	340.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Alat Pembersih sebesar Rp14.970.000,00, Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp1.006.383,63 dan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp1.677.306,05	17.653.689,68	
	▪ Dinas Perhubungan, berupa Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebesar Rp500.000,00, Alat Kantor Lainnya sebesar Rp1.665.000,00, Mebel sebesar Rp8.910.000,00, Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp4.551.000,00, Alat Komunikasi Sosial sebesar Rp388.500,00 dan Peralatan Personal Computer sebesar Rp1.237.650,00	17.252.150,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, berupa Alat Panen sebesar Rp1.800.000,00, Mebel sebesar Rp10.500.000,00 dan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp920.000,00	13.220.000,00	
	▪ Sekretariat Daerah, berupa Alat Dapur sebesar Rp16.211.714,76, Alat Rumah Tangga Lainnya	56.850.876,12	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	(Home Use) sebesar Rp38.192.387,11 dan Peralatan Studio Audio sebesar Rp2.446.774,25		
	▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp2.331.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp7.543.468,00	9.874.468,00	
	▪ Inspektorat, berupa Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.052.500,00	
	▪ Kecamatan Sintang, berupa Mebel sebesar Rp1.065.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp920.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp350.000,00 dan Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp12.000.000,00	14.335.000,00	
	▪ Kecamatan Ambalau, berupa Alat Pembersih sebesar Rp444.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp3.035.850,00	3.479.850,00	
	▪ Kecamatan Binjai Hulu, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.020.000,00	
	▪ Kecamatan Kayan Hulu, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250.000,00	
	▪ Kecamatan Serawai, berupa 1 Mebel	11.830.000,00	
	▪ Kecamatan Sungai Tebelian, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.970.000,00	
6.	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :	234.099.155,63	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/121/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Alat Dapur	2.720.000,00	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/120/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akbiat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel sebesar Rp17.895.000,00, Meja Rapat Pejabat sebesar Rp18.690.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar	53.685.000,00	





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Rp8.250.000,00 dan Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp8.850.000,00		
▪	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/106/KEP-BPKAD/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp5.519.070,00, Mebel sebesar Rp13.913.920,00, Alat Dapur sebesar Rp2.500.000,00, Meja Kerja Pejabat sebesar Rp1.725.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp15.840.000,00	39.497.990,00	
▪	Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/79/KEP-BPKAD/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel	41.475.428,76	
▪	Inspektorat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/123/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2022 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp3.247.700,00, Mebel sebesar Rp8.050.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp11.180.000,00 dan Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp10.250.000,00	32.727.700,00	
▪	Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/119/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kabupaten Sintang berupa Mebel	5.052.000,00	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/122/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Laptop dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Sengkuang Kabupaten Sintang berupa Personal Computer</li></ul>	6.500.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/140/KEP-BPKAD/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Sengkuang Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel</li></ul>	3.300.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/66/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Alai Kabupaten Sintang berupa Mebel</li></ul>	1.650.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/77/KEP-BPKAD/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel sebesar Rp3.575.000,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp5.500.000,00, Meja Kerja Pejabat sebesar Rp2.200.000,00, Meja Rapat Pejabat sebesar Rp4.620.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp6.370.000,00, Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat sebesar Rp6.000.000,00, Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp3.300.000,00, dan Peralatan Studio Audio sebesar Rp3.000.000,00</li></ul>	34.565.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Sepauk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/78/KEP-BPKAD/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan</li></ul>	12.926.036,87	



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2022 Electric Generating Set sebesar Rp3.076.036,87, Mebel sebesar Rp7.850.000,00 dan Alat Dapur sebesar Rp2.000.000,00		
<b>c.</b>	<b>Mutasi antar SKPD</b>	3.530.483.234,46	
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp3.530.483.234,46 dengan rincian sebagai berikut :		
1)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp15.840.000,00.		
2)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/193/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp33.700.000,00.		
3)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah berupa Mini Bus Penumpang 14 Orang Kebawah dengan harga perolehan Rp409.100.000,00.		
4)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Dedai berupa Laptop dengan harga perolehan Rp6.318.157,89.		
5)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Sosial ke Kecamatan Ketungau Tengah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp19.723.000,00.		
6)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp17.000.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp9.000.000,00.		
7)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Inspektorat berupa Laptop dengan harga perolehan Rp18.500.000,00.		
8)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/5227/IV.B-BPKAD tanggal 31 Agustus 2022 dialihkan status penggunaannya dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Laptop dengan harga perolehan Rp18.000.000,00.		
9)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke berupa Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan harga perolehan Rp415.009.500,00.		
10)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Inspektorat berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp13.950.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp8.497.157,44.		
11)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2928/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp22.665.000,00.		
12)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4531/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Dinas Perhubungan berupa Laptop dengan harga perolehan Rp7.500.000,00.		
13)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4141/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa Laptop dengan harga perolehan Rp8.150.000,00.		
14)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4051/IV.B-BPKAD tanggal 12 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Laptop/Notebook dengan harga perolehan Rp8.000.000,00 dan Printer dengan harga perolehan Rp2.781.818,00.		
15)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4040/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp31.500.000,00.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
16)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Kecamatan Kayan Hilir ke Kecamatan Tempunak berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp26.000.000,00.		
17)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp277.000.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp17.700.000,00.		
18)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4162/IV.B-BPKAD tanggal 26 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp350.000.000,00, Komputer Unit dengan harga perolehan Rp25.000.000,00, Laptop dengan harga perolehan Rp27.000.000,00, Komputer Unit/Jaringan dengan harga perolehan Rp1.300.000,00 dan Komputer dengan harga perolehan Rp25.000.000,00.		
19)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4466/IV.B-BPKAD tanggal 25 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Satuan Polisi Pamomg Praja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp17.140.000,00.		
20)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/5226/IV.B-BPKAD tanggal 31 Agustus 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp21.918.182,00.		
21)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6115/IV.B-BPKAD tanggal 23 September 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Badan Pembangunan Perencanaan Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp15.832.400,00.		
22)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6116/IV.B-BPKAD tanggal 23 September 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Kayan Hulu berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp199.000.000,00.		
23)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6667/IV.B-BPKAD tanggal 13 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp15.832.400,00.		
24)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6276/IV.B-BPKAD tanggal 30 September 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp27.980.000,00.		
25)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6669/IV.B-BPKAD tanggal 13 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp17.500.000,00.		
26)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6669/IV.B-BPKAD tanggal 13 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Speed Boat dengan harga perolehan Rp3.500.000,00.		
27)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6841/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Pick Up dengan harga perolehan Rp352.400.000,00, Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp26.400.000,00 dan Notebook dengan harga perolehan Rp7.420.000,00.		
28)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6839/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Kecamatan Sepauk berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp16.250.000,00.		
29)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6842/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp23.939.050,00.		



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
30)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6840/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Mobil Inova dengan harga perolehan Rp311.580.018,36 dan Laptop dengan harga perolehan Rp8.000.000,00.		
31)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6828/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berupa Ploter dengan harga perolehan Rp132.000.000,00.		
32)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6885/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Kecamatan Dedai berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp9.740.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp7.800.000,00.		
33)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6837/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa Mobil Pemadam Kebakaran dengan harga perolehan Rp80.000.000,00.		
34)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6836/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informasi ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp30.200.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp4.900.000,00.		
35)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6962/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp200.000.000,00.		
36)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6969/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Dinas Kesehatan berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp184.901.950,77.		

4.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.519.936.667.357,11	1.455.239.479.202,32
	Gedung dan Bangunan merupakan gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	- Bangunan Gedung	1.507.654.215.040,87	1.439.992.284.996,08
	- Monumen	8.898.100.487,42	12.580.845.177,42
	- Bangunan Menara	50.000.000,00	50.000.000,00
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.334.351.828,82	2.616.349.028,82
	<b>Jumlah</b>	<b>1.519.936.667.357,11</b>	<b>1.455.239.479.202,32</b>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp64.697.188.154,79 atau 4,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :

a. Mutasi bertambah	70.005.914.582,33
1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022	39.754.346.725,00
2. Penambahan aset dari Pengakuan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor BLUD tahun 2022 pada RSUD Ade M.Djoen	70.000.000,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	1.525.426.000,00
▪ Puskesmas Serawai, berupa Bangunan Gedung Garasi/Pool dari Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	145.156.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Puskesmas Tanjung Puri, berupa Bangunan Gedung Kantor dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD</li><li>▪ Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Gedung Instalasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku</li><li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Penampung Sampah</li><li>▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berupa Bangunan Gedung Garasi/Pool dari Peralatan dan Mesin-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</li><li>▪ Dinas Perhubungan, berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal</li><li>▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Lain</li></ul>	44.889.000,00	
		248.790.000,00	
		600.000.000,00	
		14.985.000,00	
		323.344.000,00	
		148.262.000,00	
4.	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Kode Barang dengan rincian sebagai berikut :	18.492.638.265,26	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp13.992.337.041,58 dan Rumah Negara Golongan II sebesar Rp1.010.284.279,35 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan</li><li>▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Khusus</li><li>▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dari Konstruksi Dalam Pengerjaan</li></ul>	15.002.621.320,93	
		655.364.544,33	
		2.834.652.400,00	
5.	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	7.614.522.992,07	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Kesehatan, hibah dari Dana BLUD dan DAK berdasarkan Nomor : 028.02/11/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021, Nomor : 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 dan Nomor : 028.02/03/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 berupa Bangunan Gedung</li></ul>	1.502.429.642,07	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Kantor sebesar Rp187.754.098,65 dan Bangunan Kesehatan sebesar Rp1.314.675.543,42		
	▪ Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada Bandar Udara Susilo – Sintang Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 berupa a Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp889.577.000,00, Bangunan Gudang sebesar Rp175.319.000,00, Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp683.754.000,00, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp706.204.000,00, dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp1.370.337.000,00.	4.087.125.000,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 028/2508/BAK dan Nomor : 641.6/2164/BPPD-TP/2022 tanggal 12 Mei 2022 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya merupakan Kantor Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu.	715.524.000,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : PLK..59.03/1270/V/2022 dan Nomor : 646.1/2269/BPPD-TP/2022 tentang Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara dan Tugu Kedaulatan NKRI untuk Diserahkan Kepada Pemda berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar Rp1.236.044.350,00 dan Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp73.400.000,00.	1.309.444.350,00	
6.	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	1.890.476.000,00	
	▪ RSP Serawai berupa Bangunan Gedung Kantor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	97.000.000,00	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Kesehatan berupa Bangunan Kesehatan dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan</li><li>▪ Labkesda berupa Bangunan Kesehatan dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan</li><li>▪ Dinas Kesehatan berupa Rumah Negara Golongan II dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II</li></ul>	1.513.756.000,00	
		199.889.000,00	
		79.831.000,00	
7.	Penambahan dari pengakuan Belanja Modal Dibayar Dimuka berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	658.504.600,00	
<b>b.</b>	<b>Mutasi berkurang</b>	<b>5.308.726.427,54</b>	
1.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	2.660.218.126,24	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Puskesmas Merakai, dari Taman ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja</li><li>▪ Dinas Kesehatan, dari Bangunan Kesehatan ke Peralatan dan Mesin-Mesin Ketik sebesar Rp46.630.000,00, Peralatan dan Mesin-Alat Pendingin sebesar Rp107.030.000,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp33.687.725,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Air Buangan Domestik sebesar Rp20.884.201,24 merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD</li><li>▪ Puskesmas Tanjung Puri, dari Bangunan Kesehatan ke Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya</li><li>▪ Puskesmas Nanga Mau, dari Bangunan Gedung Kantor ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</li><li>▪ RSUD Ade M.Djoen, dari Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik sebesar Rp119.452.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Gas Lainnya sebesar Rp599.154.200,00 merupakan</li></ul>	184.200.000,00	
		208.231.926,24	
		29.726.000,00	
		39.800.000,00	
		718.606.200,00	





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD		
	▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dari Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp800.000.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp679.654.000,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.479.654.000,00	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian berikut :	796.830.137,80	
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Bangunan	52.680.031,00	
	▪ Dinas Kesehatan, berupa Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Bangunan	77.486.106,80	
	▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Khusus	378.387.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	77.555.000,00	
	▪ Dinas Perhubungan, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Peralatan dan Mesin-Rambu Tidak Bersuar	161.000.000,00	
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	49.722.000,00	
3.	Pengurangan dari Pengadaan Tahun 2022 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan rincian sebagai berikut :	16.494.300,00	
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp5.244.400,00 dan Pagar sebesar Rp4.449.900,00	9.694.300,00	
	▪ Kecamatan Sintang, berupa Tugu	6.800.000,00	
4.	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang	1.835.183.863,50	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :		
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/142/KEP-BPKAD/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Negeri 27 Pauh Desa Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	533.544.263,50	
	▪ Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/141/KEP-BPKAD/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp941.384.600,00, Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp69.307.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp6.882.000,00	1.017.573.600,00	
	▪ Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/117/KEP-BPKAD/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	44.750.000,00	
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/123/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	239.316.000,00	
c.	<b>Mutasi antar SKPD</b>	6.974.287.080,01	
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp6.974.287.080,01 dengan rincian sebagai berikut :		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Gedung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp250.793.000,00, Bangunan Eks Kantor Perindustrian dengan harga perolehan Rp48.396.000,00, Pembuatan Jalan Lingkungan dengan harga perolehan Rp1.443.000,00, Jalan Masuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp1.443.000,00, Gapura 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp444.000,00, Gapura 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp444.000,00, Gedung Pos Jaga Permanen dengan harga perolehan Rp5.772.000,00, Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp19.203.000,00, Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp22.755.000,00, Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp22.755.000,00, dan Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp19.203.000,00.		
2)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4040/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah berupa Gedung Sekretariat PKK Kabupaten Sintang dengan harga perolehan Rp99.705.000,00 dan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang dengan harga perolehan Rp199.250.000,00.		
3)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6843/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Pasar Seroja dengan harga perolehan Rp94.105.000,00.		
4)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7684/IV.B-BPKAD tanggal 28 November 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa Gor PBSI dengan harga perolehan Rp143.856.000,00, Pembangunan Pagar Gedung PBSI Sintang dengan harga perolehan Rp103.709.648,63, Penataan Halaman Gedung Tenis Meja dengan harga perolehan Rp75.131.174,26, Halaman Indoor Apang Semangai Sintang dengan harga perolehan Rp89.265.022,04, Gedung Dekranasda Sintang dengan harga perolehan Rp204.133.002,98, Tempat Parkir Gor Bulu Tangkis dengan harga perolehan Rp301.032.000,00, Kantin Gor Bulu Tangkis dengan harga perolehan Rp46.176.000,00, Pagar Stadion Olah Raga dengan harga perolehan Rp103.205.500,00 dan Drainase Stadion Baning Sintang dengan harga perolehan Rp103.681.489,33.		
5)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2481/IV.B-BPKAD tanggal 30 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Perumahan Bekas Kantor Camat Kayan Hilir dengan harga perolehan Rp152.847.000,00 dan WC Cabang Dinas Pendidikan Kayan Hilir (Eks Kantor Camat) dengan harga perolehan Rp2.442.000,00.		
6)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2929/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan harga perolehan Rp3.169.335.900,00, Penataan Halaman Kantor dengan harga perolehan Rp794.788.000,00, Gedung Garasi/Pool Permanen dengan harga perolehan Rp89.876.000,00, Pembangunan Pagar Kantor BPP dengan harga perolehan Rp199.835.000,00, dan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan harga perolehan Rp189.800.000,00.		
7)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4147/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Pembangunan Ruko Seroja Kecamatan Sintang dengan harga perolehan Rp199.050.000,00, Pembangunan Ruko Seroja tahap II Kecamatan Sintang dengan harga perolehan Rp123.490.000,00 dan Rehabilitasi Gedung Printing Kecamatan Sintang dengan harga perolehan Rp200.603.832,10.		
<b>4.3.1.3.4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2.348.788.049.614,46</b>	<b>2.097.313.682.205,59</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari		
-	Jalan dan Jembatan	1.899.791.191.691,85	1.716.346.522.785,22
-	Bangunan Air	261.422.913.649,75	237.094.138.959,75
-	Instalasi	67.270.803.187,21	50.116.730.092,97
-	Jaringan	120.303.141.085,65	93.756.290.367,65
	<b>Jumlah</b>	<b>2.348.788.049.614,46</b>	<b>2.097.313.682.205,59</b>

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp251.474.367.408,87 atau 11,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut.

<b>a. Mutasi bertambah</b>	<b>263.133.073.649,61</b>
1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022	99.293.037.810,00
2. Penambahan aset dari Pengakuan Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi BLUD tahun 2022 pada RSUD Ade M.Djoen	250.000.000,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	1.237.067.594,24
▪ Puskesmas Dara Juanti, berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik dari Peralatan dan Mesin-Perkakas Bengkel Listrik merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	24.662.068,00
▪ Puskesmas Kemangai, berupa Jalan Khusus dari Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00
▪ RSUD Ade M.Djoen, berupa Instalasi Jaringan Pipa Gas dari Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	199.427.400,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Kantor	39.800.000,00
▪ RSUD Ade M.Djoen, berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp33.687.725,00 dan Instalasi Air Buangan Domestik sebesar Rp20.884.201,24 dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Kesehatan merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD	54.571.926,24



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ RSUD Ade M.Djoen, berupa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik sebesar Rp119.452.000,00 dan Jaringan Gas Lainnya sebesar Rp599.154.200,00 dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD</li></ul>	718.606.200,00	
4.	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian berikut :	71.438.092.247,19	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Pekerjaan Umum, berupa Jalan Kabupaten sebesar Rp49.073.586.546,57, Jalan Desa sebesar Rp700.871.525,00, Jembatan pada Jalan Nasional sebesar Rp4.185.366.360,00, Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp6.099.578.618,82, Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp5.729.066.196,80, Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp1.174.439.150,00 dan Jaringan Sambungan ke Rumah sebesar Rp4.019.241.850,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan</li><li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Jalan Khusus dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</li><li>▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</li></ul>	70.982.150.247,19	
		378.387.000,00	
		77.555.000,00	
5.	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	83.617.540.848,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Pekerjaan Umum, hibah dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : PS.04.03-Bb.20/105.1 dan Nomor : 032/9/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat berupa Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp9.913.512.289,00 dan Jembatan pada Jalan Khusus sebesar Rp6.180.891.970,00</li><li>▪ Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Perjanjian Hibah</li></ul>	16.094.404.259,00	
		6.559.860.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada Bandar Udara Susilo – Sintang berupa Jalan Khusus sebesar Rp2.224.582.000,00, Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp4.119.098.000,00, Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp23.554.000,00, Jaringan Distribusi sebesar Rp162.500.000,00 dan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air sebesar Rp30.126.000,00		
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara Nomor : 192/BA/DC/2021 dan Nomor : 032/245/BPKAD/2021 berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp15.941.731.950,00, Jaringan Pembawa sebesar Rp7.499.588.355,00 dan Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp12.477.442.850,00	35.918.763.155,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0243/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Semareh-Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu	5.111.111.311,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0482/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Desa Sungai Pisau – Dusun Nyelawai ( Panjang 9,8 KM)	4.129.608.049,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan	3.296.875.238,00	



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Transmigrasi Nomor : 0477/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Ruas Desa Sepadit – Nanga Sebawang – Suak Medang (Panjang 12,6 KM)		
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0478/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Dusun Nyelawai – Rentong (Panjang 5,37 KM)	2.306.849.519,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0484/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Desa Sungai Kelik – S. Tanju – Nanga Bayan (Panjang 10,22 KM)	4.333.233.194,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0245/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Poros Desa	2.950.484.000,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0479/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Non Status	2.916.352.123,00	
6.	Penambahan dari pengakuan Belanja Modal Dibayar Dimuka berupa Jalan Kabupaten	6.635.180.525,18	
7.	Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Jembatan pada Jalan Desa	476.905.000,00	
8.	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap	185.249.625,00	



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	direklasifikasi ke aset tetap pada Dinas Kesehatan, berupa Jaringan Distribusi dari Beban Penambahan Daya		
<b>b.</b>	<b>Mutasi berkurang</b>	<b>11.658.706.240,74</b>	
1.	Pengurangan aset dari Pembayaran Utang Belanja Modal (Retensi) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :	20.456.550,00	
	▪ Jalan Khusus, yaitu Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Toga RT 25/RW 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06556/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	7.156.350,00	
	▪ Jalan Khusus, yaitu Pembangunan Rabat Beton Gg. Mulia RT 34/RW 06 Kelurahan Rawa Mambok berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06555/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	5.895.200,00	
	▪ Bangunan Pembuang Air Kotor, yaitu Pembangunan Drainase BTN Barjo Kecamatan Sintang berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06415/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	4.902.500,00	
	▪ Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, yaitu Pembangunan Barau Penahan Longsor SMP Negeri 7 Jerora 1 Kecamatan Sintang berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06479/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	2.502.500,00	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	10.946.885.146,41	
	▪ Dinas Kesehatan, dari Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke Peralatan dan Mesin-Electric Generating Set	648.000.000,00	
	▪ Dinas Kesehatan, dari Jaringan Listrik Lainnya ke Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium Mikrobiologi	172.500.000,00	
	▪ Puskesmas Tanjung Puri, dari Jalan Lainnya ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Kantor merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD	44.889.000,00	





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinas Kesehatan, dari Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Instalasi</li><li>▪ Dinas Pekerjaan Umum, dari Jalan Desa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan</li><li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dari Bangunan Penampung Sampah ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Fasilitas Umum</li><li>▪ Dinas Perhubungan, dari Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara</li><li>▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dari Instalasi Lain ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</li></ul>	248.790.000,00	
		8.761.100.146,41	
		600.000.000,00	
		323.344.000,00	
		148.262.000,00	
3.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Jalan Khusus ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	655.364.544,33	
4.	Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2022 menjadi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	36.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Satuan Polisi Pamong Praja, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dari Jaringan Distribusi</li><li>▪ Kecamatan Kelam Permai, Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku dari Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya</li></ul>	30.000.000,00	
		6.000.000,00	
<b>c.</b>	<b>Mutasi antar SKPD</b>	222.726.269,33	
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp222.726.269,33 dengan rincian sebagai berikut :		
1)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa WC/Toilet dengan harga perolehan Rp3.800.000,00.		
2)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2929/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Penambahan Daya Listrik dengan harga perolehan Rp45.606.750,00, Jaringan Telepon Kantor BPP Sintang dengan harga perolehan Rp1.200.000,00, Jaringan Air/PDAM Kantor BPP Sintang dengan harga perolehan Rp2.458.730,00, Jaringan/Meteran Listrik Aula BPP Sintang dengan harga perolehan Rp16.811.300,00, Jaringan/Meteran Listrik Bangunan Kantor BPP Sintang dengan harga perolehan Rp16.000.000,00 dan Bangunan Pembawa Air Kotor dengan harga perolehan Rp33.168.000,00.		
3)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7684/IV.B-BPKAD tanggal 28 November 2022 dialihkan status penggunaannya dari ke berupa dengan harga perolehan Rp103.681.489,33.		



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1.3.5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>101.110.951.016,77</b>	<b>92.210.305.830,98</b>
	Aset Tetap Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap yang lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:		
	- Bahan Perpustakaan	100.758.595.066,27	91.640.692.014,26
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	6.470.534,00	223.728.400,12
	- Hewan Ternak dan Tanaman	345.885.416,50	345.885.416,50
	<b>Jumlah</b>	<b>101.110.951.016,77</b>	<b>92.210.305.830,98</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.900.645.185,79 atau 9,65% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :

<b>a. Mutasi bertambah</b>	<b>9.018.195.136,00</b>
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022	8.973.695.816,00
2. Penambahan hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hibah dari Perpustakaan Nasional RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Buku Siap Layan Pojok Baca Digital untuk Pemerintah Daerah Nomor : 9282/4.2/PLK.03.07/XI.2022 berupa Buku Umum	43.599.320,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bahan Perpustakaan yang berasal dari BOP PAUD.	900.000,00
<b>b. Mutasi berkurang</b>	<b>117.549.950,21</b>
1. Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	117.549.950,00
▪ Sekretariat Daerah, dari Audio Visual ke Peralatan dan Mesin-Peralatan Studio Audio	69.979.950,00
▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dari Bentuk Mikro (Microform) ke Peralatan dan Mesin-Peralatan Studio Gambar	42.020.000,00
▪ Kecamatan Sintang, dari Audio Visual ke Peralatan dan Mesin-Peralatan Studio Audio	5.550.000,00
2. Pengurangan dari Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Buku Umum	0,21

4.3.1.3.6	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>44.097.055.120,14</b>	<b>122.675.724.941,85</b>
	Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 berada pada :		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-	Dinas Kesehatan	481.589.900,00	15.484.211.220,93
-	Dinas Pekerjaan Umum	35.071.307.787,53	97.292.357.888,31
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	8.442.241.432,61	6.962.587.432,61
-	Dinas Perhubungan	101.916.000,00	101.916.000,00
-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	2.834.652.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.097.055.120,14</b>	<b>122.675.724.941,85</b>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan Rp78.578.669.821,71 atau 178,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut.

<b>a. Mutasi bertambah</b>	<b>10.240.754.146,41</b>
1. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	10.240.754.146,41
▪ Dinas Pekerjaan Umum, Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Pembangunan Jembatan Sungai Tamang Desa Ensabang Kecamatan Sintang sebesar Rp78.638.316,00, Tahap I Jembatan Gantung Desa Merako sebesar Rp121.656.016,00, Peningkatan Jalan SP. Telaga – Mensiap Baru sebesar Rp536.633.803,67, Peningkatan Jalan Nanga Jetak – Merah Air sebesar Rp705.622.092,64, Pembangunan Abutmen Jembatan Sungai sebesar Rp833.026.456,00, Pembangunan Abutmen Jembatan Pangkaluang sebesar Rp1.087.961.263,43 dan Peningkatan Jalan Bonet – Rarai (DAK) sebesar Rp5.397.562.198,67	8.761.100.146,41
▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Pembangunan Rumah Singgah Perdawika sebesar Rp480.000.000,00, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp800.000.000,00, dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kristen Center sebesar Rp199.654.000,00	1.479.654.000,00
<b>b. Mutasi berkurang</b>	<b>88.819.423.968,12</b>
1. Pengurangan dari pengakuan Belanja Modal Dibayar Dimuka dengan rincian berikut :	27.214.391.664,82



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum, berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Kabupaten</li> <li>▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</li> </ul>	24.379.739.264,82	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian sebagai berikut :	61.605.032.303,30	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kesehatan, dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan- Bangunan Kesehatan sebesar Rp13.992.337.041,58 dan Gedung-Bangunan- Rumah Negara Golongan II sebesar Rp1.010.284.279,35</li> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum, dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Kabupaten sebesar Rp24.693.847.281,75, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Desa sebesar Rp700.871.525,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan pada Jalan Nasional sebesar Rp4.185.366.360,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp6.099.578.618,82, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp5.729.066.196,80, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp1.174.439.150,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp1.174.439.150,00, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah sebesar Rp4.019.241.850,00.</li> </ul>	15.002.621.320,93	
		46.602.410.982,37	

**4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (2.175.478.910.696,56) (1.893.280.582.871,71)**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca sedangkan penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan aset tetap lainnya.

Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sejak LKPD tahun 2013 dan kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sintang.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan penyusutan dihitung per tahun dan mulai dihitung saat tahun perolehan. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
--------	-----------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
			(Rp)	(Rp)	
	Peralatan dan Mesin	(527.760.944.044,40)	92.192.116.327,89	(3.200.676.225,47)	(616.752.384.146,82)
	Gedung dan Bangunan	(293.241.525.408,82)	34.208.421.738,11	(2.056.690.811,15)	(325.393.256.335,78)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.072.278.113.418,49)	162.982.696.387,87	(1.927.539.592,40)	(1.233.333.270.213,96)
	<b>Jumlah</b>	<b>( 1.893.280.582.871,71)</b>	<b>289.383.234.453,87</b>	<b>(7.184.906.629,02)</b>	<b>(2.175.478.910.696,56)</b>

**a. Mutasi bertambah****289.383.234.453,87**

1. Penambahan dari Koreksi Saldo Awal Akumulasi penyusutan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan dikarenakan perincian aset. 0,39
2. Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut : 47.615.500.739,67
  - Dinas Kesehatan dengan total Akumulasi Peralatan dan Mesin 14.693.184.865,93
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 105.714.285,71
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu berupa Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp3.083.437,50, Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer sebesar Rp722.287,50 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan sebesar Rp576.400,00 4.382.125,00
  - Dinas Perhubungan berupa Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp673.143.140,00, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang sebesar Rp31.557.420,00, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp135.676.560,00, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp408.652.160,00, Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp530.626.060,00 dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II sebesar Rp158.600.640,00 1.938.255.980,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp14.310.480,00, Akumulasi Penyusutan Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti - Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti lainnya sebesar Rp148.325.322,00 dan Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp14.680.000,00</li><li>Dinas Pekerjaan Umum berupa Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp704.429.078,12 dan Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus sebesar Rp382.062.711,81</li><li>Dinas Perhubungan berupa Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus sebesar Rp2.157.800.500,00, Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp1.996.066.540,00, Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp17.076.650,00, Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi sebesar Rp117.812.500,00 dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi sebesar Rp9.037.800,00</li><li>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp2.954.633.985,00, Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa sebesar Rp2.249.876.506,50 dan Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp3.743.232.855,00</li><li>Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional</li></ul>	177.315.802,00	
3.	Penambahan dari Mutasi Antar SKPD	4.502.875.073,41	
4.	Penambahan dari Koreksi Tahun Berjalan Akumulasi Penyusutan dikarenakan grouping, penyesuaian terhadap Belanja Dibayar Dimuka, perincian aset, Reklasifikasi Kode Barang, dan koreksi dikarenakan menjadi Ekstrakomtable. Dengan rincian sebagai berikut :	5.425.511.832,71	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li></ul>	7.652.855,91	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Dinas Kesehatan	35.521.411,22	
	▪ Dinas Pekerjaan Umum	4.491.995.948,08	
	▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	181.625.760,00	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja	4.110.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup	178.782.673,92	
	▪ Dinas Perhubungan	355.400.000,00	
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	156.639.399,82	
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.045.799,99	
	▪ Inspektorat	1.063.636,37	
	▪ Kecamatan Sintang	11.111.847,40	
	▪ Kecamatan Ketungau Hilir	562.500,00	
5.	Penambahan dari Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	231.819.150.893,09	
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.256.918.108,06	
	▪ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.368.556.224,43	
	▪ Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.193.676.560,60	
6.	Penambahan atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan menjadi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	20.195.914,60	
<b>b.</b>	<b>Mutasi berkurang</b>	<b>7.184.906.629,02</b>	
1.	Pengurangan dari Koreksi Saldo Awal Akumulasi penyusutan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan Pengadaan dibawah Tahun 2022 yang Aset Tetapnya dibawah Nilai Kapitalisasi berupa Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.526.080,80	
2.	Pengurangan dari Koreksi Tahun Berjalan Akumulasi Penyusutan dikarenakan grouping, penyesuaian terhadap Belanja Dibayar Dimuka, perincian aset, Reklasifikasi Kode Barang, dan koreksi dikarenakan menjadi Ekstrakomtable. Dengan rincian sebagai berikut :	2.022.326.304,3300	
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.207.443,15	
	▪ Dinas Kesehatan	41.804.695,24	
	▪ Dinas Pekerjaan Umum	987.707.948,19	
	▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13.453.668,11	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup	630.688.779,53	
	▪ Dinas Perhubungan	269.792.932,62	
	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.564.297,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.977.760,00	
	▪ Sekretariat Daerah	6.500.365,89	
	▪ Kecamatan Binjai Hulu	432.500,00	
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.195.914,60	
3.	Pengurangan dari Mutasi Antar SKPD	4.417.508.243,95	
4.	Pengurangan dari Penghapusan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :	740.545.999,94	
	▪ Penghapusan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin	213.389.155,63	
	▪ Penghapusan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	527.156.844,31	

Apabila dibandingkan saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dengan saldo akhir Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp282.198.327.824,85 atau sebesar 14.91%.

**4.3.1.4 ASET LAINNYA 28.390.458.459,90 5.485.563.496,2100**

Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang bersifat jangka panjang dan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

**4.3.1.4.1 Tagihan Penjualan/Angsuran 2.176.984.630,97 2.468.880.115,35**

Tagihan Penjualan/Angsuran merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Rincian saldo dan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022
Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN	23.600.000,00	0,00	9.800.000,00	13.800.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	2.445.280.115,35	0,00	282.095.484,38	2.163.184.630,97
<b>Jumlah</b>	<b>2.468.880.115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>291.895.484,38</b>	<b>2.176.984.630,97</b>

Saldo Tagihan Penjualan/Angsuran per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp291.895.484,38 atau 11,82% dibandingkan dengan tahun 2021. Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN mengalami penurunan sebesar Rp9.800.000,00 atau 41,53% sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp282.095.484,38 atau 11,54%.

- Berdasarkan Nomor Bukti 1/BPKAD/2022 tanggal 31 Desember 2022 aset lainnya berupa tagihan angsuran pengembalian gaji PNS pensiun dari PT TASPEN tahun 2022 pengurangan sebesar Rp9.800.000,00 direklasifikasi ke aset Lancar Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2022.
- Berdasarkan Nomor Bukti 1/BPKAD/2022 tanggal 31 Desember 2022 aset lainnya berupa Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas tahun 2022 pengurangan sebesar Rp282.095.484,38 merupakan reklasifikasi ke akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang terdiri dari pelunasan yang belum jatuh tempo dan perhitungan angsuran berdasarkan piutang lancar yang jatuh tempo pada tahun buku 2022.





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>4.3.1.4.2</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>16.307.656.752,11</b>	<b>16.307.656.752,11</b>
	Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.600.000,00	138.600.000,00
	- Dinas Kesehatan	1.128.318.470,31	1.128.318.470,31
	- Dinas Pekerjaan Umum	223.280.000,00	223.280.000,00
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.460.000,00	47.460.000,00
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	206.670.255,00	206.670.255,00
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	29.986.000,00	29.986.000,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	357.498.500,00	357.498.500,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	236.147.011,20	236.147.011,20
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	60.467.166,66	60.467.166,66
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.000.000,00	92.000.000,00
	- Sekretariat Daerah	351.156.549,00	351.156.549,00
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	535.281.100,00	535.281.100,00
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.760.477.130,00	3.760.477.130,00
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.261.050.553,55	2.261.050.553,55
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.073.695.542,00	6.073.695.542,00
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	115.039.076,92	115.039.076,92
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	485.760.000,00	485.760.000,00
	- Kecamatan Sintang	143.407.000,00	143.407.000,00
	- Kecamatan Binjai Hulu	4.706.406,68	4.706.406,68
	- Kecamatan Dedai	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Sepauk	10.355.990,79	10.355.990,79
	- Kecamatan Ketungau Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Ketungau Tengah	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Ketungau Hulu	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Kayan Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Kayan Hulu	11.700.000,00	11.700.000,00
	- Kecamatan Serawai	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Sungai Tebelian	5.700.000,00	5.700.000,00
	-	<b>16.307.656.752,11</b>	<b>16.307.656.752,11</b>
<b>4.3.1.4.3</b>	<b>Amortisasi</b>	<b>(15.609.343.718,10)</b>	<b>(14.981.603.082,13)</b>
	Amortisasi merupakan kumpulan amortisasi atas aset tak berwujud milik Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal neraca. Saldo Amortisasi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp627.740.635,98 atau 4,19% dari saldo 2021, dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(110.880.000,00)	(83.160.000,00)
	- Dinas Kesehatan	(723.239.836,30)	(519.819.940,34)
	- Dinas Pekerjaan Umum	(223.280.000,00)	(223.280.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(37.968.000,00)	(28.476.000,00)
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	(206.670.255,00)	(206.670.255,00)
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	(17.991.600,00)	(11.994.400,00)
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	(335.578.500,00)	(303.753.380,00)
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(215.947.011,20)	(182.133.411,19)
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(60.467.166,66)	(60.467.166,66)
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(92.000.000,00)	(92.000.000,00)
-	Sekretariat Daerah	(351.156.549,00)	(351.156.549,00)
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(527.321.100,00)	(512.361.100,00)
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(3.760.477.130,00)	(3.760.477.130,00)
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(2.189.193.953,55)	(2.090.079.253,55)
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(5.999.337.542,00)	(5.825.740.822,00)
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(115.039.076,92)	(115.039.076,92)
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(485.760.000,00)	(485.760.000,00)
-	Kecamatan Sintang	(95.673.600,00)	(67.872.200,00)
-	Kecamatan Binjai Hulu	(4.706.406,68)	(4.706.406,68)
-	Kecamatan Dedai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
-	Kecamatan Sepauk	(10.355.990,79)	(10.355.990,79)
-	Kecamatan Ketungau Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
-	Kecamatan Ketungau Tengah	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
-	Kecamatan Ketungau Hulu	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
-	Kecamatan Kayan Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
-	Kecamatan Kayan Hulu	(11.700.000,00)	(11.700.000,00)
-	Kecamatan Serawai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
-	Kecamatan Sungai Tebelian	(5.700.000,00)	(5.700.000,00)
<b>a.</b>	<b>Mutasi bertambah</b>	<b>627.740.635,98</b>	
1.	Penambahan dari Koreksi Saldo Awal Amortisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,01	
2.	Penambahan dari Beban Amortisasi Tahun 2022	627.740.635,97	
<b>b.</b>	<b>Mutasi berkurang</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.3.1.4.4</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>8.061.270.378,52</b>	<b>8.061.270.378,52</b>
	Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau tidak lagi memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp8.061.270.378,52. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
▪	Dinas Kesehatan	4.016.710.813,55	4.016.710.813,55
▪	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	644.863.948,47	644.863.948,47
▪	Sekretariat Daerah	2.153.589.327,21	2.153.589.327,21



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	501.717.275,65	501.717.275,65
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	602.507.108,00	602.507.108,00
	▪ Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.400.000,00	2.400.000,00
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah	44.744.905,60	44.744.905,60
	▪ Kantor Kecamatan Sintang	88.737.000,04	88.737.000,04
	▪ Kantor Kecamatan Kayan Hilir	6.000.000,00	6.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.061.270.378,52</b>	<b>8.061.270.378,52</b>

**4.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (6.500.579.150,60) (6.370.640.667,64)**

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021 tidak mencantumkan penyusutan aset lain - lain karena tercatat secara nilai buku. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2022 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.

**a. Mutasi bertambah 129.938.482,96**

1. Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2022	77.623.366,47
2. Penambahan dari Koreksi Saldo Awal kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Sekretariat Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	52.315.116,49

**b. Mutasi berkurang 0,00**

Apabila dibandingkan dengan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021, Saldo Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (Rp129.938.482,96) atau 2,04%, yang disebabkan penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam keadaan rusak berat. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

▪ Dinas Kesehatan	(3.978.144.813,42)	(3.952.836.563,55)
▪ Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(644.863.948,47)	(644.863.948,47)
▪ Sekretariat Daerah	(631.464.099,42)	(526.833.866,33)
▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(501.717.275,65)	(501.717.275,61)
▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(602.507.108,00)	(602.507.108,00)
▪ Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(2.400.000,00)	(2.400.000,00)
▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(44.744.905,60)	(44.744.905,60)
▪ Kantor Kecamatan Sintang	(88.737.000,04)	(88.737.000,04)
▪ Kantor Kecamatan Kayan Hilir	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(6.500.579.150,56)</b>	<b>(6.370.640.667,60)</b>

**4.3.1.4.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility 23.954.469.567,00 0,00**

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2022 merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-	Sewa Lahan BMD oleh Bank Kalbar (Jalan Pangeran Muda)	3.585.784,22	
-	Sewa Lahan BMD oleh DPC Partai PPP berdasarkan Perjanjian Nomor 032/5481/IV-C-BPKAD/2022	745.873,98	0,00

Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp102.373.303,58 atau 57,88%.

**4.3.2.1.3 Utang Belanja 18.848.101.448,00 42.302.539.394,00**

Utang Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah atas barang/jasa yang telah diterima namun belum dibayarkan. Rincian saldo dan mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022
Utang Belanja Pegawai	7.371.202.785,00	3.053.349.600,00	7.339.082.776,00	3.085.469.609,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	34.746.274.109,00	15.435.238.439,00	34.739.259.909,00	15.442.252.639,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.550.000,00	0	157.550.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	70.000.000,00	1.929.750,00	68.070.250,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.515.500,00	250.000.000,00	25.206.550,00	252.308.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.302.542.394,00</b>	<b>18.808.588.039,00</b>	<b>42.263.028.985,00</b>	<b>18.848.101.448,00</b>

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

SKPD	Utang 2022	Utang 2021
▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.053.349.600,00	1.710.220.407,00
▪ Dinas Kesehatan	15.085.551.987,00	36.949.623.940,00
▪ Dinas Pekerjaan Umum	0,00	153.126.024,00
▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	101.173.174,00
▪ Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	64.466.399,00
▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.838.454,00	79.353.442,00
▪ Dinas Perhubungan	12.436.017,00	85.423.775,00
▪ Dinas Lingkungan Hidup	0,00	95.456.868,00
▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.683.189,00	84.937.492,00
▪ Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	69.836.043,00
▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.420.377,00	47.544.192,00
▪ Dinas Sosial	4.494.032,00	48.283.898,00
▪ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.973.532,00	67.427.850,00
▪ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	15.598.891,00	69.039.295,00
▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.142.685,00	51.579.051,00
▪ Satuan Polisi Pamong Praja	9.523.982,00	116.246.220,00
▪ Sekretariat Daerah	248.994.337,00	495.176.149,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
	SKPD	Utang 2022	Utang 2021
	▪ Sekretariat Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah	49.653.023,00	156.483.846,00
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	202.819.685,00	122.516.951,00
	▪ Inspektorat	17.480.378,00	160.974.346,00
	▪ Kecamatan Sungai Tebelian	1.171.784,00	40.026.712,00
	▪ Kecamatan Kelam Permai	922.378,00	42.525.232,00
	▪ Kecamatan Binjai Hulu	191.034,00	25.667.004,00
	▪ Kecamatan Tempunak	0,00	35.188.535,00
	▪ Kecamatan Dedai	0,00	34.594.282,00
	▪ Kecamatan Sepauk	1.454.150,00	49.808.642,00
	▪ Kecamatan Ketungau Hilir	0,00	30.681.200,00
	▪ Kecamatan Ketungau Tengah	27.325.468,00	27.570.550,00
	▪ Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	29.601.200,00
	▪ Kecamatan Kayan Hilir	157.392,00	39.220.950,00
	▪ Kecamatan Kayan Hulu	5.410.713,00	38.204.913,00
	▪ Kecamatan Serawai	0,00	38.551.213,00
	▪ Kecamatan Ambalau	0,00	32.794.200,00
	▪ Kecamatan Sintang	10.095.739,00	198.900.050,00
	▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.696.603,00	56.960.924,00
	▪ Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.222.194,00	103.904.076,00
	▪ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.374.484,00	89.004.554,00
	▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.598.705,00	59.622.937,00
	▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	3.025.550,00	60.167.769,00
	▪ Dinas Komunikasi dan Informatika	2.143.200,00	77.902.409,00
	▪ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.495.704,00	53.578.667,00
	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.570.077,00	283.312.581,00
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.512.621,00	90.934.755,00
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.773.483,00	34.926.677,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.848.101.448,00</b>	<b>42.302.539.394,00</b>

Saldo akhir Utang Belanja per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp23.454.437.946,00 atau 55,44%.

**4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.320.667.000,00 0,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa pengembalian pajak BPHTB kepada PT Cahaya Unggul Prima karena kekalahan banding sesuai dengan keputusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000920.32/2019/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019.



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.3	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>4.930.554.026.381,44</b>	<b>4.377.173.122.164,55</b>

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Uraian	2022	2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>4.377.173.122.164,55</b>	<b>4.170.852.771.920,78</b>
<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>(15.694.400.097,72)</b>	<b>5.978.340.503,35</b>
▪ Penyesuaian Kas	549.824,20	0,00
▪ Penyesuaian Piutang	(18.170.465,00)	14.173.355.153,00
▪ Penyesuaian Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
▪ Penyesuaian Penyisihan Piutang	(217.280,00)	(159.493.797,430)
▪ Penyesuaian Investasi Permanen	(6.525.601.817,26)	6.076.359.182,23
▪ Penyesuaian Aset Tetap	(2.438.302.921,07)	9.334.908.000,00
▪ Penyesuaian Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
▪ Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	(1.376.339.508,98)	(15.405.649.567,52)
▪ Penyesuaian Amortisasi	0,00	(199.715.600,00)
▪ Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	91.932.499,99
▪ Penyesuaian Aset Lainnya	(52.315.116,49)	0,00
▪ Penyesuaian Pengakuan Hutang	36.664.186,88	(7.933.355.366,92)
▪ Lain-lain	(5.320.667.000,00)	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>4.930.554.026.381,44</b>	<b>4.377.173.122.164,55</b>

Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.377.173.119.164,55 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp553.380.904.216,89 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp15.694.400.097,72). Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2021, Ekuitas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp553.380.904.216,89 atau sebesar 12,64%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

#### 4.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>4.4.1</b>	<b>Pendapatan – LO</b>	<b>2.066.848.809.513,64</b>	<b>1.699.867.736.419,71</b>
	Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sintang dan telah diklasifikasikan menurut jenis Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pendapatan Asli Daerah	130.556.771.755,61	191.504.400.310,64
	- Pendapatan Transfer	1.303.523.466.845,20	1.377.389.329.153,11
	- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	632.768.570.912,83	130.974.006.955,96
	<b>Jumlah</b>	<b>2.066.848.809.513,64</b>	<b>1.699.867.736.419,71</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp2.066.848.809.513,64, mengalami peningkatan sebesar Rp366.981.073.093,93 atau 21,59% dari realisasi TA 2021.

<b>4.4.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO</b>	<b>130.556.771.755,61</b>	<b>191.504.400.310,64</b>
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pendapatan Pajak Daerah	42.969.138.309,10	46.520.029.218,50
	- Pendapatan Retribusi Daerah	3.491.454.622,76	3.271.734.190,59
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	10.709.858.275,00
	- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.096.178.823,75	131.002.778.626,55
	<b>Jumlah</b>	<b>130.556.771.755,61</b>	<b>191.504.400.310,64</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp130.556.771.755,61 mengalami penurunan sebesar Rp60.947.628.555,03 atau 31,83% dari realisasi TA 2021.

<b>4.4.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah – LO</b>	<b>42.969.138.309,10</b>	<b>46.520.029.218,50</b>
	Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pajak Hotel	1.166.577.472,00	694.140.521,00
	- Pajak Restoran	4.430.523.770,10	3.431.887.338,00
	- Pajak Hiburan	874.671.695,00	602.554.930,00
	- Pajak Reklame	648.280.475,00	631.498.629,00
	- Pajak Penerangan Jalan	14.614.832.657,00	13.193.034.327,00
	- Pajak Parkir	129.434.900,00	122.712.828,00
	- Pajak Air Tanah	32.130.768,00	26.185.960,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	59.518.000,00	44.930.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.776.361.108,00	1.794.876.247,50
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	5.667.020.594,00	5.215.243.687,00
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.569.786.870,00	20.762.964.751,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	<b>Jumlah</b>	<b>42.969.138.309,10</b>	<b>46.520.029.218,50</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp42.969.138.309,10 menurun sebesar Rp3.550.890.909,40 atau 7,63% dari realisasi TA 2021.

<b>1. Pajak Hotel</b>	<b>1.166.577.472,00</b>	<b>694.140.521,00</b>
Realisasi Pajak Hotel TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
- Hotel	854.281.130,00	484.036.574,00
- Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	266.201.342,00	165.326.447,00
- Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	46.095.000,00	44.777.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.166.577.472,00</b>	<b>694.140.521,00</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp1.166.577.472,00 meningkat sebesar Rp472.436.951,00 atau 68,06% dari realisasi TA 2021.

<b>a. Pajak Hotel</b>	<b>854.281.130,00</b>	<b>484.036.574,00</b>
Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp854.281.130,00 meningkat Rp370.244.556,00 atau 76,49% dari TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>b. Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan</b>	<b>266.201.342,00</b>	<b>165.326.447,00</b>
Realisasi Pendapatan Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan TA 2022 sebesar Rp266.201.342,00 meningkat sebesar Rp100.874.895,00 atau 61,02% di TA 2021 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10</b>	<b>46.095.000,00</b>	<b>44.777.500,00</b>
Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 TA 2022 sebesar Rp46.095.000,00 meningkat sebesar Rp1.317.500,00 atau 2,94% dari TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

<b>2. Pajak Restoran</b>	<b>4.430.523.770,10</b>	<b>3.431.887.338,00</b>
Realisasi Pajak Restoran TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
- Restoran dan Sejenisnya	112.930.760,00	0,00
- Rumah Makan dan Sejenisnya	419.380.116,00	341.824.540,00
- Kafetaria dan Sejenisnya	598.938.007,00	481.346.512,00
- Warung Makan dan Sejenisnya	155.915.480,00	88.080.900,00
- Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.143.359.407,10	2.520.635.386,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.430.523.770,10</b>	<b>3.431.887.338,00</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp4.430.523.770,10 meningkat sebesar Rp998.636.432,10 atau 29,10 % dari realisasi TA 2021.

<b>a. Pajak Restoran dan Sejenisnya</b>	<b>112.930.760,00</b>	<b>0,00</b>
Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp112.930.760,00 meningkat sebesar 100% dari TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya</b>	<b>419.380.116,00</b>	<b>341.824.540,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp419.380.116,00 meningkat sebesar Rp77.555.576,00 atau 22,69% dari TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	<b>Pajak Kafetaria dan Sejenisnya</b>	<b>598.938.007,00</b>	<b>481.346.512,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp598.938.007,00 meningkat sebesar Rp117.591.495,00 atau 24,43% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
d.	<b>Pajak Warung Makan dan Sejenisnya</b>	<b>155.915.480,00</b>	<b>88.080.900,00</b>
	Realisasi Pendapatan Warung Makan dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp155.915.480,00 meningkat sebesar Rp67.834.580,00 atau 77,01% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
e.	<b>Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya</b>	<b>3.143.359.407,10</b>	<b>2.520.635.386,00</b>
	Realisasi Pendapatan Catering TA 2022 sebesar Rp3.143.359.407,10 meningkat sebesar Rp622.724.021,10 atau 24,71% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
3.	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>874.671.695,00</b>	<b>602.554.930,00</b>
	Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	23.558.500,00	0,00
	- Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	496.144.820,00	409.585.055,00
	- Permainan Bilyard dan Bowling	5.664.000,00	4.991.000,00
	- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	216.818.250,00	106.656.750,00
	- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )	129.551.125,00	81.322.125,00
	- Pertandingan Olahraga	2.935.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>874.671.695,00</b>	<b>602.554.930,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp876.671.695 meningkat sebesar Rp272.116.765,00 atau 45,16% dari realisasi TA 2021.		
a.	<b>Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana</b>	<b>23.558.500,00</b>	<b>0,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2022 Sebesar Rp23.558.500 atau 100% dari TA 2021		
b.	<b>Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya</b>	<b>496.144.820,00</b>	<b>409.585.055,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp496.144.820,00 meningkat sebesar Rp86.559.765,00 atau 21,13% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	<b>Pajak Permainan Bilyard dan Bowling</b>	<b>5.664.000,00</b>	<b>4.991.000,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Permainan <i>Bilyard</i> dan <i>Bowling</i> TA 2022 sebesar Rp5.664.000,00 meningkat sebesar Rp673.000,00 atau 13,48% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
d.	<b>Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan</b>	<b>216.818.250,00</b>	<b>106.656.750,00</b>



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Realisasi Pendapatan Paja Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan TA 2022 sebesar Rp216.818.250,00 apabila dibandingkan tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp110.161.500,00 atau 103,29% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
e.	<b>Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)</b>	<b>129.551.125,00</b>	<b>81.322.125,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) TA 2022 sebesar Rp129.551.125,00 meningkat sebesar Rp48.229.000,00 atau 59,31% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
f.	<b>Pajak Pertandingan Olahraga</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga TA 2022 sebesar Rp2.935.000,00 atau 100% dari TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
4.	<b>Pajak Reklame</b>	<b>648.280.475,00</b>	<b>631.498.629,00</b>
	Realisasi Pajak Reklame TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	514.954.465,00	501.800.619,00
	- Reklame Kain	129.629.350,00	126.843.960,00
	- Reklame Berjalan	3.696.660,00	2.854.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>648.280.475,00</b>	<b>631.498.629,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Reklame TA 2022 sebesar Rp648.280.475,00 meningkat sebesar Rp16.781.846,00 atau 2,66% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
a.	<b>Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron</b>	<b>514.954.465,00</b>	<b>501.800.619,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron TA 2022 sebesar Rp514.854.465,00 meningkat sebesar Rp13.153.846,00 atau 2,62% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
b.	<b>Pajak Reklame Kain</b>	<b>129.629.350,00</b>	<b>126.843.960,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain TA 2022 sebesar Rp129.629.350,00 meningkat sebesar Rp2.785.390,00 atau 2,20% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	<b>Pajak Reklame Berjalan</b>	<b>3.696.660,00</b>	<b>2.854.050,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Berjalan TA 2022 sebesar Rp3.696.660,00 meningkat sebesar Rp842.610,00 atau 29,52% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
5.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>14.614.832.657,00</b>	<b>13.193.034.327,00</b>
	Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN TA 2022 sebesar Rp14.614.832.657,00 meningkat sebesar Rp1.421.798.330,00 atau 10,78% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
6.	<b>Pajak Parkir</b>	<b>129.434.900,00</b>	<b>122.712.828,00</b>
	Realisasi Pajak Parkir TA 2022 sebesar Rp129.434.900,00 meningkat sebesar Rp6.722.072,00 atau 5,48% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
7.	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>32.130.768,00</b>	<b>26.185.960,00</b>
	Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022 sebesar Rp32.130.768,00 meningkat sebesar Rp5.944.808,00 atau 22,70% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
8.	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>59.518.000,00</b>	<b>44.930.000,00</b>
	Realisasi Pajak Burung Walet TA 2022 sebesar Rp59.518.000,00 meningkat sebesar Rp14.588.000,00 atau 32,47% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
9.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>1.776.361.108,00</b>	<b>1.794.876.247,50</b>
	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	Granit/Andesit	825.785.284,00	863.781.560,50
-	Pasir dan Kerikil	602.133.804,00	675.375.731,00
-	Pasir Kuarsa	136.209.632,00	194.790.936,00
-	Tanah Serap (Fullers Earth)	209.724.388,00	37.981.860,00
-	Tanah Liat ( <i>clay ball</i> )	0,00	342.000,00
-	Kerikil	0,00	0,00
-	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.508.000,00	22.604.160,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.776.361.108,00</b>	<b>1.794.876.247,50</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 sebesar Rp1.776.361.108,00 menurun sebesar Rp18.515.139,50 atau 1,03% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
a.	<b>Pajak Granit/Andesit</b>	<b>825.785.284,00</b>	<b>863.781.560,50</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Grani/Andesit TA 2022 sebesar Rp825.785.284,00 menurun sebesar Rp37.996.276,50 atau 4,40% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
b.	<b>Pajak Pasir dan Kerikil</b>	<b>602.133.804,00</b>	<b>675.375.731,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil TA 2022 sebesar Rp602.133.804,00 menurun sebesar Rp73.241.927,00 atau 10,84% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	<b>Pajak Pasir Kuarsa</b>	<b>136.209.632,00</b>	<b>194.790.936,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa TA 2022 sebesar Rp136.209.632,00 menurun sebesar Rp58.581.304,00 atau 30,07% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
d.	<b>Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)</b>	<b>209.724.388,00</b>	<b>37.981.860,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> ) TA 2022 sebesar Rp209.724.388,00 meningkat sebesar Rp171.742.528,00 atau 452,17% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
e.	<b>Pajak Tanah Liat (<i>Clay Ball</i>)</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Liat ( <i>Clay Ball</i> ) di TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>f.</b>	<b>Pajak Kerikil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pajak Kerikil TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
<b>g.</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya</b>	<b>2.508.000,00</b>	<b>22.604.160,00</b>
	Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya TA 2022 sebesar Rp2.508.000,00 menurun sebesar Rp20.096.160,00 atau 88,90% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>10.</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</b>	<b>5.667.020.594,00</b>	<b>5.215.243.687,00</b>
	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2022 sebesar Rp5.667.020.594,00 meningkat sebesar Rp451.776.907,00,00 atau 8,66% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>11.</b>	<b>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>13.569.786.870,00</b>	<b>20.762.964.751,00</b>
	Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	BPHTB – Pemindahan Hak	7.113.320.540,00	6.400.551.200,00
-	BPHTB – Pemberian Hak Baru	6.456.466.330,00	14.362.413.551,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.569.786.870,00</b>	<b>20.762.964.751,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi BPHTB TA 2022 sebesar Rp13.569.786.870,00 menurun sebesar Rp7.193.177.881,00 atau 34,64% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>a.</b>	<b>BPHTB – Pemindahan Hak</b>	<b>7.113.320.540,00</b>	<b>6.400.551.200,00</b>
	Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak TA 2022 sebesar Rp7.113.320.540,00 meningkat sebesar Rp712.769.340,00 atau 11,14% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>b.</b>	<b>BPHTB – Pemberian Hak Baru</b>	<b>6.456.466.330,00</b>	<b>14.362.413.551,00</b>
	Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak Baru TA 2022 sebesar Rp6.456.466.330,00 menurun sebesar Rp7.906.947.221,00 atau 55,05% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>4.4.1.1.2</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b>	<b>3.491.454.622,76</b>	<b>3.271.734.190,59</b>
	Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	Retribusi Jasa Umum	2.527.443.500,00	2.540.160.500,00
-	Retribusi Jasa Usaha	418.898.700,00	333.606.000,00
-	Retribusi Perizinan Tertentu	545.112.422,76	397.967.690,59
	<b>Jumlah</b>	<b>3.491.454.622,76</b>	<b>3.271.734.190,59</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp3.491.454.622,76 meningkat sebesar Rp219.720.432,17 atau 6,72% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan		



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
<b>1.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2.527.443.500,00</b>	<b>2.540.160.500,00</b>
	Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	388.079.800,00	443.781.800,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	241.605.000,00	257.265.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	96.817.000,00	100.910.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1.060.205.000,00	953.266.500,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	13.267.000,00	33.771.000,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	615.678.300,00	610.905.600,00
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	111.791.400,00	140.260.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.527.443.500,00</b>	<b>2.540.160.500,00</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 sebesar Rp2.527.443.500,00 menurun sebesar Rp12.717.000,00 atau 0,50% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- |           |   |                         |                       |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>a.</b> | <b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>  | <b>388.079.800,00</b>   | <b>443.781.800,00</b> |
|           | Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan TA 2022 sebesar Rp388.079.800,00 menurun sebesar Rp55.702.000,00 atau 12,55% oleh Dinas Kesehatan.  |                         |                       |
| <b>b.</b> | <b>Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan</b>   | <b>241.605.000,00</b>   | <b>257.265.000,00</b> |
|           | Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan TA 2022 sebesar Rp241.605.000,00 menurun sebesar Rp15.660.000,00 atau 6,09% oleh Dinas Lingkungan Hidup.                                |                         |                       |
| <b>c.</b> | <b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>  | <b>96.817.000,00</b>    | <b>100.910.000,00</b> |
|           | Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 sebesar Rp96.817.000,00 meningkat sebesar Rp4.093.000,00 atau 4,06% oleh Dinas Perhubungan.                                      |                         |                       |
| <b>d.</b> | <b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>  | <b>1.060.205.000,00</b> | <b>953.266.500,00</b> |
|           | Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 sebesar Rp1.060.205.000,00 meningkat sebesar Rp106.938.500,00 atau 11,22% oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. |                         |                       |
| <b>e.</b> | <b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>   | <b>13.267.000,00</b>    | <b>33.771.000,00</b>  |
|           | Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp13.267.000,00 menurun sebesar Rp20.504.000,00 atau 60,71% oleh Dinas Perhubungan.   |                         |                       |
| <b>f.</b> | <b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>   | <b>615.678.300,00</b>   | <b>610.905.600,00</b> |
|           | Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022 sebesar Rp615.678.300,00 menurun sebesar Rp4.772.700,00 atau 0,78% oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.                         |                         |                       |



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	<b>g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>	<b>111.791.400,00</b>	<b>140.260.600,00</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2022 sebesar Rp111.791.400,00 menurun sebesar Rp28.469.200,00 atau 20,30% oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
<b>2.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>418.898.700,00</b>	<b>333.606.000,00</b>
	Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.350.000,00	39.450.000,00
	- Retribusi Terminal	40.612.000,00	31.843.000,00
	- Retribusi Tempat Parkir Khusus	76.841.000,00	42.590.000,00
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	117.700.000,00	96.725.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	19.975.700,00	47.618.000,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	128.420.000,00	75.380.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>418.898.700,00</b>	<b>333.606.000,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 sebesar Rp418.898.700,00,00 menurun sebesar Rp85.292.700,00 atau 25,57% dari realisasi TA 2021 oleh Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
	<b>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>35.350.000,00</b>	<b>39.450.000,00</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp35.350.000,00 menurun sebesar Rp4.100.000,00 atau 10,39% oleh Sekretariat Daerah.		
	<b>b. Retribusi Terminal</b>	<b>40.612.000,00</b>	<b>31.843.000,00</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2022 sebesar Rp40.612.000,00 meningkat sebesar Rp8.769.000,00 atau 27,54% oleh Dinas Perhubungan.		
	<b>c. Retribusi Tempat Parkir Khusus</b>	<b>76.841.000,00</b>	<b>42.590.000,00</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus TA 2022 sebesar Rp76.841.000,00 meningkat sebesar Rp34.251.000,00 atau 80,42% oleh Dinas Perhubungan.		
	<b>d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</b>	<b>117.700.000,00</b>	<b>96.725.000,00</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa TA 2022 sebesar Rp117.700.000,00 meningkat sebesar Rp20.975.000,00 atau 21,69% oleh Sekretariat Daerah.		
	<b>e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</b>	<b>19.975.700,00</b>	<b>47.618.000,00</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2022 sebesar Rp19.975.700,00 menurun sebesar Rp27.642.300,00 atau 58,05% oleh Dinas Perhubungan.		
	<b>f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	<b>128.420.000,00</b>	<b>75.380.000,00</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2022 sebesar Rp128.420.000,00 meningkat sebesar Rp53.040.000,00 atau 70,36% oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.		
<b>3.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>545.112.422,76</b>	<b>397.967.690,59</b>
	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	514.423.258,24	351.235.954,40
	- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	30.689.164,52	46.731.736,19
	<b>Jumlah</b>	<b>545.112.422,76</b>	<b>397.967.690,59</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 sebesar Rp545.112.422,76 meningkat sebesar Rp147.144.732,17 atau 36,97% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
	<b>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>514.423.258,24</b>	<b>351.235.954,40</b>
	Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2022 sebesar Rp514.423.258,24 meningkat sebesar Rp163.187.303,84 atau 46,46% di TA 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
	<b>b. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</b>	<b>30.689.164,52</b>	<b>46.731.736,19</b>
	Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di TA 2022 sebesar Rp30.689.164,52 menurun sebesar Rp16.042.571,67 atau 34,33% pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi.		
<b>4.4.1.1.3</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.709.858.275,00</b>
	Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum ada penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham pembagian deviden dari PT Bank Kalimantan Barat.		
<b>4.4.1.1.4</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO</b>	<b>84.096.178.823,75</b>	<b>131.002.778.626,55</b>
	Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO yang direalisasikan pada TA 2022, untuk Pendapatan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Sintang nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang tanggal 15 Desember 2017. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.		
	- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan	82.901.250,00	32.539.000,00
	- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	63.011.952,17	77.627.326,71
	- Pendapatan Jasa Giro	4.336.303.913,21	3.582.555.974,90
	- Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	7.387.157,00	0,00
	- Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	1.140.050.975,35	234.706.804,43
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	140.132.747,08	262.622.671,17
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah	220.420.679,00	339.836.825,75
	- Pendapatan dari Pengembalian	1.738.847.530,48	1.067.088.459,69
	- Pendapatan dari BLUD	75.192.676.871,58	124.790.791.563,90
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.435.200,00	0,00
	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	521.990.000,00	615.010.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	607.020.547,88	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.096.178.823,75</b>	<b>131.002.778.626,55</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp84.096.178.823,75, menurun sebesar Rp46.906.599.802,80 atau 35,81% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kesehatan (RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas).

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan** **82.901.250,00** **32.539.000,00**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp82.901.250,00, meningkat sebesar Rp50.362.250,00 atau 154,78% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan** **63.011.952,17** **77.627.326,71**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp63.011.952,17, menurun sebesar Rp14.615.374,54 atau 18,83% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pendapatan Jasa Giro** **4.336.303.913,21** **3.582.555.974,90**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp4.336.303.913,21 meningkat sebesar Rp753.747.938,31 atau 21,04% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain** **1.140.050.975,35** **234.706.804,43**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2022 sebesar Rp1.140.050.975,35 meningkat sebesar Rp905.344.170,92 atau 385,73% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan** **140.132.747,08** **262.622.671,17**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 sebesar Rp140.132.747,08 menurun sebesar Rp122.489.924,09 atau 46,64% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah** **220.420.679,00** **339.836.825,75**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Pajak TA 2022 sebesar Rp220.420.679,00 menurun sebesar Rp119.416.146,75 atau 35,14% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- g. Pendapatan dari Pengembalian** **1.738.847.530,48** **1.067.088.459,69**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 sebesar Rp1.738.847.530,48, meningkat sebesar Rp671.759.070,79 atau 62,95% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	<b>h. Pendapatan dari BLUD</b>	<b>75.192.676.871,58</b>	<b>124.790.791.563,90</b>
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp75.192.676.871,58, menurun sebesar Rp49.598.114.692,32 atau 39,75% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Kesehatan Semua Unit dan RSUD Ade Mohammad Djoen.		
	- Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.		
	- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas.		
	<b>i. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>45.435.200,00</b>	<b>0,00</b>
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2022 sebesar Rp45.435.200,00 atau 100% dari realisasi TA 2022 dari Rumah Sakit Pratama Serawai.		
	<b>j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>	<b>521.990.000,00</b>	<b>615.010.000,00</b>
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 sebesar Rp521.990.000,00 menurun sebesar Rp93.020.000,00 atau 15,12% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	<b>k. Pendapatan Bunga Deposito</b>	<b>607.020.547,88</b>	<b>0,00</b>
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Bunga Deposito di TA 2022 sebesar Rp607.020.547,88 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
<b>4.4.1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer – LO</b>	<b>1.303.523.466.845,20</b>	<b>1.377.389.329.153,11</b>
	Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.202.559.185.737,00	1.287.092.362.149,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	10.663.906.000,00	7.519.190.000,00
	- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	90.300.375.108,20	82.777.777.004,11
	<b>Jumlah</b>	<b>1.303.523.466.845,20</b>	<b>1.377.389.329.153,11</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.303.523.466.845,20 menurun sebesar Rp73.865.862.307,91 atau 5,36% dari realisasi TA 2021.		
<b>4.4.1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO</b>	<b>1.202.559.185.737,00</b>	<b>1.287.092.362.149,00</b>
	Penetapan Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak	56.647.627.923,00	69.057.394.705,00
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	29.900.736.913,00	30.134.354.819,00
	- Dana Alokasi Umum	836.375.896.418,00	837.189.641.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	279.634.924.483,00	350.710.971.625,00



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	<b>Jumlah</b>	<b>1.202.559.185.737,00</b>	<b>1.287.092.362.149,00</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.202.559.185.737,00 menurun sebesar Rp84.533.176.412,00 atau 6,57% dari realisasi TA 2021.

<b>4.4.1.2.1.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak – LO</b>	<b>56.647.627.923,00</b>	<b>69.057.394.705,00</b>
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	47.974.747.830,00	60.026.933.727,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	8.248.541.740,00	8.606.271.400,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	414.434.000,00	418.265.400,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.904.353,00	5.924.178,00
	<b>Jumlah</b>	<b>56.647.627.923,00</b>	<b>69.057.394.705,00</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp56.647.627.923,00 menurun sebesar Rp12.409.766.782,00 atau 17,97% dari realisasi TA 2021.

**a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 47.974.747.830,00 60.026.933.727,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp47.974.747.830,00 menurun sebesar Rp12.052.185.897,00 atau 20,08% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 8.248.541.740,00 8.606.271.400,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA 2022 sebesar Rp8.248.541.740,00, menurun sebesar Rp357.729.660,00 atau 4,16% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**c. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 414.434.000,00 418.265.400,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 TA 2022 sebesar Rp414.434.000,00 menurun sebesar Rp3.831.400,00 atau 0,92% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**d. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 9.904.353,00 5.924.178,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2022 sebesar Rp9.904.353,00 meningkat sebesar Rp3.980.175,00 atau 67,19% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

<b>4.4.1.2.1.2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO</b>	<b>29.900.736.913,00</b>	<b>30.134.354.819,00</b>
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent	184.767.000,00	562.612.875,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	26.058.956.315,00	23.535.702.806,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan	1.486.949.387,00	3.988.629.988,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	689.790.000,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.900.736.913,00</b>	<b>30.134.354.819,00</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp29.900.736.913,00 menurun sebesar Rp233.617.906,00 atau 0,78% dari realisasi TA 2021.

**a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Landrent** **184.767.000,00** **562.612.875,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent TA 2022 sebesar Rp184.767.000,00 menurun sebesar Rp377.845.875,00 atau 67,16% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Royalty** **26.058.956.315,00** **23.535.702.806,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Mineral dan Batubara - Royalty TA 2022 sebesar Rp26.058.956.315,00 meningkat sebesar Rp2.523.253.509,00 atau 10,72% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**c. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan** **1.486.949.387,00** **3.988.629.988,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Provinsi Sumber Daya Hutan TA 2022 sebesar Rp1.486.949.387,00 menurun sebesar Rp2.501.680.601,00 atau 62,72% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan** **0,00** **689.790.000,00**

Tidak ada Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan di TA 2022.

**e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan** **2.170.064.211,00** **1.357.619.150,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan TA 2022 sebesar Rp2.170.064.211,00 meningkat sebesar Rp812.445.061,00 atau 59,84% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**4.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO** **836.375.896.418,00** **837.189.641.000,00**

Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya .



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Dibandingkan Rincian Dana Alokasi Umum Murni Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp836.375.896.418,00 menurun sebesar Rp813.744.582,00 atau 0,10% dari realisasi TA 2021.		
<b>4.4.1.2.1.4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus –LO</b>	<b>279.634.924.483,00</b>	<b>350.710.971.625,00</b>
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp279.634.924.483,00 menurun sebesar Rp71.076.047.142,00 atau 20,27% dari realisasi TA 2021.		
<b>1.</b>	<b>DAK Fisik</b>	<b>65.839.821.565,00</b>	<b>191.818.417.978,00</b>
	DAK Reguler	63.060.268.685,00	110.125.380.437,00
	Dana Alokasi Penugasan	2.779.552.880,00	81.693.037.541,00
	DAK Afirmasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah DAK Fisik</b>	<b>65.839.821.565,00</b>	<b>191.818.417.978,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp65.839.821.565 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp125.978.596.413,00. atau 65,68%.		
<b>2.</b>	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>213.795.102.918,00</b>	<b>158.892.553.647,00</b>
	Dana Bantuan Operasional Sekolah	77.962.709.682,00	0,00
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	69.783.112.335,00	78.817.119.000,00
	Dana TP Guru PNSD	2.070.000.000,00	1.326.000.000,00
	Dana Tunjangan Khusus Guru	42.694.761.000,00	42.576.655.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.127.038.000,00	3.234.300.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.573.700.000,00	1.349.150.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	776.264.000,00	670.518.850,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	9.520.416.097,00	23.054.466.831,00
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.304.664.600,00	5.306.955.400,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	2.077.787.566,00
	Dana Bantuan Operasional Pelayanan Kepariwisataaan	400.800.000,00	98.218.000,00
	Dana Bantuan Operasional Fasilitaas Penanaman Modal	382.237.204,00	381.383.000,00
	Dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian	199.400.000,00	0,00
	<b>Jumlah DAK Non Fisik</b>	<b>213.795.102.918,00</b>	<b>158.892.553.647,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp213.795.102.918,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp54.902.549.271,00. atau 34,55%.		
<b>4.4.1.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah LO</b>	<b>10.663.906.000,00</b>	<b>7.519.190.000,00</b>
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya Tanggal 25 Juli 2022, PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif tanggal 18 November 2021. Jumlah tersebut merupakan realisasi Dana Penyesuaian TA 2022 dan TA 2021.		
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah tanggal 18 November 2021. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebesar Rp10.663.906.000,00 meningkat sebesar Rp3.144.716.000,00 atau 41,82% dari realisasi TA 2021.		
<b>4.4.1.2.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO</b>	<b>90.300.375.108,20</b>	<b>82.777.777.004,11</b>
	Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	88.316.811.308,20	69.677.777.004,11
	- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.983.563.800,00	13.100.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>90.300.375.108,20</b>	<b>82.777.777.004,11</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 sebesar Rp90.300.375.108,20 mengalami peningkatan sebesar Rp7.522.598.104,09 atau 9,09 % dari realisasi TA 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

<b>4.4.1.2.3.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak – LO</b>	<b>88.316.811.308,20</b>	<b>69.677.777.004,11</b>
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagi hasil pajak dari Provinsi TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.358.464.345,75	11.701.597.122,59
	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.905.373.329,27	12.710.472.338,02
	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.649.301.187,68	28.036.264.877,16
	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.924.668.236,50	349.357.613,34
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	22.479.004.209,00	16.880.085.053,00
	<b>Jumlah</b>	<b>88.316.811.308,20</b>	<b>69.677.777.004,11</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2022 sebesar Rp88.316.811.308,20 meningkat sebesar Rp18.639.034.304,09 atau 26,75% dari realisasi TA 2021.

Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LO berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan dengan rincian sebagai berikut:

- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 116/BAPENDA/2022 tentang Selisih Lebih Salur dan Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Mei 2022.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 838/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Agustus 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none"><li>- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1285/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Oktober 2022.</li><li>- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1422/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022.</li></ul>		
<b>4.4.1.2.3.2</b>	<b>Bantuan Keuangan– LO</b>	<b>1.983.563.800,00</b>	<b>13.100.000.000,00</b>
	Dana Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi tahun anggaran 2022 di utamakan untuk penanggulangan dan penanganan dampak ekonomi penyebaran Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:		
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 257/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1341/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 November 2022.</li></ul>		1.983.563.800,00
	Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2022 sebesar Rp1.983.563.800,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp11.116.436.200,00 atau 84,86% dari realisasi TA 2021.		
<b>4.4.1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO</b>	<b>632.768.570.912,83</b>	<b>130.974.006.955,96</b>
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi penerimaan Hibah dan Pendapatan Lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendapatan Dana Hibah</li><li>- Pendapatan Lainnya</li></ul>	632.768.570.912,83 0,00	36.278.200.309,65 94.695.806.646,31
	<b>Jumlah</b>	<b>632.768.570.912,83</b>	<b>130.974.006.955,96</b>
	Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 sebesar Rp632.768.570.912,83 meningkat sebesar Rp501.794.563.956,87 atau 383,13% dari realisasi TA 2021.		
<b>4.4.1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah – LO</b>	<b>632.768.570.912,83</b>	<b>36.278.200.309,65</b>
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hibah dari Pemerintah Pusat</li><li>- Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya</li><li>- Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</li><li>- Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa barang)</li><li>- Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa transfer dana ke Kasda)</li><li>- Pendapatan Hibah BOS</li></ul>	625.168.209.135,33 7.600.361.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00	9.261.900.103,10 26.378.815.447,75 151.212.500,00 446.272.258,80 40.000.000,00 0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>632.768.570.912,83</b>	<b>36.278.200.309,65</b>



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	TA 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.		
<b>a.</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>625.168.209.135,33</b>	<b>9.261.900.103,10</b>
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp625.168.209.135,33 mengalami penambahan sebesar Rp615.906.309.032,23 atau 6,649,89% dari realisasi TA 2021 dengan rincian :		
-	Hibah Air Minum Perkotaan, Tahap ke-1 TA 2022, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (016.016 Hibah Air Minum Perkotaan (AMK))		4.020.000.000
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Masyarakat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 593/663.A/BPKAD/2022 tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 36 Sepan Kemantan Kecamatan Ketungau Hilir berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa.		90.000.000,00
-	Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Bandar Udara Susilo – Sintang berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa dan tanah untuk jalan.		559.964.869.000,00
-	Dinas Kesehatan, hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Nomor : KN.02.07/I.3/4208/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Tugas Pembantuan (TP-04) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berupa Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kedokteran dan Kesehatan dan Alat Laboratorium.		2.325.541.862,84
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : BA.3/BNPB/4/2019 berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang senilai 185.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan Alat Kendaraan Bermotor angkutan barang senilai 105.714.285,71 dan nilai buku senilai 79.285.714,29		79.285.714,29
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN Nomor : 136/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 berupa Personal Computer sebesar 12.333.750,00 dikurangi akumulasi penyusutan personal computer 3.083.437,50 Peralatan Personal Computer sebesar 2.889.150,00 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan personal computer 722.287,50 dan Peralatan Jaringan sebesar Rp2.305.600,00 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan jaringan senilai 576.400.		13.146.375,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Pemerintah Daerah Nomor : 5687/4.2/PLK.03.07/XI/2022		215.570.399,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar 152.051.019,00, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar 19.920.060,00 dan Buku senilai 43.599.320,00		
-	Dinas Kesehatan, hibah dari Dana BLUD dan DAK berdasarkan Nomor : 028.02/11/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021, Nomor : 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 dan Nomor : 028.02/03/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar 187.754.098,65 dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar 3.755.081,97 dan Bangunan Kesehatan sebesar 1.384.675.543,42 dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar 26.293.510,87 dan Bangunan air/irigasi sebesar 250.000.000,00		1.542.381.049,23
-	Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada Bandar Udara Susilo – Sintang Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 berupa a Bangunan Gedung Kantor sebesar 889.577.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 673.143.140,00 Bangunan Gudang Instalasi sebesar 175.319.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 31.557.420 Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar 683.754.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan 135.676.560, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar 706.204.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 406.652.160,00 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar 1.370.337.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 530.626,060, Bangunan Gedung tempat tinggal sebesar 261.934.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 158.600.640 dan jalan khusus sebesar 2.224.582.000 dikurangi akumulasi penyusutan 2.157.800,500, bangunan pembawa air irigasi sebesar 4.119.098.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1.996.066.540, bangunan pengaman sumber air dan tanah sebesar 30.126.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 9.037.800, bangunan pelengkap air bersih sebesar 23.554.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 17.076.650,00 dan jaringan listrik distribusi sebesar 162.500.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 117.812.500.		4.410.935.030,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 028/2508/BAK dan Nomor : 641.6/2164/BPPD-TP/2022 tanggal 12 Mei 2022 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya merupakan Kantor Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu sebesar 715.524.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 14.310.480,00		701.213.520,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : PLK..59/03/1270/V/2022 dan Nomor : 646.1/2269/BPPD-TP/2022 tentang Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara dan Tugu Kedaulatan NKRI untuk Diserahkan Kepada Pemda berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar 1.236.044.350,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 148.325.322,00 dan Tugu/Tanda Batas		1.146.439.028,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Administrasi sebesar 73.400.000,00, akumulasi penyusutan sebesar 14.680.000,00		
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0243/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Semareh-Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu jalan Negara sebesar 5.111.111.311,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 3.577.777.917,70, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0243/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Semareh-Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu jalan Negara sebesar 4.129.608.049,00 dikurangi akumulasi penyusutan 2.890.725.634,30 hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0477/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Ruas Desa Sepadit – Nanga Sebang – Suak Medang (Panjang 12,6 KM) jalan Negara sebesar 3.296.875.238,00 dikurangi akumulasi penyusutan 2.307.812.666,60, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0478/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Dusun Nyelawai – Rentong (Panjang 5,37 KM) jalan Negara sebesar 2.306.849.519,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1.614.794.663,30, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0484/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Desa Sungai Kelik – S. Tanju – Nanga Bayan (Panjang 10,22 KM) jalan Negara sebesar 4.333.233.194,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 3.033.263.235,80, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0245/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Poros Desa jalan Negara sebesar 2.950.484.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.065.338.800,00, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0479/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Non Status jalan Negara sebesar 2.916.352.123,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 874.905.636,90		8.679.894.879,40



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara Nomor : 192/BA/DC/2021 dan Nomor : 032/245/BPKAD/2021 berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar 15.941.731.950,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.954.633.985,00, Jaringan Pembawa sebesar 7.499.588.355,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.249.876.506,50 dan Jaringan Induk Distribusi sebesar 12.477.442.850,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 3.743.232.855,00		26.971.019.808,50
-	Dinas Pekerjaan Umum, hibah dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : PS.04.03-Bb.20/105.1 dan Nomor : 032/9/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat berupa Jembatan pada Jalan Desa sebesar 9.913.512.289,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 704.429.078,12 dan Jembatan pada Jalan Khusus sebesar 6.180.891.970,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 382.062.711,81		15.007.912.469,07
<b>b.</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>7.600.361.777,50</b>	<b>26.378.815.447,75</b>
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya TA 2022 sebesar Rp7.600.361.777,50 mengalami penurunan sebesar Rp18.778.453.670,25 atau 71.19% dari realisasi TA 2021 dengan rincian :		
-	Dinas Kesehatan, hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan BAST nomor: 442/06.12.02/DINKES-SDK.A berupa obat/BMHP/Antiseptik/Alkes Logistik, BAST nomor: 442/06.12OP/DINKES-SDK.A berupa obat dan Alkes, BAST nomor: 442/25/01OP/DINKES-SDK.A berupa bahan logistic alat kesehatan, BAST Nomor: 442/25/01TB/DINKES-SDK.A berupa obat, BAST Nomor: 442/28.01TB/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/08.02VAK2/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Regluar dan logistic, BAST nomor: 442/24.021OP/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST nomor: 442/24.03VAKREG1/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/24.02MAL/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST nomor: 442/08.03VAKHJ/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/31/03DBD/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/14.04VAKREG1/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Regulaer dan Logistik, BAST Nomor: 442/13.05VAKREG9/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/13.02VAR/DINKES berupa obat program, BAST Nomor: 442/25.05VAKREG8/DINKES-SDK.A berupa Vaksin dan logistic, BAST Nomor: 442/19.05/HEP.1/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/29.05VAKREG1/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Bian dan Logistik, BAST Nomor: 442/29.05VAKREG2/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/30.05Gz2/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/06.06TB/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/06.06/VAKREG6/DINKES-SDK.A berupa Logistik Bian,		7.600.361.777,50



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	BAST nomor: 442/06.06.01/DINKES-SDK.A berupa obat dan BMHP Covid-19/Buffer, BAST nomor: 442/16.06TB/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/24.06VAKREG1/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/27.06VAR1/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/12.12TB2/DINKES berupa obat program, BAST Nomor: 442/08.11VAKREG2/DINKES berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/21.11VAR1/DINKES berupa obat program.		
	<b>c. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>	<b>0,00</b>	<b>151.212.500,00</b>
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan di TA 2022.		
	<b>d. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa barang)</b>	<b>0,00</b>	<b>446.272.258,80</b>
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (Berupa Barang) di TA 2022.		
	<b>e. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa Uang)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa Barang) di TA 2022.		
<b>4.4.1.3.2</b>	<b>Pendapatan Lainnya – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.695.806.646,31</b>
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Hibah dana BOS	0,00	90.597.384.740,00
	- Pengembalian Hibah	0,00	4.079.930.906,31
	- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	18.491.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>94.695.806.646,31</b>
	Dengan uraian sebagai berikut:		
	<b>a. Hibah dana BOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.597.384.740,00</b>
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS di TA 2022.		
	<b>b. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.930.906,31</b>
	Tidak ada Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di TA 2022		
	<b>c. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.491.000,00</b>
	Tidak ada realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN di TA 2022.		
<b>4.4.2</b>	<b>Beban – LO</b>	<b>1.493.940.952.533,93</b>	<b>1.492.730.406.621,44</b>
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Operasi TA 2022 dan TA 2021.		



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>4.4.2.1</b>	<b>Beban Operasi – LO</b>	<b>1.493.940.952.533,93</b>	<b>1.492.730.406.621,44</b>
	Realisasi Beban Operasi TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai	617.380.287.686,56	614.173.898.876,92
	- Beban Persediaan	191.400.112.126,39	194.435.539.828,38
	- Beban Jasa	200.595.040.920,58	228.010.569.161,53
	- Beban Pemeliharaan	28.603.773.909,35	21.554.423.676,00
	- Beban Perjalanan Dinas	57.846.503.334,00	53.216.095.871,53
	- Beban Subsidi	753.471.164,00	0,00
	- Beban Hibah	28.697.721.000,00	31.419.679.900,00
	- Beban Bantuan Sosial	2.756.050.000,00	1.277.200.000,00
	- Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	- Beban Transfer	130.666.612.549,00	126.225.457.657,00
	- Beban Penyusutan	231.653.322.902,35	220.313.402.076,29
	- Beban Amortisasi	627.740.635,97	1.048.842.259,24
	- Beban Penyisihan Piutang	1.169.537.021,73	1.055.297.314,55
	- Beban Lain-lain	1.790.779.284,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.493.940.952.533,93</b>	<b>1.492.730.406.621,44</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Operasi TA 2022 sebesar Rp1.493.940.952.533,93 meningkat sebesar Rp1.210.545.912,49 atau 0,08% dari realisasi TA 2021.

<b>4.4.2.1.1</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>617.380.287.686,56</b>	<b>614.173.898.876,92</b>
	Realisasi Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan	376.575.405.505,98	375.285.620.349,92
	- Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	92.439.814.084,33	80.955.844.556,00
	- Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	124.904.688.191,25	137.936.448.143,00
	- Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.593.962.391,00	19.057.842.460,00
	- Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	218.269.014,00	246.840.914,00
	- Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	648.148.500,00	691.302.454,00
	- Honorarium PNS	0,00	0,00
	- Honorarium non PNS	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>617.380.287.686,56</b>	<b>614.173.898.876,92</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai TA 2022 sebesar Rp617.380.287.686,56 meningkat sebesar Rp3.206.388.809,64 atau 0,52% dari realisasi TA 2021.

TA 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Honorarium PNS dan Non PNS mapping ke akun Jasa Kantor.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>a.</b>	<b>Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan</b>	<b>376.567.080.405,98</b>	<b>375.285.620.349,92</b>
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan tunjangan TA 2022 sebesar Rp376.567.080.405,98 meningkat sebesar Rp1.281.460.056,06 atau 0,34% dari realisasi TA 2021.		
<b>b.</b>	<b>Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>92.439.814.084,33</b>	<b>80.955.844.556,00</b>
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan penghasilan ASN TA 2022 sebesar Rp92.439.814.084,33 meningkat sebesar Rp11.483.969.528,33 atau 14,19% dari realisasi TA 2021.		
<b>c.</b>	<b>Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN</b>	<b>124.904.688.191,25</b>	<b>137.936.448.143,00</b>
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2022 sebesar Rp124.904.688.191,25, menurun sebesar Rp13.031.759.951,75 atau 9,45% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Komukasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.		
<b>d.</b>	<b>Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>22.593.962.391,00</b>	<b>19.057.842.460,00</b>
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022 sebesar Rp22.593.962.391,00 meningkat sebesar Rp3.536.119.931,00 atau 18,55% dari realisasi TA 2021.		
<b>e.</b>	<b>Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>218.269.014,00</b>	<b>246.840.914,00</b>
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2022 sebesar Rp218.269.014,00 menurun sebesar Rp28.571.900,00 atau 11,58% dari realisasi TA 2021.		
<b>f.</b>	<b>Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>648.148.500,00</b>	<b>691.302.454,00</b>
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2022 sebesar Rp648.148.500,00 menurun sebesar Rp43.153.954,00 atau 6,66% dari realisasi TA 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH./WKDH.		
<b>4.4.2.1.2</b>	<b>Beban Persediaan</b>	<b>191.400.112.126,39</b>	<b>194.435.539.828,38</b>
	Realisasi Beban Persediaan TA 2022 dan TA 2021 hanya terdiri dari Beban Bahan Pakai Habis dan Beban Hibah Barang yang diserahkan.		
	Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Persediaan TA 2022 sebesar Rp191.400.112.126,39, menurun sebesar Rp3.035.427.701,99 atau sebesar 1,56% dari realisasi TA 2021. Realisasi Beban Persediaan pada Beban Bahan Pakai Habis TA 2022 dan TA 2021 yaitu:		
	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>		
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.053.125.603,17	10.273785327,98
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	89.459.500,00	179.725.634,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.705.829.607,00	11.817.058.795,43
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	364.391.200,00	546.243.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.002.373.312,98	2.448.820.650,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.430.586.298,00	1.466.666.384,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.526.360.975,00	1.573.579.319,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	318.108.350,00	117.452.500,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.286.074.950,00	885.868.050,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	361.053.000,00	117.629.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.329.227.326,05	5.851.155.462,38
-	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.093.908.163,14	15.016.053.185,84
-	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.764.881.537,00	4.344.819.705,00
-	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
-	Beban Pengisian Tabung Gas	4.080.619.566,00	8.722.213.025,00
-	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.629.178.042,00	68.421.621,00
-	Beban bahan/bibit tanaman	38.917.750,00	3.437.500,00
-	Beban bahan dan obat-obatan	14.284.123.177,07	17.099.686.881,68
-	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.332.239.465,93	18.876.368.615,70
-	Beban Bahan Kimia	3.020.524.557,05	14.756.755.175,00
-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	265.100,00	45.318.140,00
-	Beban Bahan-bahan Baku	514.421.960,00	2.298.270.968,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	702.635.177,00	294.292.414,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	19.071.500,00	1.774.939.616,80
-	Beban Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar	74.991.000,00	0,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.205.000,00	816.560,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	33.736.500,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	31.474.600,00	35.995.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.122.103.707,00	6.198.399.850,00
-	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.797.171.810,00	3.124.014.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	474.993.400,00	2.635.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.697.568.200,00	1.670.175.085,00
-	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.562.619.600,00	8.131.426.500,00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	22.604.040,00	0,00
-	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	292.130.800,00	8.499.400,00
-	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	24.522.680,00	37.677.500,00
-	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	617.185.100,00	623.913.900,00
-	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	41.004.670,00	96.760.000,00
-	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	190.354.200,00	32.792.000,00
-	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	78.713.450,00	26.908.200,00
-	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	10.450.000,00
-	Beban Pakaian Siaga	889.011.584,00	611.217.536,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Beban Pakaian Pelatihan Kerja	112.650.000,00	0,00
	- Beban Pakaian Kerja Laboratorium	30.827.702,00	0,00
	- Beban Pakaian KORPRI	136.251.500,00	6.445.000,00
	- Beban Pakaian Batik Tradisional	486.440.650,00	105.914.000,00
	- Beban Pakaian Olahraga	435.956.000,00	472.595.000,00
	- Beban Pakaian Paskibraka	233.185.000,00	100.000.000,00
	- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.810.136.924,00	12.843.260.673,00
	- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.980.000,00	8.037.592.800,00
	<b>Beban Barang Tak Pakai Habis</b>		
	- Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.672.000,00	0,00
	<b>Beban persediaan dari mapping beban hibah barang</b>		
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.370.956.500,00
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	758.800.000,00
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.183.546.567,00	5.283.405.700,00
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.332.435.825,00	24.152.469.163,00
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	2.062.122.291,00
	- Beban Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>191.400.112.126,39</b>	<b>194.435.539.828,38</b>

Pada tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan mengenai pengelompokan beban persediaan yang sebelumnya Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dikelompokkan dalam beban jasa maka pada tahun ini dikelompokkan menjadi beban persediaan. Sehingga terjadi peningkatan Realisasi Beban Persediaan Bahan Pakai Habis TA 2022.

<b>4.4.2.1.3</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>200.595.040.920,58</b>	<b>228.010.569.161,53</b>
	Realisasi Beban Jasa TA 2021 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Jasa Kantor	149.364.288.899,33	185.167.298.397,42
	- Beban Iuran Jaminan Asuransi	38.408.340.766,25	30.134.488.780,23
	- Beban Sewa Tanah	2.100.000,00	121.640.000,00
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	921.887.925,00	404.170.000,00
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.112.962.000,00	961.769.232,88
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	89.198.000,00	42.500.000,00
	- Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	2.238.889.820,00	1.942.738.500,00
	- Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	2.600.730.650,00	1.740.124.800,00
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	644.015.000,00	632.400.000,00
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.079.823.917,00	385.130.000,00
	- Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	172.565.625,00	216.838.011,00





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	25.243.699,00	12.189.840,00
-	Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat	2.934.994.619,00	6.249.281.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>200.595.040.920,58</b>	<b>228.010.569.161,53</b>
<b>a.</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>149.364.288.899,33</b>	<b>185.167.298.397,42</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Kantor TA 2022 sebesar Rp149.364.288.899,33 menurun sebesar Rp35.803.009.498,09 atau 19,34% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>b.</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Asuransi</b>	<b>38.408.340.766,25</b>	<b>30.134.488.780,23</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Iuran Jaminan Asuransi TA 2022 sebesar Rp38.408.340.766,25 meningkat sebesar Rp8.273.851.986,02 atau 27,46% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>c.</b>	<b>Beban Sewa Tanah</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>121.640.000,00</b>
	Realisasi Beban Sewa Tanah TA 2022 sebesar Rp2.100.000,00 menurun sebesar Rp119.540.000,00 atau 98,27% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>d.</b>	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>921.887.925,00</b>	<b>404.170.000,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp921.887.925,00 meningkat sebesar Rp517.717.925,00 atau 128,09% dari realisasi TA 2021 pada Dinas Kesehatan, RSUD Ade.M Djoen, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
<b>e.</b>	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.112.962.000,00</b>	<b>961.769.232,88</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp1.112.962.000,00 meningkat sebesar Rp151.192.767,12 atau 15,72 % dari realisasi TA 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSP Pratama Serawai, Kelurahan Rawa Mambok, Kelurahan Sengkuang, RSUD. Ade M. Djoen.		
<b>f.</b>	<b>Beban Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>89.198.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp89.198.000,00 meningkat sebesar Rp46.698.000,00 atau 109,88% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah.		
<b>g.</b>	<b>Beban Jasa Konsultasi Konstruksi</b>	<b>2.238.889.820,00</b>	<b>1.942.738.500,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2022 sebesar Rp2.238.889.820,00 meningkat sebesar Rp296.151.320,00 atau 15,24% pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan		



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kaawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>h.</b>	<b>Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi</b>	<b>2.600.730.650,00</b>	<b>1.740.124.800,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2022 sebesar Rp2.600.730.650,00 meningkat sebesar Rp860.605.850,00 atau 49,46% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Ade.M Djoen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pe, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.		
<b>i.</b>	<b>Beban Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>644.015.000,00</b>	<b>632.400.000,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Beasiswa Pendidikan PNS TA 2022 sebesar Rp644.015.000,00 meningkat sebesar Rp11.615.000,00 atau 1,84 % dari realisasi TA 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.		
<b>j.</b>	<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>2.079.823.917,00</b>	<b>385.130.000,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2022 sebesar Rp2.079.823.917,00 meningkat sebesar Rp1.694.693.917,00 atau 440,03 % dari realisasi TA 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Ade M. Djoen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.		
<b>k.</b>	<b>Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN</b>	<b>172.565.625,00</b>	<b>216.838.011,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN pada TA 2022 sebesar Rp172.565.625,00 menurun sebesar Rp44.272.386,00 atau sebesar 20,42% pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>l.</b>	<b>Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi</b>	<b>25.243.699,00</b>	<b>12.189.840,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi pada TA2022 sebesar Rp25.243.699,00 meningkat sebesar Rp13.053.859,00 atau 107,09% pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.		
<b>m.</b>	<b>Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat</b>	<b>2.934.994.619,00</b>	<b>6.249.281.600,00</b>
	Realisasi Beban Jasa dari Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada tahun 2022 sebesar Rp2.934.994.619,00 menurun sebesar Rp3.314.286.981,00 atau 53,03% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,		



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Sintang.		
<b>4.4.2.1.4</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>28.603.773.909,35</b>	<b>21.554.423.676,00</b>
	Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00
	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.725.267.766,00	5.788.785.335,00
	- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.789.009.598,35	6.155.355.041,00
	- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.089.496.545,00	9.610.283.300,00
	- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	- Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.603.773.909,35</b>	<b>21.554.423.676,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp28.603.773.909,35 meningkat sebesar Rp7.049.350.7233350 atau 32,70% dari realisasi TA 2021.		
<b>a.</b>	<b>Beban Pemeliharaan Tanah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan tanah di TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>b.</b>	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>6.725.267.766,00</b>	<b>5.788.785.335,00</b>
	Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp6.725.267.766,00 meningkat sebesar Rp936.482.431,00 atau 16,18% dari realisasi TA 2021 pada SKPD di Kabupaten Sintang.		
<b>c.</b>	<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>3.789.009.598,35</b>	<b>6.155.355.041,00</b>
	Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp3.789.009.598,35 menurun sebesar Rp2.366.345.442,65 atau 38,44% dari realisasi TA 2021 pada SKPD di Kabupaten Sintang.		
<b>d.</b>	<b>Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>18.089.496.545,00</b>	<b>9.610.283.300,00</b>
	Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp18.089.496.545,00 meningkat sebesar Rp8,479,213,245,00 atau 88,23% dari realisasi TA 2021 pada SKPD di Kabupaten Sintang.		
<b>e.</b>	<b>Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya di TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>f.</b>	<b>Beban Pemeliharaan Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan Aset Lainnya di TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>4.4.2.1.5</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>57.846.503.334,00</b>	<b>53.216.095.871,53</b>
	Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.715.849.397,00	8.810.443.967,53
	- Beban Perjalanan Dinas Tetap	64.155.000,00	0,00



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.948.673.937,00	32.871.637.307,00
-	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	92.825.000,00	11.466.274.467,00
-	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.000.000,00	67.740.130,00
-	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00
-	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00
-	Beban Transportasi Akomodasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.846.503.334,00</b>	<b>53.216.095.871,53</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2022 sebesar Rp57.846.503.334,00 meningkat sebesar Rp4.630.407.462,47 atau 8,70% dari realisasi TA 2021.

- a. Beban Perjalanan Dinas Biasa** **17.715.849.397,00** **8.810.443.967,53**  
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Biasa TA 2022 sebesar Rp17.715.849.397,00 meningkat sebesar Rp8.905.405.429,47 atau 101,08% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- b. Beban Perjalanan Dinas Tetap** **64.155.000,00** **0,00**  
Terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Tetap TA 2022 sebesar Rp64.155.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota** **39.948.673.937,00** **32.871.637.307,00**  
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota TA 2022 sebesar Rp39.948.673.937,00 meningkat sebesar Rp7.077.036.630,00 atau 21,53% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- d. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** **92.825.000,00** **11.466.274.467,00**  
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota TA 2022 sebesar Rp92.825.000,00 menurun sebesar Rp11.373.449.467,00 atau 99,19% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- e. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota** **25.000.000,00** **67.740.130,00**  
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota TA 2022 sebesar Rp25.000.000,00 menurun sebesar Rp42.740.130,00 atau 63,09% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- f. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah** **0,00** **0,00**  
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.
- g. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri** **0,00** **0,00**  
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri di TA 2022 dan 2021.
- h. Beban Transportasi Akomodasi** **0,00** **0,00**  
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Transportasi Akomodasi TA pada SKPD Kabupaten Sintang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>4.4.2.1.6</b>	<b>Beban Subsidi</b>	<b>753.471.164,00</b>	<b>0,00</b>
	Realisasi Beban Subsidi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dengan TA 2021 terdiri dari:		
	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	41.400.000,00	0,00
	Beban Subsidi kepada BUMD	712.071.164,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>753.471.164,00</b>	<b>0,00</b>
	Beban Subsidi kepada BUMD merupakan Beban Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 690/1259/KEP-DPRKP/2022 tanggal 24 November 2022, tentang Penetapan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dengan dasar perhitungan Laporan Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Buku 2021 Nomor : PE.01.03/LEV-162/PW14/4/2022 tanggal 31 Mei 2022 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/10432/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp712.071.164,00.		
	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta merupakan Beban Subsidi kepada Pelaku usaha angkutan umum transportasi darat dan sungai di Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Penetapan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 551.2/798/Dishub-B/2022 tentang hasil survey pendataan kepada pelaku usaha angkutan umum darat dan sungai tanggal 14 Desember 2022 berdasarkan pencairan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09725/LS/2.15.5.04.2.13.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp41.400.000,00.		
<b>4.4.2.1.7</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>28.697.721.000,00</b>	<b>31.419.679.900,00</b>
	Realisasi Beban Hibah TA 2022 Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dengan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	275.000.000,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	27.966.087.000,00	30.413.045.900,00
	- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,00	0,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Masyarakat	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.697.721.000,00</b>	<b>31.419.679.900,00</b>
	<b>a. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000.000,00</b>
	Tidak ada realisasi Beban Hibah Kepada Pemerintah di TA 2022.		
	<b>b. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak terdapat realisasi beban hibah uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.		
	<b>c. Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>27.966.087.000,00</b>	<b>30.413.045.900,00</b>
	Realisasi Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 sebesar Rp27.966.087.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.446.958.900,00 atau 8,05% dari realisasi TA 2021.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	<p>Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 21 yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di setiap SKPD pada akhir periode akuntansi dikonversi ke Kelompok Beban Hibah.</p>		
	<p>Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diberikan kepada Lembaga Anti Narkotika, Karang Taruna Desa Senangan Jaya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sintang, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang, serta Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sintang.</p>		
	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 900/129/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Berupa bantuan uang pada bidang pendidikan kepada 7 PAUD dan Taman Kanak-Kanak, pengadaan sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar dan bantuan operasional untuk MTs. Serta bantuan bidang kebudayaan pada 16 Sanggar, Komunitas dan Paguyuban serta Lembaga Swadaya Masyarakat.</p>		
	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1187/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1106/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Sekretariat Pengurus Organisasi Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) cabang Sintang, Nano Futsal Academy (NAFUSA), Karang Taruna Pemuda Merdeka, Club Basket Panca Setya Sintang, King Rattle Club cabang Sintang, Sintang Hard Enduro Community (SHERCO), Club Basket UNKA, Karang Taruna Mutiara Jaya, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sintang, Majelis Pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sintang, Ikatan Pemuda Dayak Desa Wilayah Kayan (IPDDWK), dan Kwatir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang.</p>		
	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan nonprofesional, dan organisasi kemasyarakatan</p>		
	<p>- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	5,431,738.000,00	5.260.156.250,00
	<p>- Dinas Pertanian dan Perkebunan</p>	1.467.550.000,00	3.847.220.000,00
	<p>- Sekretariat Daerah</p>	15.726.799.000,00	20.028.192.650,00
	<p>- Dinas Lingkungan Hidup</p>	0,00	1.092.477.000,00



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	35.000.000,00
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.340.000.000,00	150.000.000,00
	<b>Jumlah Konversi</b>	<b>27.966.087.000,00</b>	<b>30.413.045.900,00</b>
	- PPKD	0,00	0,00
	<b>Jumlah Keseluruhan Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>27.966.087.000,00</b>	<b>30.413.045.900,00</b>
<b>d.</b>	<b>Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>731.634.000,00</b>	<b>731.634.000,00</b>
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 213/668/KEP-KESBANGPOL-D/2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 di TA 2022. Tidak ada Peningkatan atau Penurunan Realisasi Beban Bantuan Keuangan TA 2022 dengan realisasi TA 2021 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
<b>e.</b>	<b>Beban Hibah Uang Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak terdapat Realisasi Beban Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian di TA 2022.		
<b>f.</b>	<b>Beban Hibah Uang Kepada Masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	a. Beban Hibah Bidang Pendidikan	0,00	0,00
	b. Beban Hibah Bidang Kesehatan	0,00	0,00
	c. Beban Hibah Bidang Keagamaan	0,00	0,00
	d. Beban Hibah Bidang Kesenian	0,00	0,00
	e. Beban Hibah Bidang Adat Istiadat	0,00	0,00
	f. Beban Hibah Bidang Keolahragaan non Profesional	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak ada Realisasi Beban Hibah kepada Masyarakat di TA 2022.		
<b>4.4.2.1.8</b>	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>2.756.050.000,00</b>	<b>1.277.200.000,00</b>
	Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Bantuan Sosial Kepada Individu	936.000.000,00	25.000.000,00
	- Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.384.000.000,00	980.000.000,00
	- Bantuan Sosial Kepada Keluarga	436.050.000,00	272.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.756.050.000,00</b>	<b>1.277.200.000,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp2.756.050.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.478.850.000,00 atau 115,79% dari tahun 2021.		
	- Sekretariat Daerah	0,00	25.000.000,00
	- Dinas Sosial	1.256.250.000,00	272.200.000,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.214.000.000,00	0,00
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	285.800.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	980.000.000,00
	- PPKD		0,00
	<b>Jumlah Keseluruhan Beban Bantuan Sosial</b>	<b>2.756.050.000,00</b>	<b>1.277.200.000,00</b>
<b>4.4.2.1.9</b>	<b>Beban Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Beban Bantuan Keuangan di Tahun 2022 di kelompokkan ke dalam beban Hibah.		
<b>4.4.2.1.10</b>	<b>Beban Transfer</b>	<b>130.666.612.549,00</b>	<b>126.225.457.657,00</b>
	Realisasi Beban Transfer TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Transfer Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00
	- Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	120.273.710.714,00	120.056.871.077,00
	- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.732.200.000,00	5.722.989.894,00
	- Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	610.701.835,00	445.596.686,00
	<b>Jumlah</b>	<b>130.666.612.549,00</b>	<b>126.225.457.657,00</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Transfer TA 2022 sebesar Rp130.666.612.549,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.441.154.892,00 atau 3,52% dari TA 2021.		
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 252 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Transfer Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2022 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan.		
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2022 sebesar Rp120.273.710.714,00 menurun sebesar Rp216.839.637,00 atau 0,18% dari realisasi TA 2021.		
	Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Sintang yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2022.		
	- Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa TA 2022 sebesar Rp9.732.200.000,00 meningkat sebesar Rp4.009.210.106,00 atau 70,05% dari realisasi TA 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Desa.		
	- Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa TA 2022 sebesar Rp610.701.835,00 meningkat sebesar Rp165.105.149,00 atau 37,05% dari realisasi TA 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
<b>4.4.2.1.11</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>231.653.322.902,35</b>	<b>220.313.402.076,29</b>
	Realisasi Beban Penyusutan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	74.256.918.108,06	76.670.276.320,89
	- Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	30.370.527.724,43	29.054.886.539,24
	- Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	126.948.253.703,39	114.506.665.849,59
	- Beban Penyusutan Aset lain-lain	77.623.366,47	81.573.366,57
	<b>Jumlah</b>	<b>231.653.322.902,35</b>	<b>220.313.402.076,29</b>
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyusutan TA 2022 sebesar 231.653.322.902,35 meningkat sebesar 11.339.920.826,06 atau 5,15% dari realisasi TA 2021.		





Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>a.</b>	<b>Beban penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>74.256.918.108,06</b>	<b>76.670.276.320,89</b>
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp74.256.918.108,06 menurun sebesar Rp2.413.358.212,83 atau 3,15% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>b.</b>	<b>Beban penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>30.370.527.724,43</b>	<b>29.054.886.539,24</b>
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp30.370.527.724,43 meningkat sebesar Rp1.315.641.185,19 atau 4,53% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>c.</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi</b>	<b>126.948.253.703,39</b>	<b>114.506.665.849,59</b>
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2022 sebesar Rp126.948.253.703,39 meningkat sebesar Rp12.441.587.853,80 atau 10,87% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>d.</b>	<b>Beban Penyusutan Aset lain-lain</b>	<b>77.623.366,47</b>	<b>81.573.366,57</b>
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan lain-lain TA 2022 sebesar Rp77.623.366,47 menurun sebesar Rp3.950.000,10 atau 4,84 % dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
<b>4.4.2.1.12</b>	<b>Beban Amortisasi</b>	<b>627.740.635,97</b>	<b>1.048.842.259,24</b>
	Realisasi Beban Amortisasi TA 2022 sebesar Rp627.740.635,97 menurun sebesar Rp421.101.623,27 atau 40,15% dari TA 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Kecamatan Sintang.		
<b>4.4.2.1.13</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>1.169.537.021,73</b>	<b>1.055.297.314,55</b>
	Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2022 sebesar Rp1.169.537.021,73, meningkat sebesar Rp114.239.707,18 atau 10,83% dari realisasi TA 2021. Realisasai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Penyisihan Piutang Pajak	846.153.108,00	779.645.300,25
	- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	18.212.232,50	282.272,50
	- Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	0,00	0,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	25.187.601,36	0,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	279.984.079,87	275.369.741,80
	<b>Jumlah</b>	<b>1.169.537.021,73</b>	<b>1.055.297.314,55</b>
<b>a.</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>846.153.108,00</b>	<b>779.645.300,25</b>
	Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2022 sebesar Rp846.153.108,00 meningkat sebesar Rp66.507.807,75 atau 8,53% dari realisasi TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	<b>b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>18.212.232,50</b>	<b>282.272,50</b>
	Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2022 sebesar Rp18.212.232,50 menurun sebesar Rp17.929.960,00 atau 6352% dari realisasi TA 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
	<b>c. Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tidak terdapat Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar di TA 2022.		
	<b>d. Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)</b>	<b>25.187.601,36</b>	<b>0,00</b>
	Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lainnya (ganti rugi) di TA 2022 sebesar Rp25.187.601,36 meningkat 100% dari TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<b>e. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>279.984.079,87</b>	<b>275.369.741,80</b>
	Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah TA 2022 sebesar Rp279.984.079,87 meningkat sebesar Rp4.614.338,07 atau 1,68% dari realisasi TA 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
<b>4.4.2.1.14</b>	<b>Beban Lain-lain</b>	<b>1.790.779.284,00</b>	<b>0,00</b>
	Terdapat realisasi Beban lain-lain atau Beban tak terduga dari penyesuaian Belanja Tak Terduga di TA 2022 sebesar Rp1.790.779.284,00 meningkat 100% dari TA 2021.		
<b>4.4.3</b>	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
<b>4.4.3.1</b>	<b>Surplus Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>293.669.239,12</b>	<b>249.322.009,41</b>
	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 sebesar Rp293.669.239,12 meningkat sebesar Rp44.347.229,71 atau 17,79% dari realisasi TA 2021. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	45.925.622,28
	- Surplus Penyelesaian Kewajiban	0,00	30.581.000,00
	- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	293.669.239,12	172.815.387,13
	<b>Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>293.669.239,12</b>	<b>249.322.009,41</b>
<b>4.4.3.2</b>	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(4.126.221.904,23)</b>	<b>(7.044.642.067,26)</b>
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 sebesar (Rp4.126.221.904,23) menurun sebesar (Rp2.918.420.163,03) atau 41,43% dari realisasi TA 2021. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Defisit Penjualan Aset Non Lancar	4.126.221.904,23	7.044.642.067,26
	- Defisit Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00
	- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.126.221.904,23	7.044.642.067,26
	<b>Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>4.126.221.904,23</b>	<b>7.044.642.067,26</b>
	<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(3.832.552.665,11)</b>	<b>(6.795.320.057,85)</b>
	<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>
<b>a.</b>	<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar</b>	<b>0,00</b>	<b>45.925.622,28</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Tidak ada Realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar di Tahun 2022.		
<b>b.</b>	<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>30.581.000,00</b>
	Tidak Ada Realisasi Surplus Penyelesaian Kewajiban di TA 2022.		
<b>c.</b>	<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(3.832.552.665,11)</b>	
	<b>Lainnya</b>		
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<b>293.669.239,12</b>	
-	Koreksi lebih catat penyisihan piutang Pajak hotel yang telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2022	18.500.000,00	
-	Koreksi lebih catat penyisihan Piutang Pajak Restoran	378.250,00	
-	Koreksi lebih catat penyisihan Piutang pajak Hiburan	350.000,00	
-	Koreksi lebih catat penyisihan Piutang Pajak Hiburan Reklame	263.300,00	
-	Koreksi lebih catat penyisihan Piutang Pajak Air Tanah yang telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2022	237.600,00	
-	Koreksi kurang catat penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayarkan pada tahun 2022	114.758.534,88	
-	Penghapusan utang retensi yang lebih dari dua tahun yang sudah tidak dibayarkan lagi pihak ke 3 menjadi surplus dari kegiatan non operasional.	7.058.950,00	
-	Pelunasan Piutang Bagian Lancar Tagihan kendaraan dan rumah dinas Bappenda 2022 yg sudah disisihkan	152.122.604,24	
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<b>(4.126.221.904,23)</b>	
-	Defisit dari Penghapusan Aset Tetap berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/117/KEP-BPKAD/2022 berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan	34.010.000,00	
-	Defisit dari Penghapusan Aset Tetap adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/141/KEP-BPKAD/2022 berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah) di tahun 2022	753.777.330,40	
-	Defisit dari adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan keputusan sekretaris daerah	157.948.560,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Kabupaten Sintang Nomor 032/123/KEP-BPKAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan (Pasar Hutan Wisata) dari daftar barang pengguna barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2022		
-	Defisit dari adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan keputusan sekretaris daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/142/KEP-BPKAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan (Sekolah Dasar Negeri 27 Pauh Desa Kecamatan Kayan Hilir) dari daftar barang pengguna barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2022	362.291.128,79	
-	Koreksi pengurangan investasi permanen penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang terdapat kerugian tahun berjalan dari 79,99% kepemilikan Kabupaten Sintang	2.797.484.885,04	
-	Penyesuaian akun R/K PPKD atas kurang catat Defisit dari kegiatan Non Operasional penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD	20.710.000,00	
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar (Rp2.918.420.163,03) atau sebesar 41,43%. Selisih yang signifikan disebabkan karena adanya penghapusan aset tetap berupa gedung dan bangunan di Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Inspektorat, Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sepauk. Perubahan kebijakan pada tahun 2022 untuk aset dibawah kapitalisasi di reklasifikasi keakun beban operasional sedangkan pada tahun 2021 langsung dihapuskan dari pembukuan dengan menjadikan sebagai kerugian investasi.		
<b>4.4.4</b>	<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Realisasi Pos Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
-	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5</b>	<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>
	Tabel di bawah menunjukkan Defisit – LO TA 2022 sebesar Rp569.075.304.314,60 meningkat sebesar Rp368.733.294.574,18 atau 184,05% dari surplus TA 2021. Defisit– LO Tahun Anggaran 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut.		
-	Pendapatan – LO (1)	2.066.848.809.513,64	1.699.867.736.419,71
-	Beban – LO (2)	1.493.940.952.533,93	1.492.730.406.621,44
-	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (3 = 1 – 2)	573.268.122.753,71	207.137.329.798,27



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

---

<b>Ref</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
-	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4)	(3.832.552.665,11)	(6.795.320.057,85)
-	Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (5 = 3 + 4)	569.075.304.314,60	200.342.009.740,42
-	Pos Luar Biasa (6)	0,00	0,00
-	<b>Surplus/Defisit – LO (7 = 5 + 6)</b>	<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

#### 4.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan, Transitoris/Non Anggaran berdasarkan Realisasi Anggaran.		
<b>4.5.1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>166.454.362.758,27</b>	<b>417.465.520.094,90</b>
	Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Terdapat perubahan metode penyajian Laporan Arus Kas, pada TA 2022 dan 2021 menggunakan metode langsung.		
<b>4.5.1.1</b>	<b>Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>1.779.595.118.870,58</b>	<b>2.004.387.065.517,10</b>
	Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	1. Penerimaan Pajak Daerah	41.665.868.567,10	44.901.339.051,50
	2. Penerimaan Retribusi Daerah	3.511.868.658,24	3.165.373.258,40
	3. Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.709.858.275,00	10.862.613.298,00
	4. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.056.313.252,12	117.281.263.942,32
	5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	46.478.342.269,00	69.057.394.705,00
	6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.115.553.000,00	30.134.354.819,00
	7. Penerimaan Dana Alokasi Umum	836.375.896.418,00	837.189.641.000,00
	8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	279.634.924.483,00	350.710.971.625,00
	9. Penerimaan Dana Penyesuaian	342.843.467.000,00	348.528.098.000,00
	10. Penerimaan Dana Insentif Daerah	10.663.906.000,00	7.519.190.000,00
	11. Penerimaan Dana Transfer Provinsi	81.519.120.948,12	90.300.977.671,57
	12. Penerimaan Hibah	4.020.000.000,00	40.000.000,00
	13. Pemdapatan Lainnya	0,00	94.695.848.146,31
	14. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>1.779.595.118.870,58</b>	<b>2.004.387.065.517,10</b>
<b>4.5.1.2</b>	<b>Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>1.613.140.756.112,31</b>	<b>1.586.921.545.422,20</b>
	Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	1. Pembayaran Pegawai	627.666.020.862,56	648.859.358.337,00
	2. Pembayaran Barang dan Jasa	472.573.551.860,75	395.694.786.136,28
	3. Pembayaran Subsidi	753.471.164,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	4. Pembayaran Hibah	34.080.803.392,00	64.288.633.554,00
	5. Pembayaran Bantuan Sosial	2.756.050.000,00	980.000.000,00
	6. Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	7. Pembayaran Tak Terduga	1.800.779.284,00	2.345.211.737,92
	8. Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.342.901.835,00	6.168.586.580,00
	9. Pembayaran Transfer Dana Desa	463.167.177.714,00	468.584.969.077,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>1.613.140.756.112,31</b>	<b>1.586.921.545.422,20</b>
<b>4.5.1.3</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A = I – II)</b>	<b>166.454.362.758,27</b>	<b>417.465.520.094,90</b>
	Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (I)	1.779.595.118.870,58	2.004.387.065.517,10
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi (II)	1.613.140.756.112,31	1.586.921.545.422,20
	<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>166.454.362.758,27</b>	<b>417.465.520.094,90</b>
	Pada TA 2022 mengalami penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp251.011.157.336,63 atau 60,00% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2021.		
<b>4.5.2</b>	<b>ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(198.423.651.009,00)</b>	<b>(272.840.907.187,00)</b>
	Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.		
<b>4.5.2.1</b>	<b>Arus Kas Masuk (III)</b>	<b>422.808.650,00</b>	<b>309.757.100,00</b>
	Arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	50.200.000,00	7.953.000,00
	2. Penjualan Gedung dan Bangunan	372.608.650,00	301.804.100,00
	3. Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>422.808.650,00</b>	<b>309.757.100,00</b>
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp.50.200.000,00 merupakan angsuran penjualan kendaraan bermotor sedangkan penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp.372.608.650,00 merupakan angsuran penjualan Rumah Dinas Golongan III. ((termasuk dari bongkaran gedung dan bangunan yang terjual))		
<b>4.5.2.2</b>	<b>Arus Kas Keluar (IV)</b>	<b>198.846.459.659,00</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
	Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1. Perolehan Tanah	760.147.200,00	3.114.842.800,00
	2. Perolehan Peralatan dan Mesin	40.565.232.108,00	72.458.838.616,00
	3. Perolehan Gedung dan Bangunan	39.754.346.725,00	66.687.416.666,00
	4. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.293.037.810,00	121.390.855.062,00
	5. Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.973.695.816,00	9.498.711.143,00
	6. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
	7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	0,00
	8. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>198.846.459.659,00</b>	<b>273.150.664.287,00</b>
<b>4.5.2.3</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B = III – IV)</b>	<b>(198.423.651.009,00)</b>	<b>(272.840.907.187,00)</b>
	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas aset non keuangan dengan arus kas keluar dari aktivitas aset non keuangan. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (III)	422.808.650,00	309.757.100,00
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi (IV)	198.846.459.659,00	273.150.664.287,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(198.423.651.009,00)</b>	<b>(272.840.907.187,00)</b>
	Kedadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi non keuangan dari penerimaannya. Pada TA 2022 terjadi kenaikan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp. 74.417.256.178,00 atau 27,27% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2021.		
<b>4.5.3</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.123.423,00)</b>
	Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan non anggaran yaitu:		
	1. Pemungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa potongan atas IWP, Taperum, HKPG, potongan Askes dan potongan pajak yang dipotong oleh BUD dan Bendahara SKPD yang termasuk didalamnya belanja pengesahan BLUD dan Belanja Tidak Terduga		
	2. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
<b>4.5.3.1</b>	<b>Arus Kas Masuk (V)</b>	<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.655.747.895,23</b>
	Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	23.575.237.338,00	34.101.133.413,000
	2. Utang PFK Taperum	0,00	0,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	21.683.917.808,28	24.343.254.169,754
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.453.829.563,17	1.957.947.173,126





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	679.443.350,43	792.835.229,636
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	3.026.974.726,42	3.965.843.267,636
	7. Utang PFK PPh Pasal 25	1.486.486,00	0,00
	8. Utang PFK PPN	27.751.266.272,49	35.538.087.432,533
	9. Utang PFK PHR	1.649.062.872,55	655.985.410,545
	10. Utang TAPERA	0,00	0,00
	11. Utang iuran JKK	578.304.979,00	825.600.717,000
	12. Utang iuran JKM	1.734.919.059,00	2.476.802.289,000
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	14.501.000.902,00	19.998.258.793,000
	14. Utang PFK Galian	0,00	0,00
	15. Utang TASPEN	0,00	0,00
	16. Utang PFK Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan PFK (1)</b>	<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.655.747.895,23</b>
	1. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Non Anggaran (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (1+2)</b>	<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.655.747.895,23</b>
<b>4.5.3.2</b>	<b>Arus Kas Keluar (VI)</b>	<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.669.871.318,23</b>
	Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	23.575.237.338,00	34.101.133.413,000
	2. Utang PFK Taperum	0,00	0,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	21.683.917.808,28	24.343.254.169,754
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.453.829.563,17	1.957.947.173,126
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	679.443.350,43	792.835.229,636
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	3.026.974.726,42	3.965.843.267,636
	7. Utang PFK PPh Pasal 25	1.486.486,00	0,00
	8. Utang PFK PPN	27.751.266.272,49	35.538.087.432,533
	9. Utang PFK PHR	1.649.062.872,55	655.985.410,545
	10. Utang TAPERA	0,00	0,00
	11. Utang iuran JKK	578.304.979,00	825.600.717,000
	12. Utang iuran JKM	1.734.919.059,00	2.476.802.289,000
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	14.501.000.902,00	19.998.258.793,000
	14. Utang PFK Galian	0,00	0,00
	15. Utang TAPERA	0,00	0,00
	16. Utang PFK Lainnya	0,00	14.123.423,00
	<b>Jumlah Pengeluaran PFK (1)</b>	<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.669.871.318,23</b>
	2. Pengeluaran Non Anggaran		
	1. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Non Anggaran (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (1+2)</b>	<b>96.635.443.357,34</b>	<b>124.669.871.318,23</b>



Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4.5.3.3	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C = V – VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.123.423,00)</b>
	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas non anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran (V)	96.635.443.357,34	124.655.747.895,23
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran (VI)	96.635.443.357,34	124.669.871.318,23
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.123.423,00)</b>
	Aktivitas Non Anggaran di atas merupakan PFK yang dipotong langsung dari pencairan SP2D LS dan PFK yang dipungut dan disetor Bendahara Pengeluaran SKPD. Pada TA 2022 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp14.123.423,00 atau 100% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2021.		
4.5.4	<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas</b>	<b>(31.969.288.250,73)</b>	<b>144.610.489.484,90</b>
	Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode akuntansi merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, dan aktivitas transitoris/non anggaran. Jumlah kenaikan/penurunan bersih kas BUD selama periode tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.144.610.489.484,90 dan Rp.( 31.969.288.250,73), rincian kenaikan sebesar Rp. 112.641.201.234,17 atau 77,89% dibandingkan dengan perhitungan Kenaikan/penurunan bersih kas tahun 2021 sebagai berikut:		
	1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A)	166.454.362.758,27	417.465.520.094,90
	2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B)	(198.423.651.009,00)	(272.840.907.187,00)
	3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C)	0,00	(14.123.423,00)
	<b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas (D = A + B + C)</b>	<b>(31.969.288.250,73)</b>	<b>144.610.489.484,90</b>
	<b>Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP (E)</b>	<b>190.755.717.936,13</b>	<b>46.144.678.627,03</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara (F = D + E)</b>	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>190.755.168.111,93</b>
	Penjelasan Rincian Saldo Akhir Kas sebagai berikut :		
	Saldo Akhir Kas di :		
	Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
	Kas BLUD	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98
	Kas di Bendahara Penerimaan	15.110.850,00	19.957.500,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.416.564,00	35.822.368,00
	Kas Dana BOS	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
	Kas Dana JKN	63.926.200,00	18.491.000,00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga di Kas Dana BOS	0,00	0,00
	Kas Lainnya – Kas Lainnya di Kas Bendahara Pengeluaran (PFK)	0,00	0,00
	<b>Jumlah Sisa Kas</b>	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>190.755.168.111,93</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

---

<b>Ref</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
------------	---------------	----------------------------	----------------------------

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Laporan Arus Kas mengacu kepada IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sehingga dalam Laporan Arus Kas termasuk di dalamnya transaksi di BLUD dan Dana BOS serta Transfer Keuangan Dana Desa melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja.

**4.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>4.6.1</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>4.377.173.122.164,55</b>	<b>4.170.852.771.920,78</b>
	Saldo Ekuitas Awal TA 2022 adalah saldo Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp4.377.173.122.164,55 apabila dibandingkan dengan Ekuitas Awal 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp206.320.350.243,77 atau sebesar 4,95 %.		
<b>4.6.2</b>	<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>569.075.304.314,60</b>	<b>200.342.009.740,42</b>
	Surplus/Defisit – LO TA 2022 adalah surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca sebesar Rp569.075.304.314,60, apabila dibandingkan Surplus-LO TA 2021 terjadi kenaikan dengan sebesar Rp368.733.294.574,18 atau sebesar 184,05 %.		
<b>4.6.3</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>(15.694.400.097,72)</b>	<b>5.978.340.503,35</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebesar Rp5.978.340.503,35 apabila dibandingkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022, maka terjadi penurunan sebesar Rp(21.672.740.601,07) atau 362,52 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Penyesuaian Kas	549.824,20	0,00
2	Penyesuaian Piutang	(18.170.465,00)	14.173.355.153,00
3	Penyesuaian Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
4	Penyesuaian Penyisihan Piutang	(217.280,00)	(159.493.797,430)
5	Penyesuaian Investasi Permanen	(6.525.601.817,26)	6.076.359.182,23
6	Penyesuaian Aset Tetap	(2.438.302.921,07)	9.334.908.000,00
7	Penyesuaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
8	Penyesuaian Aset Tetap Lainnya	0,00	(15.405.649.567,52)
9	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	(1.376.339.508,98)	(199.715.600,00)
10	Penyesuaian Amortisasi	0,00	91.932.499,99
11	Penyesuaian Aset Lainnya	(52.315.116,49)	0,00
12	Penyesuaian Pengakuan Hutang	36.664.186,88	(7.933.355.366,92)
13	Penyesuaian Ekuitas Lainnya	(5.320.667.000,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(15.694.400.097,72)</b>	<b>5.978.340.503,35</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	<b>Penyesuaian Kas</b> Penyesuaian ini disebabkan koreksi kurang catat kas BOP atas PAUD dan Kesetaraan yang berstatus negeri dan merupakan saldo tahun sebelumnya yang belum dicatat sebesar Rp549.824,20 yang terdiri dari SKB Sintang Rp158.734,43, TKN 1 sebesar Rp119.482,50 dan TKN 2 Sintang sebesar Rp271.607,27	<b>549.824,20</b>	
		<b>(18.170.465,00)</b>	
2.	<b>Penyesuaian Piutang</b> Penyesuaian ini disebabkan telah Koreksi lebih catat atas piutang PBB-P2 yang sudah dibayarkan pada tahun 2021, namun masih tercatat sebagai piutang tahun 2022 sebesar Rp25.187.601,36.		<b>(217.280,00)</b>
3.	<b>Penyesuaian Penyisihan Piutang</b> Penyesuaian ini disebabkan telah Koreksi Kurang Entri Saldo Awal Penyisihan Piutang Retribusi TA 2022 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebesar Rp (217.280,00).	<b>(6.525.601.817,26)</b>	
4.	<b>Penyesuaian Investasi Permanen</b> Penyesuaian ini disebabkan koreksi pengurangan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang, dikarenakan berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Perumda Tirta Senentang terdapat koreksi terhadap Cadangan Imbalan Kerja (Dana Pensiun) yang pada Laporan Keuangan sebelumnya pernah tercatat dikeluarkan dari LK karena bukan bagian dari ekuitas sebesar Rp6.525.601.817,26.		



Ref Uraian Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021  
(Rp) (Rp)

5. Penyesuaian Aset Tetap (2.438.302.921,07)

URAIAN	JUMLAH
<b>1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan karena grouping	(7.652.855,91)
➤ koreksi akumulasi gedung tempat tinggal golongan ii karena grouping	10.363.400,00
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung tempat pendidikan karena grouping	3.928.595,18
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung kantor karena grouping	25.561.044,87
➤ reklas kode barang dari gedung tempat kerja lainnya ke tanah untuk bangunan tempat kerja dan koreksi akumulasi penyusutan barang tersebut	5.268.003,10
<b>2) DINAS KESEHATAN</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan bangunan kesehatan karena penyesuaian terhadap belanja di bayar dimuka yang di dalamnya terdapat belanja mebel	(26.293.510,87)
➤ koreksi akumulasi penyusutan mebel karena reklas kode barang	(62.356.400,00)
➤ koreksi saldo akumulasi peralatan mesin karena rinci	(3.786.369,83)
➤ koreksi akumulasi penyusutan bangunan rumah dinas gol. ii karena penyesuaian terhadap belanja di bayar dimuka	(3.755.081,97)
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan karena grouping	17.841.532,92
➤ koreksi akumulasi penyusutan karena ekstracomtable alat kedokteran umum	2.130.326,00
➤ jurnal aset : mutasi kode barang (reklas) penimbunan halaman gedung kantor utdc dan koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena perpindahan kode barang	20.146.387,77
<b>3) DINAS PEKERJAAN UMUM</b>	
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan desa karena grouping	(1.783.352.306,40)
➤ koreksi akumulasi penyusutan jaringan pembawa karena grouping	(305.463.864,21)
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan kembatan kabupaten karena grouping	(538.930.243,11)
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan kabupaten karena grouping	(573.276.854,45)
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan kembatan kabupaten karena grouping	424.361.624,91
➤ koreksi akumulasi penyusutan jembatan nasional karena grouping	11.437.952,67
➤ koreksi akumulasi penyusutan jalan khusus karena grouping	308.457.013,40



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref Uraian Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021  
(Rp) (Rp)

<b>4) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
➤ reklasifikasi kode barang dari bangunan tempat kerja lainnya ( batu dan penimbunan ) menjadi jalan khusus dan koreksi akumulasi penyusutan karena perpindahan kode barang dan masa manfaat	(181.625.760,00)
<b>5) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
➤ koreksi nilai akumulasi penyusutan personal komputer karena merinci beberapa barang	(4.110.000,00)
<b>6) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
➤ koreksi saldo akumulasi peralatan komputer jaringan karena perincian	(0,39)
<b>7) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>	
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan pengaman sungai karena grouping	1.883.623,53
➤ koreksi akumulasi penyusutan bangunan kolam ikan karena grouping	11.570.044,58
<b>8) DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena grouping	(17.386.255,94)
➤ reklasifikasi aset berupa gedung bangunan tempat kerja lainnya ke bangunan air pembuang pengaman air dan koreksi akm. penyusutan karena perpindahan kode brg merubah masa manfaat	(43.430.800,00)
➤ koreksi akm penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena pindah kode barang merubah masa manfaat	(117.965.617,98)
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung pertemuan karena grouping	19.789.341,50
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung permanen karena grouping	3.417.658,46
➤ koreksi akumulasi penyusutan peralatan mesin di alat pembersih kursi rapat pejabat karena pindah ke ekstrakomptbel	17.653.689,68
➤ koreksi akm penyusutan jalan khusus karena pindah kode barang merubah masa manfaat	589.828.089,89
<b>9) DINAS PERHUBUNGAN</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan jalan kabupaten karena grouping	(194.400.000,00)
➤ reklasifikasi mutasi kode barang 2022 dari bangunan gedung tempat kerja lainnya menjadi rambu tidak bersuar (marka jalan) dan koreksi karena masa manfaat habis	(161.000.000,00)
➤ koreksi akumulasi penyusutan jalan khusus karena grouping	221.492.932,62
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena pindah kode barang	48.300.000,00
<b>10) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref Uraian Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021  
(Rp) (Rp)

➤ koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tak berwujud	(0,01)
<b>11) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>	
➤ koreksi gedung bangunan kantor karena grouping	2.564.297,00
<b>12) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung pertokoan koperasi dan gedung tempat kerja lainnya karena grouping barang	(156.639.399,82)
➤ koreksi akumulasi penyusutan pada gedung pertokoan koperasi karena perpindahan barang dari gedung bangunan ke tanah	3.977.760,00
<b>13) SEKRETARIAT DAERAH</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan rumah tinggal golongan I karena grouping	6.500.365,50
<b>14) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap berupa gedung bangunan karena grouping	(1.045.799,99)
<b>15) INSPEKTORAT</b>	
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung kantor karena grouping	(1.063.636,37)
<b>16) KECAMATAN SINTANG</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap 2022 karena grouping	(11.111.847,40)
<b>17) KECAMATAN BINJAI HULU</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap 2022 karena reklasifikasi kode barang di simbada	432.500,00
<b>18) KECAMATAN KETUNGAU HILIR</b>	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap 2022 karena reklasifikasi kode barang di simbada	(562.500,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>(2.438.302.921,07)</b>

**6. Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap (1.376.339.508,98)**

Penyesuaian ini disebabkan

- Koreksi lebih catat akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.290.972.679,91,
- Koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan - Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp0,39,
- Koreksi Penyesuaian akun R/K PPKD atas Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan pengelompokan





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	aset yang dimutasikan dari SKPD lain yang sebelumnya belum dilakukan pengelompokan kepada Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp 36.683.280, koreksi Penyesuaian akun R/K PPKD atas Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung sebesar 439.596.468,34 dan Bangunan dan lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di sebesar Rp390.912.918,88 dikarenakan pengelompokan aset yang dimutasikan dari SKPD lain yang sebelumnya belum dilakukan pengelompokan.		
<b>7.</b>	<b>Penyesuaian Aset Lainnya</b> Penyesuaian ini disebabkan koreksi saldo awal kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Sekretariat Daerah, sebesar Rp(52.315.116,49).	<b>(52.315.116,49)</b>	
<b>8.</b>	<b>Penyesuaian Pengakuan Hutang</b> Penyesuaian ini disebabkan koreksi lebih catat Pendapatan Diterima Dimuka pada tahun 2021 sebesar Rp36.664.186,88 yang terdiri dari <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kurang catat sewa lahan DPD Partai Golkar sebesar Rp38.905.777,19 dan</li><li>➤ lebih catat sewa lahan Bank Kalbar sebesar Rp(2.241.590,30).</li></ul>	<b>36.664.186,88</b>	
<b>9.</b>	<b>Penyesuaian Ekuitas Lainnya</b> Penyesuaian ini disebabkan koreksi kurang catat utang Jangka Pendek Lainnya berupa pengembalian pajak BPHTB kepada PT Cahaya Unggul Prima karena kekalahan banding sesuai dengan keputusan Pengadilan Pajak No.PUT-000920.32/2019/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019.	<b>(5.320.667.000,00)</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

---

<b>Ref</b>	<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2021 (Rp)</b>
<b>4.6.4</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>4.930.554.026.381,44</b>	<b>4.377.173.122.164</b>
	Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.377.173.122.164,55 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp569.075.304.314,60 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp15.694.400.097,72). Apabila dibandingkan dengan saldo awal tahun 2021, Ekuitas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp553.380.904.216,89 atau sebesar 12,6		



## **BAB V**

### **PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

**A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada.**

Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352). Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang terbentuk bersamaan dengan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sintang. Secara geografis terletak antara 1°05' Lintang Utara sampai 0°46' Lintang Selatan dan antara 110°50' Bujur Barat sampai 113°20' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sintang seluruhnya adalah 21.635 km<sup>2</sup> atau 14,74% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,4 km<sup>2</sup> atau 29,52% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 277,05 km<sup>2</sup> atau 1,28% dari luas Kabupaten Sintang.

**B. Perubahan Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terdiri :

Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.

Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;



6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Tebelian;
2. Kecamatan Kelam Permai;
3. Kecamatan Binjai Hulu;
4. Kecamatan Tempunak;
5. Kecamatan Dedai;
6. Kecamatan Sepauk;
7. Kecamatan Ketungau Hilir;
8. Kecamatan Ketungau Tengah;
9. Kecamatan Ketungau Hulu;
10. Kecamatan Kayan Hilir;
11. Kecamatan Kayan Hulu;
12. Kecamatan Serawai;
13. Kecamatan Ambalau;
14. Kecamatan Bukit Mangat (belum beroperasi);
15. Kecamatan Ketungau Tengah Utara (belum beroperasi);
16. Kecamatan Ketungau Tengah Selatan (belum beroperasi);
17. Kecamatan Ketungau Hulu Utara (belum beroperasi);
18. Kecamatan Ingar (belum beroperasi);
19. Kecamatan Tontang (belum beroperasi);
20. Kecamatan Sintang Barat (belum beroperasi);
21. Kecamatan Sintang membawahi Kelurahan yang terdiri dari:
  - a. Kelurahan Tanjung Puri;
  - b. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
  - c. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
  - d. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
  - e. Kelurahan Ladang;
  - f. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
  - g. Kelurahan Akcaya;
  - h. Kelurahan Alai;
  - i. Kelurahan Rawa Mambok;
  - j. Kelurahan Sengkuang;



- k. Kelurahan Mengkurai;
- l. Kelurahan Kedabang;
- m. Kelurahan Mekar Jaya;
- n. Kelurahan Batu Lalau;
- o. Kelurahan Menyumbang Tengah;
- p. Kelurahan Ulak Jaya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2021 Rumah Sakit Ade M. Djoen Sintang menjadi UPT dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

### **C. Penerapan Badan Layanan Umum pada 20 Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Sintang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 994 tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017 terdiri dari:

1. Puskesmas Serawai;
2. Puskesmas Kemangai;
3. Puskesmas Tebidah;
4. Puskesmas Sepauk;
5. Puskesmas Tempunak;
6. Puskesmas Pandan;
7. Puskesmas Sungai Durian;
8. Puskesmas Jelimpau;
9. Puskesmas Tanjung Puri;
10. Puskesmas Dara Juanti;
11. Puskesmas Dedai;
12. Puskesmas Emparu;
13. Puskesmas Nanga Mau;
14. Puskesmas Kebong;
15. Puskesmas Nanga Lebang;
16. Puskesmas Mensiku;
17. Puskesmas Nanga Ketungau;
18. Puskesmas Seranga;
19. Puskesmas Merakai;
20. Puskesmas Senaning.
21. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Rumah Sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan BLUD, yaitu:

Rumah Sakit Pratama Serawai

#### **D. Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sintang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 – 293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021. Mulai tanggal 25 Februari 2021.

Pelantikan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.61-5105 Tahun 2022 Tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Pelantikan Wakil Kepala Daerah Melkianus, S.Sos dikarenakan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yaitu Alm. Sudyanto, telah meninggal dunia.

Bupati Sintang : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH

Wakil Bupati Sintang : MELKIANUS, S.Sos



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Sintang selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyampaian laporan keuangan. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik.

Dengan laporan keuangan daerah ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, serta informasi arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Sintang, Mei 2023

JAROT WINARNO



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**SALDO KAS DANA BOS SATUAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**  
**Periode 31 Desember 2022**

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
1	SD NEGERI 01 SERAWAI	4001024944	600.890,36	1.806.000,00	2.406.890,36
2	SD NEGERI 02 NANGA SERAWAI	4001024952	30.648,16	(0,00)	30.648,16
3	SD NEGERI 03 NANGA SERAWAI	4001024961	299,10	2.060.000,00	2.060.299,10
4	SD NEGERI 04 NANGA SERAWAI	4001024979	-	-	-
5	SD NEGERI 06 MENTATAI	4001024987	0,38	(0,00)	0,38
6	SD NEGERI 07 BUNTUT PONTE	4001024995	0,38	14.951.458,00	14.951.458,38
7	SD NEGERI 08 BARAS NABUN	4001025002	4.725.885,28	-	4.725.885,28
8	SD NEGERI 09 BATU KETEBUNG	4001025011	0,80	875.182,00	875.182,80
9	SD NEGERI 10 BEDAHA	4001025029	12.706,46	1.352.000,00	1.364.706,46
10	SD NEGERI 11 NANGA NALAI	4001025037	665.565,71	824.000,00	1.489.565,71
11	SD NEGERI 12 PAGAR LEBATA	4001025045	64.088,35	1.236.000,00	1.300.088,35
12	SD NEGERI 13 TAHAI	4001025053	0,01	0,00	0,01
13	SD NEGERI 14 TONTANG	4001025061	831,16	2.065.000,00	2.065.831,16
14	SD NEGERI 15 LEMOYU	4001025070	104.133,52	1.236.000,00	1.340.133,52
15	SD NEGERI 16 LEKAWAI	4001025088	653,78	1.773.000,00	1.773.653,78
16	SD NEGERI 17 NANGA RIYOI	4001025096	597,37	837.000,00	837.597,37
17	SD NEGERI 18 MENTAYOI	4001025100	29,73	180.000,00	180.029,73
18	SD NEGERI 19 RUHAN	4001025118	1.514.215,85	1.004.000,00	2.518.215,85
19	SD NEGERI 20 RANTAU MALAM	4001025126	10.823,65	0,00	10.823,65
20	SD NEGERI 21 TELUK PAYANG	4001025134	394.284,21	1.000,00	395.284,21
21	SD NEGERI 22 SEI RAYA PADANG	4001025142	6.792,28	1.474.000,00	1.480.792,28
22	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	4001025151	57.587,18	24.000,00	81.587,18
23	SD NEGERI 24 SEGULANG	4001025169	-	1.236.000,00	1.236.000,00
24	SD NEGERI 25 BEGORI	4001025177	728.217,91	1.648.000,00	2.376.217,91
25	SD NEGERI 26 MERAKO	4001025185	0,12	0,00	0,12
26	SD NEGERI 27 TEKUNGAI	4001025193	874,01	825.000,00	825.874,01
27	SD NEGERI 28 PENEKASAN	4001025207	129,84	60.000,00	60.129,84
28	SD NEGERI 29 TANGGOI	4001026149	-	824.000,00	824.000,00
29	SD NEGERI 30 MEROBOI	4001026157	-	-	-
30	SD NEGERI 01 AMBALAU	4001025215	762.908,45	0,00	762.908,45
31	SD NEGERI 02 AMBALAU	4001025223	74.702,28	0,00	74.702,28
32	SD NEGERI 03 KEMANGAI	4001025231	1.507.949,77	164.000,00	1.671.949,77
33	SD NEGERI 04 BUNTUT PIMPIN	4001025266	60.995,35	(0,00)	60.995,35
34	SD NEGERI 05 NANGA SEPAN	4001025754	812.807,56	20.000,00	832.807,56
35	SD NEGERI 06 TANJUNG ANDAN	4001025762	0,29	824.000,00	824.000,29
36	SD NEGERI 07 KEPALA JUNGAI	4001025771	88.203,38	(0,00)	88.203,38
37	SD NEGERI 08 MENSUANG	4001025789	1.486,97	(0,00)	1.486,97
38	SD NEGERI 09 KEPALA RUAN	4001025797	227,23	2.130.000,00	2.130.227,23
39	SD NEGERI 10 MENANTAK	4001025801	-	0,52	0,52
40	SD NEGERI 11 BUNTUT SABON	4001025819	306,08	(0,00)	306,08
41	SD NEGERI 12 BUNTUT PURUN	4001025827	0,96	(0,00)	0,96
42	SD NEGERI 13 SUNGAI RUNUK	4001025835	394,88	9.000,00	9.394,88
43	SD NEGERI 14 KESANGE	4001025843	9.143,06	0,00	9.143,06
44	SD NEGERI 15 KEPINGOI	4001025851	241.692,58	(0,00)	241.692,58
45	SD NEGERI 16 NANGA RADE	4001025860	85,64	840.000,00	840.085,64
46	SD NEGERI 17 MENTOMOI	4001025878	0,13	(0,00)	0,13
47	SD NEGERI 18 JABAI	4001025886	27.236,41	(0,00)	27.236,41
48	SD NEGERI 19 SAKE	4001025894	603.104,73	798.000,00	1.401.104,73
49	SD NEGERI 20 KEREMOI	4001025908	1.460.270,77	46.000,00	1.506.270,77
50	SD NEGERI 21 MENAKON	4001025916	408,05	(0,00)	408,05
51	SD NEGERI 23 KEMANGAI II	4001025924	55,10	(0,00)	55,10
52	SD NEGERI 24 PERE	4001025932	96.243,99	0,00	96.243,99
53	SD NEGERI 25 LEDAN	4001025941	290.735,66	(0,00)	290.735,66
54	SD NEGERI 26 JENGGARANG	4001025959	45,62	27.707.025,00	27.707.070,62
55	SD NEGERI 27 DEME	4001025967	112.888,96	(0,00)	112.888,96
56	SD NEGERI 28 TELUK MUDING	4001025975	644.286,05	(0,00)	644.286,05
57	SD NEGERI 29 REBUNGAI	4001022046	20.743,50	-	20.743,50
58	SD NEGERI 01 NANGA TEBIDAH	4001025614	999,88	623.000,00	623.999,88
59	SD NEGERI 02 NANGA TEBIDAH	4001025622	0,91	(0,00)	0,91
60	SD NEGERI 03 NANGA PAYAK	4001025631	33.130.055,55	-	33.130.055,55
61	SD NEGERI 04 NANGA ORAN	4001025649	38.756,34	0,00	38.756,34
62	SD NEGERI 05 NANGA UNGAI	4001025657	354,20	0,00	354,20



NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
63	SD NEGERI 06 NANGA MASAU	4001025665	89.856,91	(0,00)	89.856,91
64	SD NEGERI 07 TANJUNG LALAU	4001025673	590,47	(0,00)	590,47
65	SD NEGERI 08 LINTANG TAMBUK	4001025681	456,97	824.000,00	824.456,97
66	SD NEGERI 09 SEMADAI	4001025690	27.501.774,28	8.400,00	27.510.174,28
67	SD NEGERI 10 RIAM PANJANG	4001025703	0,70	(0,00)	0,70
68	SD NEGERI 11 TANAH MERAH	4001025711	84.446,08	1.180.000,00	1.264.446,08
69	SD NEGERI 12 MERAH AU	4001025720	680,06	0,00	680,06
70	SD NEGERI 13 ENTOGONG	4001025738	855,13	(0,00)	855,13
71	SD NEGERI 14 PELAIK II	4001025746	417.459,87	0,00	417.459,87
72	SD NEGERI 15 MERAH ARAI	4001024740	32.986,77	210.000,00	242.986,77
73	SD NEGERI 16 EMPONYANG	4001024758	4.290,38	0,00	4.290,38
74	SD NEGERI 17 NANGA ABAI	4001024766	547,60	18.000,00	18.547,60
75	SD NEGERI 18 NANGA TORAN	4001024774	43.878.000,69	-	43.878.000,69
76	SD NEGERI 19 NANGA KERAPUK	4001024782	607.729,62	0,00	607.729,62
77	SD NEGERI 20 RIAM MUNTIK	4001024791	889,60	(0,00)	889,60
78	SD NEGERI 21 MENALUK	4001024804	370,87	(0,00)	370,87
79	SD NEGERI 22 KP ARAK	4001024821	393.045,90	0,00	393.045,90
80	SD NEGERI 23 NANGA TORAH	4001024839	142.491,51	0,00	142.491,51
81	SD NEGERI 24 TOPAN	4001024847	679,73	4.000,00	4.679,73
82	SD NEGERI 25 EMPAKAN	4001024855	226.840,97	5.600,00	232.440,97
83	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	4001024863	934,15	0,00	934,15
84	SD NEGERI 27 ENKIDAU	4001024871	48.172,27	(0,00)	48.172,27
85	SD NEGERI 28 TANJUNG MIRU	4001024880	747.457,16	(0,00)	747.457,16
86	SD NEGERI 29 NAGKAK LESTARI	4001024898	3.842.101,19	-	3.842.101,19
87	SD NEGERI 30 GURUNG PANJANG	4001024901	68.065,63	0,00	68.065,63
88	SD NEGERI 31 MAPAN JAYA	4001024910	897,99	(0,00)	897,99
89	SD NEGERI 32 GURUNG BERAJANG	4001024928	428,97	(0,00)	428,97
90	SD NEGERI 33 MELABAN PEDINI	4001024936	657,71	824.000,00	824.657,71
91	SD NEGERI 34 BANGAU	4001026581	-	-	-
92	SD NEGERI 21 SP IV SKPH MANIS RAYA	4001024529	4.116.876,44	-	4.116.876,44
93	SD NEGERI 01 SEPAUK	4001024324	10.501.164,78	(0,00)	10.501.164,78
94	SD NEGERI 02 LENGKENAT	4001024332	459.819,65	0,00	459.819,65
95	SD NEGERI 03 SEPAUK	4001024341	1.288.570,63	(0,00)	1.288.570,63
96	SD NEGERI 04 SIRANG SETAMBANG	4001024359	29.856.634,95	-	29.856.634,95
97	SD NEGERI 05 SEKUBANG	4001024367	13.384,28	0,00	13.384,28
98	SD NEGERI 06 ENSABANG	4001024375	8.000,23	(0,00)	8.000,23
99	SD NEGERI 07 SEMUNTAI	4001024383	891.411,93	-	891.411,93
100	SD NEGERI 08 KENYAUK	4001024391	45.099,27	0,00	45.099,27
101	SD NEGERI 09 SUKAU	4001024405	541,55	(0,00)	541,55
102	SD NEGERI 10 NANGA LIBAU	4001024413	6.318.172,09	-	6.318.172,09
103	SD NEGERI 11 ANDONG	4001024421	473,45	0,00	473,45
104	SD NEGERI 12 NANGA PARI	4001024430	453.143,90	0,00	453.143,90
105	SD NEGERI 13 MAIT HILIR	4001024448	74.604,38	0,00	74.604,38
106	SD NEGERI 14 MANIS RAYA	4001024456	3.286.350,95	-	3.286.350,95
107	SD NEGERI 15 SEMIRAH TIMBAI	4001024464	681.801,67	0,00	681.801,67
108	SD NEGERI 16 PAOH KECAMATAN SEPAUK	4001024472	14.163.471,57	-	14.163.471,57
109	SD NEGERI 17 SP.2 C PAOH	4001024481	650,21	0,00	650,21
110	SD NEGERI 18 SP V SKPC PAOH	4001024499	577,31	0,00	577,31
111	SD NEGERI 19 SUNGAI JAUNG	4001024502	21.671.613,79	-	21.671.613,79
112	SD NEGERI 20 SP 2 SKPH MANIS RAYA	4001024511	3.833.674,00	-	3.833.674,00
113	SD NEGERI 22 SP 5 SKPH MANIS RAYA	4001024537	140.112,12	0,00	140.112,12
114	SD NEGERI 23 SKPH SP 3 MANIS RAYA	4001024545	0,45	(0,00)	0,45
115	SD NEGERI 24 TEMIANG KAPUAS	4001024553	662,06	0,00	662,06
116	SD NEGERI 25 SEI ARAK	4001024561	58.054,44	(0,00)	58.054,44
117	SD NEGERI 26 SUNGAI RAYA	4001024570	16.884,53	0,00	16.884,53
118	SD NEGERI 27 GERNIS	4001024588	384,55	0,00	384,55
119	SD NEGERI 28 TANAH PUTIH	4001024596	44.073,25	-	44.073,25
120	SD NEGERI 29 SP 1 SKPH MANIS RAYA	4001024600	353,87	260.000,00	260.353,87
121	SD NEGERI 30 SILIT	4001024618	160.650,32	0,00	160.650,32
122	SD NEGERI 31 SUNGAI SEGAK	4001024626	74.403,29	0,00	74.403,29
123	SD NEGERI 33 BERNAYAU	4001024634	117.061,70	(0,00)	117.061,70
124	SD NEGERI 34 BANGUN I	4001024642	3.192.027,46	-	3.192.027,46
125	SD NEGERI 35 BANGUN II	4001024651	246,90	0,00	246,90
126	SD NEGERI 37 TAPANG SEMBILAN	4001024669	79.307,70	(0,00)	79.307,70
127	SD NEGERI 38 SUNGAI AUR	4001024677	12.619.616,25	-	12.619.616,25
128	SD NEGERI 39 TANJUNG RIA	4001024685	21.992,24	18.008,00	40.000,24
129	SD NEGERI 40 LEPAT BETUNG	4001024693	66.238,37	0,00	66.238,37

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
130	SD NEGERI 42 NANGA LAYUNG	4001024707	697.182,03	0,00	697.182,03
131	SD NEGERI 43 TAPANG ACEH	4001024715	3.043.145,17	(0,00)	3.043.145,17
132	SD NEGERI 45 SUNGAI TAMANG	4001024723	11.085,04	(0,00)	11.085,04
133	SD NEGERI 46 SUNGAI LIMAU	4001024731	47.556,21	31.000,00	78.556,21
134	SD NEGERI 47 SINAR KASIH	4001025240	67.742,36	0,00	67.742,36
135	SD NEGERI 48 LEPUNG BERUANG	4001025258	0,02	(0,00)	0,02
136	SD NEGERI 01 TEMPUNAK	4001024049	325,77	0,00	325,77
137	SD NEGERI 02 PANGKALUANG	4001024057	247.227,90	(0,00)	247.227,90
138	SD NEGERI 03 MAKONG	4001024065	-	-	-
139	SD NEGERI 04 JELIMPAU	4001024073	29.046.000,37	-	29.046.000,37
140	SD NEGERI 05 PENINJAU	4001024081	0,43	0,00	0,43
141	SD NEGERI 06 SUNGAI BULUH	4001024090	76,88	(0,00)	76,88
142	SD NEGERI 07 PAGAL II TAYAK	4001024103	53.823,34	0,00	53.823,34
143	SD NEGERI 08 PULAU MANDONG	4001024111	551.195,63	(0,00)	551.195,63
144	SD NEGERI 09 MENSIAK TANJUNG	4001024120	247,88	20.000,00	20.247,88
145	SD NEGERI 10 SP 1 PAOH	4001024138	313.895,82	(0,00)	313.895,82
146	SD NEGERI 11 SP IV PAOH	4001024146	365,23	(0,00)	365,23
147	SD NEGERI 12 ANSOK	4001024154	-	0,78	0,78
148	SD NEGERI 13 TEMPUNAK	4001024162	793,91	(0,00)	793,91
149	SD NEGERI 14 MERAYAK	4001024171	520.924,95	0,00	520.924,95
150	SD NEGERI 15 SP 3 SKPD PANDAN	4001024189	54.043,43	0,00	54.043,43
151	SD NEGERI 16 SP 5 SKPD PANDAN	4001024197	15.854,31	0,00	15.854,31
152	SD NEGERI 17 TEMBAK	4001024201	672,26	0,00	672,26
153	SD NEGERI 18 SP 8 SKPD PANDAN	4001024219	1.236.113,16	(0,00)	1.236.113,16
154	SD NEGERI 19 SP 3 SKPC PAUH	4001024227	1.480,15	0,00	1.480,15
155	SD NEGERI 20 KUJAU	4001024235	833.100,39	-	833.100,39
156	SD NEGERI 21 SP VI SKP C PAOH	4001024243	217.259,90	0,00	217.259,90
157	SD NEGERI 22 LANJAU	4001024251	12.784.059,41	-	12.784.059,41
158	SD NEGERI 23 BALAI HARAPAN	4001024260	0,55	0,00	0,55
159	SD NEGERI 24 SP BF KELANSAM	4001024278	29.820,49	8.000,00	37.820,49
160	SD NEGERI 25 MANSIK	4001024286	2.338.664,38	(0,00)	2.338.664,38
161	SD NEGERI 26 SUNGAI KURA	4001024294	40,16	(0,00)	40,16
162	SD NEGERI 27 SUNGAI BELATUK	4001024308	0,64	(0,00)	0,64
163	SD NEGERI 01 SUNGAI UKOI	4001021228	957.702,40	0,00	957.702,40
164	SD NEGERI 02 NOBAL	4001021236	168,84	2.000,00	2.168,84
165	SD NEGERI 03 LEBAK UBAH	4001021244	940.510,80	(0,00)	940.510,80
166	SD NEGERI 04 PANDAN	4001021252	246.389,60	(0,00)	246.389,60
167	SD NEGERI 05 TENGADAK	4001021261	60.233,90	0,00	60.233,90
168	SD NEGERI 06 RANSI DAKAN	4001021279	728,57	(0,00)	728,57
169	SD NEGERI 07 BAYA BETUNG	4001021287	772.905,60	(0,00)	772.905,60
170	SD NEGERI 08 BONET ENKABANG	4001021295	44.834.455,13	-	44.834.455,13
171	SD NEGERI 09 MERARAI	4001021309	1.650.810,77	35.774.000,00	37.424.810,77
172	SD NEGERI 10 SP 1 PANDAN	4001021317	580.979,33	0,00	580.979,33
173	SD NEGERI 11 SP 2 PANDAN	4001021325	5.096.651,83	0,00	5.096.651,83
174	SD NEGERI 12 SKP D SP 4 PANDAN	4001021333	248.917,77	0,00	248.917,77
175	SD NEGERI 13 SP 6 PANDAN	4001021341	9.960.962,36	0,00	9.960.962,36
176	SD NEGERI 14 SKP D SP 7 PANDAN	4001026017	346,07	(0,00)	346,07
177	SD NEGERI 15 GURUNG KEMPADIK	4001021350	51.314.658,37	-	51.314.658,37
178	SD NEGERI 16 SABANG SURAI	4001021368	454,63	0,00	454,63
179	SD NEGERI 17 SP 1 NOBAL	4001021376	0,89	39.595,00	39.595,89
180	SD NEGERI 18 SP 2 NOBAL	4001021384	744.096,57	(0,00)	744.096,57
181	SD NEGERI 19 SKPI SP 4 NOBAL	4001021392	537,71	0,00	537,71
182	SD NEGERI 20 SKPI SP 5 NOBAL	4001021406	11.255.589,39	(0,00)	11.255.589,39
183	SD NEGERI 21 SKPI SP 6 NOBAL	4001021414	580,22	(0,00)	580,22
184	SD NEGERI 22 PENJERNANG	4001021422	67.857,88	0,00	67.857,88
185	SD NEGERI 23 SUNGAI BERIS	4001021431	159.312.007,29	-	159.312.007,29
186	SD NEGERI 24 BONET BARU	4001021449	0,65	2.018.854,00	2.018.854,65
187	SD NEGERI 25 RAJANG BEGANTUNG II	4001021457	0,33	(0,00)	0,33
188	SD NEGERI 26 PENJERNANG HULU	4001021465	1.838.611,07	(0,00)	1.838.611,07
189	SD NEGERI 27 MANTER	4001021473	973,78	0,00	973,78
190	SD NEGERI 28 KRUAK	4001024316	482.771,90	280.000,00	762.771,90
191	SD NEGERI 29 NENAK	4001021481	4.924,09	884.000,00	888.924,09
192	SD NEGERI 30 BANCOH	4001021490	698,22	(0,00)	698,22
193	SD NEGERI 01 SINTANG	4001020779	994.099,27	(0,00)	994.099,27
194	SD NEGERI 02 SINTANG	4001020809	83.409,03	0,00	83.409,03
195	SD NEGERI 03 SINTANG	4001020833	603.434,68	17.331.000,00	17.934.434,68
196	SD NEGERI 04 SINTANG	4001020868	609,78	82.000,00	82.609,78

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
197	SD NEGERI 05 SINTANG	4001020892	788.026,08	(0,00)	788.026,08
198	SD NEGERI 06 SINTANG	4001020922	0,85	(0,00)	0,85
199	SD NEGERI 07 SINTANG	4001020957	219.820,44	0,00	219.820,44
200	SD NEGERI 08 SINTANG	4001020981	94.050,26	(0,00)	94.050,26
201	SD NEGERI 09 SINTANG	4001021015	31.134,78	(0,00)	31.134,78
202	SD NEGERI 10 SINTANG	4001021104	911.106,39	-	911.106,39
203	SD NEGERI 11 TERTUNG	4001021040	56.630,42	(0,00)	56.630,42
204	SD NEGERI 12 JERORA	4001021074	77,54	0,00	77,54
205	SD NEGERI 13 SINTANG	4001020787	636.965,76	(0,00)	636.965,76
206	SD NEGERI 14 MENGGURAI	4001020795	402,09	0,00	402,09
207	SD NEGERI 15 KAPUAS KIRI HULU	4001020817	0,27	0,00	0,27
208	SD NEGERI 16 SUNGAI RINGIN	4001020825	4.883.338,09	-	4.883.338,09
209	SD NEGERI 17 BANING SEI ANA	4001020841	228.063,86	0,00	228.063,86
210	SD NEGERI 18 LADANG	4001020850	43,95	(0,00)	43,95
211	SD NEGERI 19 MUNGKUK BANTOK	4001020876	380.604,91	(0,00)	380.604,91
212	SD NEGERI 20 NAMBOK	4001020884	443,14	218.000,00	218.443,14
213	SD NEGERI 21 TELUK MENYURAI	4001020906	263.891,06	0,00	263.891,06
214	SD NEGERI 22 SUNGAI RAMBAI	4001020108	3.193.916,76	-	3.193.916,76
215	SD NEGERI 23 MENYUMBUNG	4001020931	495,47	0,00	495,47
216	SD NEGERI 24 BATU LALAU	4001020949	43.904,73	0,00	43.904,73
217	SD NEGERI 26 SINTANG	4001020965	23.285,59	1.511.700,00	1.534.985,59
218	SD NEGERI 27 SINTANG	4001020973	660,51	3.255.000,00	3.255.660,51
219	SD NEGERI 28 TANJUNG MULIA	4001020990	28.933.996,87	-	28.933.996,87
220	SD NEGERI 29 NENAK TEMBULAN	4001021007	309.000,46	531.000,00	840.000,46
221	SD NEGERI 01 NANGA DEDAI	4001023760	838,34	0,00	838,34
222	SD NEGERI 02 NANGA JETAK	4001023778	2.672.889,91	15.917.167,00	18.590.056,91
223	SD NEGERI 03 GANDIS	4001023786	131.749,47	1.482.000,00	1.613.749,47
224	SD NEGERI 04 PENYAK LALANG	4001023794	407,30	(0,00)	407,30
225	SD NEGERI 05 SUNGAI MALI	4001023808	583.204,51	(0,00)	583.204,51
226	SD NEGERI 06 DEDAI	4001023816	279.092,09	0,00	279.092,09
227	SD NEGERI 07 BELINYUK SIBAU	4001023824	671,88	(0,00)	671,88
228	SD NEGERI 08 BULUH MERINDU	4001023832	31,33	0,00	31,33
229	SD NEGERI 09 KEDERAS	4001023841	315.865,06	0,00	315.865,06
230	SD NEGERI 10 KUMPANG	4001023859	824.199,90	0,00	824.199,90
231	SD NEGERI 11 UMIN	4001023867	1.448.374,00	-	1.448.374,00
232	SD NEGERI 12 MERIMPIT	4001023875	1.336,90	170.000,00	171.336,90
233	SD NEGERI 13 SUNGAI TAPANG	4001023883	82.996,82	(0,00)	82.996,82
234	SD NEGERI 14 EMPACI	4001023891	383,74	0,00	383,74
235	SD NEGERI 15 GANDIS HULU	4001023905	21,54	0,00	21,54
236	SD NEGERI 16 PENGKADAN BARU	4001023913	108.448,94	(0,00)	108.448,94
237	SD NEGERI 17 NANGA JETAK	4001023921	32,47	(0,00)	32,47
238	SD NEGERI 18 BATU LANDUNG	4001023930	551,02	0,00	551,02
239	SD NEGERI 19 KEBAH	4001023948	35.434,50	-	35.434,50
240	SD NEGERI 20 SKP G SP 1 EMPARU	4001023956	506.973,85	(0,00)	506.973,85
241	SD NEGERI 21 SKPG SP 2 EMPARU	4001023964	176.567,80	0,00	176.567,80
242	SD NEGERI 22 SKP.G SP3 EMPARU	4001023972	501,04	0,00	501,04
243	SD NEGERI 23 LUNDANG	4001023981	1.729.104,70	(0,00)	1.729.104,70
244	SD NEGERI 24 TAUK	4001023999	79.344,80	(0,00)	79.344,80
245	SD NEGERI 25 RIGUK	4001024006	314.943,10	(0,00)	314.943,10
246	SD NEGERI 26 BARAS	4001024014	104.845,70	(0,00)	104.845,70
247	SD NEGERI 27 SUNGAI MANYAM	4001024022	-	261.233,28	261.233,28
248	SD NEGERI 28 MENGGURAI	4001024031	68.115,28	0,00	68.115,28
249	SD NEGERI 01 NANGA MAU	4001025274	10.311,99	0,00	10.311,99
250	SD NEGERI 02 NANGA MAU	4001025282	192.160,16	1.160.000,00	1.352.160,16
251	SD NEGERI 03 NYANGKOM	4001025291	97.437,04	0,00	97.437,04
252	SD NEGERI 04 MELINGKAT	4001025304	0,86	0,00	0,86
253	SD NEGERI 05 MENTUNAI	4001025312	72,86	0,00	72,86
254	SD NEGERI 06 PAKAK I	4001025321	165.421,91	(0,00)	165.421,91
255	SD NEGERI 07 PELAIK	4001025339	0,80	(0,00)	0,80
256	SD NEGERI 08 TERTUNG MAU	4001025347	54,80	(0,00)	54,80
257	SD NEGERI 09 SUNGAI BUAYA	4001025355	70.917,81	0,00	70.917,81
258	SD NEGERI 10 KERAPA SEPAN	4001025363	-	-	-
259	SD NEGERI 11 LALANG INGGAR	4001025371	58.950,90	0,00	58.950,90
260	SD NEGERI 12 NANGA LIDAU	4001025380	1.013.066,38	(0,00)	1.013.066,38
261	SD NEGERI 13 SUNGAI MANAN	4001025398	134.486,62	0,00	134.486,62
262	SD NEGERI 14 LENGKONG BINDU	4001025401	0,01	1.228.936,00	1.228.936,01
263	SD NEGERI 15 ENGGARANGAN	4001025410	47,27	18.000,00	18.047,27

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
264	SD NEGERI 16 BULUH JEGARA	4001025428	899,38	46.000,00	46.899,38
265	SD NEGERI 17 KELANGAU	4001025436	989,38	(0,00)	989,38
266	SD NEGERI 18 NATAI TEBEDAK	4001025444	373,76	55.000,00	55.373,76
267	SD NEGERI 19 SUKA MAJU	4001025452	717.209,20	0,00	717.209,20
268	SD NEGERI 20 NANGA TIKAN	4001025461	-	80.444,48	80.444,48
269	SD NEGERI 21 LANDAU BERINGIN	4001025479	21.831,91	(0,00)	21.831,91
270	SD NEGERI 22 LUBUK BESAR	4001025487	86.757,55	(0,00)	86.757,55
271	SD NEGERI 23 PERIANG	4001025495	1.907,19	(0,00)	1.907,19
272	SD NEGERI 24 LINGGAM	4001025509	37,27	(0,00)	37,27
273	SD NEGERI 25 GURUNG PENINGKAH	4001025517	29.741,38	0,00	29.741,38
274	SD NEGERI 26 RANAP	4001025525	33,89	0,00	33,89
275	SD NEGERI 27 PAUH DESA	4001025533	0,35	114.000,00	114.000,35
276	SD NEGERI 28 TUGUK	4001025541	79.642,24	823.000,00	902.642,24
277	SD NEGERI 29 MENGKIRAI	4001025550	-	202.804,92	202.804,92
278	SD NEGERI 30 BELIMBING	4001025568	517,95	5.128.000,00	5.128.517,95
279	SD NEGERI 31 KARIA BARU	4001025576	33.320,23	963.050,00	996.370,23
280	SD NEGERI 32 LUBUK LEBAN	4001025584	128.396,78	0,00	128.396,78
281	SD NEGERI 33 NATAI BUNJAU	4001025592	418,90	0,00	418,90
282	SD NEGERI 34 TAPANG URUK	4001025606	375,42	166.000,00	166.375,42
283	SD NEGERI 01 KENUKUT	4001021023	123.315,13	(0,00)	123.315,13
284	SD NEGERI 02 MERPAK	4001021031	-	14.000,52	14.000,52
285	SD NEGERI 03 SEBUNGKANG	4001021058	572.454,36	180.000,00	752.454,36
286	SD NEGERI 04 BENGKUANG	4001021066	84,37	90.000,00	90.084,37
287	SD NEGERI 05 NANGA LEBANG	4001021082	1.824.117,21	(0,00)	1.824.117,21
288	SD NEGERI 06 SUNGAI PUKAT	4001021091	185.648,41	(0,00)	185.648,41
289	SD NEGERI 07 SUNGAI LAIS	4001021112	365.812,18	0,00	365.812,18
290	SD NEGERI 08 SEI MANYAM	4001021139	984.285,08	(0,00)	984.285,08
291	SD NEGERI 09 ENKARAS	4001021147	815.539,45	-	815.539,45
292	SD NEGERI 10 SP4 BANING PANJANG	4001026408	12.164.974,71	-	12.164.974,71
293	SD NEGERI 11 SKPG SP V SUNGAI MARAM	4001021155	887,13	(0,00)	887,13
294	SD NEGERI 12 SKPG SP 6 ENSAID PANJANG	4001021163	261.765,40	6.123.000,00	6.384.765,40
295	SD NEGERI 13 SKPG. SP.7 SEPAN LEBANG	4001021171	0,43	1.995.120,80	1.995.121,23
296	SD NEGERI 14 SKPG SP8 SUNGAI PUKAT	4001021180	562,85	78.000,00	78.562,85
297	SD NEGERI 15 UJUNG KULAN	4001021198	102.692,08	(0,00)	102.692,08
298	SD NEGERI 16 SUNGAI JELAWAI	4001021201	448.983,28	0,00	448.983,28
299	SD NEGERI 17 LANJING	4001021210	37.733,34	0,00	37.733,34
300	SD NEGERI 18 RANSI PANJANG	4001026963	-	-	-
301	SD NEGERI 19 BUKIT SENGKAJANG	4001026955	-	-	-
302	SD NEGERI 01 BINJAI HULU	4001026106	697,62	603.000,00	603.697,62
303	SD NEGERI 02 SP DE MENSIKU	4001021503	15,00	880.000,00	880.015,00
304	SD NEGERI 03 MENSIKU	4001021511	0,46	0,00	0,46
305	SD NEGERI 04 SPF MENSIKU BINJAI HULU	4001021520	2.220.414,11	0,00	2.220.414,11
306	SD NEGERI 07 TELAGA II	4001021546	606.855,41	(0,00)	606.855,41
307	SD NEGERI 08 SKP B SP E	4001021554	2.107.348,38	(0,00)	2.107.348,38
308	SD NEGERI 09 AMPAR BEDANG	4001021562	440.580,08	(0,00)	440.580,08
309	SD NEGERI 10 MENSIKU PANTAI	4001021571	-	-	-
310	SD NEGERI 11 SANDUNG	4001021589	706,79	0,00	706,79
311	SD NEGERI 12 SUNGAI RISAP	4001021597	0,56	290.806,00	290.806,56
312	SD NEGERI 6 SP.C KELANSAM	4001021538	2.277.504,09	0,00	2.277.504,09
313	SD NEGERI 01 NANGA KETUNGAU	4001021601	148.119.304,40	-	148.119.304,40
314	SD NEGERI 02 NANGA MERKAK	4001021619	29.439,52	(0,00)	29.439,52
315	SD NEGERI 05 AIR NYURUK	4001021643	78.532,94	(0,00)	78.532,94
316	SD NEGERI 06 SETAPANG	4001021651	2.117.565,92	-	2.117.565,92
317	SD NEGERI 07 TUNDUK	4001021660	573,22	962.000,00	962.573,22
318	SD NEGERI 08 SEMERUNDUK	4001021678	73.142,16	(0,00)	73.142,16
319	SD NEGERI 09 SETUNGKUP	4001021686	912.734,17	(0,00)	912.734,17
320	SD NEGERI 10 AMPUK	4001021694	34,96	(0,00)	34,96
321	SD NEGERI 11 SEJIRAK	4001021708	3.225.133,41	(0,00)	3.225.133,41
322	SD NEGERI 12 SEMUNTAI	4001021716	756,28	0,00	756,28
323	SD NEGERI 13 MAUNG	4001021724	1.744.747,21	0,00	1.744.747,21
324	SD NEGERI 14 BATU AMPAR	4001021732	3.162.759,88	(0,00)	3.162.759,88
325	SD NEGERI 15 MUNGKUK WIE	4001022020	768.852,56	0,00	768.852,56
326	SD NEGERI 16 SUNGAI DERAS	4001021741	80.900,68	0,00	80.900,68
327	SD NEGERI 17 TANJUNG BAUNG	4001021759	4.107,80	(0,00)	4.107,80
328	SD NEGERI 18 JENTAWANG	4001021767	78.720,76	0,00	78.720,76
329	SD NEGERI 19 KENAYAN	4001021775	75.051.184,32	-	75.051.184,32
330	SD NEGERI 20 ENKERYUNG	4001021783	22,58	(0,00)	22,58

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
331	SD NEGERI 21 SELABAH	4001021791	855,38	0,00	855,38
332	SD NEGERI 22 BANJOR	4001021805	56.674,97	(0,00)	56.674,97
333	SD NEGERI 23 SP A SERANGAS	4001021813	1.561.039,14	-	1.561.039,14
334	SD NEGERI 24 SP B SERANGAS	4001021821	752,76	0,00	752,76
335	SD NEGERI 25 SP C SERANGAS	4001021830	117,24	0,00	117,24
336	SD NEGERI 26 SP D SERANGAS	4001021848	20.930,95	0,00	20.930,95
337	SD NEGERI 27 SP E SERANGAS	4001021856	2.816.001,18	0,00	2.816.001,18
338	SD NEGERI 28 UPT XII SP. III	4001021864	352.073,65	0,00	352.073,65
339	SD NEGERI 30 PEDADANG HILIR	4001022038	4.771,29	(0,00)	4.771,29
340	SD NEGERI 31 PEDADANG HULU	4001021881	675.648,37	0,00	675.648,37
341	SD NEGERI 32 SEMUNTAI	4001021899	283.287,18	-	283.287,18
342	SD NEGERI 33 TERUSAN II	4001021902	84.065,90	55.000,00	139.065,90
343	SD NEGERI 34 MUNGKUK KELAPA	4001021911	6.446,69	(0,00)	6.446,69
344	SD NEGERI 35 SEDAUN	4001026203	52.362,06	0,00	52.362,06
345	SD NEGERI 36 SEPAN KEMANTAN	4001021929	975,40	1.022.000,00	1.022.975,40
346	SD NEGERI 37 TERUSAN I	4001021937	105.518,85	0,00	105.518,85
347	SD NEGERI 38 SP.D SERANGAS	4001021945	262,34	0,00	262,34
348	SD NEGERI 39 BAUNG HILIR	4001026301	270.359,71	0,00	270.359,71
349	SD NEGERI 41 SEPINANG	4001026921	-	-	-
350	SD NEGERI NO 03 KENUAK	4001021627	209.117,96	(0,00)	209.117,96
351	SD NEGERI NO 04 SUNGAI MALI	4001021635	652,48	(0,00)	652,48
352	SDN 29 KARYA BUDI TIBU KENDU	4001021872	416,24	0,00	416,24
353	SD NEGERI 01 NANGA MERAKAI	4001021953	31.392,90	0,00	31.392,90
354	SD NEGERI 02 NANGA BELOH	4001021961	495,86	(0,00)	495,86
355	SD NEGERI 03 KEDEMBAK AIR TABUN	4001021970	946,24	(0,00)	946,24
356	SD NEGERI 04 NANGA MERAKAI	4001021988	81.631,50	-	81.631,50
357	SD NEGERI 05 BATANG ANTU	4001021996	0,43	0,00	0,43
358	SD NEGERI 06 NANGA SEKAPAT	4001022003	1.351.946,76	0,00	1.351.946,76
359	SD NEGERI 07 LUBUK NIBUNG	4001022607	869,01	0,00	869,01
360	SD NEGERI 08 NANGA SERAN	4001023093	984.926,37	0,00	984.926,37
361	SD NEGERI 09 SEPUTAU TIGA	4001023107	0,95	0,00	0,95
362	SD NEGERI 10 NANGA ENTELOI	4001023115	4.011.692,97	627.000,00	4.638.692,97
363	SD NEGERI 11 NANGA LEMETAK	4001023123	2.333,73	0,00	2.333,73
364	SD NEGERI 12 SEPAN MENGARET	4001023131	1.527.481,88	(0,00)	1.527.481,88
365	SD NEGERI 13 LUJUK	4001023140	50.866.172,10	-	50.866.172,10
366	SD NEGERI 14 JELEMUK	4001023158	0,49	0,00	0,49
367	SD NEGERI 15 KEDEMBAK	4001023166	824.218,83	(0,00)	824.218,83
368	SD NEGERI 16 SENANGAN BESAR	4001023174	176.486,86	0,00	176.486,86
369	SD NEGERI 17 SEGUNTUNG	4001023182	40.697.978,68	-	40.697.978,68
370	SD NEGERI 18 LUBUK KEDANG	4001023191	3.158.016,86	0,00	3.158.016,86
371	SD NEGERI 19 BETUNG	4001023204	1.530,57	86.000,00	87.530,57
372	SD NEGERI 20 SEI AREH	4001023212	0,96	0,00	0,96
373	SD NEGERI 21 SEMAREH	4001023221	58.292,25	-	58.292,25
374	SD NEGERI 22 SEI KELUKAI	4001023239	29,53	0,00	29,53
375	SD NEGERI 23 BINDA	4001023247	4.964.725,88	-	4.964.725,88
376	SD NEGERI 24 MENILAU	4001023255	618,76	(0,00)	618,76
377	SD NEGERI 25 ENKITAN	4001023263	913.026,42	0,00	913.026,42
378	SD NEGERI 26 KAMPUNG BARU MERAKAI	4001023271	0,88	(0,00)	0,88
379	SD NEGERI 27 SEPUTAU II	4001023280	225.735,78	2.000,00	227.735,78
380	SD NEGERI 28 MENGERAT SEBARA	4001023298	288.126,02	(0,00)	288.126,02
381	SD NEGERI 29 SUNGAI PUANG	4001023301	0,42	0,00	0,42
382	SD NEGERI 30 MUNGKUK GELOMBANG	4001023310	0,02	0,00	0,02
383	SD NEGERI 31 SUNGAI BUAYA	4001023328	160.951,87	0,00	160.951,87
384	SD NEGERI 32 TUMBUK	4001023336	100,37	0,00	100,37
385	SD NEGERI 33 SEBETUK	4001023344	178.777,29	(0,00)	178.777,29
386	SD NEGERI 34 MATAI	4001023352	314,90	1.240.000,00	1.240.314,90
387	SD NEGERI 35 ULAK	4001023361	472.333,64	0,00	472.333,64
388	SD NEGERI 36 MUNGKUK KUBU	4001023379	624.599,66	(0,00)	624.599,66
389	SD NEGERI 37 SEMUDIK	4001023387	612.788,72	(0,00)	612.788,72
390	SD NEGERI 38 SUNGAI LAWANG	4001023395	1.982.419,37	824.000,00	2.806.419,37
391	SD NEGERI 39 MENGERAT	4001023409	157,83	2.586.900,00	2.587.057,83
392	SD NEGERI 40 SEPUTAU I	4001023417	790.109,36	-	790.109,36
393	SD NEGERI 41 KEBANGAK	4001026009	0,14	0,00	0,14
394	SD NEGERI 42 ULAK BAYAN	4001026122	4.500,00	297.000,00	301.500,00
395	SD NEGERI 43 SUNGAI JAUNG	4001026611	-	14.000,00	14.000,00
396	SD NEGERI 44 SUNGAI SEGAK	4001026645	1.285.534,73	(0,00)	1.285.534,73
397	SD NEGERI 45 TATAI	4001026131	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
398	SD NEGERI 46 TABAU	4001026602	-	-	-
399	SD NEGERI 47 SEPULAU	4001026629	4.000,00	-	4.000,00
400	SD NEGERI 48 PEDALAI	4001026939	-	-	-
401	SD NEGERI 52 TANJUNG LESUNG	4001026947	-	-	-
402	SD NEGERI 01 SENANING	4001023425	213.785,06	0,00	213.785,06
403	SD NEGERI 02 JASA	4001023433	913,21	(0,00)	913,21
404	SD NEGERI 03 EMPURA	4001023441	28.749,42	0,00	28.749,42
405	SD NEGERI 04 SEPILUK	4001023450	628.956,23	(0,00)	628.956,23
406	SD NEGERI 05 SEBADAK	4001023468	90.705,81	0,00	90.705,81
407	SD NEGERI 06 RENTONG	4001023476	951.430,04	0,00	951.430,04
408	SD NEGERI 07 RASAU	4001023484	922,46	67.000,00	67.922,46
409	SD NEGERI 08 MUAKAN	4001023492	76.204,60	(0,00)	76.204,60
410	SD NEGERI 09 SUNGAI SERIA	4001023506	577,55	0,00	577,55
411	SD NEGERI 10 SUAK MEDANG	4001023514	982,44	(0,00)	982,44
412	SD NEGERI 11 SEPADIT	4001023522	462.429,47	(0,00)	462.429,47
413	SD NEGERI 12 BEKUAN	4001023531	0,72	(0,00)	0,72
414	SD NEGERI 13 NANGA BAYAN	4001023549	2.358.930,28	-	2.358.930,28
415	SD NEGERI 14 KEDANGRAN	4001023557	259.272,93	0,00	259.272,93
416	SD NEGERI 15 RIAM SEJAWAK	4001023565	6.396.744,77	-	6.396.744,77
417	SD NEGERI 16 SEPAN PETURAU	4001023573	1.423.619,82	(0,00)	1.423.619,82
418	SD NEGERI 17 LUBUK TAPANG	4001023581	40.177,36	(0,00)	40.177,36
419	SD NEGERI 18 MELINGKAT	4001023590	2.782.616,33	-	2.782.616,33
420	SD NEGERI 19 SUNGAI KELIK	4001023603	869,50	-	869,50
421	SD NEGERI 20 BINJAI	4001023611	0,29	0,00	0,29
422	SD NEGERI 21 SUNGAI ANTU	4001023620	527.936,97	(0,00)	527.936,97
423	SD NEGERI 22 EMPUNAK	4001023638	1.007.934,83	(0,00)	1.007.934,83
424	SD NEGERI 23 SEJELU	4001023646	554.312,72	(0,00)	554.312,72
425	SD NEGERI 24 SENIBUNG	4001023654	150.218,96	0,00	150.218,96
426	SD NEGERI 25 SEDANGU	4001023662	892.310,33	(0,00)	892.310,33
427	SD NEGERI 26 ABOI	4001023671	2.252.154,06	-	2.252.154,06
428	SD NEGERI 27 NYELAWAI	4001023689	824.444,97	(0,00)	824.444,97
429	SD NEGERI 28 SEJAWAK	4001023697	0,48	0,00	0,48
430	SD NEGERI 29 IDAI	4001023701	1.002.041,03	0,00	1.002.041,03
431	SD NEGERI 30 PINTAS KELADAN	4001023719	1.597.265,53	-	1.597.265,53
432	SD NEGERI 31 EMBALEH	4001023727	7.508.481,81	-	7.508.481,81
433	SD NEGERI 32 PEDIAN	4001023735	22.527,76	1.357.000,00	1.379.527,76
434	SD NEGERI 33 APOT	4001023743	27.159,74	0,00	27.159,74
435	SD NEGERI 34 SUNGAI ENTELI	4001023751	6.355,07	0,00	6.355,07
	<b>Total SD</b>		<b>1.054.609.227,75</b>	<b>182.000.286,30</b>	<b>1.236.609.514,05</b>
1	SMP NEGERI 1 SERAWAI	4001022992	75.643,55	(0,00)	75.643,55
2	SMP NEGERI 2 SERAWAI	4001023000	996,62	0,00	996,62
3	SMP NEGERI 3 SERAWAI	4001023018	31.898,54	56.000,00	87.898,54
4	SMP NEGERI 4 SERAWAI SATU ATAP	4001023026	375.666,67	0,00	375.666,67
5	SMP NEGERI 5 SERAWAI	4001023034	700.990,00	182.990,26	883.980,26
6	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SERAWAI	4001023042	36.314,45	0,00	36.314,45
7	SMP NEGERI 1 AMBALAU	4001023051	229.646,36	0,00	229.646,36
8	SMP NEGERI 2 AMBALAU	4001023069	512,91	3.487,00	3.999,91
9	SMP NEGERI 3 AMBALAU	4001023077	406.117,30	1.024.000,00	1.430.117,30
10	SMP NEGERI 4 AMBALAU	4001023085	924,80	(0,00)	924,80
11	SMP NEGERI 5 AMBALAU	4004016713	0,20	0,00	0,20
12	SMP NEGERI 6 AMBALAU	4004016705	457,60	49.000,00	49.457,60
13	SMP NEGERI 1 KAYAN HULU	4001022917	25.932,12	0,00	25.932,12
14	SMP NEGERI 2 KAYAN HULU	4001022925	646.931,86	-	646.931,86
15	SMP NEGERI 3 KAYAN HULU	4001022933	782.600,15	1.024.000,00	1.806.600,15
16	SMP NEGERI 4 KAYAN HULU	4001022941	50.718,37	0,00	50.718,37
17	SMP NEGERI 5 KAYAN HULU	4001022950	44.096,69	(0,00)	44.096,69
18	SMP NEGERI 6 SATAP KAYAN HULU	4001022968	0,20	0,00	0,20
19	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HULU	4001022976	89,06	41.000,00	41.089,06
20	SMP NEGERI 8 KAYAN HULU	4001022984	1.400,13	(0,00)	1.400,13
21	SMP NEGERI 1 SEPAUK	4001022691	165,26	14.000,00	14.165,26
22	SMP NEGERI 12 SEPAUK	4001022801	30.017,67	0,00	30.017,67
23	SMP NEGERI 2 SEPAUK	4001022704	34.006,03	0,00	34.006,03
24	SMP NEGERI 3 SEPAUK	4001022712	2.566.088,14	(0,00)	2.566.088,14
25	SMP NEGERI 4 SEPAUK	4001022721	21.157,08	(0,00)	21.157,08
26	SMP NEGERI 5 SEPAUK	4001022739	0,27	15.000,00	15.000,27
27	SMP NEGERI 6 SATAP SEPAUK	4001022747	39.565,19	(0,00)	39.565,19
28	SMP NEGERI 7 SEPAUK	4001022755	750.136,29	(0,00)	750.136,29

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
29	SMP NEGERI 8 SEPAUK	4001022763	-	-	-
30	SMP NEGERI 9 SEPAUK SATU ATAP	4001022771	152.004,99	57.000,00	209.004,99
31	SMPN 10 SEPAUK	4001022780	1.462,55	(0,00)	1.462,55
32	SMPN 11 SEPAUK	4001022798	6.587,80	0,00	6.587,80
33	SMP NEGERI 1 TEMPUNAK	4001022615	34.671,21	(0,00)	34.671,21
34	SMP NEGERI 2 TEMPUNAK	4001022623	694.517,33	(0,00)	694.517,33
35	SMP NEGERI 3 TEMPUNAK	4001022631	368.591,19	30.000,00	398.591,19
36	SMP NEGERI 4 TEMPUNAK	4001022640	1.325.255,28	-	1.325.255,28
37	SMP NEGERI 5 SATU ATAP TEMPUNAK	4001022658	4.358,36	0,00	4.358,36
38	SMP NEGERI 6 TEMPUNAK	4001022666	21.189,67	(0,00)	21.189,67
39	SMP NEGERI 7 SATAP TEMPUNAK	4001022674	134,28	0,00	134,28
40	SMP NEGERI 8 SATAP TEMPUNAK	4001022682	118.624,30	(0,00)	118.624,30
41	SMP NEGERI 9 TEMPUNAK	4001026912	-	-	-
42	SMP NEGERI 1 SUNGAI TEBELIAN	4001022208	102.721,12	0,00	102.721,12
43	SMP NEGERI 2 SUNGAI TEBELIAN	4001022216	7.661,03	615.000,00	622.661,03
44	SMP NEGERI 3 SUNGAI TEBELIAN	4001022224	305.539,74	0,00	305.539,74
45	SMP NEGERI 4 SUNGAI TEBELIAN	4001022232	70.545,22	200.740,00	271.285,22
46	SMP NEGERI 5 SUNGAI TEBELIAN	4001022241	0,55	0,00	0,55
47	SMP NEGERI 6 SUNGAI TEBELIAN	4001026670	496,72	(0,00)	496,72
48	SMP NEGERI 1 SINTANG	4001022062	2.245.660,05	480.502,00	2.726.162,05
49	SMP NEGERI 2 SINTANG	4001022071	246.552,30	(0,00)	246.552,30
50	SMP NEGERI 3 SINTANG	4001022089	76.106,09	0,00	76.106,09
51	SMP NEGERI 4 SINTANG	4001022097	203,55	(0,00)	203,55
52	SMP NEGERI 5 SATU ATAP SINTANG	4001022101	2.125.032,70	-	2.125.032,70
53	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SINTANG	4001022119	1.292.817,50	-	1.292.817,50
54	SMP NEGERI 8 SATU ATAP SINTANG	4001022135	575,75	-	575,75
55	SMP NEGERI 9 SINTANG	4001026696	-	-	-
56	SMPN 7 SINTANG	4001022127	682.231,15	(0,00)	682.231,15
57	SMP NEGERI 1 DEDAI	4001022526	484.781,77	(0,00)	484.781,77
58	SMP NEGERI 2 DEDAI	4001022534	1.011.630,09	360.000,00	1.371.630,09
59	SMP NEGERI 3 DEDAI	4001022542	2.745.013,98	0,00	2.745.013,98
60	SMP NEGERI 4 DEDAI	4001022551	1.120.867,73	0,00	1.120.867,73
61	SMP NEGERI 5 DEDAI	4001022569	676,20	37.000,00	37.676,20
62	SMP NEGERI 6 DEDAI	4001022577	164.687,31	0,00	164.687,31
63	SMP NEGERI 7 DEDAI	4001022585	458,96	0,00	458,96
64	SMP NEGERI 8 DEDAI	4001022593	8.436,47	(0,00)	8.436,47
65	SMP NEGERI 1 KAYAN HILIR	4001022810	8.029,77	(0,00)	8.029,77
66	SMP NEGERI 10 KAYAN HILIR	4001022909	219,98	0,00	219,98
67	SMP NEGERI 2 KAYAN HILIR	4001022828	0,84	27.853,00	27.853,84
68	SMP NEGERI 3 KAYAN HILIR	4001022836	0,94	(0,00)	0,94
69	SMP NEGERI 4 KAYAN HILIR	4001022844	3.282.862,10	(0,00)	3.282.862,10
70	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR	4001022852	2.460,91	(0,00)	2.460,91
71	SMP NEGERI 6 KAYAN HILIR	4001022861	1.080.653,29	(0,00)	1.080.653,29
72	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HILIR	4001022879	431.927,31	0,00	431.927,31
73	SMP NEGERI 9 KAYAN HILIR	4001022895	0,38	(0,00)	0,38
74	SMPN 8 KAYAN HILIR	4001022887	32.753,22	(0,00)	32.753,22
75	SMP NEGERI 1 KELAM PERMAI	4001022143	1.651.406,18	1.200.000,00	2.851.406,18
76	SMP NEGERI 2 KELAM PERMAI	4001022151	645.100,67	4.100.000,00	4.745.100,67
77	SMP NEGERI 3 KELAM PERMAI	4001022160	426,28	0,00	426,28
78	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KELAM PERMAI	4001022178	48.203,12	0,00	48.203,12
79	SMP NEGERI 5 KELAM PERMAI	4001022186	1.112.261,00	-	1.112.261,00
80	SMP NEGERI 6 SATAP KELAM PERMAI	4001022194	67.303,06	0,00	67.303,06
81	SMP NEGERI 1 BINJAI HULU	4001022259	1.515.823,36	0,00	1.515.823,36
82	SMP NEGERI 2 SATAP BINJAI HULU	4001022267	20.776.304,09	-	20.776.304,09
83	SMP NEGERI 1 KETUNGAU HILIR	4001022275	35.196,32	(0,00)	35.196,32
84	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HILIR	4001022283	3.107.688,63	(0,00)	3.107.688,63
85	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HILIR	4001014264	3.587,00	48.000,00	51.587,00
86	SMP NEGERI 4 KETUNGAU HILIR	4001022305	341.960,09	0,00	341.960,09
87	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HILIR	4001022313	410.679,74	(0,00)	410.679,74
88	SMP NEGERI 8 SATU ATAP KETUNGAU HILIR	4001022348	280.801,25	961.000,00	1.241.801,25
89	SMPN 6 KETUNGAU HILIR	4001022321	1.767.672,99	180.000,00	1.947.672,99
90	SMPN 7 KETUNGAU HILIR SATAP	4001022330	9.924,74	0,00	9.924,74
91	SMP NEGERI 1 KETUNGAU TENGAH	4001022356	2.540.262,38	(0,00)	2.540.262,38
92	SMP NEGERI 10 SATU ATAP KETUNGAU TENGAH	4001022445	30.057,49	0,00	30.057,49
93	SMP NEGERI 11 KETUNGAU TENGAH	4004016691	-	-	-
94	SMP NEGERI 12 KETUNGAU TENGAH	4001026653	-	-	-
95	SMP NEGERI 13 KETUNGAU TENGAH	4001027242	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	Saldo Bank	Kas Tunai Sekolah	Saldo BOS Per 31 Des 2022
96	SMP NEGERI 2 KETUNGAU TENGAH	4001022364	7.831.320,41	-	7.831.320,41
97	SMP NEGERI 3 KETUNGAU TENGAH	4001022372	52.232.470,14	1.804.000,00	54.036.470,14
98	SMP NEGERI 4 KETUNGAU TENGAH	4001022381	301,56	7.000,00	7.301,56
99	SMP NEGERI 6 KETUNGAU TENGAH	4001022402	48.227,18	0,00	48.227,18
100	SMP NEGERI 8 KETUNGAU TENGAH	4001022429	3.594.304,80	0,00	3.594.304,80
101	SMP NEGERI 9 SATU ATAP KETUNGAU TENGAH	4001022437	20.513,38	(0,00)	20.513,38
102	SMPN 5 KETUNGAU TENGAH	4001022399	1.146.244,45	0,00	1.146.244,45
103	SMPN 7 KETUNGAU TENGAH SATAP	4001022411	1.028.670,45	0,00	1.028.670,45
104	SMP NEGERI 1 KETUNGAU HULU	4001022453	-	376,44	376,44
105	SMP NEGERI 10 KETUNGAU HULU	4001026661	-	-	-
106	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU	4001022461	539,74	(0,00)	539,74
107	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU	4001022470	5.467.138,22	-	5.467.138,22
108	SMP NEGERI 4 KETUNGAU HULU	4001022488	4.463.787,13	-	4.463.787,13
109	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU	4001022496	328.183,52	1.024.000,00	1.352.183,52
110	SMP NEGERI 6 SATAP KETUNGAU HULU	4001022500	1.559.121,40	0,00	1.559.121,40
111	SMP NEGERI 7 SATU ATAP KETUNGAU HULU	4001022518	4.862.000,15	-	4.862.000,15
112	SMP NEGERI 8 KETUNGAU HULU	4001026165	0,95	410,00	410,95
113	SMP NEGERI 9 KETUNGAU HULU	4001026025	68.500,00	1.382.000,00	1.450.500,00
	<b>Total SMP</b>		<b>144.107.057,06</b>	<b>14.924.358,70</b>	<b>159.031.415,76</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.198.716.284,81</b>	<b>196.924.645,00</b>	<b>1.395.640.929,81</b>





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PERSEDIAAN PER SKPD  
PERIODE 31 DESEMBER 2022

No	SKPD	PERSEDIAAN																	JUMLAH SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	ATK	KERTAS DAN COVER	MATERAI	BAHAN KOMPUTER	Obat-Obatan	Bahan Makanan	Bahan Kimia Reagen	Alat Listrik	Barang Cetak	Perabot kantor	BBM	Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat	BAKHP	RADIOLOGI	OKSIGEN	APD (ALAT PELINDUNG DIRI)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	830.000,00	1.820.000,00																1.820.000,00
2	Dinas Kesehatan	13.114.185.429,60	101.867.100,00	13.421.500,00	620.000,00	36.240.076,00	6.698.009.031,49	191.869.500,00	540.027.568,00	31.740.080,00	4.258.500,00	235.524.439,00			3.725.175.537,60	106.265.000,00	39.798.897,00	3.191.094.508,19	14.915.911.737,28
4	Dinas Pekerjaan Umum	1.365.000,00	300.000,00	420.000,00		240.000,00													960.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.342.629.145,00	600.000,00			625.000,00								20.745.312.400,00					20.746.537.400,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	453.000,00	355.000,00																355.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	436.000,00	700.000,00	160.000,00															860.000,00
8	Dinas Sosial	1.413.500,00	165.000,00			825.000,00													990.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.552.010.840,00	540.000,00			500.000,00						164.190.000,00		752.649.545,00					917.879.545,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	355.000,00	1.315.000,00																1.315.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	608.384.550,00		810.000,00		1.000.000,00		581.357.050,00											583.167.050,00
12	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	4.125.000,00	660.000,00			247.500,00													907.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.244.000,00	1.704.000,00			500.000,00					6.607.500,00								8.811.500,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.439.000,00	412.920,00	3.219.000,00		7.853.250,00				2.289.375,00	44.919.000,00								58.693.545,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	770.000,00	500.000,00																500.000,00
16	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	304.387.547,20	430.000,00				211.867.685,48												212.297.685,48
17	Dinas Perhubungan	7.129.957,00	2.651.250,00								7.846.608,00								10.497.858,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000,00	1.150.000,00																1.150.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	308.000,00	1.100.000,00																1.100.000,00
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.070.100,00	2.441.000,00	778.000,00		2.550.000,00						2.859.000,00							8.628.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	787.000,00	565.800,00	180.000,00		250.000,00						94.500,00							1.090.300,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	776.500,00	41.000,00	900.000,00		375.000,00					134.100,00	190.000,00							1.640.100,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.055.000,00	1.182.600,00			330.000,00													1.512.600,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.870.000,00	660.000,00			1.127.500,00													1.787.500,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.056.000,00	592.740,00	1.176.600,00		638.250,00													2.407.590,00
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	44.847.000,00	900.000,00								48.575.000,00								49.475.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	150.000,00	80.000,00																80.000,00
28	Sekretariat Daerah	2.147.853,00	1.692.921,00			1.899.220,02													3.592.141,02
29	Sekretariat DPRD	858.000,00	1.221.000,00																1.221.000,00
30	Inspektorat	561.000,00								1.909.600,00									1.909.600,00
31	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	929.500,00	588.500,00																588.500,00
32	Kantor Kecamatan Kelay Permai	300.000,00	360.000,00			250.000,00													610.000,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	401.500,00	790.000,00																790.000,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	484.000,00	793.000,00																793.000,00
35	Kantor Kecamatan Deday	725.000,00	496.500,00									83.000,00	250.360,00						829.860,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	150.000,00	300.000,00			225.000,00													525.000,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	553.600,00	625.000,00																625.000,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.257.000,00	900.000,00																900.000,00
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	330.000,00	610.500,00																610.500,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	260.000,00	262.500,00	720.000,00															982.500,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	627.000,00	770.000,00			250.000,00													1.020.000,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	1.046.100,00	56.500,00	600.000,00		137.500,00													794.000,00
43	Kantor Kecamatan Ambalau	-	600.000,00																600.000,00
44	Kantor Kecamatan Sintang	269.168.900,00	13.341.100,00	3.238.800,00	200.000,00	4.112.179,00													20.892.079,00
45	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	198.000,00	626.040,00			500.000,00													1.126.040,00
	TOTAL	46.329.275.021,80	146.766.971,00	25.623.900,00	820.000,00	60.675.475,02	6.909.876.716,97	773.226.550,00	540.027.568,00	35.939.055,00	112.340.708,00	402.940.939,00	250.360,00	21.497.961.945,00	3.725.175.537,60	106.265.000,00	39.798.897,00	3.191.094.508,19	37.568.784.130,78



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PIUTANG RETRIBUSI  
Periode 31 Desember 2022

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
					PIUTANG (Rp)			
1	155	Cumoi	23/09/2021	31/12/2021	440.000,00	440.000,00	110.000,00	330.000,00
2	156	Siami	23/09/2021	31/12/2021	1.080.000,00	1.080.000,00	270.000,00	810.000,00
3	54	Tuwono	26 Agt 2021	31/12/2021	720.000,00	720.000,00	180.000,00	540.000,00
4	30	Dony Valnando	15/04/2021	31/12/2021	2.805.000,00	2.805.000,00	701.250,00	2.103.750,00
5	50	Suhartini	28/07/2021	31/12/2021	2.550.000,00	2.550.000,00	637.500,00	1.912.500,00
6	85	Andi Hugraha	07/09/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
7	86	Ramadanur	07/09/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
8	87	Eri Pius	07/09/2021	31/12/2021	1.020.000,00	1.020.000,00	255.000,00	765.000,00
9	91	Ratna Juwita	07/09/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
10	92	Syaiful Husni	07/09/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
11	93	Syarifuddin	07/09/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
12	110	Agus Herlinda	09/09/2021	31/12/2021	2.550.000,00	2.550.000,00	637.500,00	1.912.500,00
13	182	Yuliarti	15/10/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
14	184	Amsar Tanjung	15/10/2021	31/12/2021	2.550.000,00	2.550.000,00	637.500,00	1.912.500,00
15	186	Ermalina	15/10/2021	31/12/2021	1.785.000,00	1.785.000,00	446.250,00	1.338.750,00
16	177	Iwan Suhadi	15/10/2021	31/12/2021	1.080.000,00	1.080.000,00	270.000,00	810.000,00
17	181	Ermansyah	15/10/2021	31/12/2021	1.080.000,00	1.080.000,00	270.000,00	810.000,00
18	221	Irma Elviana	07/12/2021	31/12/2021	660.000,00	660.000,00	165.000,00	495.000,00
19	41	Mardiyani	28/06/2021	31/12/2021	600.000,00	600.000,00	150.000,00	450.000,00
20	42	Munawi	28/06/2021	31/12/2021	720.000,00	720.000,00	180.000,00	540.000,00
21	43	Nenni Qaulawati	30/06/2021	31/12/2021	840.000,00	840.000,00	210.000,00	630.000,00
22	44	Supiah	30/06/2021	31/12/2021	840.000,00	840.000,00	210.000,00	630.000,00
23	63	Rozikin	02/09/2021	31/12/2021	720.000,00	720.000,00	180.000,00	540.000,00
24	121	Munawi	10/09/2021	31/12/2021	720.000,00	720.000,00	180.000,00	540.000,00
25	122	Suksesih	10/09/2021	31/12/2021	840.000,00	840.000,00	210.000,00	630.000,00
26	22	Yusianti	01/03/2021	31/12/2021	630.000,00	630.000,00	157.500,00	472.500,00
27	23	Sarlinda	01/03/2021	31/12/2021	720.000,00	720.000,00	180.000,00	540.000,00
28	114	Tri Handoko	10/09/2021	31/12/2021	180.000,00	180.000,00	45.000,00	135.000,00
29	150	M Indra	23/09/2021	31/12/2021	1.020.000,00	1.020.000,00	255.000,00	765.000,00
30	170	Rini	23/09/2021	31/12/2021	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00
31	1	Siti Nurjanah	05/01/2021	31/12/2021	1.912.500,00	1.912.500,00	478.125,00	1.434.375,00
32	2	Martono	05/01/2021	31/12/2021	892.500,00	892.500,00	223.125,00	669.375,00
33	3	Juhardi	05/01/2021	31/12/2021	1.657.500,00	1.657.500,00	414.375,00	1.243.125,00
34	4	Heni V	05/01/2021	31/12/2021	1.657.500,00	1.657.500,00	414.375,00	1.243.125,00
35	14	Musni	19/01/2021	31/12/2021	1.530.000,00	1.530.000,00	382.500,00	1.147.500,00
36	16	Risawati	26/01/2021	31/12/2021	1.147.500,00	1.147.500,00	286.875,00	860.625,00
37	21	Ricky Septiadi	23/02/2021	31/12/2021	1.660.000,00	1.660.000,00	415.000,00	1.245.000,00
38	26	Bambang Sukarni	15/04/2021	31/12/2021	2.805.000,00	2.805.000,00	701.250,00	2.103.750,00
39	27	Agus Herlinda/Akir Ali	15/04/2021	31/12/2021	382.500,00	382.500,00	95.625,00	286.875,00
40	28	Lim Nyan Kong	15/04/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
41	29	Dony Valnando	15/04/2021	31/12/2021	1.530.000,00	1.530.000,00	382.500,00	1.147.500,00
42	37	Siaw Kin Fen	16/04/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
					PIUTANG			
					(Rp)			
43	105	Kong Tjhin Djin	08/09/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
44	108	Siaw Kin Fen	09/09/2021	31/12/2021	1.020.000,00	1.020.000,00	255.000,00	765.000,00
45	151	Mulyati	23/09/2021	31/12/2021	2.550.000,00	2.550.000,00	637.500,00	1.912.500,00
46	152	Peri Sadisko	23/09/2021	31/12/2021	2.550.000,00	2.550.000,00	637.500,00	1.912.500,00
47	153	Martono	23/09/2021	31/12/2021	1.530.000,00	1.530.000,00	382.500,00	1.147.500,00
48	185	Eli Suryanti	07/10/2021	31/12/2021	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	1.530.000,00
49	231	Sukirno	13/12/2021	31/12/2021	1.020.000,00	1.020.000,00	255.000,00	765.000,00
50	11	Arizal	22/03/2022	31/12/2022	-	510.000,00	-	510.000,00
51	20	Hendi Suhendi	22/03/2022	31/12/2022	-	220.000,00	-	220.000,00
52	57	Rudius	22/03/2022	31/12/2022	-	1.660.000,00	-	1.660.000,00
53	61	Arif Nurohman	22/03/2022	31/12/2022	-	720.000,00	-	720.000,00
54	62	Siti Komariah	22/03/2022	31/12/2022	-	720.000,00	-	720.000,00
55	73	Nikodemus	22/03/2022	31/12/2022	-	1.440.000,00	-	1.440.000,00
56	76	Supardianto	22/03/2022	31/12/2022	-	720.000,00	-	720.000,00
57	77	Imam Sanusi	22/03/2022	31/12/2022	-	720.000,00	-	720.000,00
58	188	Kasmadi	22/03/2022	31/12/2022	-	360.000,00	-	360.000,00
59	259	Elmidah	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
60	260	Afrinal Munir	22/03/2022	31/12/2022	-	2.040.000,00	-	2.040.000,00
61	267	Desniyanti	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
62	294	Zulliadi	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
63	645	Andi	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
64	646	Doni Eka Rianto	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
65	652	Maizil Erdi	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
66	656	Anwar	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
67	669	Syaiful Husni	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
68	672	Ramadanur	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
69	721	Kong Tjhin Djin	22/03/2022	31/12/2022	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00
<b>JUMLAH PIUTANG PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI DAN INTENSIF DPRD</b>					<b>71.895.000,00</b>	<b>96.305.000,00</b>	<b>17.973.750,00</b>	<b>78.331.250,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PIUTANG RETRIBUSI  
Periode 31 Desember 2022

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AWAL PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
<b>PIUTANG RETRIBUSI PBG DPMPSTP</b>									
1	27	M. IRWAN	5/5/2008	05/05/2008	1.068.500,00	1.068.500,00	1.068.500,00	1.068.500,00	-
2	28	MULKANI	5/21/2008	21/05/2008	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	-
3	41	Drs. MIKHAEL ABENG, MM	6/3/2008	03/06/2008	1.882.125,00	1.882.125,00	1.882.125,00	1.882.125,00	-
4	09	FAISAL SP	2/11/2009	11/02/2009	613.500,00	613.500,00	613.500,00	613.500,00	-
5	22	NURSIHAH	3/19/2009	19/03/2009	497.250,00	497.250,00	497.250,00	497.250,00	-
6	23	RUSNI	3/19/2009	19/03/2009	805.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	-
7	25	GM. NAJIB	3/19/2009	19/03/2009	733.500,00	733.500,00	733.500,00	733.500,00	-
8	41	Drs. MARSELINUS EDIT	5/28/2009	28/05/2009	416.250,00	416.250,00	416.250,00	416.250,00	-
9	42	Drs. MARSELINUS EDIT	5/28/2009	28/05/2009	422.250,00	422.250,00	422.250,00	422.250,00	-
10	43	Drs. MARSELINUS EDIT	5/28/2009	28/05/2009	824.250,00	824.250,00	824.250,00	824.250,00	-
11	44	Drs. MARSELINUS EDIT	5/28/2009	28/05/2009	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	-
12	73	SOFYAN WALDI	11/5/2009	05/11/2009	566.250,00	566.250,00	566.250,00	566.250,00	-
13	77	INDRA SUBEKTI	12/7/2009	07/12/2009	1.353.100,00	1.353.100,00	1.353.100,00	1.353.100,00	-
14	184	NORITA DAHLIA	6/18/2013	31/12/2013	195.920,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00	-
15	39	ARIF DHARMA HARTANA	8/16/2013	31/12/2013	66.960,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00	-
16	152	ALI SURAHMAN	11/27/2013	31/12/2013	42.160,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00	-
17	35	EDY MULYONO	1/17/2017	17/02/2017	217.280,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00	-
18	14	ROBBY	2/9/2018	09/03/2018	-	-	-	-	-
19	124	SUPARDI	08/05/2019	08/06/2019	176.050,00	88.025,00	176.050,00	132.037,50	44.012,50
20	125	BROLIE BARSEBA	10/06/2019	10/07/2019	703.200,00	351.600,00	703.200,00	527.400,00	175.800,00
21	126	ABANG MAYOR	27/06/2019	27/07/2019	74.680,00	37.340,00	74.680,00	56.010,00	18.670,00
22	127	FITRIYADI	15/11/2019	15/12/2019	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI PBG</b>					<b>11.294.725,00</b>	<b>10.817.760,00</b>	<b>11.294.725,00</b>	<b>11.056.242,50</b>	<b>238.482,50</b>
<b>PIUTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN HO KPTSP</b>									
	250	WARMI CANIAGO	4/17/2014	12/31/2014	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	-
	271	JALI S.	4/29/2014	12/31/2014	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	117	SYAIFULLAH/CV.PRIMA JAYA ABADI	2/16/2015	3/16/2015	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	144	RINI EKAWATI/TK/ABADI STATIONARY	3/3/2015	4/3/2015	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	-
	365	ALANSYAH/BKL.SEPEDA MOTOR	5/12/2015	6/12/2015	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-
	591	ABDUL MALIK/TK.MEKAR	8/27/2015	9/27/2015	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
	240	A. BAMBANG SUPARJO/TIMBAU MELAWI	4/10/2017	5/10/2017	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	-
<b>JUMLAH PIUTANG IJIN GANGGUAN HO</b>					<b>1.284.500,00</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN PIUTANG RETRIBUSI</b>					<b>12.579.225,00</b>	<b>12.102.260,00</b>	<b>12.579.225,00</b>	<b>12.340.742,50</b>	<b>238.482,50</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PIUTANG PAJAK DAERAH  
Periode 31 Desember 2022

No	NOMOR WAJIB PAJAK	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
<b>PIUTANG ATAS DENDA</b>							
1	973/357/III-A/BAPPENDA/2019	PT. PERKASA MAS LANGGENG	06/08/2019	31/12/2019	767.377.902,20	575.533.426,65	191.844.475,55
2	SKPDKBT NO:793/119/II.B BAPPENDA 2021	PT. PERKASA MAS LANGGENG	09/02/2021	09/02/2021	12.028.742,28	3.007.185,57	9.021.556,71
3	SKPDKBT NO:793/120/II.B BAPPENDA 2021	PT.AGRO GADING SEJAHTERA	09/02/2021	09/02/2021	-	-	-
5	SKPDKB	Piutang Denda Restoran	30/04/2021	30/06/2021	15.900.298,41	3.975.074,60	11.925.223,81
6	SKPDKB	Piutang Denda Hiburan	30/04/2021		8.775.026,00	8.775.026,00	-
<b>JUMLAH KESELURUHAN PIUTANG ATAS DENDA TAHUN 2021</b>					<b>804.081.968,89</b>	<b>591.290.712,82</b>	<b>212.791.256,07</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH  
PIUTANG PENDAPATAN BLUD  
Periode 31 Desember 2022

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
<b>PENDAPATAN BLUD</b>							
	916/4149/KEU/2016	PTPN PLASMA XIII BULAN MEI 2016	30/05/2016	30/05/2016	1.048.599,00	1.048.599,00	-
	916/5154/KEU/2016	- BULAN JUNI 2016	30/06/2016	30/06/2016	584.863,00	584.863,00	-
	916/1058/KEU/2016	PT BUANA HJAU ABADI II BULAN JANUARI 2016	30/01/2016	30/01/2016	3.617.574,00	3.617.574,00	-
	916/5141/KEU/2016	- BULAN JUNI 2016	30/06/2016	30/06/2016	118.165,00	118.165,00	-
	916/0080/KEU/2016	- BULAN DESEMBER 2016	30/12/2016	30/12/2016	275.259,00	275.259,00	-
	916/4249/KEU/2016	- BULAN MEI 2016	30/05/2016	30/05/2016	6.166.176,00	6.166.176,00	-
	916/8480/KEU/2016	- BULAN NOVEMBER 2016	30/11/2016	30/11/2016	2.176.324,00	2.176.324,00	-
		PT SINARMAS/FINANTARA	30/05/2016	30/05/2016	11.345.010,00	11.345.010,00	-
		PT BUMI SENTOSA LESTARI BULAN JUNI 2015	30/05/2016	30/05/2016	20,00	20,00	-
	156352	ELLYSABETH	16/09/2010	16/09/2010	4.773.200,00	4.773.200,00	-
	182648	WIWIK NINGSIH	25/09/2009	25/09/2009	7.376.263,00	7.376.263,00	-
	192293	ASMAWATI	28/12/2010	28/12/2010	2.377.938,00	2.377.938,00	-
	192294	NY. ROSIDA	04/02/2011	04/02/2011	711.900,00	711.900,00	-
	196983	MELAN	01/04/2011	01/04/2011	294.500,00	294.500,00	-
	122633	DARMAWAN ISKANDAR	04/01/2011	04/01/2011	606.000,00	606.000,00	-
	196812	USMAN	30/03/2011	30/03/2011	415.200,00	415.200,00	-
	195016	JUNIATI	18/02/2011	18/02/2011	4.639.200,00	4.639.200,00	-
	194835	RIKARDO	15/02/2011	15/02/2011	412.790,00	412.790,00	-
	KL	ADE SUFIANSYAH	21/01/2011	21/01/2011	1.155.867,00	1.155.867,00	-
	194853	DIANA SULASTRI	21/02/2011	21/02/2011	2.794.700,00	2.794.700,00	-
	190812	NUR ASURI	06/12/2010	06/12/2010	1.207.204,00	1.207.204,00	-
	193132	SAID	11/01/2011	11/01/2011	727.240,00	727.240,00	-
	202200	ANDREAS	29/08/2011	29/08/2011	5.023.310,00	5.023.310,00	-
	203213	NURLENA SUSANTI	18/08/2011	18/08/2011	600.000,00	600.000,00	-
	203909	AGUS SOPIANTO	06/09/2011	06/09/2011	774.462,00	774.462,00	-
	138345	DARIUS SAPUTRA	28/06/2011	28/06/2011	342.900,00	342.900,00	-
	162535	AFRIDAWASNI Br SARAGIH	29/06/2011	29/06/2011	3.336.050,00	3.336.050,00	-
	200698	TUTI ROSMAYANTI	20/08/2011	20/08/2011	1.965.550,00	1.965.550,00	-
	201438	YOHANES	14/07/2011	14/07/2011	2.949.050,00	2.949.050,00	-
	196272	NY SELI	31/10/2011	31/10/2011	5.883.765,00	5.883.765,00	-
	206076	Ny. Sri Novianti	05/11/2011	05/11/2011	246.025,00	246.025,00	-
	166646	Eliyus Maneti	23/06/2011	23/06/2011	94.000,00	94.000,00	-
	KL	Deri Fitriani	25/09/2009	25/09/2009	583.900,00	583.900,00	-
	KL	R. K. Mariati	30/07/2010	30/07/2010	1.674.500,00	1.674.500,00	-
	KL	Risky Dhasniyanti	12/11/2010	12/11/2010	1.006.257,00	1.006.257,00	-
	KL	M. Fatih Ircal	01/01/2011	01/01/2011	167.200,00	167.200,00	-
	KL	Risky Dhasniyanti	12/11/2010	12/11/2010	446.700,00	446.700,00	-
	KL	Lena Juliana	18/08/2011	18/08/2011	3.732.502,00	3.732.502,00	-
	KL	Sri Winingsih	21/07/2011	21/07/2011	3.092.363,00	3.092.363,00	-
	KL	dr. Handanu	13/10/2011	13/10/2011	26.250,00	26.250,00	-
	211496	Nurazazi Rahmatun	12/02/2012	12/02/2012	1.048.950,00	1.048.950,00	-
	216402	Merry Agustin	07/06/2012	07/06/2012	7.785.867,00	7.785.867,00	-
	212219	Mas Nurjan	12/03/2012	12/03/2012	1.864.920,00	1.864.920,00	-
	214686	Oktavia Putri	27/04/2012	27/04/2012	150.000,00	150.000,00	-
	214658	Bonsam	30/04/2012	30/04/2012	1.701.775,00	1.701.775,00	-
	211263	Silit	24/02/2012	24/02/2012	3.924.300,00	3.924.300,00	-
	213547	Lenisia	08/04/2012	08/04/2012	3.648.194,00	3.648.194,00	-
	213680	Dedi	28/07/2012	28/07/2012	1.656.585,00	1.656.585,00	-
	219157	Mardan	12/08/2012	12/08/2012	2.221.500,00	2.221.500,00	-
	213105	Miranda	26/03/2012	26/03/2012	679.775,00	679.775,00	-

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
	220970	Sepianto/Simpoy	24/04/2012	24/04/2012	1.825.150,00	1.825.150,00	-
	174597	Nagiya Aisyah Anriko	04/12/2012	04/12/2012	117.500,00	117.500,00	-
	139187	Lanan	16/11/2012	16/11/2012	2.665.588,00	2.665.588,00	-
	226649	ROPINUS	31/01/2013	31/01/2013	2.822.850,00	2.822.850,00	-
	KL	VIKTORIUS	12/08/2013	12/08/2013	330.507,00	330.507,00	-
	234012	KARSONO	13/08/2013	13/08/2013	97.406,00	97.406,00	-
	KL	NARTI	12/08/2013	12/08/2013	1.122.570,00	1.122.570,00	-
	KL	NUR HAYATI	12/08/2013	12/08/2013	75.795,00	75.795,00	-
	KL	EKO	12/08/2013	12/08/2013	71.180,00	71.180,00	-
	KL	KRISTIAN MONDANG	12/08/2013	12/08/2013	48.000,00	48.000,00	-
	KL	YUSUF	12/08/2013	12/08/2013	88.137,00	88.137,00	-
	KL	YATI	12/08/2013	12/08/2013	78.575,00	78.575,00	-
	KL	JAMHURI	12/08/2013	12/08/2013	82.425,00	82.425,00	-
	KL	POMPI	12/08/2013	12/08/2013	247.920,00	247.920,00	-
	KL	DESTIA AGUSTINA	12/08/2013	12/08/2013	71.945,00	71.945,00	-
	KL	MAULIDAH	12/08/2013	12/08/2013	202.875,00	202.875,00	-
	KL	FADILATUL AQLI	12/08/2013	12/08/2013	513.875,00	513.875,00	-
	243914	FRANSISKA	25/03/2014	25/03/2014	2.431.270,00	2.431.270,00	-
	KL	LILI PURNAWAH	27/05/2014	27/05/2014	2.275.790,00	2.275.790,00	-
	232309	ROBET	08/06/2014	08/06/2014	1.842.773,00	1.842.773,00	-
	247540	DEDE	25/06/2014	25/06/2014	1.250.000,00	1.250.000,00	-
	115771	NURLINAWATI	25/06/2014	25/06/2014	2.908.659,00	2.908.659,00	-
	237136	BUJANG BORNEO	25/06/2014	25/06/2014	2.491.948,00	2.491.948,00	-
	247564	HARZA	28/06/2014	28/06/2014	1.778.795,00	1.778.795,00	-
	247593	BY NY RIA MELDIAH	28/06/2014	28/06/2014	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	252506	DEDI S	03/12/2014	03/12/2014	281.000,00	281.000,00	-
	252938	MAGDALENA	03/12/2014	03/12/2014	599.015,00	599.015,00	-
	250912	ARYA	09/10/2014	09/10/2014	304.828,00	304.828,00	-
	247932	PRAMESTI	13/07/2014	13/07/2014	2.119.263,00	2.119.263,00	-
	252051	FARELL AZLA	08/11/2014	08/11/2014	561.400,00	561.400,00	-
	252709	CRISTOPORUS	27/11/2014	27/11/2014	356.800,00	356.800,00	-
	103001	TJIE SIE TJIN	21/10/2014	21/10/2014	16.097.524,00	16.097.524,00	-
	249334	HARYO FIRMAN	26/08/2014	26/08/2014	3.221.850,00	3.221.850,00	-
	250413	SUDIRMAN	26/09/2014	26/09/2014	471.913,00	471.913,00	-
	245359	KHALILA	02/10/2014	02/10/2014	503.864,00	503.864,00	-
	KL	CICI KUSMAWATI	26/09/2014	26/09/2014	628.299,00	628.299,00	-
	171863	BUKHARI ASTI S	27/12/2014	27/12/2014	548.200,00	548.200,00	-
	259820	RAMLAN	05/01/2015	05/01/2015	470.800,00	470.800,00	-
	161950	RIA IRAWATI	17/02/2015	17/02/2015	813.400,00	813.400,00	-
	262926	BY NY SARI BONA	22/03/2015	22/03/2015	1.258.750,00	1.258.750,00	-
	262921	SARI BONA SULASTRI	21/03/2015	21/03/2015	4.722.883,00	4.722.883,00	-
	133145	YULIANA	03/03/2015	03/03/2015	562.800,00	562.800,00	-
	233861	AGUSTINUS	27/03/2015	27/03/2015	873.400,00	873.400,00	-
	87612	SYAMSUDDIN	14/03/2015	14/03/2015	844.400,00	844.400,00	-
	263493	FATIR	04/04/2015	04/04/2015	200.847,00	200.847,00	-
	251541	ZAIN ZUL FADIL	12/06/2015	12/06/2015	43.000,00	43.000,00	-
	265758	ELVIANTI	26/05/2015	26/05/2015	2.136.640,00	2.136.640,00	-
	166970	ASNAWATI	22/06/2015	22/06/2015	6.095.188,00	6.095.188,00	-
	268777	NY FITRI	10/08/2015	10/08/2015	5.081.850,00	5.081.850,00	-
	268782	BY NY FITRI	10/08/2015	10/08/2015	1.013.750,00	1.013.750,00	-
	209160	DUABIT AKBAR	19/08/2015	19/08/2015	472.100,00	472.100,00	-
	92094	BAYU BIASA	20/09/2015	20/09/2015	362.800,00	362.800,00	-
	179167	NINING	08/09/2015	08/09/2015	463.100,00	463.100,00	-
	270063	ZAKHIRA	10/09/2015	10/09/2015	62.800,00	62.800,00	-
	206327	SRI UTAMI	28/09/2015	28/09/2015	531.200,00	531.200,00	-
	270623	ANGELA	21/09/2015	21/09/2015	9.413.650,00	9.413.650,00	-
	172507	MELTI PASHA	30/10/2015	30/10/2015	318.420,00	318.420,00	-
	226298	HERAWATI	16/10/2015	16/10/2015	314.500,00	314.500,00	-
	272558	LUTHFI R	11/11/2015	11/11/2015	408.800,00	408.800,00	-
	31647	MAGDALENA	20/11/2015	20/11/2015	108.800,00	108.800,00	-

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
	269075	FEDELIS DIAS	18/07/2015	18/07/2015	593.500,00	593.500,00	-
	109319	NYURUNG BASRI	04/07/2015	04/07/2015	235.800,00	235.800,00	-
	162814	NURAINI	01/03/2015	01/03/2015	292.000,00	292.000,00	-
	270517	L M UDENG	18/09/2015	18/09/2015	2.569.560,00	2.569.560,00	-
		ZIATUL	30/01/2015	30/01/2015	39.000,00	39.000,00	-
	247442	SAFIRA ELIA PUTRI	14/12/2015	14/12/2015	398.200,00	398.200,00	-
	171200	RIZA	29/12/2015	29/12/2015	562.800,00	562.800,00	-
	195860	RAJAB GONI	01/01/2016	01/01/2016	522.000,00	522.000,00	-
	268542	HAYFA AURANIA	07/01/2016	07/01/2016	1.996.552,00	1.996.552,00	-
	102634	HERMELING	18/01/2016	18/01/2016	2.233.240,00	2.233.240,00	-
		AHMAD KADRI	21/01/2016	21/01/2016	1.427.711,00	1.427.711,00	-
		SUTINI	26/01/2016	26/01/2016	1.412.373,00	1.412.373,00	-
	104865	WAN HANAFIAH	02/01/2016	02/01/2016	2.679.734,00	2.679.734,00	-
	276614	LISA	03/02/2016	03/02/2016	-	-	-
	115730	ALDRIK FARIS	10/02/2016	10/02/2016	425.000,00	425.000,00	-
	175419	TAJONO	26/02/2016	26/02/2016	1.026.300,00	1.026.300,00	-
	277375	KAROLUS	15/02/2016	15/02/2016	127.492,00	127.492,00	-
	278469	SERLIN JUMIATI	16/03/2016	16/03/2016	384.800,00	384.800,00	-
	278177	F.A. FARIS	23/03/2016	23/03/2016	13.679.157,00	13.679.157,00	-
	279160	SAMSI	27/03/2016	27/03/2016	246.950,00	246.950,00	-
	223270	M. DAMSYIK	31/03/2016	31/03/2016	1.341.243,00	1.341.243,00	-
	243997	SITI JUBAEDAH	06/04/2016	06/04/2016	4.358.909,00	4.358.909,00	-
	269353	SUHARTI	08/04/2016	08/04/2016	-	-	-
	096958	RUSMIATI	08/04/2016	08/04/2016	-	-	-
	148087	M. FATHAN	09/05/2016	09/05/2016	1.253.014,00	1.253.014,00	-
	287694	LUFITA AVRILIA	21/06/2016	21/06/2016	-	-	-
	287432	BY. NY. IDA LAELA	16/06/2016	16/06/2016	989.000,00	989.000,00	-
	231606	MICAEL MARO	23/07/2016	23/07/2016	-	-	-
	288740	BERO	11/07/2016	11/07/2016	-	-	-
	288136	RIKA YULIANI	15/07/2016	15/07/2016	-	-	-
	282040	BU. BAJANG	27/05/2016	27/05/2016	-	-	-
	288654	ALFIUS	27/07/2016	27/07/2016	712.000,00	712.000,00	-
	288099	BY. NY. YUNIDA	24/06/2016	24/06/2016	2.272.000,00	2.272.000,00	-
	282211	NURDIANA	24/06/2016	24/06/2016	433.700,00	433.700,00	-
		BY. BENEDIKTA	05/08/2016	05/08/2016	352.500,00	352.500,00	-
	300158	DWI MAHMUDA	15/08/2016	15/08/2016	-	-	-
		YOEL REVANDO	24/07/2016	24/07/2016	-	-	-
	288855	SOPU	06/08/2016	06/08/2016	1.116.200,00	1.116.200,00	-
	515116	IMUS	02/09/2016	02/09/2016	4.663.555,00	4.663.555,00	-
	300439	IMNU SAPUTRA	20/08/2016	20/08/2016	526.240,00	526.240,00	-
		YUNI TRISNO	07/08/2016	07/08/2016	119.909,00	119.909,00	-
	300811	LINA	05/09/2016	05/09/2016	-	-	-
		GS. HARYADI	13/09/2016	13/09/2016	282.265,00	282.265,00	-
		EKOSWARA	20/09/2016	20/09/2016	603.800,00	603.800,00	-
	289628	SYAMSUDIN	27/09/2016	27/09/2016	15.516.549,00	15.516.549,00	-
		BY. DWI S	23/08/2016	23/08/2016	-	-	-
	303241	NGAISAH	01/11/2016	01/11/2016	-	-	-
	302201	AGUSTINA TITIN	11/10/2016	11/10/2016	-	-	-
	303779	BY. NY. MARIA	15/11/2016	15/11/2016	-	-	-
	303513	BY. NY ANIDA	22/11/2016	22/11/2016	-	-	-
	302768	HAFIZAH	22/11/2016	22/11/2016	-	-	-
	304836	BY. NY NURLENI SELIDA	05/12/2016	05/12/2016	-	-	-
	304544	BY. NY. NURHAERANI	10/12/2016	10/12/2016	-	-	-
	304544	BY. NY. NURHAERANI	12/12/2016	12/12/2016	-	-	-
	305420	DIAH KARTIKA	21/12/2016	21/12/2016	2.565.145,00	2.565.145,00	-
	305262	TAKUWAN	20/12/2016	20/12/2016	-	-	-
		PT BUANA HUJAU ABADI II			-	-	-
		APRIL 2017	30/04/2017	30/05/2017	4.417.013,00	4.417.013,00	-
		PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (DSU) 2017			-	-	-
		DESEMBER 2017	30/12/2017	29/01/2018	1.954.433,00	1.954.433,00	-



No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
		BPJS KETENAGAKERJAAN 2017			-	-	-
		MARET 2017	30/03/2017	29/04/2017	130.500,00	130.500,00	-
		MEI 2107	30/05/2017	29/06/2017	1.087.606,00	1.087.606,00	-
		<b>DESEMBER 2017</b>	30/12/2017	29/01/2018	21.437.456,00	21.437.456,00	-
		PT PERSADA GRAHA MANDIRI 2017			-	-	-
		APRIL 2017	30/04/2017	30/05/2017	1.613.845,00	1.613.845,00	-
		<b>JUNI 2017</b>	30/06/2017	30/07/2017	5.021.397,00	5.021.397,00	-
	304891	BY NY HERLINA	08/12/2017	07/01/2018	-	-	-
	223687	ANDRIANUS	18/01/2017	17/02/2017	520.000,00	520.000,00	-
	306015	DEWI	31/12/2016	30/01/2017	1.567.526,00	1.567.526,00	-
	306656	BY NY TINA	15/01/2017	14/02/2017	-	-	-
	093687	PAIMAH	05/02/2017	07/03/2017	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	307626	LILET	17/02/2017	19/03/2017	1.665.000,00	1.665.000,00	-
	302911	APIT	14/02/2017	16/03/2017	3.021.678,00	3.021.678,00	-
	301982	FRANSISKA	14/02/2017	16/03/2017	-	-	-
	307585	ASYIFA	02/02/2017	04/03/2017	86.890,00	86.890,00	-
	308890	DAYANG	13/02/2017	15/03/2017	166.087,00	166.087,00	-
	309869	MAHMUD	26/03/2017	25/04/2017	-	-	-
	308596	BY NY MARIA	06/03/2017	05/04/2017	394.500,00	394.500,00	-
		SYEH DEA KURNIA	05/03/2017	04/04/2017	-	-	-
		BY NY SYEH DEA	11/03/2017	10/04/2017	-	-	-
	309218	LAYCHOK KOW	31/03/2017	30/04/2017	-	-	-
	309967	ANISAH	27/03/2017	26/04/2017	-	-	-
		BY NY KATARINA	25/03/2017	24/04/2017	-	-	-
	311231	IMAM FAHMI	10/03/2017	09/04/2017	935.253,00	935.253,00	-
	311014	ARDIANTO	22/04/2017	22/05/2017	8.589.338,00	8.589.338,00	-
	112401	H.DHARMA	08/05/2017	07/06/2017	600.000,00	600.000,00	-
	312569	BY NY EVI	22/05/2017	21/06/2017	2.451.000,00	2.451.000,00	-
	312424	NY EVI	22/05/2017	21/06/2017	216.500,00	216.500,00	-
	311975	FAZRI PUTAK	18/05/2017	17/06/2017	-	-	-
	312473	SITI	20/05/2017	19/06/2017	-	-	-
	314202	SISKA JULIANA	20/05/2017	19/06/2017	-	-	-
	311442	YUDIA NINGSIH	27/04/2017	27/05/2017	1.569.791,00	1.569.791,00	-
	312539	SRI RAHAYU	20/05/2017	19/06/2017	-	-	-
	189887	JUSIAN	15/05/2017	14/06/2017	2.569.500,00	2.569.500,00	-
	191059	DOLFI M	28/06/2017	28/07/2017	-	-	-
	313490	BY NY IRENA	12/03/2017	11/04/2017	2.915.000,00	2.915.000,00	-
	112240	ULWAN	30/06/2017	30/07/2017	450.000,00	450.000,00	-
	137338	FALENTINA	12/06/2017	12/07/2017	380.900,00	380.900,00	-
	314870	BONG FAK KIONG	19/07/2017	18/08/2017	-	-	-
	314032	MARYATI	24/06/2017	24/07/2017	-	-	-
	312865	BY NY PINA K	28/05/2017	27/06/2017	2.256.500,00	2.256.500,00	-
	313302	SENIA	08/06/2017	08/07/2017	-	-	-
	315641	DWI K	30/07/2017	29/08/2017	-	-	-
		ADIK PIKRIP	12/08/2017	11/09/2017	143.986,00	143.986,00	-
		PETRUS PIS	16/06/2017	16/07/2017	916.500,00	916.500,00	-
	259730	MARTINUS	03/07/2017	02/08/2017	1.531.512,00	1.531.512,00	-
	280429	HANAN H	04/08/2017	03/09/2017	-	-	-
	315435	BY NY DARIAH	04/08/2017	03/09/2017	-	-	-
	104865	WAN HANAFIAH	23/09/2017	23/10/2017	360.000,00	360.000,00	-
	316961	BY FITRA	09/08/2017	08/09/2017	-	-	-
	319560	JOKO	16/10/2017	15/11/2017	-	-	-
	316781	RIRI	18/08/2017	17/09/2017	519.175,00	519.175,00	-
	314020	ROBIYAH	24/06/2017	24/07/2017	941.500,00	941.500,00	-
	322209	SITI	22/12/2017	21/01/2018	122.000,00	122.000,00	-
	322839	ANUAR	16/12/2017	15/01/2018	-	-	-
	319965	ANTIN	25/10/2017	24/11/2017	1.703.743,00	1.703.743,00	-
	034388	RUSDIANA DWI	30/12/2017	29/01/2018	-	-	-
	316834	RATNA ILAS	30/12/2017	29/01/2018	24.260,00	24.260,00	-

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
		<b>BPJS 2018</b>	30/12/2018	30/12/2018	-	-	-
		<b>RUJUKAN AMBULAN BPJS</b>	30/12/2018	30/12/2018	-	-	-
	916/216/KEU/2018	<b>JAMPERSAL KAPUAS HULU 2018</b>	30/12/2018	30/12/2018	-	-	-
	916/2181/KEU/2018	<b>NOVEMBER 2018</b>	30/11/2018	30/11/2018	-	-	-
	916/218/KEU/2018	<b>DESEMBER 2018</b>	30/12/2018	30/12/2018	-	-	-
	916/10123/KEU/2018	<b>PT SDK II SOLAM RAYA 2108</b>	30/11/2018	30/11/2018	-	-	-
	916//KEU/2018	AGUSTUS 2018	30/08/2018	30/08/2018	-	-	-
	916/9502/KEU/2018	SEPTEMBER 2018	30/09/2018	30/09/2018	-	-	-
	916/1116/KEU/2018	JANUARI 2018	30/01/2018	30/01/2018	-	-	-
	916//KEU/2018	SEPTEMBER 2018	30/09/2018	30/09/2018	-	-	-
	916/9502/KEU/2018	DESEMBER 2018	30/12/2018	30/12/2018	-	-	-
	916/9500/KUE/2018	<b>PT SNIP 2018</b>	30/09/2018	30/09/2018	-	-	-
	916/9499/KUE/2018	SEPTEMBER 2018	30/09/2018	30/09/2018	8.168.564,00	8.168.564,00	-
	916/205/KUE/2018	<b>PT SAWIT KATULISTIWA LESTARI</b>	30/12/2018	30/12/2018	-	-	-
	916/219/KUE/2018	DESEMBER 2018	30/12/2018	30/12/2018	-	-	-
		PT KIARA SAWIT ABADI 2					
	916/2130/KUE/2018	FEBRUARI 2018	28/02/2018	28/02/2018	-	-	-
	916/3510/KUE/2018	APRIL 2018	30/04/2018	30/04/2018	-	-	-
	916/5543/KUE/2018	MEI 2018	30/05/2018	30/05/2018	-	-	-
		BPJS KETENAGAKERJAAN 2018					
	916/8018/KUE/2018	FEBRUARI 2018	28/02/2018	28/02/2018	311.505,00	311.505,00	-
	916/3518/KUE/2018	APRIL 2108	30/04/2018	30/04/2018	1.748.083,00	1.748.083,00	-
		<b>JULI 2018</b>	30/07/2018	30/07/2018	875.076,00	875.076,00	-
		<b>AGUSTUS 2018</b>	30/08/2018	30/08/2018	-	-	-
		<b>NOVEMBER 2018</b>	30/11/2018	30/11/2018	238.500,00	238.500,00	-
		PT PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA 2018					
	916/2131/KUE/2018	FEBRUARI 2018	28/02/2018	28/02/2018	-	-	-
	916/2508/KUE/2018	MARET 2018	30/03/2018	30/03/2018	-	-	-
	916/3516/KUE/2018	APRIL 2018	30/04/2018	30/04/2018	-	-	-
		PT. INHEALTH	30/11/2018	30/11/2018	-	-	-
	320275	ANDRA M PRAHU	26/10/2018	27/10/2018	280.000,00	280.000,00	-
	320988	FAGUSTA	08/01/2018	11/01/2018	277.500,00	277.500,00	-
	324984	BY NY MISIYANI	26/01/2018	07/02/2018	16.497.500,00	16.497.500,00	-
	324069	ANITA MAYANG	09/01/2018	17/01/2018	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	326000	BY NY ANGELIN	17/02/2018	28/02/2018	4.157.500,00	4.157.500,00	-
	325507	BYTITIN W 1	07/02/2018	26/02/2018	8.577.050,00	8.577.050,00	-
	325508	BYTITIN W 1	06/02/2018	28/02/2018	22.121.000,00	22.121.000,00	-
	324677	ADRIAN	22/01/2018	31/01/2018	8.638.250,00	8.638.250,00	-
	325237	BY NY MEGA S	01/02/2018	02/02/2018	2.000.250,00	2.000.250,00	-
	325986	BY NY ELISABET DWI	17/02/2018	26/02/2018	5.306.500,00	5.306.500,00	-
	136283	AGUSTINA RINDA	09/04/2018	11/04/2018	2.835.229,00	2.835.229,00	-
	012691	WAHDAH	24/01/2018	25/01/2018	377.700,00	377.700,00	-
	324980	ASNI	21/01/2018	05/02/2018	3.616.117,00	3.616.117,00	-
	27-9039	KHAIRUDIN	01-04-2018	05/04/2018	888.300,00	888.300,00	-
	328361	BY NY YUNITA	28/03/2018	29/03/2018	259.000,00	259.000,00	-
	245516	MUSTAFA	26/03/2018	27/03/2018	907.000,00	907.000,00	-
	327833	LINA MAMPOU	1903-2018	21/03/2018	742.100,00	742.100,00	-
	338604	NURAINI	07/10/2018	12/10/2018	-	-	-
		JULIANA OKTA	18-011-2018	26/11/2018	-	-	-
	87092	A.I UGONG	22/05/2018	23/05/2018	144.100,00	144.100,00	-
	330633	PASKALIA	10/05/2018	13/05/2018	377.700,00	377.700,00	-
	328508	CORNELIUS	31/03/2018	04/04/2018	1.253.000,00	1.253.000,00	-
		ASNAWATI	30/09/2018	01/10/2018	602.400,00	602.400,00	-
	334943	FIRDAYANTI	01/08/2018	02/08/2018	284.700,00	284.700,00	-
	208368	WAHYUDI	18/08/2018	23/08/2018	1.055.140,00	1.055.140,00	-
	324522	SITI AMINAH	09/05/2018	17/05/2018	3.255.800,00	3.255.800,00	-
		M JAIS ALVAISYI	06/05/2018	08/05/2018	511.100,00	511.100,00	-
	215159	DWI ANDIKA	24/10/2018	27/10/2018	-	-	-
	219514	AMRIN	24/10/2018	27/10/2018	300.000,00	300.000,00	-
	339663	SALWA DWI	27/10/2018	31/10/2018	1.015.400,00	1.015.400,00	-

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
	338593	ANGELA	01/10/2018	09/10/2018	508.000,00	508.000,00	-
	340897	BY NY ZIDRIF	22/11/2018	24/11/2018	305.500,00	305.500,00	-
	287183	THIYA ANGREA	28/10/2018	03/11/2018	1.294.500,00	1.294.500,00	-
	331281	BY PUTRA ADITY	23/05/2018	24/05/2018	191.570,00	191.570,00	-
	219818	AMAT KUSMARA	18/07/2018	20/07/2018	657.800,00	657.800,00	-
	332559	DEPI	24/06/2018	26/06/2018	3.440.000,00	3.440.000,00	-
	331193	YUPITA	22/05/2018	23/05/2018	573.900,00	573.900,00	-
	094482	IDAWATI	18/04/2018	18/04/2018	839.000,00	839.000,00	-
	242761	LUKMAN	19/04/2018	22/04/2018	63.600,00	63.600,00	-
	207157	HABIBAH	30/07/2018	08/08/2018	908.400,00	908.400,00	-
	334722	BY NY DIANA.S	29/07/2018	08/08/2018	-	-	-
	113879	RISERIA	23/08/2018	28/08/2018	900.600,00	900.600,00	-
		TITUS	15/09/2018	15/09/2018	597.592,00	597.592,00	-
	337417	TARYONO	16/09/2018	17/09/2018	2.477.437,00	2.477.437,00	-
	336454	NONA	28/08/2018	30/08/2018	379.000,00	379.000,00	-
	338933	ELKAROY	13/10/2018	15/10/2018	860.000,00	860.000,00	-
	312969	SIMA	10/10/2018	12/10/2018	1.021.000,00	1.021.000,00	-
	113819	RISERIA	21/10/2018	26/10/2018	549.000,00	549.000,00	-
		INDRA	15/10/2018	12/10/2018	611.500,00	611.500,00	-
	341740	LUIS	09/12/2018	09/12/2018	281.702,00	281.702,00	-
		ESI OKTAVIA	16/12/2018	19/12/2018	4.501.003,00	4.501.003,00	-
	342050	DINA	16/12/2018	19/12/2018	277.000,00	277.000,00	-
		<b>PIUTANG TAHUN 2019</b>					
		<b>BPJS 2019</b>	30/12/2019	30/12/2019	-	-	-
		<b>JAMPERSAL KAPUAS HULU</b>	30/12/2019	30/12/2019	-	-	-
		<b>JAMPERSAL SINTANG</b>	30/12/2019	30/12/2019	-	-	-
		<b>SDK 3</b>	30/12/2019	30/12/2019	-	-	-
		DESEMBER 2019					
		<b>PT BUANA HIJAU ABADDI</b>					
	916/486/KEU/2019	MEI 2019	30/05/2019	30/05/2019	-	-	-
		<b>PT DUTA SEJAHTERA UTAMA</b>					
	916/485/KEU/2019	MEI 2019	30/05/2019	30/05/2019	2.688.136,00	2.016.102,00	672.034,00
		DESEMBER 2019	30/12/2019	30/12/2019	6.378.814,00	4.784.110,50	1.594.703,50
		<b>PT PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA</b>					
	916/273/KEU/2019	JUNI 2019	30/06/2019	30/06/2019	-	-	-
	916/273/KEU/2019	SEPTEMBER 2019	30/06/2019	30/06/2019	-	-	-
	916/504/KEU/2019	OKTOBER 2019	30/10/2019	30/10/2019	-	-	-
		<b>PT INHEALT</b>					
		DESEMBER 2019	30/12/2019	30/12/2019	-	-	-
		<b>BPJS KETENAGAKERJAAN</b>					
	916/519/KEU/2019	JANUARI 2019	31/01/2019	31/01/2019	1.292.817,00	969.612,75	323.204,25
	916/722/KEU/2019	MARET 2019	30/03/2019	30/03/2019	11.335.523,00	8.501.642,25	2.833.880,75
		AGUSTUS 2019	30/08/2019	30/08/2019	2.126.050,00	1.594.537,50	531.512,50
		OKTOBER 2019	30/10/2019	30/10/2019	3.028.260,00	2.271.195,00	757.065,00
		<b>UMUM</b>					
	343585	JUPITER	14/01/2019	17/01/2019	1.979.948,00	1.484.961,00	494.987,00
	343801	HAFIZAH	19/01/2019	21/01/2019	4.325.945,00	3.244.458,75	1.081.486,25
	343968	RISMA KRISTINA	22/01/2019	24/01/2019	3.252.247,00	2.439.185,25	813.061,75
	344458	JESIKA V.I	17/02/2019	20/02/2019	539.300,00	404.475,00	134.825,00
		DEVIN DESTAS	23/01/2019	25/01/2019	1.923.192,00	1.442.394,00	480.798,00
	377192	RUSMINI	28/03/2019	04/04/2019	1.800.500,00	1.350.375,00	450.125,00
	349615	BY NURHALIM	19/05/2019	19/05/2019	961.519,00	721.139,25	240.379,75
	350024	LIDWINA N	27/05/2019	31/05/2019	3.796.000,00	2.847.000,00	949.000,00
	350875	REZA HANIF	17/06/2019	27/06/2019	2.309.000,00	1.731.750,00	577.250,00
	309617	KARYONO	21/05/2019	23/05/2019	274.100,00	205.575,00	68.525,00
	353413	ELIMYATI	03/08/2019	07/08/2019	1.650.500,00	1.237.875,00	412.625,00

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
	350321	JHONI HARJA	05/06/2019	13/06/2019	1.242.200,00	931.650,00	310.550,00
	351797	SYAIFULLAH	03/07/2019	06/07/2019	5.809.706,00	4.357.279,50	1.452.426,50
	353269	SEVEN JULIAN	01/08/2019	04/08/2019	595.000,00	446.250,00	148.750,00
	315395	BRAMADUS	19/11/2019	23/11/2019	-	-	-
	352572	MELIMIA	18/07/2019	24/07/2019	3.031.218,00	2.273.413,50	757.804,50
	356975	ADI	19/11/2019	29/11/2019	13.473.384,00	10.105.038,00	3.368.346,00
	357710	WIWIT	01/11/2019	03/11/2019	3.566.141,00	2.674.605,75	891.535,25
		<b>PIUTANG TAHUN 2020</b>					
		BPJS KESEHATAN 2020	31/12/2020	31/12/2020	-	-	-
	916/1496/KEU 2020	BUANA HIJAU ABADI JUNI 2020	30/06/2020	30/06/2020	-	-	-
		PT. PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA					
	916/2957/KEU 2020	DESEMBER 2020	30/12/2020	30/12/2020	-	-	-
		PT DSU MARET 2020	30/03/2020	30/03/2020	379.914,00	189.957,00	189.957,00
		BPJS KETENAGAKERJAAN					
	916/1021/KEU/2020	JANUARI 2020	30/01/2020	30/01/2020	1.345.746,00	672.873,00	672.873,00
	916/1244/KEU/2020	MARET 2020	30/04/2020	30/04/2020	2.277.111,00	1.138.555,50	1.138.555,50
	916/1499/KEU/2020	JUNI 2020	30/06/2020	30/06/2020	-	-	-
	916/2800/KEU/2020	SEPTEMBER 2020	30/09/2020	30/09/2020	-	-	-
	916/2800/KEU/2020	NOVEMBER 2020	30/11/2020	30/11/2020	-	-	-
	916/2817/KEU/2020	JAMPERSAL SINTANG PIUTANG PASIEN UMUM	30/12/2020	30/12/2020	-	-	-
		ISRIYANTO	31/01/2020	03/02/2020	237.444,00	118.722,00	118.722,00
	309695	ZANEWAR/309695	17/04/2020	20/04/2020	604.200,00	302.100,00	302.100,00
	2616443	ANDREAS SUMARDI, 261643	30/12/2020	02/01/2021	450.000,00	112.500,00	337.500,00
		M ABRISAL RAUFA	15/01/2020	18/01/2020	287.500,00	143.750,00	143.750,00
	015571	WINARTI, 015571	31/12/2020	03/01/2021	335.400,00	83.850,00	251.550,00
	360941	DEVA ALVARO,360941	12/01/2020	15/01/2020	508.000,00	254.000,00	254.000,00
	187257	AINUN,187257	21/02/2020	24/02/2020	555.500,00	277.750,00	277.750,00
		BY NY KARRTINI	28/02/2020	02/03/2020	700.333,00	350.166,50	350.166,50
	244516	ALNO,244516	19/02/2020	22/02/2020	9.153.606,00	4.576.803,00	4.576.803,00
		BY NY SRIATUN	13/03/2020	16/03/2020	429.000,00	214.500,00	214.500,00
		SRIATUN	13/03/2020	16/03/2020	3.567.311,00	1.783.655,50	1.783.655,50
		RUSLI	22/04/2020	25/04/2020	997.165,00	498.582,50	498.582,50
		BY NY SUGINA	20/04/2020	23/04/2020	-	-	-
		YUNI	03/04/2020	06/04/2020	2.992.834,00	1.496.417,00	1.496.417,00
		BY NY TTIK T1	15/04/2020	18/04/2020	2.055.000,00	1.027.500,00	1.027.500,00
	365450	MARIA IMBOK, 365450	07/04/2020	10/04/2020	3.162.180,00	1.581.090,00	1.581.090,00
		BY NY LIA ARISTA	29/05/2020	01/06/2020	1.946.500,00	973.250,00	973.250,00
		SUPRIHATIN	24/04/2020	27/04/2020	1.459.500,00	729.750,00	729.750,00
	012681	UMAYAH, 012681	11/06/2020	14/06/2020	1.052.500,00	526.250,00	526.250,00
	187257	AINUN,187257	03/06/2020	06/06/2020	665.800,00	332.900,00	332.900,00
	367044	BY MICHEALLA JUNIA, 367044	10/06/2020	13/06/2020	4.511.194,00	2.255.597,00	2.255.597,00
	331612	MARDALENA INDIR,331612	17/07/2020	20/07/2020	775.000,00	387.500,00	387.500,00
	331612	MARDALENA INDIR,331612	17/07/2020	20/07/2020	236.100,00	118.050,00	118.050,00
		YANTI ECIL	10/08/2020	13/08/2020	3.579.244,00	1.789.622,00	1.789.622,00
		JHONI	25/07/2020	28/07/2020	2.519.244,00	1.259.622,00	1.259.622,00
		BY NY KRISTA	12/08/2020	15/08/2020	1.678.500,00	839.250,00	839.250,00
		ANDINI DWI S	21/08/2020	24/08/2020	3.931.445,00	1.965.722,50	1.965.722,50
	103363	BUNA B ,103363	14/09/2020	17/09/2020	933.697,00	466.848,50	466.848,50

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
	076269	ZAINI AZHAR, 076269	25/09/2020	28/09/2020	750.000,00	375.000,00	375.000,00
	308890	SAMSIARTI, 308890	14/09/2020	17/09/2020	1.350.000,00	675.000,00	675.000,00
	338766	AGUSTINUS , 338766	11/09/2020	14/09/2020	299.700,00	149.850,00	149.850,00
		HERMANUS PUTIN	29/10/2020	01/11/2020	795.941,00	397.970,50	397.970,50
		KRISTINA DWI SARTIKA	27/11/2020	30/11/2020	1.056.000,00	528.000,00	528.000,00
	273871	SANTOKO, 273871	19/11/2020	22/11/2020	521.300,00	260.650,00	260.650,00
	338329	THOMAS CURE, 338329	25/11/2020	28/11/2020	654.500,00	327.250,00	327.250,00
	175675	JAMES VIKTOR P , 175675	03/06/2020	06/06/2020	608.599,00	304.299,50	304.299,50
		<b>PIUTANG TAHUN 2021</b>					
		BPJS KESEHATAN 2021	31/12/2021	31/12/2022	-	-	-
		CLAIM PELAYANAN COVID 19 KEMENKES 2020	31/12/2020	31/12/2021	-	-	-
		CLAIM PELAYANAN COVID 19 KEMENKES 2021	31/12/2021	31/12/2022	-	-	-
		<b>PT SDK 11</b>					
	916/ /keu/ rsud/2021	<b>Bulan Desember 2021</b>	31/12/2021	31/12/2022	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
		<b>BPJS Ketenagakerjaan 2021</b>					
	916/ /keu/ rsud/2021	<b>Januari 2021</b>	29/01/2021	28/02/2021	1.112.841,00	278.210,25	834.630,75
	916/ /keu/ rsud/2021	<b>Februari 2021</b>	18/02/2021	20/03/2021	7.849.688,00	1.962.422,00	5.887.266,00
	916/ /keu/ rsud/2021	<b>Juni 2021</b>	18/06/2021	18/07/2021	521.000,00	130.250,00	390.750,00
	916/ 3478 /keu/ rsud/2021	<b>Agustus 2021</b>	08/09/2021	08/10/2021	335.500,00	83.875,00	251.625,00
	376563	Lusiana Balbalina,376563	21/03/2021	20/04/2021	980.276,00	245.069,00	735.207,00
	376934	by ny mina,376934	03/04/2021	03/05/2021	2.675.000,00	668.750,00	2.006.250,00
	287960	elkiano,287960	05/04/2021	05/05/2021	2.387.141,00	596.785,25	1.790.355,75
	377031	by ny pardiati,377031	13/04/2021	13/05/2021	1.176.000,00	294.000,00	882.000,00
	377014	by.elisabet c,377014	20/04/2021	20/05/2021	16.895.000,00	4.223.750,00	12.671.250,00
	380259	ekan,380259	29/08/2021	28/09/2021	1.702.962,00	425.740,50	1.277.221,50
	379918	by ny mia audia,379918	25/08/2021	24/09/2021	8.304.954,00	2.076.238,50	6.228.715,50
	378511	melisa lepia,378511	12/07/2021	11/08/2021	4.647.900,00	1.161.975,00	3.485.925,00
	380017	lindri melinda,380037	20/08/2021	19/09/2021	2.509.700,00	627.425,00	1.882.275,00
	381939	lia wati,381939	31/10/2021	30/11/2021	5.290.888,00	1.322.722,00	3.968.166,00
	199940	riyanto,199940	10/12/2021	09/01/2022	7.111.200,00	-	7.111.200,00
	134084	yecika putri,134084	19/12/2021	18/01/2022	-	-	-
		<b>PIUTANG TAHUN 2022</b>					
	387024	Boli	25/03/2022	25/04/2022	2.151.000,00	-	2.151.000,00
	289078	Anisa	30/05/2022	30/06/2022	50.500,00	-	50.500,00
	385548	Fazario	06/06/2022	06/07/2022	2.506.600,00	-	2.506.600,00
	390279	Helmi	02/07/2022	02/08/2022	3.137.000,00	-	3.137.000,00
	344052	Vina	03/07/2022	03/08/2022	3.242.500,00	-	3.242.500,00
	392862	Seliapiyanti	08/09/2022	08/10/2022	442.500,00	-	442.500,00
	392545	Bayu	27/09/2022	27/10/2022	10.364.160,00	-	10.364.160,00
	361506	Liliana	06/10/2022	06/11/2022	2.373.850,00	-	2.373.850,00
	387726	Pandi alias Toi	13/04/2022	13/05/2022	679.945,00	-	679.945,00
	392637	Askara	13/09/2022	13/10/2022	2.145.500,00	-	2.145.500,00
					-	-	-
		<b>BPJS Ketenagakerjaan 2022</b>					
		Agustus 2022	31/08/2022	30/09/2022	6.578.893,00	-	6.578.893,00
		November 2022	31/08/2022	30/09/2022	238.500,00	-	238.500,00
		Desember 2022	31/12/2022	30/01/2023	8.828.869,00	-	8.828.869,00
					-	-	-

No	NOMOR PENETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
		<b>Inheat 2022</b>			-	-	-
		Desember 2022	31/12/2022	30/01/2023	1.235.500,00	-	1.235.500,00
					-	-	-
		<b>BPJS Kesehatan 2022</b>			-	-	-
		November 2022	30/11/2022	30/12/2022	2.632.535.300,00	-	2.632.535.300,00
		Desember 2022	31/12/2022	30/01/2023	3.065.784.600,00	-	3.065.784.600,00
		<b>JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN BLUD</b>			<b>6.406.796.539,00</b>	<b>565.875.755,50</b>	<b>5.840.920.783,50</b>

**PIUTANG DINAS KESEHATAN BLUD PUSKESMAS**

1		SERAWAI	31/12/2022	31/03/2023	21.399.600,00	-	21.399.600,00
2		KEMANGAI	31/12/2022	31/03/2023	27.745.000,00	-	27.745.000,00
3		TEBIDAH	31/12/2022	31/03/2023	-	-	-
4		SEPAUK	31/12/2022	31/03/2023	-	-	-
5		TEMPUNAK	31/12/2022	31/03/2023	225.000,00	-	225.000,00
6		JELIMPAU	31/12/2022	31/03/2023	5.668.000,00	-	5.668.000,00
7		PANDAN	31/12/2022	31/03/2023	645.000,00	-	645.000,00
8		SUNGAI DURIAN	31/12/2022	31/03/2023	10.735.150,00	-	10.735.150,00
9		TANJUNG PURI	31/12/2022	31/03/2023	5.259.000,00	-	5.259.000,00
10		DARA JUANTI	31/12/2022	31/03/2023	6.510.000,00	-	6.510.000,00
11		DEDAI	31/12/2022	31/03/2023	-	-	-
12		EMPARU	31/12/2022	31/03/2023	4.529.800,00	-	4.529.800,00
13		NANGA MAU	31/12/2022	31/03/2023	13.237.400,00	-	13.237.400,00
14		KEBONG	31/12/2022	31/03/2023	8.092.000,00	-	8.092.000,00
15		LEBANG	31/12/2022	31/03/2023	2.100.000,00	-	2.100.000,00
16		MENSIKU	31/12/2022	31/03/2023	17.122.000,00	-	17.122.000,00
17		KETUNGAU	31/12/2022	31/03/2023	5.659.000,00	-	5.659.000,00
18		SERANGAS	31/12/2022	31/03/2023	-	-	-
19		MERAKAI	31/12/2022	31/03/2023	-	-	-
20		SENANING	31/12/2022	31/03/2023	-	-	-
		<b>JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS 2022</b>			<b>128.926.950,00</b>	<b>-</b>	<b>128.926.950,00</b>
		<b>TOTAL PIUTANG BLUD</b>			<b>6.535.723.489,00</b>	<b>565.875.755,50</b>	<b>5.969.847.733,50</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PIUTANG LAINNYA  
Periode 31 Desember 2022

BAGIAN LANCAR TAGIHAN ANGSURAN RUMAH DINAS BAPPENDA

No.	NO PERJANJIAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TGL.JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
1	012/291/V-A.DPPKA/2011	Ali Usman	09/05/2011	01/05/2021	-	-	-
2	012/289/V-A.DPPKA/2011	Agustinus, S. Sos	09/05/2011	01/04/2021	-	-	-
3	012/276/V-A.DPPKA/2011	Akoran, S. Pd	05/07/2012	30/06/2022	-	-	-
4		Paulus Adie			-	-	-
5		Yelmanus			-	-	-
6	032/402.A/IV-A.BPKAD	Ny. Widada	10/08/2015	01/03/2020	-	-	-
7	012/184/V-A.DPPKA/2011	Ba'a	16/03/2011	01/03/2021	-	-	-
8	032/363.A/IV-A.BPKAD	Margareta	10/07/2015	01/03/2020	-	-	-
9		Paskalis			-	-	-
10		Adolpus			-	-	-
11		Dapot Siahaan			-	-	-
12	032/409.A/IV-A.BPKAD	Yunus B, S.Sos	10/07/2015	01/03/2020	-	-	-
13		Nyanggungau			-	-	-
14		Jaya Martin Luther			-	-	-
15		Drs. Yacob Basyari			-	-	-
16		Yosafat A. Asam Djarak			-	-	-
17	032/417.A/IV-A.BPKAD	Ny. Hendryk Pius	10/09/2015	01/03/2020	-	-	-
18		Agustinus Wagini			-	-	-
19	012/299/V-A.DPPKA/2011	Bennie Enos	10/05/2011	01/05/2021	-	-	-
20		Hamdani Rizal, BA			-	-	-
21		Agus Jam, S.Sos, M.Si			-	-	-
22	032/134/IV.A-BPKAD/2016	MAIMUNAH, HA	01/06/2016	01/06/2036	-	-	-
23	032/135.A/IV.A-BPKAD/2016	NETTY VIKTORIA, SE, MM	01/03/2016	01/03/2036	-	-	-
24	032/52.A/IV.A-BPKAD/2016	FATMAWATI, S. Sos, M. Si	01/03/2016	01/03/2036	21.030.937,50	-	21.030.937,50
25	032/135/IV.A-BPKAD/2016	EFENDI, S. Sos	01/05/2016	01/05/2036	2.923.750,00	-	2.923.750,00
26	032/140/IV.A-BPKAD/2016	GERUNTANG	01/05/2016	01/04/2036	689.301,61	-	689.301,61
27	032/51.A/IV.A-BPKAD/2016	MARIETTA, SE	01/05/2016	01/05/2036	54.300.000,00	-	54.300.000,00
28	032/106.A/IV.A-BPKAD/2016	SUMIATI	01/04/2016	01/05/2036	15.341.611,52	-	15.341.611,52
29	032/136.A/IV.A-BPKAD/2016	H. HAERUDIN,S. Sos, M. Si	01/05/2016	01/05/2036	-	-	-
30	032/107.A/IV.A-BPKAD/2016	M. DJAFAR	01/04/2016	01/01/2036	6.900.000,00	-	6.900.000,00
31	032/51.B/IV.A-BPKAD/2016	MAHRUS EFENDI	01/03/2016	01/03/2036	-	-	-
32	032/85.A/IV.A-BPKAD/2016	HERKOLANUS RONI, SH, MH	01/04/2016	01/04/2036	0,00	-	0,00
33	032/106.A/IV.A-BPKAD/2016	BUDHI AMIR	01/05/2016	01/05/2036	8.359.375,00	-	8.359.375,00
34	032/51.C/IV.A-BPKAD/2016	NGAINUR ROCHMA, S. Pd.I	01/03/2016	01/03/2036	27.545.312,50	-	27.545.312,50
35	032/134/IV.A-BPKAD/2016	SALAMAH	01/06/2016	01/07/2036	4.182.031,25	-	4.182.031,25
36	032/109.A/IV.A-BPKAD/2016	ANIAH	01/04/2016	01/11/2030	18.857,16	-	18.857,16
37	032/86.A/IV.A-BPKAD/2016	Drs. HATTA, M. Si	01/04/2016	01/04/2036	-	-	-
38	032/87.A/IV.A-BPKAD/2016	HIKMAWAN BAKTI, S. Sos	01/04/2016	01/04/2036	79.149,96	-	79.149,96
39	032/26.A/IV.A-BPKAD/2016	Drs. LINDRA AZMAR, M. Si	01/03/2016	01/03/2036	7.417.500,08	-	7.417.500,08
40	032/241.A/IV.A-BPKAD/2016	DM. KUSUMAYUDA	01/08/2016	01/10/2034	5.771.312,38	-	5.771.312,38
41	032/9.A/IV.A-BPKAD/2017	SYAHBUDIN	01/02/2017	01/03/2036	18.057.656,25	-	18.057.656,25
42	032/51.D/IV.A-BPKAD/2016	SYOPIYAH	01/03/2016	01/03/2036	525.000,00	-	525.000,00
43	032/135 C/IV.A-BPKAD/2016	ADE MURNI	01/03/2016	01/03/2036	44.706.546,46	-	44.706.546,46

44	032/45.A/IV.A-BPKAD/2017	GA. ANDERSON, SH., MM	01/03/2016	01/03/2036	18.793.333,41	-	18.793.333,41
45	032/52.C/IV.A-BPKAD/2016	RAMADHANSAH, ST	01/03/2016	01/03/2036	101.537.187,50	-	101.537.187,50
46	032/4698/IV.B-BPKAD	SUSI LESTARI (ISTRI ALM HERMAWAN SETION	01/11/2021	01/11/2031	1.487.815,00	-	1.487.815,00
<b>JUMLAH</b>					<b>339.666.677,57</b>	<b>144.641.093,53</b>	<b>339.666.677,57</b>

**BAGIAN LANCAR ANGSURAN KENDARAAN BAPPENDA**

No.	NO PERJANJIAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	TGL.JATUH TEMPO	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
1	SK Bupati No. 57 Tahun 2004 Tanggal 9 Maret 2004	H. GUSTI EFFENDI, SH.MM	09/03/2004	09/03/2006	20.400.000,00	20.400.000,00	-
2	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	SUKARDI	24/07/2007	23/07/2009	700.000,00	700.000,00	-
3	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	SAMAD	24/07/2007	23/07/2009	720.000,00	720.000,00	-
4	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	M. MANSUR, BA	24/07/2007	23/07/2009	720.000,00	720.000,00	-
5	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	MARKUS PAIMIN	24/07/2007	23/07/2009	-	-	-
6	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	HASAN	24/07/2007	23/07/2009	760.000,00	760.000,00	-
7	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	DARMANTO	24/07/2007	23/07/2009	780.000,00	780.000,00	-
8	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	Drs. BASIR HASIBUAN	24/07/2007	23/07/2009	860.000,00	860.000,00	-
9	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	Drs. DARWIS	24/07/2007	23/07/2009	920.000,00	920.000,00	-
10	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	L. GIYA	24/07/2007	23/07/2009	920.000,00	920.000,00	-
11	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	G. SALADIN RUSDI	24/07/2007	23/07/2009	920.000,00	920.000,00	-
12	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	H. GIYANTO	24/07/2007	23/07/2009	920.000,00	920.000,00	-
13	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	RIDWAN	24/07/2007	23/07/2009	940.000,00	940.000,00	-
14	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	PETRUS RAJALI	24/07/2007	23/07/2009	1.020.000,00	1.020.000,00	-
15	SK Bupati No. 371 Tahun 2007 Tanggal 24 Juli 2007	S. SUHARTONO	24/07/2007	23/07/2009	1.020.000,00	1.020.000,00	-
16	SK Bupati No. 1447 Tahun 2009 Tanggal 29 Desember 2009	DULHADI	29/12/2009	30/06/2010	-	-	-
17	SK Bupati No. 032/1315/ KEP-BPKAD/2015 Tanggal 11 Mei 2015	Drs. IGNATIUS JUAN, MM	11/05/2015	31/12/2015	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN ANGSURAN</b>					<b>371.266.677,57</b>	<b>176.241.093,53</b>	<b>339.666.677,57</b>





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PIUTANG TRANSFER DANA BAGI HASIL  
Periode 31 Desember 2022

No.	NO SURAT KETETAPAN	NAMA	TANGGAL PENETAPAN	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
<b>Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi</b>						
1	SK Nomor:225/BAPENDA/2022	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - PKB - LO	31/01/2022	1.000.512.536,75	0,00	1.000.512.536,75
2		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - BBNKB - LO	31/01/2022	2.242.551.446,27	0,00	2.242.551.446,27
3		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - PAP - LO	31/01/2022	9.424.675.530,78	0,00	9.424.675.530,78
4		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - PBBKB - LO	31/01/2022	139.313.863,40	0,00	139.313.863,40
<b>Jumlah Piutang Lainnya Kurang Salur Dana Bagi Hasil</b>				<b>12.807.053.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807.053.377,20</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN MUTASI PIUTANG DAERAH KABUPATEN SINTANG  
PER 31 DESEMBER 2022

No.	URAIAN PIUTANG	SALDO AWAL		PENYESUAIAN PENYISIHAN	PENYESUAIAN PIUTANG		PENAMBAHAN TAHUN BERJALAN	PELUNASAN	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	(BEBAN PENYISIHAN) /SURPLUS NON OPERASIONAL	PIUTANG BERSIH
		PIUTANG	PENYISIHAN		D	K						
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12.00	13
<b>PIUTANG PAJAK</b>												
<b>I</b>	<b>PAJAK HOTEL</b>	<b>232.994.783,60</b>	<b>232.994.783,60</b>	-	-	-	<b>1.166.577.472,00</b>	<b>1.185.077.472,00</b>	<b>214.494.783,60</b>	<b>214.494.783,60</b>	<b>18.500.000,00</b>	-
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	232.994.783,60	232.994.783,60	-	-	-	1.166.577.472,00	1.185.077.472,00	214.494.783,60	214.494.783,60	18.500.000,00	-
<b>II</b>	<b>PAJAK RESTORAN</b>	<b>91.810.300,00</b>	<b>27.161.000,00</b>	-	-	-	<b>4.426.621.770,00</b>	<b>4.313.691.010,00</b>	<b>204.741.060,00</b>	<b>47.639.215,00</b>	<b>20.478.215,00</b>	<b>157.101.845,00</b>
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	91.810.300,00	27.161.000,00	-	-	-	4.426.621.770,00	4.313.691.010,00	204.741.060,00	47.639.215,00	20.478.215,00	157.101.845,00
<b>III</b>	<b>PAJAK HIBURAN</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>2.695.000,00</b>	-	-	-	<b>874.671.695,00</b>	<b>872.059.695,00</b>	<b>5.307.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.962.000,00</b>
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2.695.000,00	2.695.000,00	-	-	-	874.671.695,00	872.059.695,00	5.307.000,00	2.345.000,00	350.000,00	2.962.000,00
<b>IV</b>	<b>PAJAK REKLAME</b>	<b>27.365.630,00</b>	<b>23.252.090,00</b>	-	-	-	<b>648.280.475,00</b>	<b>630.911.450,00</b>	<b>44.734.655,00</b>	<b>22.988.790,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>21.745.865,00</b>
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	27.365.630,00	23.252.090,00	-	-	-	648.280.475,00	630.911.450,00	44.734.655,00	22.988.790,00	263.300,00	21.745.865,00
<b>V</b>	<b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>PAJAK AIR TANAH</b>	<b>475.200,00</b>	<b>237.600,00</b>	-	-	-	<b>32.130.768,00</b>	<b>32.605.968,00</b>	-	-	<b>237.600,00</b>	-
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	475.200,00	237.600,00	-	-	-	32.130.768,00	32.605.968,00	-	-	237.600,00	-
<b>VII</b>	<b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>	<b>294.629.812,50</b>	<b>293.783.484,38</b>	-	-	-	<b>1.776.352.858,00</b>	<b>1.891.957.721,00</b>	<b>179.024.949,50</b>	<b>179.024.949,50</b>	<b>114.758.534,88</b>	-
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	294.629.812,50	293.783.484,38	-	-	-	1.776.352.858,00	1.891.957.721,00	179.024.949,50	179.024.949,50	114.758.534,88	-
<b>VIII</b>	<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2</b>	<b>10.825.862.495,00</b>	<b>6.813.519.682,50</b>	-	-	-	<b>5.667.020.576,00</b>	<b>4.362.082.556,00</b>	<b>12.112.630.050,00</b>	<b>7.638.810.075,50</b>	<b>825.290.393,00</b>	<b>4.473.819.974,50</b>
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	10.825.862.495,00	6.813.519.682,50	-	-	-	5.667.020.576,00	4.362.082.556,00	12.112.630.050,00	7.638.810.075,50	825.290.393,00	4.473.819.974,50
<b>IX</b>	<b>PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	-	-	-	<b>13.569.786.870,00</b>	<b>13.569.786.870,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	-
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	25.000,00	18.750,00	-	-	-	13.569.786.870,00	13.569.786.870,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	-
	<b>JUMLAH PIUTANG PAJAK</b>	<b>11.475.858.221,10</b>	<b>7.393.662.390,48</b>	-	-	-	<b>18.170.465,00</b>	<b>28.161.442.484,00</b>	<b>12.760.957.498,10</b>	<b>8.105.327.813,60</b>	<b>(711.665.423,12)</b>	<b>4.655.629.684,50</b>
<b>PIUTANG RETRIBUSI</b>												
<b>I</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD</b>	-	-	-	-	-	<b>850.000,00</b>	-	<b>850.000,00</b>	-	-	<b>850.000,00</b>
1	RUMAH SAKIT PRATAMA SERAWAI	-	-	-	-	-	850.000,00	-	850.000,00	-	-	850.000,00
<b>II</b>	<b>RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGEMDIALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</b>	<b>76.363.200,00</b>	-	-	-	-	-	<b>76.363.200,00</b>	-	-	-	-
1	DISKOMINFO	76.363.200,00	-	-	-	-	-	76.363.200,00	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b>	<b>71.895.000,00</b>	-	-	-	-	<b>24.410.000,00</b>	-	<b>96.305.000,00</b>	<b>17.973.750,00</b>	<b>17.973.750,00</b>	<b>78.331.250,00</b>
1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	71.895.000,00	-	-	-	-	24.410.000,00	-	96.305.000,00	17.973.750,00	17.973.750,00	78.331.250,00
<b>III</b>	<b>RETRIBUSI LAIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)</b>	<b>11.294.725,00</b>	<b>10.600.480,00</b>	<b>217.280,00</b>	-	-	-	-	<b>11.294.725,00</b>	<b>11.056.242,50</b>	<b>238.482,50</b>	<b>238.482,50</b>
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.294.725,00	10.600.480,00	217.280,00	-	-	-	-	11.294.725,00	11.056.242,50	238.482,50	238.482,50
<b>III</b>	<b>RETRIBUSI GANGGUAN HO</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.284.500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.284.500,00</b>	-	-
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.284.500,00	1.284.500,00	-	-	-	-	-	1.284.500,00	1.284.500,00	-	-
	<b>JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI</b>	<b>160.837.425,00</b>	<b>11.884.980,00</b>	<b>217.280,00</b>	-	-	<b>25.260.000,00</b>	<b>76.363.200,00</b>	<b>109.734.225,00</b>	<b>30.314.492,50</b>	<b>(18.212.232,50)</b>	<b>79.419.732,50</b>
<b>PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>												
<b>I</b>	<b>Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>1.226.509.680,00</b>	<b>1.226.509.680,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1.226.509.680,00</b>	<b>1.226.509.680,00</b>	-	-
1	Piutang Pokok Pinjaman ke Masyarakat (DISPERINDAGKOP DAN UKM)	1.022.805.000,00	1.022.805.000,00	-	-	-	-	-	1.022.805.000,00	1.022.805.000,00	-	-
2	Piutang Bunga Pinjaman ke Masyarakat (DISPERINDAGKOP DAN UKM)	203.704.680,00	203.704.680,00	-	-	-	-	-	203.704.680,00	203.704.680,00	-	-
<b>II</b>	<b>Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>34.485.971,54</b>	-	-	-	-	-	<b>34.485.971,54</b>	-	-	-	<b>30.379.319,69</b>
1	Collection Fee Investasi Permanen (SKPKD)	34.485.971,54	-	-	-	-	-	34.485.971,54	-	-	-	30.379.319,69
<b>III</b>	<b>Piutang Jasa Giro</b>	-	-	-	-	-	<b>7.387.157,00</b>	-	<b>7.387.157,00</b>	-	-	<b>30.379.319,69</b>
1	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	7.387.157,00	-	7.387.157,00	-	-	30.379.319,69
<b>IV</b>	<b>Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>900.637.388,89</b>	<b>383.688.951,10</b>	-	-	-	-	<b>96.555.420,00</b>	<b>804.081.968,89</b>	<b>584.709.443,32</b>	<b>201.020.492,22</b>	<b>219.372.525,57</b>
1	Denda Pajak BPHTB (BAPPENDA)	875.962.064,48	383.688.951,10	-	-	-	-	96.555.420,00	779.406.644,48	578.540.612,22	194.851.661,12	200.866.032,26
2	Denda Pajak Restoran (BAPPENDA)	15.900.298,41	-	-	-	-	-	-	15.900.298,41	3.975.074,60	3.975.074,60	11.925.223,81
3	Denda Pajak Hiburan (BAPPENDA)	8.775.026,00	-	-	-	-	-	-	8.775.026,00	2.193.756,50	2.193.756,50	6.581.269,50
<b>V</b>	<b>Piutang Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>2.034.954.398,00</b>	<b>2.034.951.848,00</b>	-	-	-	-	-	<b>2.034.954.398,00</b>	<b>2.034.951.848,00</b>	-	<b>2.550,00</b>
1	Pengembalian Kas 2001-2005 (SKPKD)	342.109.651,00	342.109.651,00	-	-	-	-	-	342.109.651,00	342.109.651,00	-	-
2	Pengembalian Kelebihan Pencairan SIPD (SKPKD)	245.878.673,00	245.878.673,00	-	-	-	-	-	245.878.673,00	245.878.673,00	-	-
3	Pengembalian Kelebihan Belanja Gaji, Barang dan Jasa (KEL. LADANG KEC. SINTANG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengembalian Belanja TKI (SEKRETARIAT DPRD)	1.441.856.474,00	1.441.856.474,00	-	-	-	-	-	1.441.856.474,00	1.441.856.474,00	-	-
5	BPKAD (SKPKD) Gaji Lebih besar	5.106.200,00	5.106.200,00	-	-	-	-	-	5.106.200,00	5.106.200,00	-	-
6	Pengembalian Kelebihan Belanja Modal (BOS AFIRMASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)	3.400,00	850,00	-	-	-	-	-	3.400,00	850,00	-	2.550,00
<b>VI</b>	<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>	<b>28.480.324.885,00</b>	<b>480.743.336,75</b>	-	-	-	<b>5.871.222.167,00</b>	<b>27.815.823.563,00</b>	<b>6.535.723.489,00</b>	<b>565.875.755,50</b>	<b>85.132.418,75</b>	<b>5.969.847.733,50</b>
1	RSUD ADE M. LJOEN (DINAS KESEHATAN)	28.398.555.085,00	480.743.336,75	-	-	-	5.742.295.217,00	27.734.053.763,00	6.406.796.539,00	565.875.755,50	85.132.418,75	5.840.920.783,50
2	PUSKESMAS (DINAS KESEHATAN)	81.769.800,00	-	-	-	-	128.926.950,00	81.769.800,00	128.926.950,00	-	-	128.926.950,00
<b>VII</b>	<b>Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rumah Sakit Pratama Serawai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Rumah Sakit Pratama Serawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PIUTANG LAIN - LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>32.676.912.323,43</b>	<b>4.125.893.815,85</b>	-	-	-	<b>5.878.609.324,00</b>	<b>27.946.864.954,54</b>	<b>10.608.656.692,89</b>	<b>4.412.046.726,82</b>	<b>(286.152.910,97)</b>	<b>6.249.981.448,45</b>
<b>BAGIAN LANCAR TAGIHAN ANGSURAN</b>												
<b>I</b>	<b>BAGIAN LANCAR ANGSURAN RUMAH DINAS</b>	<b>347.278.593,19</b>	<b>119.453.492,17</b>	-	-	-	<b>282.095.484,38</b>	<b>289.707.400,00</b>	<b>339.666.677,57</b>	<b>144.641.093,53</b>	<b>25.187.601,36</b>	<b>195.025.584,04</b>
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	347.278.593,19	119.453.492,17	-	-	-	282.095.484,38	289.707.400,00	339.666.677,57	144.641.093,53	25.187.601,36	195.025.584,04
<b>II</b>	<b>BAGIAN LANCAR ANGSURAN KENDARAAN</b>	<b>286.575.000,00</b>	<b>286.575.000,00</b>	-	-	-	-	<b>50.200.000,00</b>	<b>236.375.000,00</b>	<b>236.375.000,00</b>	<b>50.200.000,00</b>	-
1	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	286.575.000,00	286.575.000,00	-	-	-	-	50.200.000,00	236.375.000,00	236.375.000,00	50.200.000,00	-
2	SEKRETARIS DAERAH	204.775.000,00	204.775.000,00	-	-	-	-	-	204.775.000,00	204.775.000,00	-	-

No.	URAIAN PIUTANG	SALDO AWAL		PENYESUAIAN PENYISIHAN	PENYESUAIAN PIUTANG		PENAMBAHAN TAHUN BERJALAN	PELUNASAN	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG	(BEBAN PENYISIHAN) /SURPLUS NON OPERASIONAL	PIUTANG BERSIH
		PIUTANG	PENYISIHAN		D	K						
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12,00	13
<b>III</b>	<b>BAGIAN LANCAR GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH</b>	<b>421.383.021,00</b>	<b>421.383.021,00</b>	-	-	-	-	-	<b>421.383.021,00</b>	<b>421.383.021,00</b>	-	-
1	BPKAD (SKPKD)	421.383.021,00	421.383.021,00	-	-	-	-	-	421.383.021,00	421.383.021,00	-	-
<b>IV</b>	<b>BAGIAN LANCAR ANGSURAN PENGEMBALIAN GAJI TASPEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BPKAD (SKPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN ANGSURAN</b>	<b>1.055.236.614,19</b>	<b>827.411.513,17</b>	-	-	-	<b>282.095.484,38</b>	<b>339.907.400,00</b>	<b>997.424.698,57</b>	<b>802.399.114,53</b>	<b>25.012.398,64</b>	<b>195.025.584,04</b>
	<b>PIUTANG TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KALBAR</b>	<b>4.025.799.217,12</b>	-	-	-	-	<b>12.807.053.377,20</b>	<b>4.025.799.217,12</b>	<b>12.807.053.377,20</b>	-	-	<b>12.807.053.377,20</b>
1	BPKAD (SKPKD)	4.025.799.217,12	-	-	-	-	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12	12.807.053.377,20	-	-	12.807.053.377,20
	<b>JUMLAH PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>4.025.799.217,12</b>	-	-	-	-	<b>12.807.053.377,20</b>	<b>4.025.799.217,12</b>	<b>12.807.053.377,20</b>	-	-	<b>12.807.053.377,20</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
REKAP RETENSI  
PER 31 DESEMBER 2022

NO.	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	PELAKSANA	Tahun Kegiatan	NO. SP2D 5%	RETENSI
1	2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	1.03.1.04.01.00.16.003..5.2.3..23.38	Pembangunan Drainase BTN Barjo Kec. Sintang	CV.Bugau Uma	2020	02.19/04.0/03930/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.03/VIII/2022	4.902.500
2	1.04.1.04.01.00.30.017.5.2.3..21.05	Pembangunan Barau Penahan Longsor SMP Negeri 7 Jerora 1 Kec. Sintang	CV.Tahta Chiara	2020	02.19/04.0/06479/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	2.502.500
3	1.04.1.04.01.00.16.09.5.2.3..21.05	Pembangunan Rabat Beton Gang Mulia RT/RW 34/06 Rawa Mambok	CV.Catur Jaya Makmur	2020	02.19/04.0/06555/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	5.895.200
4	1.04.1.04.01.00.16.09.5.2.3..21.03	Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Toga RT. 25 Rw. 04 Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec.	CV.Catur Jaya Makmur	2020	02.19/04.0/06556/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	7.156.350
JUMLAH .....						<b>20.456.550</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PER SP2D)**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH YANG DICAIRKAN	REKENING DESA	KETERANGAN	SP2D		PAJAK DAERAH DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
								TGL SP2D	NOMOR SP2D		
1	Serawai	Nanga Serawai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000001	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
2	Serawai	Sawang Ser Chiang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017298	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
3	Serawai	Tanjung Raya	28.747.184,00	1.803.904,00	30.551.088,00	4001017654	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
4	Serawai	Nanga Tekungai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018260	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
5	Serawai	Talian Sahabung	20.422.252,00	1.281.510,00	21.703.762,00	4701000019	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
6	Ambalau	Buntut Pimpin	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017352	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	270.307.368,00	16.961.960,00
7	Ambalau	Riam Sabon	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4101010061	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
8	Ambalau	Lunjan Tingang	23.337.897,00	1.464.468,00	24.802.365,00	4001016381	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
9	Tempunak	Pagal Baru	91.232.021,00	5.724.868,00	96.956.889,00	4001016631	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
10	Kayan Hilir	Batu Netak	16.962.082,00	1.064.382,00	18.026.464,00	4101010142	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
11	Ketungau Tengah	Engkitan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016321	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
12	Serawai	Tunas Harapan	27.810.994,00	1.745.160,00	29.556.154,00	4701000248	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
13	Serawai	Nanga Jelumdung	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016038	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
14	Serawai	Teluk Harapan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000043	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
15	Serawai	Mekar Sari	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000086	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
16	Kayan Hulu	Kebarau	26.527.732,00	1.664.635,00	28.192.367,00	4001016941	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
17	Kayan Hulu	Riam Panjang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018766	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	304.836.941,00	19.128.720,00
18	Kayan Hulu	Entong	29.852.087,00	1.873.238,00	31.725.325,00	4201000071	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
19	Binjai Hulu	DAK Jaya	98.226.142,00	6.163.754,00	104.389.896,00	4001017751	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
20	Ketungau Tengah	Argo Mulyo	27.841.040,00	1.747.043,00	29.588.083,00	4001016143	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
21	Ketungau Hulu	Sejauk	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018073	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
22	Dedai	Tauk	19.907.336,00	1.249.200,00	21.156.536,00	4001017964	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
23	Ambalau	Nanga Ambalau	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018952	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
24	Ambalau	Nanga Mentomoi	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016615	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
25	Ambalau	Sungai Tambun	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016887	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
26	Ambalau	Nanga Kesang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018197	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
27	Ambalau	Nanga Kemangai	28.983.322,00	1.762.275,00	30.745.597,00	4001018464	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	166.287.134,00	10.434.625,00
28	Serawai	Panekasaan	19.749.055,00	1.239.266,00	20.988.321,00	4701000175	Bank Kalbar Capem Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
29	Ketungau Hilir	Semuntai	32.446.972,00	2.036.070,00	34.483.042,00	4001016445	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
30	Kayan Hilir	Melingkat	26.270.037,00	1.648.462,00	27.918.499,00	4001016763	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
31	Serawai	Begori	28.008.686,00	1.757.565,00	29.766.251,00	4001016623	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
32	Serawai	Sabhang Landan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018782	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
33	Ketungau Tengah	Kubu Berangan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018081	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
34	Ketungau Tengah	Gut Jaya Bakti	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017263	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	151.835.527,00	9.527.781,00
35	Kayan Hulu	Tanjung Lalau	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4201000080	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
36	Sintang	Jerora Satu	27.707.853,00	1.738.686,00	29.446.539,00	4001016674	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
37	Ambalau	Nanga Ukai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019134	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
38	Kelam Permai	Kebong	21.447.378,00	1.345.840,00	22.793.218,00	4001018120	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
39	Ambalau	Nusa Poring	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019568	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
40	Ambalau	Korong Daso	20.001.108,00	1.255.082,00	21.256.190,00	4001019258	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
41	Kayan Hulu	Nanga Toran	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4201000403	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
42	Kayan Hulu	Empoyang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016135	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
43	Kayan Hilir	Sungai Ranap	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018871	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	140.837.187,00	8.837.622,00
44	Serawai	Mentaji	21.426.394,00	1.344.520,00	22.770.914,00	4701000167	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
45	Dedai	Manyam	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018618	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
46	Ketungau Hilir	Sungai Mali	24.738.075,00	1.552.330,00	26.290.405,00	4001016925	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
47	Ambalau	Kolangan Juoi	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018553	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
48	Ambalau	Bukit Tinggi	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019215	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
49	Ambalau	Nanga Pahangan	16.153.520,00	1.013.644,00	17.167.164,00	4001017689	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
50	Ketungau Tengah	Sungai Areh	28.535.964,00	1.790.650,00	30.326.614,00	4001017760	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
51	Ketungau Tengah	Wana Bhakti	35.971.578,00	2.257.240,00	38.228.818,00	4001018227	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	201.598.631,00	12.650.443,00
52	Ketungau Tengah	Kerta Sari	15.441.950,00	968.992,00	16.410.942,00	4001017204	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
53	Kayan Hilir	Sungai Garong	23.547.863,00	1.477.644,00	25.025.507,00	4001017310	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
54	Kayan Hulu	Nanga Abai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018910	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
55	Serawai	Nanga Bihe	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000159	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
56	Ketungau Hulu	Rasau	22.210.468,00	1.393.721,00	23.604.189,00	4001018529	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
57	Kayan Hulu	Buluh Merindu	14.945.100,00	937.815,00	15.882.915,00	4001019142	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
58	Kayan Hulu	Nanga Tampang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4201000608	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
59	Dedai	Sungai Tapang	27.901.316,00	1.750.826,00	29.652.142,00	4001017239	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
60	Dedai	Belayuk Sibau	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018651	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
61	Kelam Permai	Sepan Lebang	33.847.142,00	2.123.930,00	35.971.072,00	4001017905	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
62	Kelam Permai	Nanga Lebang	27.998.042,00	1.756.895,00	29.754.937,00	4001017077	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	207.734.168,00	13.035.452,00
63	Serawai	Buntut Ponte	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000116	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/04/2022	02.19/04.0/01114/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
64	Serawai	Nusa Tuiuh	14.934.								

NO.	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH			REKONING DESA	KETERANGAN	SP2D		PAJAK DAERAH DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
			DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH YANG DICAIRKAN			TGL SP2D	NOMOR SP2D		
79	Kayan Hilir	Nanga Lidau	24.713.995,00	1.550.819,00	26.264.814,00	4001018405	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022	292.374.463,00	18.346.686,00
80	Kayan Hilir	Natai Lesung	19.876.009,00	1.247.232,00	21.123.241,00	4101010169	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
81	Binjai Hulu	Telaga Dua	64.204.426,00	4.028.869,00	68.233.295,00	4001016453	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
82	Sepauk	Nanga Pari	40.454.206,00	2.538.528,00	42.992.734,00	4001017638	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
83	Ketunggau Hilir	Ratu Damai	24.831.445,00	1.558.189,00	26.389.634,00	4001016275	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
84	Sungai Tebelian	Kanan Raya	35.297.533,00	2.214.943,00	37.512.476,00	4001016607	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
85	Dedai	Nanga Jetak	34.818.855,00	2.184.906,00	37.003.761,00	4001018642	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
86	Ambalau	Nanga Menantak	18.309.350,00	1.148.924,00	19.458.274,00	4001019061	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/04/2022	02.19/04.0/01116/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
87	Sepauk	Sirang Sitambang	35.880.163,00	2.251.503,00	38.131.666,00	4001016305	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
88	Sepauk	Sekujam Timbai	15.501.815,00	972.749,00	16.474.564,00	4001018715	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
89	Binjai Hulu	Simba Raya	34.575.690,00	2.169.647,00	36.745.337,00	4001016534	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
90	Binjai Hulu	Sungai Risap Mensiku Bersatu	35.221.244,00	2.210.156,00	37.431.400,00	4001016429	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
91	Sungai Tebelian	Bava Mulya	40.372.742,00	2.533.416,00	42.906.158,00	4001016861	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
92	Tempunak	Nanga Tempunak	47.754.550,00	2.996.630,00	50.751.180,00	4001016682	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
93	Kayan Hilir	Tertung Mau	23.986.175,00	1.505.148,00	25.491.323,00	4201000021	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
94	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018596	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
95	Ketunggau Tengah	Sumber Sari	35.137.653,00	2.204.910,00	37.342.563,00	4001018839	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
96	Ketunggau Hulu	Sungai Pisau	24.117.826,00	1.513.409,00	25.631.235,00	4001018677	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01632/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2022		
97	Dedai	Mangat Baru	45.409.158,00	2.849.454,00	48.258.612,00	4001015830	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
98	Dedai	Nanga Libau	23.532.558,00	1.476.683,00	25.009.241,00	4001018090	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
99	Sepauk	Nanga Libau	15.408.558,00	966.897,00	16.375.455,00	4001018723	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
100	Sepauk	Kenvauk	29.390.678,00	1.844.284,00	31.234.962,00	4001016879	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
101	Sepauk	Bungkong Baru	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4301000036	Bank Kalbar Capem Sepauk	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
102	Sungai Tebelian	Balai Agung	71.301.468,00	4.474.214,00	75.775.682,00	4001016411	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
103	Kayan Hilir	Jaya Sakti	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018511	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
104	Kayan Hulu	Riam Muntik	23.124.998,00	1.451.109,00	24.576.107,00	4001017646	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
105	Ketunggau Tengah	Landau Buaya	47.941.922,00	3.008.387,00	50.950.309,00	4001018456	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
106	Ketunggau Hulu	Sebuluh	23.259.696,00	1.459.561,00	24.719.257,00	4001016551	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01633/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
107	Dedai	Menaong Baru	15.364.778,00	964.150,00	16.328.928,00	4001015821	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
108	Serawai	Muara Kota	15.082.813,00	946.456,00	16.029.269,00	4701000230	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
109	Tempunak	Suka Jawa	20.069.272,00	1.259.360,00	21.328.632,00	4001015261	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
110	Sepauk	Tanjung Mawang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017115	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
111	Kayan Hilir	Tanjung Keliling	21.657.895,00	1.359.047,00	23.016.942,00	4001017395	Bank Kalbar Capem Sepauk	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
112	Kayan Hulu	Narahu Permai	15.934.322,00	937.138,00	16.871.460,00	4201000055	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
113	Sungai Tebelian	Sabang Surai	16.746.292,00	1.050.842,00	17.797.134,00	4001016097	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
114	Sungai Tebelian	Lebak Ubah	15.809.818,00	992.076,00	16.801.894,00	4101010045	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
115	Ketunggau Tengah	Tanjung Sari	26.806.338,00	1.682.115,00	28.488.453,00	4001017212	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
116	Ketunggau Hulu	Sebetung Paluk	25.177.443,00	1.579.901,00	26.757.344,00	4001018219	Bank Kalbar Cabang Sintang	25/05/2022	02.19/04.0/01634/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
117	Sungai Tebelian	Perembang	91.999.220,00	5.773.010,00	97.772.230,00	4001015147	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
118	Sungai Tebelian	Sungai Uko	74.039.512,00	4.646.027,00	78.685.539,00	4001015465	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
119	Kayan Hulu	Tanjung Miru	18.692.529,00	1.172.968,00	19.865.497,00	4001018251	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
120	Kayan Hulu	Nanga Payak	14.945.100,00	937.815,00	15.882.915,00	4201000004	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
121	Ketunggau Tengah	Bakti Senabang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017140	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
122	Ketunggau Tengah	Mungku Gelombang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001015848	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
123	Dedai	Terusan	26.983.701,00	1.693.245,00	28.676.946,00	4001017794	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
124	Sepauk	Sinar Pekavau	14.964.770,00	939.049,00	15.903.819,00	4001018324	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
125	Ambalau	Buntut Purun	16.899.771,00	1.060.472,00	17.960.243,00	4101010126	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
126	Kayan Hilir	Karya Baru	23.413.130,00	1.469.189,00	24.882.319,00	4201000101	Bank Kalbar Cabang Sintang	24/05/2022	02.19/04.0/01626/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IV/2022		
127	Kelam Permai	Merpak	16.410.416,00	1.029.764,00	17.440.180,00	4001015872	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
128	Sungai Tebelian	Kaiang Baru	15.382.350,00	965.252,00	16.347.602,00	4001015902	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
129	Ketunggau Hilir	Tanjung Baung	24.699.961,00	1.549.939,00	26.249.900,00	4001016780	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
130	Ketunggau Hilir	Matung	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016437	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
131	Ketunggau Tengah	Senangan Jawa	18.893.295,00	1.185.566,00	20.078.861,00	4001016933	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
132	Ketunggau Hulu	Mungku Entawak	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017786	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
133	Kayan Hilir	Mengkirai	26.115.853,00	1.638.787,00	27.754.640,00	4001018243	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
134	Kayan Hilir	Engkerawang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4201000039	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
135	Kayan Hulu	Tonak Goneh	21.231.038,00	1.332.262,00	22.563.300,00	4201000209	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
136	Kayan Hulu	Nanga Masau	28.630.877,00	1.796.606,00	30.427.483,00	4001017930	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01802/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
137	Kelam Permai	Ensaid Paniang	33.980.314,00	2.132.287,00	36.112.601,00	4001017913	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01801/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
138	Dedai	Baras	15.027.194,00	942.966,00	15.970.160,00	4001017841	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01801/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
139	Serawai	Nanga Ruhun	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018065	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01801/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
140	Serawai	Meroboi	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000094	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	31/05/2022	02.19/04.0/01801/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
141	Ketunggau Tengah	Wiravada	15.040.189,00	943.782,00	15.983.971,00	4001017301	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01801/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/V/2022		
142	Ketunggau Hilir	Mungku Kelapa									

NO.	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI	JUMLAH YANG	REKONING DESA	KETERANGAN	SP2D		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI
			DAERAH	DAERAH	DICAIRKAN			TGL SP2D	NOMOR SP2D		DAERAH
164	Ketungau Hilir	Air Nyuruk	34.240.240,00	2.148.597,00	36.388.837,00	4001018341	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01799/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IV/2022		
165	Ketungau Tengah	Kayu Dujung	32.403.620,00	2.033.348,00	34.436.968,00	4001017221	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01799/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IV/2022		
166	Ketungau Hulu	Sungai Kelik	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018111	Bank Kalbar Cabang Sintang	31/05/2022	02.19/04.0/01799/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IV/2022		
167	Binjai Hulu	Binjai Hilir	15.204.554,00	954.096,00	16.158.650,00	4001017387	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
168	Sepauk	Sepulut	17.113.496,00	1.073.883,00	18.187.379,00	4001017671	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
169	Ambalau	Dakniah Bungai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016577	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
170	Serawai	Nanga Rivoi	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000217	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
171	Ketungau Hilir	Nanga Merkak	14.980.021,00	940.006,00	15.920.027,00	4001017956	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
172	Kayan Hulu	Kerapuk Jaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018855	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022	220.809.314,00	13.855.928,00
173	Dedai	Pengkadang Sungai Rupa	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019070	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
174	Dedai	Kumpang	24.945.770,00	1.565.363,00	26.511.133,00	4001019029	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
175	Dedai	Lundang Baru	15.101.404,00	947.623,00	16.049.027,00	4001016127	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
176	Dedai	Pengkadang Baru	73.726.781,00	4.626.405,00	78.353.186,00	4001017867	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02690/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
177	Kayan Hilir	Ipoh Emang	20.212.804,00	1.268.366,00	21.481.170,00	4001017883	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
178	Kayan Hilir	Pelaiak	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018421	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
179	Kayan Hilir	Paoh Desa	37.694.966,00	2.365.383,00	40.060.349,00	4001017042	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
180	Kayan Hilir	Lalang Inggar	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017999	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
181	Kayan Hilir	Nanga Tikau	33.223.157,00	2.084.775,00	35.307.932,00	4001016542	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
182	Dedai	Sungai Mali	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018693	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022	214.693.603,00	13.472.161,00
183	Dedai	Empaji	29.962.259,00	1.880.152,00	31.842.431,00	4001017816	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
184	Ambalau	Pelau Sabhang	18.928.787,00	1.187.795,00	20.116.582,00	4001019118	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
185	Ketungau Tengah	Nanga Kelapan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016968	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
186	Ketungau Tengah	Swadaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016348	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02689/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
187	Sungai Tebelian	Banchoh	77.912.538,00	4.889.062,00	82.801.600,00	4001015783	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
188	Sungai Tebelian	Solam Raya	15.501.968,00	972.760,00	16.474.728,00	4001015619	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
189	Tempunak	Pulau Jaya	45.990.460,00	2.885.932,00	48.876.392,00	4001017247	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
190	Tempunak	Mensiap Baru	81.204.002,00	5.095.604,00	86.299.606,00	4101010151	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
191	Tempunak	Pudau Bersatu	42.927.749,00	2.693.744,00	45.621.493,00	4001016984	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022	345.093.486,00	21.654.842,00
192	Kelam Permai	Gemba Raya	34.369.594,00	2.156.714,00	36.526.308,00	4001015953	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
193	Sintang	Kebiau Baru	17.318.531,00	1.086.750,00	18.405.281,00	4001017972	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
194	Kayan Hulu	Tapang Menua	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017948	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
195	Ketungau Hulu	Nanga Bayan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017000	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
196	Kayan Hilir	Sungai Menuang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017051	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02031/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
197	Kayan Hilir	Benandang Mal	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018898	Bank Kalbar Cabang Sintang	07/07/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII/2022		
198	Tempunak	Mangkurat Baru	50.515.680,00	3.169.892,00	53.685.572,00	4001017026	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
199	Tempunak	Merti Jaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4101010207	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
200	Sintang	Mali Jampung	54.704.500,00	3.432.745,00	58.137.245,00	4001016801	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
201	Kelam Permai	Bengkuan	24.332.268,00	1.526.866,00	25.859.134,00	4001017336	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
202	Sepauk	Tanjung Hulu	15.423.442,00	967.831,00	16.391.273,00	4001016313	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
203	Kayan Hulu	Nanga Oran	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017271	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
204	Ketungau Hilir	Bauang Sengapat	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016798	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
205	Ketungau Tengah	Marga havu	27.997.882,00	1.756.885,00	29.754.767,00	4001017891	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02030/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
206	Sepauk	Tawang Sari	70.007.500,00	4.393.016,00	74.400.516,00	4001018294	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
207	Sepauk	Buluh Kuning	15.044.902,00	944.077,00	15.988.979,00	4001018448	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
208	Sepauk	Mati Hilir	66.432.346,00	4.168.673,00	70.601.019,00	4001016836	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
209	Ambalau	Patih Jenara	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018936	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
210	Ambalau	Deme	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019576	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
211	Ambalau	Mensuang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019177	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022	337.771.221,00	21.195.361,00
212	Ambalau	Nanga Menakon	22.186.248,00	1.392.201,00	23.578.449,00	4001018057	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
213	Sintang	Merti Guna	51.904.360,00	3.257.032,00	55.161.392,00	4001013004	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
214	Dedai	Mengkirai Jaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019037	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
215	Ketungau Hilir	Beluh Mulyo	52.458.577,00	3.291.810,00	55.750.387,00	4001017981	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/06/2022	02.19/04.0/02029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
216	Serawai	Pagar Lebata	45.180.853,00	2.835.130,00	48.015.983,00	4701000183	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	23/06/2022	02.19/04.0/02276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
217	Serawai	Tanjung Harapan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017611	Bank Kalbar Cabang Sintang	23/06/2022	02.19/04.0/02276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
218	Sepauk	Sinar Harapan	31.449.591,00	1.973.482,00	33.423.073,00	4001016071	Bank Kalbar Cabang Sintang	23/06/2022	02.19/04.0/02276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
219	Sepauk	Temawang Bulai	22.294.472,00	1.398.992,00	23.693.464,00	4001015988	Bank Kalbar Cabang Sintang	23/06/2022	02.19/04.0/02276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
220	Tempunak	Balai Harapan	52.227.933,00	3.277.338,00	55.505.271,00	4001016739	Bank Kalbar Cabang Sintang	23/06/2022	02.19/04.0/02276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
221	Kayan Hilir	Sungai Sintang	25.270.980,00	1.585.770,00	26.856.750,00	4001017166	Bank Kalbar Cabang Sintang	23/06/2022	02.19/04.0/02276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022	236.161.117,00	14.819.264,00
222	Kayan Hulu	Topan Nanga	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017662	Bank Kalbar Cabang Sintang	23/06/2022	02.19/04.0/02276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/VI/2022		
223	Ketungau Hilir	Jentawang Hilir	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016518	Bank Kal				

NO.	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH YANG DICAIRKAN	REKONING DESA	KETERANGAN	SP2D		PAJAK DAERAH DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
								TGL SP2D	NOMOR SP2D		
249	Sepauk	Sekubang	47.430.491,00	2.976.294,00	50.406.785,00	4001018669	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03780/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
250	Binjai Hulu	Telaga Satu Binjai	15.069.990,00	945.652,00	16.015.642,00	4001016844	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03780/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
251	Sintang	Anggah Jaya	45.858.118,00	2.877.628,00	48.735.746,00	4001016691	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
252	Sintang	Teluk Kelansam	15.379.092,00	965.048,00	16.344.140,00	4001017123	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
253	Binjai Hulu	Binjai Hulu	93.351.002,00	5.857.836,00	99.208.838,00	4001017620	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
254	Kayan Hilir	Kayan Hilir Beringin	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018588	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
255	Kayan Hilir	Monai Begumunk	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016496	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
256	Sepauk	Peningsum	15.102.932,00	947.719,00	16.050.651,00	4001016101	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
257	Sepauk	Bangun	40.177.960,00	2.521.195,00	42.699.155,00	4001019401	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022	330.832.016,00	20.759.926,00
258	Sepauk	Tanjung Balai	14.972.674,00	939.545,00	15.912.219,00	4101010118	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
259	Tempunak	Riam Batu	14.967.524,00	939.222,00	15.906.746,00	4001017093	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
260	Ambalau	Nanga Keremai	23.803.302,00	1.493.673,00	25.296.975,00	4001019088	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
261	Ketungau Hilir	Batu Ampar	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017808	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
262	Ketungau Tengah	Panggi Rudai	22.416.446,00	1.406.646,00	23.823.092,00	4001017174	Bank Kalbar Cabang Sintang	11/08/2022	02.19/04.0/03752/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
263	Dedai	Hulu Dedai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017182	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
264	Dedai	Tanjung	27.453.388,00	1.722.718,00	29.176.106,00	4001018154	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
265	Sepauk	Bernauvau	14.945.100,00	937.815,00	15.882.915,00	4001018537	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
266	Sepauk	Sungai Segak	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016488	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
267	Ketungau Hilir	Lepung Pantak	21.195.480,00	1.330.030,00	22.525.510,00	4001017158	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
268	Ketungau Hilir	Kenuk	14.934.322,00	947.013,00	15.881.335,00	4001016186	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
269	Ketungau Hulu	Neraai Jaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019053	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
270	Ketungau Hulu	Empunak Tapang Keladan	36.421.647,00	2.285.482,00	38.707.129,00	4001018995	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022	368.657.095,00	23.133.469,00
271	Sintang	Tebing Rava	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018707	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
272	Kelam Permai	Pelimping	16.536.986,00	1.037.707,00	17.574.693,00	4001017034	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
273	Tempunak	Kenyabar Baru	65.651.536,00	4.119.676,00	69.771.212,00	4001013012	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
274	Kayan Hilir	Kempas Rava	29.049.934,00	1.822.902,00	30.872.836,00	4001016283	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
275	Serawai	Mensulung Bio	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	471000124	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
276	Binjai Hulu	Sungai Risap	52.801.020,00	3.313.298,00	56.114.318,00	4001018430	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
277	Ketungau Tengah	Begelang Jaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018235	Bank Kalbar Cabang Sintang	22/08/2022	02.19/04.0/03982/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VIII/2022		
278	Kelam Permai	Sungai Lais	23.122.655,00	1.450.962,00	24.573.617,00	4001015911	Bank Kalbar Cabang Sintang	29/09/2022	02.19/04.0/05037/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
279	Binjai Hulu	Ampar Bedang	15.116.516,00	948.571,00	16.065.087,00	4001018791	Bank Kalbar Cabang Sintang	29/09/2022	02.19/04.0/05037/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
280	Kayan Hulu	Maman Jaya	21.323.882,00	1.338.087,00	22.661.969,00	4001018278	Bank Kalbar Cabang Sintang	29/09/2022	02.19/04.0/05037/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
281	Sungai Tebelian	Gurung Kempadik	56.053.662,00	3.517.403,00	59.571.065,00	4001015759	Bank Kalbar Cabang Sintang	29/09/2022	02.19/04.0/05037/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022	160.419.681,00	10.066.437,00
282	Tempunak	Tanjung Perada	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4101010053	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	29/09/2022	02.19/04.0/05037/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
283	Serawai	Baras Nabun	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001015929	Bank Kalbar Cabang Sintang	29/09/2022	02.19/04.0/05037/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
284	Ambalau	Bukai Tukun	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019126	Bank Kalbar Cabang Sintang	29/09/2022	02.19/04.0/05037/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
285	Dedai	Batu Landung	20.281.900,00	1.272.702,00	21.554.602,00	4001019011	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/09/2022	02.19/04.0/04761/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
286	Sepauk	Gernis Jaya	15.131.720,00	949.525,00	16.081.245,00	4001016224	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/09/2022	02.19/04.0/04761/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
287	Kayan Hilir	Natai Tebedak	21.117.786,00	1.325.155,00	22.442.941,00	4001018201	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/09/2022	02.19/04.0/04761/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
288	Ketungau Tengah	Senangan Kecil	15.341.384,00	962.682,00	16.304.066,00	4001016917	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/09/2022	02.19/04.0/04761/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022	144.410.171,00	9.061.831,00
289	Ambalau	Purut Beribit	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019240	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/09/2022	02.19/04.0/04761/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
290	Ketungau Hilir	Batu Nyadi	32.287.154,00	2.026.040,00	34.313.194,00	4001016151	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/09/2022	02.19/04.0/04761/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
291	Ketungau Hulu	Desa Jasa	25.315.905,00	1.588.589,00	26.904.494,00	4001019185	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/09/2022	02.19/04.0/04761/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
292	Kayan Hilir	Sungai Buaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018880	Bank Kalbar Cabang Sintang	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
293	Kayan Hilir	Sungai Merava	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017921	Bank Kalbar Cabang Sintang	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
294	Tempunak	Kupan Jaya	26.538.040,00	1.666.535,00	28.204.575,00	4001017379	Bank Kalbar Cabang Sintang	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
295	Tempunak	Mensiap Jaya	16.969.480,00	1.064.846,00	18.034.326,00	4001016992	Bank Kalbar Cabang Sintang	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
296	Tempunak	Timun Baru	74.534.104,00	4.677.063,00	79.211.167,00	4101010037	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
297	Tempunak	Repak Sari	150.038.301,00	9.415.000,00	159.453.301,00	4001017255	Bank Kalbar Cabang Sintang	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022	475.310.954,00	29.826.069,00
298	Sintang	Tanjung Kelansam	40.504.788,00	2.541.702,00	43.046.490,00	4101010177	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
299	Kelam Permai	Sei Pukat	47.972.383,00	3.010.298,00	50.982.681,00	4001016216	Bank Kalbar Cabang Sintang	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
300	Sepauk	Paoh Benua	73.930.892,00	4.639.211,00	78.570.103,00	4001016194	Bank Kalbar Cabang Sintang	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
301	Serawai	Limbur Bernaung Lestari	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4710001141	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	12/09/2022	02.19/04.0/04598/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/IX/2022		
302	Serawai	Karya Jaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4710001191	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	26/10/2022	02.19/04.0/05719/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
303	Serawai	Nanga Mentatai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4710001132	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	26/10/2022	02.19/04.0/05719/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022	44.802.966,00	2.811.414,00
304	Sepauk	Kemantan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018383	Bank Kalbar Cabang Sintang	26/10/2022	02.19/04.0/05719/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
305	Sintang	Mungguq Bantok	14.946.738,00	937.918,00	15.884.656,00	4001018570	Bank Kalbar Cabang Sintang	26/10/2022	02.19/04.0/05713/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
306	Kayan Hulu	Empakan	24.214.164,00	1.519.454,00	25.733.618,00	4101010185	Bank Kalbar Cabang Kapuas Kanan Hulu	26/10/2022	02.19/04.0/05713/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
307	Kayan Hilir	Sungai Pengga	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018171	Bank Kalbar Cabang Sintang	26/10/2022	02.19/04.0/05713/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
308	Serawai	Nanga Segulang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001015881	Bank Kalbar Cabang Sintang	26/10/2022	02.19/04.0/05713/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022	120.686.017,00	7.573.128,00
309	Serawai	Temakung	15.017.074,00	942.335,00	15.959.409,00	4001017778	Bank Kalbar Cabang Sintang	26/10/2022	02.19/04.0/05713/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
310	Ketungau Hulu	Embah	21.705.075,00	1.362.007,00	23.067.082,00	4001016208	Bank Kalbar Cabang Sintang	26/10/2022	02.19/04.0/05713/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
311	Ketungau Hulu	Suak Medang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018146	Bank Kalbar Cabang Sintang	26/10/2022	02.19/04.0/05713/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
312	Dedai	Riguk	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018481	Bank Kalbar Cabang Sintang				



NO.	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI	JUMLAH YANG	REKONING DESA	KETERANGAN	SP2D		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI
			DAERAH	DAERAH	DICAIRKAN			TGL SP2D	NOMOR SP2D		DAERAH
330	Sungai Tebelian	Baya Betung	15.248.628,00	956.861,00	16.205.489,00	4101010096	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	09/12/2022	02.19/04.0/08382/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.05/XII/2022	201.787.196,00	12.662.277,00
331	Sepauk	Temawang Muntai	42.759.253,00	2.683.171,00	45.442.424,00	4001016241	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/12/2022	02.19/04.0/08382/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.05/XII/2022		
332	Sepauk	Tanjung Ria	17.269.548,00	1.083.675,00	18.353.223,00	4301000010	Bank Kalbar Capem Sepauk	09/12/2022	02.19/04.0/08382/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.05/XII/2022		
333	Dedai	Umin Java	41.618.510,00	2.611.588,00	44.230.098,00	4001017743	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/12/2022	02.19/04.0/08382/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.05/XII/2022	116.442.136,00	7.306.818,00
334	Ketungau Tengah	Pandjang Jari	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016895	Bank Kalbar Cabang Sintang	09/12/2022	02.19/04.0/08382/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.05/XII/2022		
335	Kayan Hilir	Sekah	21.883.268,00	1.373.177,00	23.256.445,00	4001017829	Bank Kalbar Cabang Sintang	30/11/2022	02.19/04.0/07612/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
336	Kayan Hilir	Mekar Mandiri	19.039.122,00	1.199.137,00	20.238.259,00	4001016952	Bank Kalbar Cabang Sintang	30/11/2022	02.19/04.0/07612/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022	151.711.934,00	9.520.021,00
337	Kayan Hilir	Uyangkom	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4201000098	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	30/11/2022	02.19/04.0/07612/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
338	Ketungau Hulu	Njung Kempas	22.570.961,00	1.416.342,00	23.987.303,00	4001015961	Bank Kalbar Cabang Sintang	30/11/2022	02.19/04.0/07612/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
339	Ketungau Hulu	Nanga Bugau	23.080.339,00	1.448.306,00	24.528.645,00	4001016461	Bank Kalbar Cabang Sintang	30/11/2022	02.19/04.0/07612/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022	203.367.947,00	12.761.468,00
340	Ketungau Hulu	Sekah	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016721	Bank Kalbar Cabang Sintang	30/11/2022	02.19/04.0/07612/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI/2022		
341	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	14.980.326,00	940.025,00	15.920.351,00	4001016810	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
342	Ketungau Hilir	Semajau Mekar	27.109.680,00	1.701.150,00	28.810.830,00	4001016364	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	151.711.934,00	9.520.021,00
343	Ketungau Hilir	Seribunng	15.035.277,00	943.473,00	15.978.750,00	4001016054	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
344	Serawai	Batu Ketebug	14.946.772,00	937.920,00	15.884.692,00	4701000035	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
345	Ketungau Tengah	Tirta Karva	15.134.143,00	949.677,00	16.083.820,00	4001016291	Bank Kalbar Capem Sepauk	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	203.367.947,00	12.761.468,00
346	Ketungau Tengah	Semareh	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019223	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
347	Ketungau Hulu	Sungai Seria	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018812	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
348	Ketungau Hulu	Idai	19.702.770,00	1.236.362,00	20.939.132,00	4001018901	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	141.247.875,00	8.863.392,00
349	Ketungau Hulu	Sungai Mawang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018774	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09469/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
350	Sintang	Lalang Baru	15.261.326,00	957.658,00	16.218.984,00	4101010088	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
351	Kayan Hilir	Lingsam Permai	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4101010100	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	203.367.947,00	12.761.468,00
352	Kayan Hilir	Lengkom Bindu	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018821	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
353	Kayan Hilir	Bukit Segaloh	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018847	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
354	Kayan Hilir	Sungai Emang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4201000063	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	151.711.934,00	9.520.021,00
355	Kayan Hilir	Nanga Mau	15.408.352,00	966.884,00	16.375.236,00	4001016771	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
356	Kayan Hilir	Neran Java	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018740	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
357	Kayan Hulu	Nanga Tonggoui	25.783.112,00	1.617.907,00	27.401.019,00	4001019151	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	160.366.043,00	10.063.071,00
358	Kayan Hulu	Landau Bara	30.075.660,00	1.887.267,00	31.962.927,00	4201000012	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
359	Kayan Hulu	Tanah Merah	26.949.279,00	1.691.085,00	28.640.364,00	4201000306	Bank Kalbar Capem Nanga Mau	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
360	Ketungau Hilir	Setungkup	15.218.608,00	954.977,00	16.173.585,00	4001016259	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09467/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	168.375.156,00	10.565.651,00
361	Sepauk	Sungai Raya	15.401.728,00	966.468,00	16.368.196,00	4001016666	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
362	Sepauk	Riam Kempadik	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019207	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
363	Sepauk	Nanga Sepauk	14.945.368,00	937.831,00	15.883.199,00	4301000001	Bank Kalbar Capem Nanga Sepauk	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	141.247.875,00	8.863.392,00
364	Sepauk	Sukau Bersatu	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016232	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
365	Sepauk	Lengkenat	21.294.847,00	1.336.265,00	22.631.112,00	4001017069	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
366	Sepauk	Ensabang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016062	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	203.367.947,00	12.761.468,00
367	Binjai Hulu	Pemaka Kabiau Raya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016852	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
368	Dedai	Dedai Kanan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4101010134	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
369	Serawai	Meraka Jaya	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019584	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09466/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	160.366.043,00	10.063.071,00
370	Sungai Tebelian	Merarai Dua	15.571.006,00	977.092,00	16.548.098,00	4001015767	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
371	Sungai Tebelian	Penjernang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017361	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
372	Sungai Tebelian	Riam Kijang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4101010070	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	168.375.156,00	10.565.651,00
373	Sungai Tebelian	Bonet Lama	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016402	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
374	Sungai Tebelian	Ransi Dakan	22.643.413,00	1.420.890,00	24.064.303,00	4001015236	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
375	Sungai Tebelian	Sarai	15.627.308,00	980.624,00	16.607.932,00	4001015694	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	160.366.043,00	10.063.071,00
376	Sungai Tebelian	Penjernang Hulu	19.054.595,00	1.195.688,00	20.250.283,00	4101010029	Bank Kalbar Capem Kapuas Kanan Hulu	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
377	Ambalau	Lutung Mingan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018561	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
378	Ambalau	Nanga Sake	20.807.224,00	1.305.667,00	22.112.891,00	4001019193	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	160.366.043,00	10.063.071,00
379	Ambalau	Tanjung Andan	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001019100	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09468/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
380	Sintang	Tertung	16.352.680,00	1.026.142,00	17.378.822,00	4001018472	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
381	Kelam Permai	Karva Java Bakti	15.538.399,00	975.045,00	16.513.444,00	4001015864	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	29.868.644,00	1.874.276,00
382	Kayan Hulu	Lintang Tambuk	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001018758	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
383	Tempunak	Gurung Mali	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016399	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
384	Tempunak	Kuala Tiga	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001017085	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	160.366.043,00	10.063.071,00
385	Tempunak	Sungai Buluh	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001016470	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
386	Tempunak	Pekulai Bersatu	23.934.710,00	1.501.918,00	25.436.628,00	4001016330	Bank Kalbar Cabang Sintang	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022		
387	Serawai	Bedaha	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4701000108	Bank Kalbar Capem Nanga Serawai	20/12/2022	02.19/04.0/09465/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022	29.868.644,00	1.874.276,00
388	Serawai	Gurung Sengiang	14.934.322,00	937.138,00	15.871.460,00	4001015856					



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DAFTAR SILTAP DAN POTONGAN BPJS PER DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU SILTAP	TOTAL		
				SILTAP BRUTO	POT. BPJS	SILTAP NETTO
1	AMBALAU	BUKAI TUKUN	201.480.000,00	201.480.000,00	626.880,00	200.853.120,00
2	AMBALAU	BUKIT TINGGI	201.480.000,00	201.480.000,00	1.802.280,00	199.677.720,00
3	AMBALAU	BUNTUT PIMPIN	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
4	AMBALAU	BUNTUT PURUN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.350.800,00	223.405.200,00
5	AMBALAU	BUNTUT SABON	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
6	AMBALAU	DAHTAH BUNGAI	201.480.000,00	201.480.000,00	1.018.680,00	200.461.320,00
7	AMBALAU	DEME	225.756.000,00	225.756.000,00	2.612.000,00	223.144.000,00
8	AMBALAU	JENGGARANG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
9	AMBALAU	KEPALA JUNGAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.272.440,00	199.207.560,00
10	AMBALAU	KOLANGAN JUOI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.246.320,00	199.233.680,00
11	AMBALAU	KORONG DASO	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
12	AMBALAU	LUNJAN TINGANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.664.240,00	223.091.760,00
13	AMBALAU	LUTING MINGAN	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
14	AMBALAU	MENSUANG	201.480.000,00	201.480.000,00	1.959.000,00	199.521.000,00
15	AMBALAU	NANGA AMBALAU	174.780.000,00	174.780.000,00	2.115.720,00	172.664.280,00
16	AMBALAU	NANGA KEMANGAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
17	AMBALAU	NANGA KEREMOI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.298.560,00	223.457.440,00
18	AMBALAU	NANGA KESANGE	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
19	AMBALAU	NANGA MENAKON	250.032.000,00	250.032.000,00	3.056.040,00	246.975.960,00
20	AMBALAU	NANGA MENANTAK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
21	AMBALAU	NANGA MENTOMOI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.298.560,00	199.181.440,00
22	AMBALAU	NANGA PAHANGAN	201.480.000,00	201.480.000,00	940.320,00	200.539.680,00
23	AMBALAU	NANGA RADE	201.480.000,00	201.480.000,00	1.332.120,00	200.147.880,00
24	AMBALAU	NANGA SAKAI	274.308.000,00	274.308.000,00	3.238.880,00	271.069.120,00
25	AMBALAU	NANGA SAKE	225.756.000,00	225.756.000,00	2.194.080,00	223.561.920,00
26	AMBALAU	NANGA UKAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.220.200,00	199.259.800,00
27	AMBALAU	NUSA PORING	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
28	AMBALAU	PATIH JEPARA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.246.320,00	199.233.680,00
29	AMBALAU	PULOU SABHANG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
30	AMBALAU	PURUT BERIBIT	201.480.000,00	201.480.000,00	1.332.120,00	200.147.880,00
31	AMBALAU	RIAM SABON	201.480.000,00	201.480.000,00	1.567.200,00	199.912.800,00
32	AMBALAU	SUNGAI TAMBUN	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
33	AMBALAU	TANJUNG ANDAN	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
34	BINJAI HULU	AMPAR BEDANG	274.308.000,00	274.308.000,00	3.238.880,00	271.069.120,00
35	BINJAI HULU	BINAI HILIR	250.032.000,00	250.032.000,00	3.003.800,00	247.028.200,00
36	BINJAI HULU	BINJAI HULU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.134.400,00	271.173.600,00
37	BINJAI HULU	DAK JAYA	223.332.000,00	223.332.000,00	2.820.960,00	220.511.040,00
38	BINJAI HULU	EMPAKA KABIAU RAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.350.800,00	223.405.200,00
39	BINJAI HULU	MENSIKU	199.056.000,00	199.056.000,00	2.324.680,00	196.731.320,00
40	BINJAI HULU	SIMBA RAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
41	BINJAI HULU	SUNGAI RISAP	250.032.000,00	250.032.000,00	2.585.880,00	247.446.120,00
42	BINJAI HULU	SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.350.800,00	223.405.200,00
43	BINJAI HULU	TELAGA DUA	250.032.000,00	250.032.000,00	2.585.880,00	247.446.120,00
44	BINJAI HULU	TELAGA SATU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.899.320,00	247.132.680,00
45	DEDAI	APIN BARU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.768.720,00	247.263.280,00
46	DEDAI	BARAS	247.608.000,00	247.608.000,00	3.056.040,00	244.551.960,00
47	DEDAI	BATU LANDUNG	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
48	DEDAI	BELINYUK SIBAU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
49	DEDAI	DEDAI KANAN	250.032.000,00	250.032.000,00	3.003.800,00	247.028.200,00
50	DEDAI	EMPACI	274.308.000,00	274.308.000,00	3.134.400,00	271.173.600,00
51	DEDAI	EMPARU BARU	298.584.000,00	298.584.000,00	3.447.840,00	295.136.160,00
52	DEDAI	GANDIS	274.308.000,00	274.308.000,00	3.317.240,00	270.990.760,00
53	DEDAI	GANDIS HULU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
54	DEDAI	HULU DEDAI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.272.440,00	223.483.560,00
55	DEDAI	JANGKANG	201.480.000,00	201.480.000,00	1.567.200,00	199.912.800,00
56	DEDAI	KUMPANG	250.032.000,00	250.032.000,00	3.029.920,00	247.002.080,00
57	DEDAI	LUNDANG BARU	223.332.000,00	223.332.000,00	2.820.960,00	220.511.040,00
58	DEDAI	MANAONG BARU	199.056.000,00	199.056.000,00	2.194.080,00	196.861.920,00
59	DEDAI	MANGAT BARU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
60	DEDAI	MANYAM	225.756.000,00	225.756.000,00	2.167.960,00	223.588.040,00
61	DEDAI	MENGGIRAI JAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.403.040,00	199.076.960,00
62	DEDAI	MEREMPIIT BARU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
63	DEDAI	NANGA DEDAI	199.056.000,00	199.056.000,00	2.167.960,00	196.888.040,00
64	DEDAI	NANGA JETAK	250.032.000,00	250.032.000,00	2.768.720,00	247.263.280,00
65	DEDAI	PANGKADAN SUNGAI RUPA	250.032.000,00	250.032.000,00	2.298.560,00	247.733.440,00
66	DEDAI	PENGKADAN BARU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.160.520,00	271.147.480,00
67	DEDAI	PENYAK LALANG	223.332.000,00	223.332.000,00	2.194.080,00	221.137.920,00
68	DEDAI	RIGUK	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
69	DEDAI	SAMAK	201.480.000,00	201.480.000,00	1.802.280,00	199.677.720,00
70	DEDAI	SUNGAI MALI	223.332.000,00	223.332.000,00	3.081.400,00	220.250.600,00
71	DEDAI	SUNGAI TAPANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
72	DEDAI	TANJUNG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.298.560,00	199.181.440,00
73	DEDAI	TAOK	199.056.000,00	199.056.000,00	2.194.080,00	196.861.920,00
74	DEDAI	TERUSAN	201.480.000,00	201.480.000,00	2.063.480,00	199.416.520,00
75	DEDAI	UMIN JAYA	250.032.000,00	250.032.000,00	3.160.520,00	246.871.480,00
76	KAYAN HILIR	BATU NETAK	225.756.000,00	225.756.000,00	1.880.640,00	223.875.360,00
77	KAYAN HILIR	BEGENDANG MAL	201.480.000,00	201.480.000,00	1.567.200,00	199.912.800,00
78	KAYAN HILIR	BUKIT SEGALOH	298.584.000,00	298.584.000,00	1.253.760,00	297.330.240,00
79	KAYAN HILIR	BULUK JEGARA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
80	KAYAN HILIR	BULUK PANJANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.585.880,00	223.170.120,00
81	KAYAN HILIR	ENGKERANGAN	274.308.000,00	274.308.000,00	3.343.360,00	270.964.640,00
82	KAYAN HILIR	IPOH EMANG	250.032.000,00	250.032.000,00	2.585.880,00	247.446.120,00
83	KAYAN HILIR	JAMBU	274.308.000,00	274.308.000,00	1.880.640,00	272.427.360,00
84	KAYAN HILIR	JAYA SAKTI	250.032.000,00	250.032.000,00	2.063.480,00	247.968.520,00
85	KAYAN HILIR	KARYA BARU	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
86	KAYAN HILIR	KEMPAS RAYA	274.308.000,00	274.308.000,00	2.899.320,00	271.408.680,00
87	KAYAN HILIR	KERAPA SEPAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
88	KAYAN HILIR	LALANG INGGAR	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
89	KAYAN HILIR	LANDAU BERINGIN	274.308.000,00	274.308.000,00	1.645.560,00	272.662.440,00
90	KAYAN HILIR	LENGKONG BINDU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
91	KAYAN HILIR	LINGGAM PERMAI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
92	KAYAN HILIR	MEKAR MANDIRI	274.308.000,00	274.308.000,00	2.272.440,00	272.035.560,00
93	KAYAN HILIR	MELINGKAT	274.308.000,00	274.308.000,00	3.134.400,00	271.173.600,00
94	KAYAN HILIR	MENGGIRAI	298.584.000,00	298.584.000,00	1.880.640,00	296.703.360,00
95	KAYAN HILIR	MENTUNAI	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
96	KAYAN HILIR	MONBAI BEGUNUNK	225.756.000,00	225.756.000,00	1.332.120,00	224.423.880,00
97	KAYAN HILIR	NANGA LIDAU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.664.240,00	247.367.760,00
98	KAYAN HILIR	NANGA MAU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.056.040,00	271.251.960,00
99	KAYAN HILIR	NANGA TIKAN	298.584.000,00	298.584.000,00	3.447.840,00	295.136.160,00
100	KAYAN HILIR	NATAI LESUNG	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
101	KAYAN HILIR	NATAI TEBEDAK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
102	KAYAN HILIR	NERAN BAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU SILTAP	TOTAL		
				SILTAP BRUTO	POT. BPJS	SILTAP NETTO
103	KAYAN HILIR	NYANGKOM	274.308.000,00	274.308.000,00	3.265.000,00	271.043.000,00
104	KAYAN HILIR	PAKAK	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
105	KAYAN HILIR	PAOH DESA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.585.880,00	223.170.120,00
106	KAYAN HILIR	PELAIK	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
107	KAYAN HILIR	SUNGAI BUAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
108	KAYAN HILIR	SUNGAI EMANG	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
109	KAYAN HILIR	SUNGAI GARONG	250.032.000,00	250.032.000,00	2.638.120,00	247.393.880,00
110	KAYAN HILIR	SUNGAI MENUANG	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
111	KAYAN HILIR	SUNGAI MERAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.350.800,00	223.405.200,00
112	KAYAN HILIR	SUNGAI PENGGA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.925.440,00	198.554.560,00
113	KAYAN HILIR	SUNGAI RANAP	225.756.000,00	225.756.000,00	1.567.200,00	224.188.800,00
114	KAYAN HILIR	SUNGAI SINTANG	274.308.000,00	274.308.000,00	3.212.760,00	271.095.240,00
115	KAYAN HILIR	TANJUNG KELILING	201.480.000,00	201.480.000,00	2.403.040,00	199.076.960,00
116	KAYAN HILIR	TANJUNG PUTAR	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
117	KAYAN HILIR	TERTUNG MAU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.507.520,00	247.524.480,00
118	KAYAN HILIR	TUGUK	274.308.000,00	274.308.000,00	3.369.480,00	270.938.520,00
119	KAYAN HULU	BULUH MERINDU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.794.840,00	247.237.160,00
120	KAYAN HULU	EMPAKAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
121	KAYAN HULU	EMPOYANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.794.840,00	222.961.160,00
122	KAYAN HULU	ENTOGONG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
123	KAYAN HULU	KEBARAU	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
124	KAYAN HULU	KERAPUK JAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.612.000,00	223.144.000,00
125	KAYAN HULU	LANDAU BARA	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
126	KAYAN HULU	LINTAK TAMBUK	247.608.000,00	247.608.000,00	2.768.720,00	244.839.280,00
127	KAYAN HULU	MAPAN JAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
128	KAYAN HULU	MERAH ARAI	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
129	KAYAN HULU	MERAHAU PERMAI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
130	KAYAN HULU	NANGA ABAI	247.608.000,00	247.608.000,00	2.820.960,00	244.787.040,00
131	KAYAN HULU	NANGA LAAR	199.056.000,00	199.056.000,00	1.880.640,00	197.175.360,00
132	KAYAN HULU	NANGA MASAU	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
133	KAYAN HULU	NANGA ORAN	274.308.000,00	274.308.000,00	2.690.360,00	271.617.640,00
134	KAYAN HULU	NANGA PAYAK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.610.000,00	223.144.000,00
135	KAYAN HULU	NANGA TAMPANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.559.760,00	223.196.240,00
136	KAYAN HULU	NANGA TEBIDAH	250.032.000,00	250.032.000,00	2.820.960,00	247.211.040,00
137	KAYAN HULU	NANGA TONGGOI	250.032.000,00	250.032.000,00	2.429.160,00	247.602.840,00
138	KAYAN HULU	NANGA TORAN	298.584.000,00	298.584.000,00	3.447.840,00	295.136.160,00
139	KAYAN HULU	NANGA UNGAI	199.056.000,00	199.056.000,00	2.194.080,00	196.861.920,00
140	KAYAN HULU	NANGKAK LESTARI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.455.280,00	223.300.720,00
141	KAYAN HULU	RIAM MUNTIK	201.480.000,00	201.480.000,00	2.220.200,00	199.259.800,00
142	KAYAN HULU	RIAM PANJANG	322.860.000,00	322.860.000,00	2.194.080,00	320.665.920,00
143	KAYAN HULU	TANAH MERAH	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
144	KAYAN HULU	TANJUNG BUNGA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
145	KAYAN HULU	TANJUNG LALAU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
146	KAYAN HULU	TANJUNG MIRU	201.480.000,00	201.480.000,00	1.332.120,00	200.147.880,00
147	KAYAN HULU	TAPANG MANUA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.612.000,00	223.144.000,00
148	KAYAN HULU	TONAK GONEH	201.480.000,00	201.480.000,00	2.585.880,00	198.894.120,00
149	KAYAN HULU	TOPAN NANGA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
150	KELAM PERMAI	BANING PANJANG	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
151	KELAM PERMAI	BENGKUANG	223.332.000,00	223.332.000,00	2.507.520,00	220.824.480,00
152	KELAM PERMAI	ENSAID PANJANG	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
153	KELAM PERMAI	GEMBA RAYA	322.860.000,00	322.860.000,00	3.787.400,00	319.072.600,00
154	KELAM PERMAI	KARYA JAYA BHAKTI	250.032.000,00	250.032.000,00	2.820.960,00	247.211.040,00
155	KELAM PERMAI	KEBONG	347.136.000,00	347.136.000,00	4.362.040,00	342.773.960,00
156	KELAM PERMAI	KELAM SEJAHTERA	250.032.000,00	250.032.000,00	2.977.680,00	247.054.320,00
157	KELAM PERMAI	LANDAU KODAM	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
158	KELAM PERMAI	MANDIRI JAYA	298.584.000,00	298.584.000,00	3.552.320,00	295.031.680,00
159	KELAM PERMAI	MERPAK	274.308.000,00	274.308.000,00	3.343.360,00	270.964.640,00
160	KELAM PERMAI	NANGA LEBANG	223.332.000,00	223.332.000,00	2.350.800,00	220.981.200,00
161	KELAM PERMAI	PELIMPING	347.136.000,00	347.136.000,00	4.074.720,00	343.061.280,00
162	KELAM PERMAI	SEPAN LEBANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.794.840,00	222.961.160,00
163	KELAM PERMAI	SUNGAI LABI	250.032.000,00	250.032.000,00	2.899.320,00	247.132.680,00
164	KELAM PERMAI	SUNGAI LAIS	225.756.000,00	225.756.000,00	2.272.440,00	223.483.560,00
165	KELAM PERMAI	SUNGAI MARAM	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
166	KELAM PERMAI	SUNGAI PUKAT	225.756.000,00	225.756.000,00	2.716.480,00	223.039.520,00
167	KETUNGAU HILIR	AIR NYURUK	250.032.000,00	250.032.000,00	3.082.160,00	246.949.840,00
168	KETUNGAU HILIR	BATU AMPAR	225.756.000,00	225.756.000,00	2.690.360,00	223.065.640,00
169	KETUNGAU HILIR	BATU NYADI	274.308.000,00	274.308.000,00	2.820.960,00	271.487.040,00
170	KETUNGAU HILIR	BAUNG SENGATAP	250.032.000,00	250.032.000,00	2.820.960,00	247.211.040,00
171	KETUNGAU HILIR	BELUH MULYO	274.308.000,00	274.308.000,00	3.578.440,00	270.729.560,00
172	KETUNGAU HILIR	BETUNG PERMAI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
173	KETUNGAU HILIR	BUKIT SIDIN PERMAI	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
174	KETUNGAU HILIR	JENTAWANG HILIR	225.756.000,00	225.756.000,00	2.429.160,00	223.326.840,00
175	KETUNGAU HILIR	KENUAK	223.332.000,00	223.332.000,00	2.820.960,00	220.511.040,00
176	KETUNGAU HILIR	LEPUNG PANTAK	201.480.000,00	201.480.000,00	1.985.120,00	199.494.880,00
177	KETUNGAU HILIR	MAUNG	274.308.000,00	274.308.000,00	3.317.240,00	270.990.760,00
178	KETUNGAU HILIR	MUNGGUK KELAPA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.768.720,00	222.987.280,00
179	KETUNGAU HILIR	NANGA KETUNGAU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
180	KETUNGAU HILIR	NANGA MERKAK	322.860.000,00	322.860.000,00	2.194.080,00	320.665.920,00
181	KETUNGAU HILIR	NANGA SEJIRAK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.873.200,00	222.882.800,00
182	KETUNGAU HILIR	PAMPANG DUA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.638.120,00	223.117.880,00
183	KETUNGAU HILIR	RATU DAMAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.011.240,00	199.468.760,00
184	KETUNGAU HILIR	SEMAJAU MEKAR	223.332.000,00	223.332.000,00	2.507.520,00	220.824.480,00
185	KETUNGAU HILIR	SEMUNTAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
186	KETUNGAU HILIR	SENIBUNG	274.308.000,00	274.308.000,00	2.167.960,00	272.140.040,00
187	KETUNGAU HILIR	SETUNGKUP	298.584.000,00	298.584.000,00	3.447.840,00	295.136.160,00
188	KETUNGAU HILIR	SUNGAI DERAS	296.160.000,00	296.160.000,00	3.761.280,00	292.398.720,00
189	KETUNGAU HILIR	SUNGAI MALI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.768.720,00	222.987.280,00
190	KETUNGAU HILIR	TANJUNG BAUNG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.559.760,00	223.196.240,00
191	KETUNGAU HULU	BEKUAN LUYANG	250.032.000,00	250.032.000,00	2.951.560,00	247.080.440,00
192	KETUNGAU HULU	EMBALEH	201.480.000,00	201.480.000,00	2.664.240,00	198.815.760,00
193	KETUNGAU HULU	EMPUNAK TAPANG KELADAN	225.756.000,00	225.756.000,00	3.134.400,00	222.621.600,00
194	KETUNGAU HULU	EMPURA	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
195	KETUNGAU HULU	ENGKERUH	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
196	KETUNGAU HULU	IDAI	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
197	KETUNGAU HULU	JASA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
198	KETUNGAU HULU	MUAKAN PETINGGI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
199	KETUNGAU HULU	MUNGGUK ENTAWAK	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
200	KETUNGAU HULU	NANGA BAYAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
201	KETUNGAU HULU	NANGA BUGAU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.820.960,00	247.211.040,00
202	KETUNGAU HULU	NANGA SEBAWANG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
203	KETUNGAU HULU	NERACI JAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
204	KETUNGAU HULU	RASAU	174.780.000,00	174.780.000,00	1.959.000,00	172.821.000,00
205	KETUNGAU HULU	RIAM SEJAWAK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
206	KETUNGAU HULU	SEBADAK	199.056.000,00	199.056.000,00	2.220.200,00	196.835.800,00
207	KETUNGAU HULU	SEBETUNG PALUK	250.032.000,00	250.032.000,00	2.899.320,00	247.132.680,00
208	KETUNGAU HULU	SEBULUH	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
209	KETUNGAU HULU	SEJAWAK	201.480.000,00	201.480.000,00	2.376.920,00	199.103.080,00
210	KETUNGAU HULU	SEKAH	250.032.000,00	250.032.000,00	2.585.880,00	247.446.120,00
211	KETUNGAU HULU	SENANING	250.032.000,00	250.032.000,00	2.403.040,00	247.628.960,00

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU SILTAP	TOTAL		
				SILTAP BRUTO	POT. BRJS	SILTAP NETTO
212	KETUNGAU HULU	SEPILUK	199.056.000,00	199.056.000,00	2.246.320,00	196.809.680,00
213	KETUNGAU HULU	SUAK MEDANG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
214	KETUNGAU HULU	SUNGAI BUGAU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.768.720,00	247.263.280,00
215	KETUNGAU HULU	SUNGAI KELIK	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
216	KETUNGAU HULU	SUNGAI MAWANG	201.480.000,00	201.480.000,00	1.018.680,00	200.461.320,00
217	KETUNGAU HULU	SUNGAI PISAU	250.032.000,00	250.032.000,00	3.029.920,00	247.002.080,00
218	KETUNGAU HULU	SUNGAI SERIA	199.056.000,00	199.056.000,00	2.507.520,00	196.548.480,00
219	KETUNGAU HULU	UJUNG KEMPAS	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
220	KETUNGAU TENGAH	ARGO MULYO	271.884.000,00	271.884.000,00	2.847.080,00	269.036.920,00
221	KETUNGAU TENGAH	BAKTI SENABUNG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
222	KETUNGAU TENGAH	BEGELANG JAYA	298.584.000,00	298.584.000,00	2.820.960,00	295.763.040,00
223	KETUNGAU TENGAH	ENGGITAN	274.308.000,00	274.308.000,00	3.212.760,00	271.095.240,00
224	KETUNGAU TENGAH	GUT JAYA BHAKTI	322.860.000,00	322.860.000,00	3.630.680,00	319.229.320,00
225	KETUNGAU TENGAH	KAYU DUJUNG	298.584.000,00	298.584.000,00	3.056.040,00	295.527.960,00
226	KETUNGAU TENGAH	KERTA SARI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.089.600,00	199.390.400,00
227	KETUNGAU TENGAH	KUBU BERANGAN	250.032.000,00	250.032.000,00	2.585.880,00	247.446.120,00
228	KETUNGAU TENGAH	LANDAU BUAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
229	KETUNGAU TENGAH	LANDAU TEMIANG	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
230	KETUNGAU TENGAH	MARGAHAYU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.977.680,00	247.054.320,00
231	KETUNGAU TENGAH	MUNGGUK GELOMBANG	250.032.000,00	250.032.000,00	3.108.280,00	246.923.720,00
232	KETUNGAU TENGAH	MUNGGUK LAWANG	250.032.000,00	250.032.000,00	2.194.080,00	247.837.920,00
233	KETUNGAU TENGAH	NANGA KELAPAN	250.032.000,00	250.032.000,00	3.082.160,00	246.949.840,00
234	KETUNGAU TENGAH	PADUNG KUMANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.167.960,00	223.588.040,00
235	KETUNGAU TENGAH	PANDING JAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
236	KETUNGAU TENGAH	PANGGI AGUNG	298.584.000,00	298.584.000,00	3.761.280,00	294.822.720,00
237	KETUNGAU TENGAH	PANGGI RUGUK	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
238	KETUNGAU TENGAH	RADIN JAYA	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
239	KETUNGAU TENGAH	SEMAREH	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
240	KETUNGAU TENGAH	SENANGAN JAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.429.160,00	199.050.840,00
241	KETUNGAU TENGAH	SENANGAN KECIL	250.032.000,00	250.032.000,00	2.612.000,00	247.420.000,00
242	KETUNGAU TENGAH	SUMBER SARI	322.860.000,00	322.860.000,00	4.022.480,00	318.837.520,00
243	KETUNGAU TENGAH	SUNGAI AREH	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
244	KETUNGAU TENGAH	SWADAYA	274.308.000,00	274.308.000,00	2.820.960,00	271.487.040,00
245	KETUNGAU TENGAH	TANJUNG SARI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
246	KETUNGAU TENGAH	TIRTA KARYA	223.332.000,00	223.332.000,00	2.507.520,00	220.824.480,00
247	KETUNGAU TENGAH	WANA BHAKTI	298.584.000,00	298.584.000,00	3.761.280,00	294.822.720,00
248	KETUNGAU TENGAH	WIRAYUDA	274.308.000,00	274.308.000,00	3.238.880,00	271.069.120,00
249	SEPAUK	BANGUN	201.480.000,00	201.480.000,00	2.272.440,00	199.207.560,00
250	SEPAUK	BEDAYAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
251	SEPAUK	BERNAYAU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.194.080,00	223.561.920,00
252	SEPAUK	BULUH KUNING	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
253	SEPAUK	BUNGKONG BARU	201.480.000,00	201.480.000,00	-	201.480.000,00
254	SEPAUK	ENSABANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
255	SEPAUK	GERNIS JAYA	223.332.000,00	223.332.000,00	2.194.080,00	221.137.920,00
256	SEPAUK	KEMANTAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.194.080,00	223.561.920,00
257	SEPAUK	KENYAUK	174.780.000,00	174.780.000,00	2.141.840,00	172.638.160,00
258	SEPAUK	LANDAU PANJANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
259	SEPAUK	LENGKENAT	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
260	SEPAUK	LIMAU BAKTI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
261	SEPAUK	MAIT HILIR	223.332.000,00	223.332.000,00	2.820.960,00	220.511.040,00
262	SEPAUK	MANIS RAYA	250.032.000,00	250.032.000,00	3.003.800,00	247.028.200,00
263	SEPAUK	NANGA LAYUNG	225.756.000,00	225.756.000,00	1.880.640,00	223.875.360,00
264	SEPAUK	NANGA LIBAU	223.332.000,00	223.332.000,00	2.690.360,00	220.641.640,00
265	SEPAUK	NANGA PARI	298.584.000,00	298.584.000,00	3.761.280,00	294.822.720,00
266	SEPAUK	NANGA SEPAUK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.298.560,00	223.457.440,00
267	SEPAUK	PAOH BENUA	271.884.000,00	271.884.000,00	3.186.640,00	268.697.360,00
268	SEPAUK	PENINSUNG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.638.120,00	223.117.880,00
269	SEPAUK	RIAM KEMPADIK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
270	SEPAUK	SEKUBANG	223.332.000,00	223.332.000,00	2.481.400,00	220.850.600,00
271	SEPAUK	SEKUIJAM TIMBAI	199.056.000,00	199.056.000,00	2.507.520,00	196.548.480,00
272	SEPAUK	SEMUNTAI	223.332.000,00	223.332.000,00	2.194.080,00	221.137.920,00
273	SEPAUK	SEKUPUT	250.032.000,00	250.032.000,00	3.056.040,00	246.975.960,00
274	SEPAUK	SINAR HARAPAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
275	SEPAUK	SINAR PEKAYAU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.089.600,00	223.666.400,00
276	SEPAUK	SIRANG SETAMBANG	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
277	SEPAUK	SUKAU BERSATU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.820.960,00	247.211.040,00
278	SEPAUK	SUNGAI JAUUNG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.115.720,00	199.364.280,00
279	SEPAUK	SUNGAI RAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.768.720,00	222.987.280,00
280	SEPAUK	SUNGAI SEGAK	250.032.000,00	250.032.000,00	2.768.720,00	247.263.280,00
281	SEPAUK	TANJUNG BALAI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.742.600,00	223.013.400,00
282	SEPAUK	TANJUNG HULU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.664.240,00	223.091.760,00
283	SEPAUK	TANJUNG MAWANG	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
284	SEPAUK	TANJUNG RIA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
285	SEPAUK	TAWANG SARI	223.332.000,00	223.332.000,00	2.820.960,00	220.511.040,00
286	SEPAUK	TEMAWANG BULAI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
287	SEPAUK	TEMAWANG MUNTAL	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
288	SEPAUK	TEMIANG KAPUAS	201.480.000,00	201.480.000,00	2.141.840,00	199.338.160,00
289	SERAWAI	BARAS NABUN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
290	SERAWAI	BATU KETEBUNG	250.032.000,00	250.032.000,00	1.723.920,00	248.308.080,00
291	SERAWAI	BEDAHA	223.332.000,00	223.332.000,00	2.507.520,00	220.824.480,00
292	SERAWAI	BEGORI	250.032.000,00	250.032.000,00	2.507.520,00	247.524.480,00
293	SERAWAI	BUNTUT PONTE	199.056.000,00	199.056.000,00	2.403.040,00	196.652.960,00
294	SERAWAI	GURUNG SENGHIANG	250.032.000,00	250.032.000,00	2.298.560,00	247.733.440,00
295	SERAWAI	KARYA JAYA	174.780.000,00	174.780.000,00	1.985.120,00	172.794.880,00
296	SERAWAI	LIMBUR BERNAUNG LESTARI	201.480.000,00	201.480.000,00	1.880.640,00	199.599.360,00
297	SERAWAI	MEKAR SARI	250.032.000,00	250.032.000,00	3.317.240,00	246.714.760,00
298	SERAWAI	MENSULUNG BIO	225.756.000,00	225.756.000,00	2.194.080,00	223.561.920,00
299	SERAWAI	MENTAJOI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.585.880,00	198.894.120,00
300	SERAWAI	MERAKO JAYA	250.032.000,00	250.032.000,00	2.194.080,00	247.837.920,00
301	SERAWAI	MEROBOI	225.756.000,00	225.756.000,00	1.567.200,00	224.188.800,00
302	SERAWAI	MUARA KOTA	250.032.000,00	250.032.000,00	2.794.840,00	247.237.160,00
303	SERAWAI	NANGA BIHE	250.032.000,00	250.032.000,00	2.664.240,00	247.367.760,00
304	SERAWAI	NANGA JELUNDUNG	225.756.000,00	225.756.000,00	1.671.680,00	224.084.320,00
305	SERAWAI	NANGA MENTATAI	225.756.000,00	225.756.000,00	1.828.400,00	223.927.600,00
306	SERAWAI	NANGA RIYOI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.298.560,00	199.181.440,00
307	SERAWAI	NANGA RUHAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.141.840,00	223.614.160,00
308	SERAWAI	NANGA SEGULANG	274.308.000,00	274.308.000,00	3.238.880,00	271.069.120,00
309	SERAWAI	NANGA SERAWAI	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
310	SERAWAI	NANGA TANGOI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
311	SERAWAI	NANGA TEKUNGAI	250.032.000,00	250.032.000,00	2.194.080,00	247.837.920,00
312	SERAWAI	NUSA TUJUH	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
313	SERAWAI	PAGAR LEBATA	201.480.000,00	201.480.000,00	1.932.880,00	199.547.120,00
314	SERAWAI	PANEKASAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
315	SERAWAI	RANTAU MALAM	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
316	SERAWAI	SABHANG LANDAN	201.480.000,00	201.480.000,00	1.750.040,00	199.729.960,00
317	SERAWAI	SAWANG SENGHIANG	298.584.000,00	298.584.000,00	2.507.520,00	296.076.480,00
318	SERAWAI	TAHAI PERMAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
319	SERAWAI	TALIAN SAHABUNG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
320	SERAWAI	TAMAKUNG	250.032.000,00	250.032.000,00	1.880.640,00	248.151.360,00

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU SILTAP	TOTAL		
				SILTAP BRUTO	POT. BRJS	SILTAP NETTO
321	SERAWAI	TANJUNG BARU	201.480.000,00	201.480.000,00	2.429.160,00	199.050.840,00
322	SERAWAI	TANJUNG HARAPAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.742.600,00	223.013.400,00
323	SERAWAI	TANJUNG RAYA	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
324	SERAWAI	TELUK HARAPAN	250.032.000,00	250.032.000,00	2.559.760,00	247.472.240,00
325	SERAWAI	TONTANG	274.308.000,00	274.308.000,00	3.238.880,00	271.069.120,00
326	SERAWAI	TUNAS HARAPAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.585.880,00	223.170.120,00
327	SINTANG	ANGGAH JAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.794.840,00	222.961.160,00
328	SINTANG	BANING KOTA	298.584.000,00	298.584.000,00	3.682.920,00	294.901.080,00
329	SINTANG	JERORA SATU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
330	SINTANG	KEBLAU BARU	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
331	SINTANG	LALANG BARU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.899.320,00	222.856.680,00
332	SINTANG	MAIL JAMPONG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.899.320,00	222.856.680,00
333	SINTANG	MERTI GUNA	274.308.000,00	274.308.000,00	3.134.400,00	271.173.600,00
334	SINTANG	MUNGGUK BANTOK	225.756.000,00	225.756.000,00	2.220.200,00	223.535.800,00
335	SINTANG	SUNGAI ANA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
336	SINTANG	TANJUNG KELANSAM	225.756.000,00	225.756.000,00	2.507.520,00	223.248.480,00
337	SINTANG	TEBING RAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.768.720,00	198.711.280,00
338	SINTANG	TELUK KELANSAM	225.756.000,00	225.756.000,00	2.612.000,00	223.144.000,00
339	SINTANG	TERTUNG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
340	SUNGAI TEBELIAN	BALAI AGUNG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.664.240,00	223.091.760,00
341	SUNGAI TEBELIAN	BANCOH	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
342	SUNGAI TEBELIAN	BAYA BETUNG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.194.080,00	199.285.920,00
343	SUNGAI TEBELIAN	BAYA MULYA	201.480.000,00	201.480.000,00	1.462.720,00	200.017.280,00
344	SUNGAI TEBELIAN	BONET ENKABANG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
345	SUNGAI TEBELIAN	BONET LAMA	250.032.000,00	250.032.000,00	1.906.760,00	248.125.240,00
346	SUNGAI TEBELIAN	GURUNG KEMPADIK	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
347	SUNGAI TEBELIAN	KAJANG BARU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
348	SUNGAI TEBELIAN	KUNYAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.481.400,00	198.998.600,00
349	SUNGAI TEBELIAN	LAMAN RAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	1.828.400,00	199.651.600,00
350	SUNGAI TEBELIAN	LEBAK UBAH	250.032.000,00	250.032.000,00	2.455.280,00	247.576.720,00
351	SUNGAI TEBELIAN	MANTER	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
352	SUNGAI TEBELIAN	MELAYANG SARI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.768.720,00	222.987.280,00
353	SUNGAI TEBELIAN	MERARAI DUA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.298.560,00	223.457.440,00
354	SUNGAI TEBELIAN	MERARAI SATU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
355	SUNGAI TEBELIAN	NOBAL	174.780.000,00	174.780.000,00	2.194.080,00	172.585.920,00
356	SUNGAI TEBELIAN	PENJERNANG	201.480.000,00	201.480.000,00	1.593.320,00	199.886.680,00
357	SUNGAI TEBELIAN	PENJERNANG HULU	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
358	SUNGAI TEBELIAN	PEREMBANG	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
359	SUNGAI TEBELIAN	RANSI DAKAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.716.480,00	223.039.520,00
360	SUNGAI TEBELIAN	RARAI	250.032.000,00	250.032.000,00	3.447.840,00	246.584.160,00
361	SUNGAI TEBELIAN	RIAM KIJANG	201.480.000,00	201.480.000,00	2.298.560,00	199.181.440,00
362	SUNGAI TEBELIAN	SABANG SURAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
363	SUNGAI TEBELIAN	SARAI	201.480.000,00	201.480.000,00	2.350.800,00	199.129.200,00
364	SUNGAI TEBELIAN	SOLAM RAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
365	SUNGAI TEBELIAN	SUNGAI UKOI	250.032.000,00	250.032.000,00	3.134.400,00	246.897.600,00
366	TEMPUNAK	BALAI HARAPAN	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
367	TEMPUNAK	BENUA BARU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.794.840,00	222.961.160,00
368	TEMPUNAK	BENUA KENCANA	199.056.000,00	199.056.000,00	1.828.400,00	197.227.600,00
369	TEMPUNAK	GURUNG MALI	225.756.000,00	225.756.000,00	2.612.000,00	223.144.000,00
370	TEMPUNAK	JAYA MENTARI	298.584.000,00	298.584.000,00	3.761.280,00	294.822.720,00
371	TEMPUNAK	KENYABUR BARU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
372	TEMPUNAK	KUALA TIGA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
373	TEMPUNAK	KUPAN JAYA	250.032.000,00	250.032.000,00	2.977.680,00	247.054.320,00
374	TEMPUNAK	MENGGURAT BARU	250.032.000,00	250.032.000,00	2.272.440,00	247.759.560,00
375	TEMPUNAK	MENSIAP BARU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.291.120,00	271.016.880,00
376	TEMPUNAK	MENSIAP JAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
377	TEMPUNAK	MERTI JAYA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
378	TEMPUNAK	NANGA TEMPUNAK	274.308.000,00	274.308.000,00	3.134.400,00	271.173.600,00
379	TEMPUNAK	PAGAL BARU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.134.400,00	271.173.600,00
380	TEMPUNAK	PANGKAL BARU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
381	TEMPUNAK	PEKULAI BERSATU	201.480.000,00	201.480.000,00	2.115.720,00	199.364.280,00
382	TEMPUNAK	PERIBANG BARU	247.608.000,00	247.608.000,00	2.664.240,00	244.943.760,00
383	TEMPUNAK	PUDAU BERSATU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.403.040,00	223.352.960,00
384	TEMPUNAK	PULAU JAYA	274.308.000,00	274.308.000,00	2.977.680,00	271.330.320,00
385	TEMPUNAK	REPAK SARI	274.308.000,00	274.308.000,00	2.820.960,00	271.487.040,00
386	TEMPUNAK	RIAM BATU	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
387	TEMPUNAK	SUKA JAYA	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
388	TEMPUNAK	SUNGAI BULUH	225.756.000,00	225.756.000,00	2.403.040,00	223.352.960,00
389	TEMPUNAK	TANJUNG PERADA	225.756.000,00	225.756.000,00	2.820.960,00	222.935.040,00
390	TEMPUNAK	TEMPUNAK KAPUAS	201.480.000,00	201.480.000,00	2.507.520,00	198.972.480,00
391	TEMPUNAK	TINUM BARU	274.308.000,00	274.308.000,00	3.447.840,00	270.860.160,00
		<b>Jumlah Peserta</b>	<b>91.450.896.000,00</b>	<b>91.450.896.000,00</b>	<b>1.019.906.880,00</b>	<b>90.430.989.120,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	PENDAPATAN							PLL	TOTAL PENDAPATAN
				DANA DESA	ADD SILTAP	ADD BPJS	ADD TPBPD	DBH PAJAK	DBH RETRIBUSI			
1	6105152022	Bukai Tukun	Ambalau	944.874.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.229.014.400,00	
2	6105152021	Bukit Tinggi	Ambalau	711.584.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		995.724.400,00	
3	6105152006	Buntut Pimpin	Ambalau	1.271.031.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.628.392.664,00	
4	6105152012	Buntut Purun	Ambalau	911.261.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	16.899.771,00	1.060.472,00		1.221.897.271,00	
5	6105152009	Buntut Sabon	Ambalau	852.488.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.136.628.400,00	
6	6105152019	Dahtah Bungai	Ambalau	872.951.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.157.091.400,00	
7	6105152032	Deme	Ambalau	921.644.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.230.191.488,00	
8	6105152031	Jengkarang	Ambalau	1.193.624.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.477.764.400,00	
9	6105152007	Kepala Jungai	Ambalau	1.306.230.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.590.370.400,00	
10	6105152029	Kolangan Juoi	Ambalau	1.016.792.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.300.932.400,00	
11	6105152027	Korong Daso	Ambalau	1.083.692.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	20.001.108,00	1.255.082,00		1.373.217.130,00	
12	6105152020	Lunjan Tingang	Ambalau	880.265.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	23.337.897,00	1.464.468,00		1.197.743.393,00	
13	6105152028	Luting Mingan	Ambalau	976.650.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.260.790.400,00	
14	6105152018	Mensuang	Ambalau	966.886.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.251.026.400,00	
15	6105152002	Nanga Ambalau	Ambalau	1.042.911.000,00	174.780.000,00	9.044.760,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.300.207.220,00	
16	6105152001	Nanga Kemangai	Ambalau	1.070.874.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	28.083.782,00	1.762.275,00		1.368.988.997,00	
17	6105152010	Nanga Keremoi	Ambalau	1.279.739.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	23.803.302,00	1.493.673,00		1.597.712.003,00	
18	6105152003	Nanga Kesange	Ambalau	1.155.745.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.439.885.400,00	
19	6105152004	Nanga Menakon	Ambalau	985.472.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	22.186.248,00	1.392.201,00		1.326.133.565,00	
20	6105152011	Nanga Menantak	Ambalau	1.209.947.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	18.309.350,00	1.148.924,00		1.522.081.302,00	
21	6105152014	Nanga Mentomoi	Ambalau	791.998.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.076.138.400,00	
22	6105152033	Nanga Pahangan	Ambalau	933.853.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	16.153.520,00	1.013.644,00		1.219.289.104,00	
23	6105152030	Nanga Rade	Ambalau	1.038.111.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.322.251.400,00	
24	6105152013	Nanga Sakai	Ambalau	1.375.414.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.753.988.832,00	
25	6105152005	Nanga Sake	Ambalau	989.732.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	20.807.224,00	1.305.667,00		1.304.520.919,00	
26	6105152017	Nanga Ukai	Ambalau	751.671.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.035.811.400,00	
27	6105152023	Nusa Koring	Ambalau	969.393.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.253.533.400,00	
28	6105152026	Patih Jepara	Ambalau	975.398.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.259.538.400,00	
29	6105152025	Pulou Sabhang	Ambalau	841.428.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	18.928.787,00	1.187.795,00		1.129.813.522,00	
30	6105152024	Purut Beribit	Ambalau	952.865.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.237.005.400,00	
31	6105152016	Riam Sabon	Ambalau	786.535.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.070.675.400,00	
32	6105152015	Sungai Tambun	Ambalau	829.857.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.113.997.400,00	
33	6105152008	Tanjung Andan	Ambalau	905.945.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.190.085.400,00	
34	6105212001	Ampar Bedang	Binjai Hulu	1.085.494.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	15.116.516,00	948.571,00		1.443.049.291,00	
35	6105212004	Binjai Hilir	Binjai Hulu	764.618.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	15.204.554,00	954.096,00		1.119.072.934,00	
36	6105212005	Binjai Hulu	Binjai Hulu	762.391.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	93.351.002,00	5.857.836,00		1.224.303.210,00	
37	6105212007	Dak Jaya	Binjai Hulu	834.073.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	98.226.142,00	6.163.754,00		1.249.915.000,00	
38	6105212009	Empaka Kabiau Raya	Binjai Hulu	1.028.708.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.337.255.488,00	
39	6105212008	Mensiku	Binjai Hulu	825.074.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	50.308.964,00	3.156.920,00		1.144.371.732,00	
40	6105212011	Simba Raya	Binjai Hulu	721.784.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	34.575.690,00	2.169.647,00		1.026.798.277,00	
41	6105212006	Sungai Risap	Binjai Hulu	704.267.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	52.801.020,00	3.313.298,00		1.077.464.434,00	
42	6105212010	Sungai Risap Mensiku Bersatu	Binjai Hulu	713.274.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	35.221.244,00	2.210.156,00		1.043.381.428,00	
43	6105212003	Telaga Dua	Binjai Hulu	712.024.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	64.204.426,00	4.028.869,00		1.097.340.411,00	
44	6105212002	Telaga Satu	Binjai Hulu	884.725.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	15.069.990,00	945.652,00		1.239.036.926,00	
45	6105072023	Apin Baru	Dedai	1.063.885.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.396.839.576,00	
46	6105072009	Baras	Dedai	837.062.000,00	247.608.000,00	9.438.024,00	57.600.000,00	15.027.194,00	942.966,00		1.167.678.184,00	
47	6105072029	Batu Landung	Dedai	896.624.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	20.281.900,00	1.272.702,00		1.186.447.542,00	
48	6105072025	Belinyuk Sibau	Dedai	657.584.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		966.131.488,00	
49	6105072019	Dedai Kanan	Dedai	747.832.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.101.999.744,00	
50	6105072008	Empaci	Dedai	770.525.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	29.962.279,00	1.880.152,00		1.165.070.803,00	
51	6105072014	Emparu Baru	Dedai	795.284.000,00	298.584.000,00	16.139.628,00	93.600.000,00	15.155.900,00	951.042,00		1.219.714.570,00	
52	6105072003	Gandis	Dedai	825.172.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.203.746.832,00	
53	6105072021	Gandis Hulu	Dedai	676.286.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	19.347.778,00	1.214.086,00		989.523.892,00	
54	6105072022	Hulu Dedai	Dedai	820.549.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	24.945.770,00	1.565.363,00		1.139.736.161,00	
55	6105072024	Jangkang	Dedai	692.061.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	15.101.404,00	947.623,00		976.378.967,00	
56	6105072011	Kumpang	Dedai	926.578.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	45.409.158,00	2.849.454,00		1.291.919.728,00	
57	6105072015	Lundang Baru	Dedai	761.431.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.088.754.564,00	
58	6105072013	Manaong Baru	Dedai	728.558.000,00	199.056.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	15.364.778,00	964.150,00		1.011.125.132,00	
59	6105072012	Mangat Baru	Dedai	754.019.000,00	274.308.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.111.118.488,00	
60	6105072031	Manyam	Dedai	642.575.000,00	225.756.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	15.122.326,00	948.936,00		951.178.110,00	
61	6105072026	Mengkirai Jaya	Dedai	700.695.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	34.818.855,00	2.184.906,00		1.005.967.701,00	
62	6105072018	Meremplit Baru	Dedai	731.514.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	73.726.781,00	4.626.405,00		1.102.543.214,00	
63	6105072002	Nanga Dedai	Dedai	721.816.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.003.519.308,00	
64	6105072001	Nanga Jetak	Dedai	822.715.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	31.350.050,00	1.967.236,00		1.194.328.570,00	
65	6105072010	Pangkadan Sungai Rupa	Dedai	936.461.000,00	250.032.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.290.759.832,00	

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	PENDAPATAN							PLL	TOTAL PENDAPATAN
				DANA DESA	ADD SILTAP	ADD BPJS	ADD TPBPD	DBH PAJAK	DBH RETRIBUSI			
66	6105072006	Pengkadan Baru	Dedai	830.911.000,00	274.308.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	23.532.553,00	1.476.683,00		1.197.279.352,00	
67	6105072016	Penyak Lalang	Dedai	768.261.000,00	223.332.000,00	9.306.936,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.074.371.396,00	
68	6105072005	Riguk	Dedai	1.041.372.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	27.901.316,00	1.750.826,00		1.339.293.082,00	
69	6105072030	Samak	Dedai	651.310.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	27.453.388,00	1.722.718,00		948.755.046,00	
70	6105072004	Sungai Mali	Dedai	751.358.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	19.907.336,00	1.249.200,00		1.083.966.640,00	
71	6105072020	Sungai Tapang	Dedai	938.702.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	26.983.701,00	1.693.245,00		1.260.054.974,00	
72	6105072028	Tanjung	Dedai	961.388.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	41.618.510,00	2.611.588,00		1.273.887.038,00	
73	6105072007	Taok	Dedai	721.579.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	44.747.284,00	2.807.921,00		1.034.966.053,00	
74	6105072027	Terusan	Dedai	612.586.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		896.726.400,00	
75	6105072017	Umin Jaya	Dedai	730.451.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	15.087.570,00	946.755,00		1.063.568.441,00	
76	6105082041	Batu Netak	Kayan Hilir	715.693.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	16.962.082,00	1.064.382,00		1.026.395.492,00	
77	6105082027	Begandang Mal	Kayan Hilir	908.553.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.192.693.400,00	
78	6105082021	Bukit Segaloh	Kayan Hilir	990.972.000,00	298.584.000,00	9.713.292,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.372.740.752,00	
79	6105082033	Buluk Jegara	Kayan Hilir	716.238.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.024.785.488,00	
80	6105082034	Buluk Panjang	Kayan Hilir	919.275.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	18.599.022,00	1.167.101,00		1.231.717.151,00	
81	6105082022	Engkerangan	Kayan Hilir	948.840.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.327.414.832,00	
82	6105082039	Ipho Emang	Kayan Hilir	724.185.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	20.212.804,00	1.268.366,00		1.062.749.286,00	
83	6105082002	Jambu	Kayan Hilir	789.946.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.147.307.664,00	
84	6105082017	Jaya Sakti	Kayan Hilir	818.195.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.151.149.576,00	
85	6105082020	Karya Baru	Kayan Hilir	694.264.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	23.413.130,00	1.469.189,00		1.036.229.435,00	
86	6105082038	Kempas Raya	Kayan Hilir	836.736.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	29.049.934,00	1.822.902,00		1.209.099.040,00	
87	6105082011	Kerapa Sepan	Kayan Hilir	762.578.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.071.125.488,00	
88	6105082023	Lalang Inggar	Kayan Hilir	878.344.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.186.891.488,00	
89	6105082019	Landau Beringin	Kayan Hilir	822.468.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.179.829.664,00	
90	6105082029	Lengkong Bindu	Kayan Hilir	957.332.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.265.879.488,00	
91	6105082024	Linggam Permai	Kayan Hilir	739.252.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.047.799.488,00	
92	6105082018	Mekar Mandiri	Kayan Hilir	775.712.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	19.039.124,00	1.194.717,00		1.197.436.045,00	
93	6105082008	Melingkat	Kayan Hilir	842.392.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	26.270.037,00	1.648.462,00		1.211.800.703,00	
94	6105082031	Mengkirai	Kayan Hilir	816.031.000,00	298.584.000,00	9.713.292,00	57.600.000,00	26.115.853,00	1.638.787,00		1.209.682.932,00	
95	6105082004	Mentunai	Kayan Hilir	981.722.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.339.083.664,00	
96	6105082043	Monbai Begununk	Kayan Hilir	742.398.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.050.945.488,00	
97	6105082030	Nanga Lidau	Kayan Hilir	692.784.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	24.713.995,00	1.550.819,00		1.036.131.930,00	
98	6105082001	Nanga Mau	Kayan Hilir	861.264.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	15.408.352,00	966.884,00		1.240.342.608,00	
99	6105082009	Nanga Tikan	Kayan Hilir	763.227.000,00	298.584.000,00	9.713.292,00	57.600.000,00	33.223.157,00	2.084.775,00		1.164.432.224,00	
100	6105082026	Natai Lesung	Kayan Hilir	727.411.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	19.876.009,00	1.247.232,00		1.065.617.357,00	
101	6105082006	Natai Tebedak	Kayan Hilir	1.023.619.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	21.117.786,00	1.325.155,00		1.338.737.969,00	
102	6105082042	Neran Baya	Kayan Hilir	734.980.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.043.527.488,00	
103	6105082007	Nvangkong	Kayan Hilir	772.638.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.129.999.664,00	
104	6105082013	Pakak	Kayan Hilir	832.418.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	21.883.068,00	1.373.177,00		1.197.164.449,00	
105	6105082016	Paoh Desa	Kayan Hilir	748.134.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	37.694.966,00	2.365.383,00		1.080.870.377,00	
106	6105082010	Pelaik	Kayan Hilir	687.055.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		971.195.400,00	
107	6105082012	Sungai Buaya	Kayan Hilir	1.030.572.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.314.712.400,00	
108	6105082036	Sungai Emang	Kayan Hilir	753.051.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.086.005.576,00	
109	6105082015	Sungai Garong	Kayan Hilir	1.025.032.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	23.547.863,00	1.477.644,00		1.367.140.623,00	
110	6105082025	Sungai Menuang	Kayan Hilir	1.043.773.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.376.727.576,00	
111	6105082037	Sungai Meraya	Kayan Hilir	758.336.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.066.883.488,00	
112	6105082040	Sungai Pengga	Kayan Hilir	697.223.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		981.363.400,00	
113	6105082028	Sungai Ranap	Kayan Hilir	736.605.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.045.152.488,00	
114	6105082014	Sungai Sintang	Kayan Hilir	1.028.597.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	25.270.980,00	1.585.770,00		1.396.943.954,00	
115	6105082032	Tanjung Keliling	Kayan Hilir	722.707.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	21.657.895,00	1.359.047,00		1.013.992.882,00	
116	6105082035	Tanjung Putar	Kayan Hilir	672.798.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	21.177.416,00	1.328.897,00		987.980.341,00	
117	6105082003	Tertung Mau	Kayan Hilir	752.343.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	23.986.175,00	1.505.148,00		1.094.917.439,00	
118	6105082005	Tuguk	Kayan Hilir	777.032.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	21.733.254,00	1.363.776,00		1.141.619.234,00	
119	6105092021	Buluh Merindu	Kayan Hulu	1.101.798.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.945.100,00	937.815,00		1.434.764.031,00	
120	6105092022	Empakan	Kayan Hulu	829.978.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	24.214.164,00	1.519.454,00		1.148.387.646,00	
121	6105092023	Emponyang	Kayan Hulu	721.678.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.030.225.488,00	
122	6105092006	Entogong	Kayan Hulu	729.447.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	29.852.087,00	1.873.238,00		1.053.848.353,00	
123	6105092031	Kebarau	Kayan Hulu	916.455.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	26.527.732,00	1.664.635,00		1.212.916.307,00	
124	6105092027	Kerapuk Jaya	Kayan Hulu	970.014.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.278.561.488,00	
125	6105092026	Landau Bara	Kayan Hulu	999.959.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	30.075.660,00	1.887.267,00		1.349.005.043,00	
126	6105092009	Lintang Tambuk	Kayan Hulu	830.997.000,00	247.608.000,00	9.438.024,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.161.514.484,00	
127	6105092019	Mapan Jaya	Kayan Hulu	931.284.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	21.323.882,00	1.338.087,00		1.222.214.909,00	
128	6105092028	Merah Arai	Kayan Hulu	796.745.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.129.699.576,00	
129	6105092024	Merahau Permai	Kayan Hulu	806.344.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.114.891.488,00	
130	6105092012	Nanga Abai	Kayan Hulu	1.132.524.000,00	247.608.000,00	9.438.024,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.463.041.484,00	
131	6105092013	Nanga Laar	Kayan Hulu	840.114.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	28.630.877,00	1.796.606,00		1.136.373.331,00	
132	6105092010	Nanga Masau	Kayan Hulu	821.531.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.154.485.576,00	
133	6105092015	Nanga Oran	Kayan Hulu	1.105.431.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.945.100,00	937.815,00		1.462.804.119,00	
134	6105092002	Nanga Payak	Kayan Hulu	727.259.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.035.806.488,00	
135	6105092030	Nanga Tampang	Kayan Hulu	1.084.077.000,00	225.756.000							

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	PENDAPATAN							PLL	TOTAL PENDAPATAN
				DANA DESA	ADD SILTAP	ADD BPJS	ADD TPBPD	DBH PAJAK	DBH RETRIBUSI			
136	6105092001	Nanga Tebidah	Kayan Hulu	698.702.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	25.783.112,00	1.617.907,00		1.043.186.135,00	
137	6105092007	Nanga Tonggoi	Kayan Hulu	830.917.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.163.871.576,00	
138	6105092004	Nanga Toran	Kayan Hulu	1.022.361.000,00	298.584.000,00	9.713.292,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.404.129.752,00	
139	6105092011	Nanga Ungai	Kayan Hulu	841.677.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.123.380.308,00	
140	6105092017	Nangkak Lestari	Kayan Hulu	1.134.110.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	23.124.998,00	1.451.109,00		1.451.362.135,00	
141	6105092014	Riam Muntik	Kayan Hulu	1.143.962.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.428.102.400,00	
142	6105092005	Riam Panjang	Kayan Hulu	845.877.000,00	322.860.000,00	9.844.380,00	57.600.000,00	26.949.279,00	1.691.085,00		1.264.821.744,00	
143	6105092025	Tanah Merah	Kayan Hulu	1.104.087.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.437.041.576,00	
144	6105092003	Tanjung Bunga	Kayan Hulu	712.772.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.021.319.488,00	
145	6105092008	Tanjung Lalau	Kayan Hulu	816.721.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	18.692.529,00	1.172.968,00		1.129.262.525,00	
146	6105092020	Tanjung Miru	Kayan Hulu	811.322.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.095.462.400,00	
147	6105092029	Tapang Manua	Kayan Hulu	858.668.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	21.231.038,00	1.332.262,00		1.173.907.328,00	
148	6105092016	Tonak Goneh	Kayan Hulu	717.215.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.001.355.400,00	
149	6105092018	Topan Nanga	Kayan Hulu	756.766.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.065.313.488,00	
150	6105192004	Baning Panjang	Kelam Permai	785.454.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	15.130.755,00	949.465,00		1.164.237.592,00	
151	6105192006	Bengkuang	Kelam Permai	849.159.000,00	223.332.000,00	9.306.936,00	57.600.000,00	24.332.268,00	1.526.866,00		1.165.257.070,00	
152	6105192005	Ensaid Panjang	Kelam Permai	981.096.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	33.980.314,00	2.132.287,00		1.334.291.717,00	
153	6105192011	Gemba Raya	Kelam Permai	1.005.081.000,00	322.860.000,00	9.844.380,00	57.600.000,00	34.369.594,00	2.156.714,00		1.431.911.688,00	
154	6105192012	Karya Jaya Bhakti	Kelam Permai	780.824.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	15.538.399,00	975.045,00		1.114.420.560,00	
155	6105192003	Kebong	Kelam Permai	722.032.000,00	347.136.000,00	13.188.636,00	75.600.000,00	21.447.378,00	1.345.840,00		1.180.749.854,00	
156	6105192017	Kelam Sejahtera	Kelam Permai	722.670.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	29.301.639,00	1.838.697,00		1.070.893.452,00	
157	6105192014	Landau Kodam	Kelam Permai	694.315.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	22.022.754,00	1.381.942,00		1.010.395.724,00	
158	6105192013	Mandiri Jaya	Kelam Permai	850.129.000,00	298.584.000,00	9.713.292,00	57.600.000,00	14.944.602,00	938.034,00		1.231.912.928,00	
159	6105192002	Merpak	Kelam Permai	725.758.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	16.410.416,00	1.029.764,00		1.084.688.384,00	
160	6105192001	Nanga Lebang	Kelam Permai	929.140.000,00	223.332.000,00	9.306.936,00	57.600.000,00	27.998.042,00	1.756.895,00		1.249.133.873,00	
161	6105192007	Pelimping	Kelam Permai	806.465.000,00	347.136.000,00	9.975.468,00	57.600.000,00	16.536.986,00	1.037.707,00		1.238.751.161,00	
162	6105192010	Sepan Lebang	Kelam Permai	947.101.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	47.972.383,00	3.010.298,00		1.290.759.709,00	
163	6105192015	Sungai Labi	Kelam Permai	827.984.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	33.847.142,00	2.123.930,00		1.181.038.188,00	
164	6105192016	Sungai Lais	Kelam Permai	757.688.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	27.857.782,00	1.748.094,00		1.079.969.904,00	
165	6105192009	Sungai Maram	Kelam Permai	877.755.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	23.122.655,00	1.450.962,00		1.240.624.901,00	
166	6105192008	Sungai Pukat	Kelam Permai	781.594.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	21.728.206,00	1.363.459,00		1.097.361.693,00	
167	6105042005	Air Nyuruk	Ketungau Hilir	903.844.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	34.240.240,00	2.148.597,00		1.278.529.121,00	
168	6105042015	Batu Ampar	Ketungau Hilir	1.000.715.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.309.262.488,00	
169	6105042020	Batu Nyadi	Ketungau Hilir	804.787.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	32.287.154,00	2.026.040,00		1.180.590.398,00	
170	6105042012	Baung Sengatap	Ketungau Hilir	852.774.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.206.941.744,00	
171	6105042014	Beluh Mulyo	Ketungau Hilir	917.281.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	52.458.577,00	3.291.810,00		1.325.734.759,00	
172	6105042017	Betung Permai	Ketungau Hilir	979.491.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	26.563.095,00	1.666.851,00		1.300.396.974,00	
173	6105042016	Bukit Sidin Permai	Ketungau Hilir	912.747.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	47.499.259,00	2.980.609,00		1.280.309.984,00	
174	6105042019	Jentawang Hilir	Ketungau Hilir	752.654.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.061.201.488,00	
175	6105042018	Kenuak	Ketungau Hilir	843.842.000,00	223.332.000,00	9.306.936,00	57.600.000,00	14.996.072,00	941.013,00		1.150.018.021,00	
176	6105042022	Lepung Pantak	Ketungau Hilir	709.084.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	21.195.480,00	1.330.030,00		999.878.450,00	
177	6105042025	Maung	Ketungau Hilir	790.340.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.147.701.664,00	
178	6105042024	Mungtuk Kelapa	Ketungau Hilir	698.759.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.007.306.488,00	
179	6105042001	Nanga Ketungau	Ketungau Hilir	699.643.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.980.326,00	940.025,00		1.008.239.379,00	
180	6105042006	Nanga Merkak	Ketungau Hilir	850.119.000,00	322.860.000,00	13.057.548,00	75.600.000,00	14.980.021,00	940.006,00		1.277.556.575,00	
181	6105042008	Nanga Sejirak	Ketungau Hilir	866.383.000,00	225.756.000,00	12.533.196,00	75.600.000,00	36.494.815,00	2.290.074,00		1.219.057.085,00	
182	6105042023	Pampang Dua	Ketungau Hilir	691.300.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		999.847.488,00	
183	6105042021	Ratu Damai	Ketungau Hilir	1.006.240.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	24.831.445,00	1.558.189,00		1.300.898.574,00	
184	6105042013	Semajau Mekar	Ketungau Hilir	920.845.000,00	223.332.000,00	9.306.936,00	57.600.000,00	27.109.680,00	1.701.150,00		1.239.894.766,00	
185	6105042009	Semuntai	Ketungau Hilir	774.437.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	32.446.972,00	2.036.070,00		1.077.188.982,00	
186	6105042010	Senibung	Ketungau Hilir	771.176.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	15.035.277,00	943.473,00		1.128.644.954,00	
187	6105042002	Setungkup	Ketungau Hilir	916.070.000,00	298.584.000,00	12.926.460,00	75.600.000,00	15.218.608,00	954.977,00		1.319.354.045,00	
188	6105042007	Sungai Deras	Ketungau Hilir	1.172.558.000,00	296.160.000,00	12.913.368,00	75.600.000,00	31.651.576,00	1.986.157,00		1.590.869.101,00	
189	6105042004	Sungai Mali	Ketungau Hilir	750.996.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	24.738.075,00	1.552.330,00		1.069.962.433,00	
190	6105042011	Tanjung Baung	Ketungau Hilir	763.209.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	24.699.961,00	1.549.939,00		1.082.134.928,00	
191	6105062017	Bekuan Luyang	Ketungau Hulu	908.361.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.241.315.576,00	
192	6105062020	Embaleh	Ketungau Hulu	898.035.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	25.315.905,00	1.588.589,00		1.193.208.434,00	
193	6105062012	Empunak Tapang Keladan	Ketungau Hulu	889.828.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	21.705.075,00	1.362.007,00		1.205.571.110,00	
194	6105062002	Empura	Ketungau Hulu	847.031.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	36.421.647,00	2.285.482,00		1.154.007.069,00	
195	6105062023	Engkeruh	Ketungau Hulu	731.460.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	28.942.388,00	1.816.154,00		1.030.487.482,00	
196	6105062025	Idai	Ketungau Hulu	775.173.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	21.096.141,00	1.323.796,00		1.065.861.877,00	
197	6105062009	Jasa	Ketungau Hulu	727.304.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	19.702.770,00	1.236.362,00		1.040.919.160,00	
198	6105062014	Muakan Petinggi	Ketungau Hulu	1.043.341.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	25.244.318,00	1.584.097,00		1.338.438.355,00	
199	6105062019	Mungtuk Entawak	Ketungau Hulu	808.391.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.092.531.400,00	
200	6105062007	Nanga Bayan	Ketungau Hulu	899.021.000,00	225.756.000,00	12.533.196,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.228.781.656,00	
201	6105062011	Nanga Bugau	Ketungau Hulu	1.004.155.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	23.080.339,00	1.448.306,00		1.366.979.929,00	
202	6105062015	Nanga Sebahwang	Ketungau Hulu	861.348.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.145.488.400,00	
203	6105062028	Neraci Jaya	Ketungau Hulu	758.018.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.042.158.400,00	
204	6105062008	Rasau	Ketungau Hulu	688.418.000,00	174.780.00							



NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	PENDAPATAN							PLL	TOTAL PENDAPATAN
				DANA DESA	ADD SILTAP	ADD BPJS	ADD TPBPD	DBH PAJAK	DBH RETRIBUSI			
206	6105062003	Sebadak	Ketungau Hulu	851.719.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	24.693.649,00	1.549.542,00		1.143.794.039,00	
207	6105062013	Sebetung Paluk	Ketungau Hulu	1.028.609.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	25.177.443,00	1.579.901,00		1.372.449.460,00	
208	6105062021	Sebuluh	Ketungau Hulu	717.805.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	23.259.696,00	1.459.561,00		1.010.793.197,00	
209	6105062029	Sejawak	Ketungau Hulu	883.143.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.167.283.400,00	
210	6105062016	Sekaih	Ketungau Hulu	844.739.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.177.693.576,00	
211	6105062001	Senaning	Ketungau Hulu	726.814.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	15.050.716,00	944.442,00		1.081.105.442,00	
212	6105062004	Sepiluk	Ketungau Hulu	876.533.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	33.555.086,00	2.105.603,00		1.178.025.537,00	
213	6105062006	Suak Medang	Ketungau Hulu	938.661.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.222.801.400,00	
214	6105062010	Sungai Bugau	Ketungau Hulu	864.431.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	29.902.764,00	1.876.418,00		1.213.293.298,00	
215	6105062024	Sungai Kelik	Ketungau Hulu	964.443.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.297.397.576,00	
216	6105062026	Sungai Mawang	Ketungau Hulu	806.573.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.090.713.400,00	
217	6105062018	Sungai Pisau	Ketungau Hulu	760.281.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	24.117.826,00	1.513.409,00		1.102.995.351,00	
218	6105062005	Sungai Seria	Ketungau Hulu	1.277.960.000,00	199.056.000,00	12.389.016,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.580.876.476,00	
219	6105062027	Ujung Kempas	Ketungau Hulu	799.636.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	22.570.961,00	1.416.342,00		1.091.892.243,00	
220	6105052009	Argo Mulyo	Ketungau Tengah	1.065.473.000,00	271.884.000,00	9.569.112,00	57.600.000,00	27.841.040,00	1.747.043,00		1.434.114.195,00	
221	6105052022	Bakti Senabung	Ketungau Tengah	994.058.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.278.198.400,00	
222	6105052005	Begelang Jaya	Ketungau Tengah	1.537.895.000,00	298.584.000,00	12.926.460,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.940.876.920,00	
223	6105052023	Engkitan	Ketungau Tengah	1.223.905.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.581.266.664,00	
224	6105052013	Gut Jaya Bhakti	Ketungau Tengah	1.676.225.000,00	322.860.000,00	16.270.716,00	93.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		2.124.827.176,00	
225	6105052015	Kayu Dujung	Ketungau Tengah	1.177.440.000,00	298.584.000,00	12.926.460,00	75.600.000,00	32.403.620,00	2.033.348,00		1.598.987.428,00	
226	6105052008	Kerta Sari	Ketungau Tengah	944.132.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	15.441.950,00	968.992,00		1.228.811.882,00	
227	6105052028	Kubu Berangan	Ketungau Tengah	1.061.482.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.394.436.576,00	
228	6105052014	Landau Buaya	Ketungau Tengah	1.188.945.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	47.941.922,00	3.008.387,00		1.532.571.337,00	
229	6105052024	Landau Temiang	Ketungau Tengah	1.335.824.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.619.964.400,00	
230	6105052012	Margahayu	Ketungau Tengah	1.204.545.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	27.997.882,00	1.756.885,00		1.551.382.883,00	
231	6105052018	Mungguk Gelombang	Ketungau Tengah	1.455.755.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.788.709.576,00	
232	6105052019	Mungguk Lawang	Ketungau Tengah	984.692.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	29.809.786,00	1.870.583,00		1.333.455.485,00	
233	6105052020	Nanga Kelapan	Ketungau Tengah	1.320.718.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.653.672.576,00	
234	6105052025	Padung Kumang	Ketungau Tengah	967.327.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.275.874.488,00	
235	6105052003	Panding Jaya	Ketungau Tengah	1.423.715.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.707.855.400,00	
236	6105052007	Panggi Agung	Ketungau Tengah	1.554.159.000,00	298.584.000,00	9.713.292,00	57.600.000,00	29.456.966,00	1.848.444,00		1.951.361.702,00	
237	6105052021	Panggi Ruguk	Ketungau Tengah	878.629.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	22.416.446,00	1.406.646,00		1.170.721.032,00	
238	6105052026	Radin Jaya	Ketungau Tengah	1.314.035.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.646.989.576,00	
239	6105052029	Semaroh	Ketungau Tengah	1.012.944.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.297.084.400,00	
240	6105052027	Senangan Jaya	Ketungau Tengah	872.444.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	18.893.295,00	1.185.566,00		1.160.791.801,00	
241	6105052016	Senangan Kecil	Ketungau Tengah	985.411.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	15.341.384,00	962.682,00		1.340.011.350,00	
242	6105052006	Sumber Sari	Ketungau Tengah	1.861.417.000,00	322.860.000,00	13.057.548,00	75.600.000,00	35.137.653,00	2.204.910,00		2.310.277.111,00	
243	6105052017	Sungai Areh	Ketungau Tengah	1.306.927.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	28.535.964,00	1.790.650,00		1.654.336.730,00	
244	6105052011	Swadaya	Ketungau Tengah	1.912.445.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		2.269.806.664,00	
245	6105052002	Tanjung Sari	Ketungau Tengah	1.421.318.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	26.806.338,00	1.682.115,00		1.742.482.481,00	
246	6105052004	Tirta Karya	Ketungau Tengah	891.511.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	15.134.143,00	949.677,00		1.219.046.924,00	
247	6105052010	Wana Bhakti	Ketungau Tengah	1.412.518.000,00	298.584.000,00	16.139.628,00	93.600.000,00	35.971.578,00	2.257.240,00		1.859.070.446,00	
248	6105052001	Wirayuda	Ketungau Tengah	1.931.217.000,00	274.308.000,00	16.008.540,00	93.600.000,00	15.040.189,00	943.782,00		2.331.117.511,00	
249	6105032026	Bangun	Sepauk	795.243.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	40.177.960,00	2.521.195,00		1.106.211.095,00	
250	6105032022	Bedayan	Sepauk	879.729.000,00	225.756.000,00	15.746.364,00	93.600.000,00	58.433.150,00	3.666.718,00		1.276.931.232,00	
251	6105032014	Bernayau	Sepauk	971.787.000,00	225.756.000,00	12.533.196,00	75.600.000,00	14.945.100,00	937.815,00		1.301.559.111,00	
252	6105032017	Buluh Kuning	Sepauk	719.228.000,00	201.480.000,00	12.402.108,00	57.600.000,00	15.044.902,00	944.077,00		1.024.699.087,00	
253		Bungkong Baru	Sepauk	-	201.480.000,00	653.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		928.140.400,00	
254	6105032008	Ensabang	Sepauk	1.120.297.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.428.844.488,00	
255	6105032020	Gernis Jaya	Sepauk	701.527.000,00	223.332.000,00	15.733.272,00	93.600.000,00	15.131.720,00	949.525,00		1.050.273.517,00	
256	6105032028	Kemantan	Sepauk	765.905.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.074.452.488,00	
257	6105032004	Kenyauk	Sepauk	802.014.000,00	174.780.000,00	9.044.760,00	57.600.000,00	29.390.678,00	1.844.284,00		1.074.673.722,00	
258	6105032025	Landau Panjang	Sepauk	749.294.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	45.846.112,00	2.876.873,00		1.090.693.013,00	
259	6105032005	Lengkenat	Sepauk	1.049.280.000,00	225.756.000,00	12.533.196,00	75.600.000,00	21.294.847,00	1.336.265,00		1.385.800.308,00	
260	6105032037	Limau Bakti	Sepauk	829.847.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.113.987.400,00	
261	6105032009	Mait Hilir	Sepauk	812.127.000,00	223.332.000,00	9.306.936,00	57.600.000,00	66.432.346,00	4.168.673,00		1.172.966.955,00	
262	6105032006	Manis Raya	Sepauk	803.532.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	22.712.739,00	1.425.239,00		1.165.966.262,00	
263	6105032036	Nanga Layung	Sepauk	1.000.934.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.309.481.488,00	
264	6105032013	Nanga Libau	Sepauk	951.783.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	15.408.558,00	966.897,00		1.279.610.559,00	
265	6105032016	Nanga Pari	Sepauk	1.125.631.000,00	298.584.000,00	12.926.460,00	75.600.000,00	40.454.206,00	2.538.528,00		1.555.734.194,00	
266	6105032001	Nanga Sepauk	Sepauk	807.012.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.945.368,00	937.831,00		1.115.571.227,00	
267	6105032021	Paoh Benua	Sepauk	793.881.000,00	271.884.000,00	12.782.280,00	75.600.000,00	73.930.892,00	4.639.211,00		1.232.717.383,00	
268	6105032029	Peninsung	Sepauk	730.587.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	15.102.932,00	947.719,00		1.039.313.679,00	
269	6105032035	Riam Kempadik	Sepauk	1.099.848.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.408.395.488,00	
270	6105032003	Sekubang	Sepauk	868.807.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	47.430.491,00	2.976.294,00		1.206.665.889,00	
271	6105032010	Sekujam Timbai	Sepauk	790.505.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	15.501.815,00	972.749,00		1.072.811.412,00	
272	6105032011	Semuntai	Sepauk	837.749.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.165.072.564,00	
273	6105032030	Sepulut	Sepauk	687.192.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	17.113.496,00	1.073.883,00		1.022.462.495,00	
274	6105032034	Sinar Harapan	Sepauk	823.387.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,					

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	PENDAPATAN							PLL	TOTAL PENDAPATAN
				DANA DESA	ADD SILTAP	ADD BPJS	ADD TPBPD	DBH PAJAK	DBH RETRIBUSI			
276	6105032012	Sirang Setambang	Sepauk	822.213.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	35.880.163,00	2.251.503,00		1.223.048.038,00	
277	6105032027	Sukau Bersatu	Sepauk	836.335.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.169.289.576,00	
278	6105032040	Sungai Jaung	Sepauk	823.109.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.107.249.400,00	
279	6105032024	Sungai Raya	Sepauk	798.402.000,00	225.756.000,00	12.533.196,00	75.600.000,00	15.401.728,00	966.468,00		1.128.659.392,00	
280	6105032032	Sungai Segak	Sepauk	1.045.312.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.378.266.576,00	
281	6105032033	Tanjung Balai	Sepauk	750.027.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.972.674,00	939.545,00		1.058.615.247,00	
282	6105032023	Tanjung Hulu	Sepauk	763.306.000,00	225.756.000,00	15.746.364,00	93.600.000,00	15.423.442,00	967.831,00		1.114.799.637,00	
283	6105032038	Tanjung Mawang	Sepauk	738.758.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.022.898.400,00	
284	6105032002	Tanjung Ria	Sepauk	814.066.000,00	225.756.000,00	15.746.364,00	93.600.000,00	17.269.548,00	1.083.675,00		1.167.521.587,00	
285	6105032019	Tawang Sari	Sepauk	841.258.000,00	223.332.000,00	12.520.104,00	75.600.000,00	70.007.500,00	4.393.016,00		1.227.110.620,00	
286	6105032031	Temawang Bulai	Sepauk	788.003.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	22.294.472,00	1.398.992,00		1.104.372.492,00	
287	6105032018	Temawang Muntai	Sepauk	830.825.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	42.759.253,00	2.683.171,00		1.214.563.708,00	
288	6105032007	Temiang Kapuas	Sepauk	829.107.000,00	201.480.000,00	12.402.108,00	75.600.000,00	21.158.391,00	1.327.703,00		1.141.075.202,00	
289	6105142011	Baras Nabun	Serawai	861.129.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.169.676.488,00	
290	6105142026	Batu Ketebung	Serawai	971.720.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.946.772,00	937.920,00		1.304.687.808,00	
291	6105142003	Bedaha	Serawai	835.927.000,00	223.332.000,00	9.306.936,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.142.037.396,00	
292	6105142004	Begori	Serawai	838.347.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	28.008.686,00	1.757.565,00		1.206.409.535,00	
293	6105142009	Buntut Ponte	Serawai	966.851.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.248.554.308,00	
294	6105142019	Gurung Senghiang	Serawai	996.971.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.329.925.576,00	
295	6105142007	Karya Jaya	Serawai	795.702.000,00	174.780.000,00	9.044.760,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.052.998.220,00	
296	6105142035	Limbun Bernaung Lestari	Serawai	755.761.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.039.901.400,00	
297	6105142028	Mekar Sari	Serawai	694.488.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.027.442.576,00	
298	6105142036	Mensulung Bio	Serawai	729.659.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.038.206.488,00	
299	6105142022	Mentajoi	Serawai	907.656.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	21.426.394,00	1.344.520,00		1.198.695.854,00	
300	6105142015	Merako Jaya	Serawai	909.037.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.263.204.744,00	
301	6105142032	Meroboi	Serawai	1.021.855.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.330.402.488,00	
302	6105142027	Muara Kota	Serawai	693.389.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	15.082.813,00	946.456,00		1.026.501.385,00	
303	6105142023	Nanga Bihe	Serawai	924.225.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.257.179.576,00	
304	6105142012	Nanga Jelundung	Serawai	808.054.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.116.601.488,00	
305	6105142002	Nanga Mentatai	Serawai	806.273.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.114.820.488,00	
306	6105142008	Nanga Riyoi	Serawai	777.541.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.061.681.400,00	
307	6105142031	Nanga Ruhun	Serawai	795.025.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.103.572.488,00	
308	6105142010	Nanga Segulang	Serawai	907.834.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.265.195.664,00	
309	6105142001	Nanga Serawai	Serawai	729.486.000,00	250.032.000,00	19.090.620,00	111.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.126.080.080,00	
310	6105142038	Nanga Tangoi	Serawai	756.412.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.040.552.400,00	
311	6105142024	Nanga Tekungai	Serawai	1.097.240.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.430.194.576,00	
312	6105142030	Nusa Tujuh	Serawai	795.757.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.104.304.488,00	
313	6105142005	Pagar Lebata	Serawai	947.643.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	45.180.853,00	2.835.130,00		1.263.927.923,00	
314	6105142033	Panekasan	Serawai	709.990.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	19.749.055,00	1.239.266,00		1.023.654.349,00	
315	6105142021	Rantau Malam	Serawai	1.141.954.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.474.908.576,00	
316	6105142037	Sabhang Landan	Serawai	688.809.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		972.949.400,00	
317	6105142016	Sawang Senghiang	Serawai	893.449.000,00	298.584.000,00	12.926.460,00	75.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.296.430.920,00	
318	6105142014	Tahai Permai	Serawai	754.800.000,00	201.480.000,00	12.402.108,00	75.600.000,00	20.922.400,00	1.312.895,00		1.066.517.403,00	
319	6105142025	Talian Sahabung	Serawai	1.143.873.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	20.422.252,00	1.281.510,00		1.458.252.790,00	
320	6105142034	Tamakung	Serawai	833.035.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.165.989.576,00	
321	6105142029	Tanjung Baru	Serawai	658.086.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		942.226.400,00	
322	6105142020	Tanjung Harapan	Serawai	1.037.075.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	28.747.184,00	1.803.904,00		1.360.302.116,00	
323	6105142013	Tanjung Raya	Serawai	1.052.442.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.409.803.664,00	
324	6105142018	Teluk Harapan	Serawai	974.506.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	15.017.074,00	942.335,00		1.307.548.525,00	
325	6105142006	Tontang	Serawai	765.897.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.123.258.664,00	
326	6105142017	Tunas Harapan	Serawai	731.938.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	27.810.994,00	1.745.160,00		1.054.170.182,00	
327	6105012014	Anggah Jaya	Sintang	800.032.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	45.858.118,00	2.877.628,00		1.141.443.774,00	
328	6105012007	Baning Kota	Sintang	875.111.000,00	298.584.000,00	16.139.628,00	93.600.000,00	76.248.080,00	4.784.616,00		1.364.467.324,00	
329	6105012028	Jerora Satu	Sintang	729.513.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	27.707.853,00	1.738.686,00		1.211.662.911,00	
330	6105012029	Kebiau Baru	Sintang	673.017.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	17.318.531,00	1.086.750,00		1.008.505.397,00	
331	6105012015	Lalang Baru	Sintang	741.744.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	15.261.326,00	957.658,00		1.050.639.012,00	
332	6105012027	Mail Jampang	Sintang	682.788.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	54.704.500,00	3.432.745,00		1.033.601.273,00	
333	6105012012	Merti Guna	Sintang	819.950.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	51.904.360,00	3.257.032,00		1.216.601.596,00	
334	6105012009	Mungguk Bantok	Sintang	756.847.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.946.738,00	937.918,00		1.065.407.684,00	
335	6105012011	Sungai Ana	Sintang	826.209.000,00	225.756.000,00	15.746.364,00	93.600.000,00	37.442.867,00	2.349.564,00		1.201.103.795,00	
336	6105012013	Tanjung Kelansam	Sintang	1.005.298.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	40.504.788,00	2.541.702,00		1.341.020.518,00	
337	6105012026	Tebing Raya	Sintang	654.849.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		938.989.400,00	
338	6105012010	Teluk Kelansam	Sintang	1.150.408.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	15.379.992,00	965.048,00		1.459.428.168,00	
339	6105012008	Tertung	Sintang	732.219.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	16.352.680,00	1.026.142,00		1.017.866.762,00	
340	6105202025	Balai Agung	Sungai Tebelian	1.033.894.000,00	225.756.000,00	12.533.196,00	75.600.000,00	71.301.468,00	4.474.214,00		1.423.558.878,00	
341	6105202012	Bancoh	Sungai Tebelian	726.195.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	77.912.538,00	4.889.062,00		1.101.672.628,00	
342	6105202009	Baya Betung	Sungai Tebelian	982.868.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	15.248.628,00	956.861,00		1.267.342.429,00	
343	6105202022	Baya Mulya	Sungai Tebelian	621.029.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	40.372.742,00	2.533.416,00		932.204.098,00	
344	6105202010	Bonet Engkabang	Sungai Tebelian	663.107.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	32.514.068,00	2.040.280,00		965.930.288,00	
345	6105202011	Bonet Lama	Sungai Tebelian	782.864.000,00	250.							

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	PENDAPATAN							TOTAL PENDAPATAN
				DANA DESA	ADD SILTAP	ADD BPJS	ADD TPBPD	DBH PAJAK	DBH RETRIBUSI	PLL	
346	6105202007	Gurung Kempadik	Sungai Tebelian	912.246.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	56.053.662,00	3.517.403,00		1.310.113.349,00
347	6105202006	Kajang Baru	Sungai Tebelian	743.355.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	15.382.350,00	965.252,00		1.052.378.630,00
348	6105202026	Kunyai	Sungai Tebelian	736.237.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	41.718.212,00	2.617.845,00		1.048.841.997,00
349	6105202023	Laman Raya	Sungai Tebelian	700.466.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	35.297.533,00	2.214.943,00		1.006.247.416,00
350	6105202015	Lebak Ubah	Sungai Tebelian	887.662.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	15.809.818,00	992.076,00		1.242.760.178,00
351	6105202003	Manter	Sungai Tebelian	756.535.000,00	250.032.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	16.255.942,00	1.020.072,00		1.112.107.298,00
352	6105202016	Melayang Sari	Sungai Tebelian	715.378.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	69.655.045,00	4.370.900,00		1.082.079.973,00
353	6105202005	Merarai Dua	Sungai Tebelian	1.037.104.000,00	225.756.000,00	12.533.196,00	75.600.000,00	15.571.006,00	977.092,00		1.367.541.294,00
354	6105202004	Merarai Satu	Sungai Tebelian	839.663.000,00	225.756.000,00	9.044.760,00	93.600.000,00	91.133.786,00	5.718.705,00		1.264.916.251,00
355	6105202008	Nobal	Sungai Tebelian	704.783.000,00	174.780.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	34.840.418,00	2.186.260,00		983.378.618,00
356	6105202019	Penjernang	Sungai Tebelian	696.796.000,00	201.480.000,00	12.533.196,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		984.280.656,00
357	6105202020	Penjernang Hulu	Sungai Tebelian	838.649.000,00	201.480.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	19.054.595,00	1.195.688,00		1.127.299.311,00
358	6105202013	Perembang	Sungai Tebelian	851.995.000,00	225.756.000,00	12.664.284,00	75.600.000,00	91.999.220,00	5.773.010,00		1.263.787.514,00
359	6105202001	Ransi Dakan	Sungai Tebelian	729.659.000,00	225.756.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	22.643.413,00	1.420.890,00		1.046.268.243,00
360	6105202018	Rarai	Sungai Tebelian	835.047.000,00	250.032.000,00	9.188.940,00	75.600.000,00	85.614.875,00	5.372.389,00		1.260.855.204,00
361	6105202021	Riam Kijang	Sungai Tebelian	652.080.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		936.220.400,00
362	6105202024	Sabang Surai	Sungai Tebelian	704.270.000,00	201.480.000,00	12.533.196,00	57.600.000,00	16.746.292,00	1.050.842,00		993.680.330,00
363	6105202017	Sarai	Sungai Tebelian	712.675.000,00	201.480.000,00	15.877.452,00	57.600.000,00	15.627.308,00	980.624,00		1.004.240.384,00
364	6105202014	Solam Raya	Sungai Tebelian	804.580.000,00	225.756.000,00	15.746.364,00	75.600.000,00	15.501.968,00	972.760,00		1.138.157.092,00
365	6105202002	Sungai Ukoi	Sungai Tebelian	773.635.000,00	250.032.000,00	9.188.940,00	93.600.000,00	74.039.512,00	4.646.027,00		1.205.141.479,00
366	6105022018	Balai Harapan	Tempunak	672.051.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	52.227.933,00	3.277.338,00		1.020.232.299,00
367	6105022010	Benua Baru	Tempunak	1.005.274.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	52.339.490,00	3.284.338,00		1.353.573.856,00
368	6105022017	Benua Kencana	Tempunak	908.132.000,00	199.056.000,00	9.175.848,00	57.600.000,00	37.349.448,00	2.343.702,00		1.213.656.998,00
369	6105022015	Gurung Mali	Tempunak	741.963.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.050.510.488,00
370	6105022024	Jaya Mentari	Tempunak	1.033.768.000,00	298.584.000,00	9.713.292,00	57.600.000,00	28.370.958,00	1.780.296,00		1.429.816.546,00
371	6105022009	Kenyabur Baru	Tempunak	765.107.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	65.651.536,00	4.119.676,00		1.197.581.584,00
372	6105022014	Kuala Tiga	Tempunak	738.085.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.046.632.488,00
373	6105022022	Kupan Jaya	Tempunak	716.419.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	26.558.040,00	1.666.535,00		1.061.726.691,00
374	6105022005	Mengkurat Baru	Tempunak	730.866.000,00	250.032.000,00	9.451.116,00	57.600.000,00	50.515.680,00	3.169.892,00		1.101.634.688,00
375	6105022002	Mensiap Baru	Tempunak	875.538.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	81.204.002,00	5.095.604,00		1.324.540.978,00
376	6105022026	Mensiap Jaya	Tempunak	765.051.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	16.969.480,00	1.064.846,00		1.075.761.354,00
377	6105022016	Merti Jaya	Tempunak	712.366.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.020.913.488,00
378	6105022001	Nanga Tempunak	Tempunak	729.971.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	47.754.550,00	2.996.630,00		1.143.425.552,00
379	6105022008	Pagal Baru	Tempunak	681.974.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	91.232.021,00	5.724.868,00		1.120.421.093,00
380	6105022012	Pangkal Baru	Tempunak	808.843.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	74.270.292,00	4.660.509,00		1.250.477.173,00
381	6105022025	Pekulai Bersatu	Tempunak	704.425.000,00	201.480.000,00	12.651.192,00	75.600.000,00	83.205.972,00	5.221.230,00		1.082.583.394,00
382	6105022006	Peribang Baru	Tempunak	855.054.000,00	247.608.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	23.934.710,00	1.501.918,00		1.194.887.568,00
383	6105022021	Pudau Bersatu	Tempunak	734.404.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	42.927.749,00	2.693.744,00		1.072.701.521,00
384	6105022013	Pulau Jaya	Tempunak	837.049.000,00	274.308.000,00	12.795.372,00	75.600.000,00	45.990.460,00	2.885.932,00		1.248.628.764,00
385	6105022007	Repak Sari	Tempunak	755.665.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	150.038.301,00	9.415.000,00		1.256.608.505,00
386	6105022020	Riam Batu	Tempunak	820.694.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.967.524,00	939.222,00		1.129.276.774,00
387	6105022004	Suka Jaya	Tempunak	764.089.000,00	201.480.000,00	12.402.108,00	75.600.000,00	20.069.272,00	1.259.360,00		1.074.899.740,00
388	6105022023	Sungai Buluh	Tempunak	771.688.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.080.235.488,00
389	6105022003	Tanjung Perada	Tempunak	748.728.000,00	225.756.000,00	9.320.028,00	57.600.000,00	14.934.322,00	937.138,00		1.057.275.488,00
390	6105022019	Tempunak Kapuas	Tempunak	750.794.000,00	201.480.000,00	9.188.940,00	57.600.000,00	37.130.112,00	2.329.938,00		1.058.522.990,00
391	6105022011	Tinun Baru	Tempunak	1.007.274.000,00	274.308.000,00	9.582.204,00	57.600.000,00	74.534.104,00	4.677.063,00		1.427.975.371,00
				<b>342.843.467.000,00</b>	<b>91.450.896.000,00</b>	<b>4.613.768.276,00</b>	<b>24.249.600.000,00</b>	<b>9.732.200.000,00</b>	<b>610.701.835,00</b>	<b>-</b>	<b>473.500.633.111,00</b>



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENENTANG  
KABUPATEN SINTANG**  
Jalan M.Saad No.1 ( 0565 ) 23260  
SINTANG

---

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir pada  
31 Desember 2022**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Jane Elisabeth Wuysang. MT  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jalan M.Saad No.1 (0565) 23260

Untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.;
2. Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi yang terdapat didalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang. telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.  
c. Semua Dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang. Sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**Sintang, 30 Maret 2023**

**Dr. Jane Elisabeth Wuysang. MT**  
Direktur

Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Laporan Posisi Keuangan  
Per 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Bank	<i>III.3</i>	7,838,098,016.49	7,629,094,165.49
Piutang Usaha Bersih	<i>III.4.5</i>	1,714,281,166.02	1,880,515,060.47
Persediaan	<i>III.6</i>	906,596,203.50	281,269,407.50
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>10,458,975,386.01</b>	<b>9,790,878,633.46</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap	<i>III.7</i>	45,270,921,622.36	44,869,347,181.05
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>45,270,921,622.36</b>	<b>44,869,347,181.05</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>55,729,897,008.37</b>	<b>54,660,225,814.51</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Imbalan Pasca Kerja	<i>III.8</i>	552,163,463.00	485,102,781.00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>552,163,463.00</b>	<b>485,102,781.00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Perusahaan	<i>III.9</i>	3,852,209,670.00	3,852,209,670.00
Modal Hibah	<i>III.10</i>	3,146,128,976.00	3,146,128,976.00
Penyertaan Pemerintah Belum Ditetapkan	<i>III.11</i>	15,535,901,799.00	15,535,901,799.00
Penyertaan Pemerintah Daerah	<i>III.12</i>	90,068,270,391.00	85,568,270,391.00
Surplus (Defisit)	<i>III.13</i>	(57,424,777,290.63)	(53,927,387,802.49)
<b>Jumlah Ekuitas Bersih</b>		<b>55,177,733,545.37</b>	<b>54,175,123,033.51</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>55,729,897,008.37</b>	<b>54,660,225,814.51</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Laporan Laba - Rugi  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>III.14.15</b>	19,512,355,069.00	18,401,358,658.00
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban operasional dan administrasi	<b>III.16</b>	24,193,170,061.13	20,267,264,598.51
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>(4,680,814,992.13)</b>	<b>(1,865,905,940.51)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Lain-Lain	<b>III.17</b>	1,748,759,866.98	1,399,348,227.11
Beban lain-lain	<b>III.18</b>	565,334,363.00	509,060,781.00
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>		<b>1,183,425,503.98</b>	<b>890,287,446.11</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK</b>		<b>(3,497,389,488.15)</b>	<b>(975,618,494.40)</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Laporan Perubahan Ekuitas  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

	Modal Perusahaan	Modal Hibah	Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	Penyertaan Pemerintah Daerah	Surplus (Defisit)	Jumlah Ekuitas
<b>Saldo Per 1 Januari 2021</b>	<b>3,852,209,670.00</b>	<b>3,146,128,976.00</b>	<b>15,535,901,799.00</b>	<b>85,568,270,391.00</b>	<b>(52,951,769,308.10)</b>	<b>55,150,741,527.90</b>
Penambahan Laba (Rugi) Tahun Berjalan					(975,618,494.39)	(975,618,494.39)
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>3,852,209,670.00</b>	<b>3,146,128,976.00</b>	<b>15,535,901,799.00</b>	<b>85,568,270,391.00</b>	<b>(53,927,387,802.49)</b>	<b>54,175,123,033.51</b>
Penambahan Laba (Rugi) Tahun Berjalan				4,500,000,000.00	(3,497,389,488.15)	4,500,000,000.00 (3,497,389,488.15)
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>3,852,209,670.00</b>	<b>3,146,128,976.00</b>	<b>15,535,901,799.00</b>	<b>90,068,270,391.00</b>	<b>(57,424,777,290.64)</b>	<b>55,177,733,545.36</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Laporan Arus Kas  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasional :</b>		
<b>Rugi Tahun Berjalan</b>	(3,497,389,488.15)	(975,618,494.40)
Penyesuaian :		
Penyisihan Piutang	372,683,733.45	359,172,773.94
Penyusutan aset tetap	6,762,463,975.70	5,372,725,645.54
<b>(Kenaikan) Penurunan Aktivitas Operasional</b>		
Piutang Usaha	(206,449,839.00)	(799,065,099.00)
Persediaan	(625,326,796.00)	101,945,939.50
<b>Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional</b>		
kewajiban imbalan kerja	67,060,682.00	485,102,781.00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<u><b>2,873,042,268.00</b></u>	<u><b>4,544,263,546.58</b></u>
<b>Arus Kas dari Kegiatan Investasi :</b>		
<b>(Kenaikan) Penurunan dari Aktivitas Investasi</b>		
Aset Tetap	(7,164,038,417.00)	(2,147,614,357.50)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<u><b>(7,164,038,417.00)</b></u>	<u><b>(2,147,614,357.50)</b></u>
<b>Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan :</b>		
<b>Kenaikan (Penurunan) Pendanaan Operasional</b>		
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang	4,500,000,000.00	
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>4,500,000,000.00</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>209,003,851.00</b>	<b>2,396,649,189.08</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<u><b>7,629,094,165.47</b></u>	<u><b>5,232,444,976.39</b></u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<u><u><b>7,838,098,016.47</b></u></u>	<u><u><b>7,629,094,165.47</b></u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

---

**I. Penjelasan Umum**

**Sejarah Singkat**

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Senentang Kabupaten Sintang pertama didirikan dengan status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 1981 tanggal 11 November 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, sedangkan operasionalnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang Nomor 98 Tahun 1989 tanggal 29 April 1989 yang berlaku surut per 15 Desember 1988. Perusahaan mengusahakan penyediaan dan pelayanan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.

Usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- Mendapatkan air baku yang merupakan bahan pokok produksi air.
- Mengolah air baku tersebut menjadi air yang siap digunakan.
- Mendistribusikan air yang telah diolah kepada para pelanggan, baik umum, instansi pemerintahan/TNI-POLRI, maupun perorangan.

**II. Kebijakan Akuntansi**

Pelaksanaan administrasi pembukuan dan system pengendalian intern Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) TIRTA SENENTANG Kabupaten Sintang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (laporan laba/rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (neraca) dilakukan dengan metode akrual (*Accrual Basis*).

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun diluar usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada masa prestasi dinikmati yaitu :

- (1) Pendapatan Penjualan Air  
Pendapatan Penjualan Air diakui, dicatat, dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai.
- (2) Pendapatan Sambungan Baru dan Penjualan Non-Air  
Pendapatan Sambungan Baru dan Penjualan Non-Air diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - Jika calon pelanggan membayar kewajiban secara tunai maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayaran.
  - Jika calon pelanggan membayar dengan cara mencicil, maka pengakuan pendapatan dan piutang dilakukan pada saat dokumen tagihan diterbitkan sesuai jatuh temponya.
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat diterima.
- (4) Biaya-biaya diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi, sedangkan untuk pembebanan biaya yang bersifat periodic dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, untuk keperluan pisah batas (*cut-off*) periode akuntansi, beban – beban yang

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

---

telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui pasti jumlahnya, dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

- (5) Penerimaan dana meter dari pelanggan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan meter tidak diakui sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban dalam perkiraan cadangan dana meter.

Pada kelompok pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha mengakui pendapatan subsidi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang kemudian disalurkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 690/1259/KEP-DPRKP/2022 tentang Penetapan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang. Berdasarkan surat keputusan tersebut, pencatatan akuntansi di dalam laporan keuangan disajikan pada bagian pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha.

## **2. Penilaian Piutang**

Piutang disajikan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan dan untuk piutang yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak. Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang pada akhir tahun didasarkan atas persentase sisa piutang pada tiga tahun terakhir.

Piutang berumur diatas 12 bulan s/d 24 bulan diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu, sedangkan piutang yang berumur diatas 24 bulan diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan dapat diusulkan ke Badan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih dicatat secara ekstrakomtabel dan tetap diusahakan penagihannya. Jika terdapat pendapatan pembayaran atas piutang-piutang yang telah dihapus, jumlah tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Penyisihan piutang tersebut dikecualikan bagi tagihan kepada Instansi Pemerintah termasuk TNI / Polri.

## **3. Pencatatan dan Penilaian Persediaan**

Yang merupakan persediaan adalah persediaan bahan operasi (bahan kimia dan bahan operasi lainnya) sedangkan water meter, pipa dan accesoriesnya merupakan bahan instalasi. Metode pencatatan bahan instalasi dan bahan kimia adalah Perpetual Inventory Method dan pembebanan pemakaiannya sebagai biaya dilakukan dengan metode Rata-Rata.

Metode pencatatan bahan operasi yang sifatnya merupakan barang habis pakai pencatatannya menggunakan Physical Inventory Method. Pembelian / Penerimaan barang dibukukan langsung sebagai biaya tanpa ditampung lebih dulu dalam rekening persediaan. Pada akhir periode tahun buku terhadap jumlah yang tersisa dilakukan stock opname dan nilainya dibukukan kembali sebagai saldo awal tahun buku berikutnya.

Barang / bahan yang dibeli untuk keperluan investasi termasuk pemeliharaan instalasi dikelompokkan kedalam persediaan instalasi. Persediaan ini digolongkan sebagai Aktiva Lain-Lain.

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

---

Pembebanan pemakaian bahan instalasi dan bahan kimia ke dalam pos biaya dicatat dengan metode *First In First Out (FIFO)*.

#### **4. Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan/harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aktiva tetap tersebut. Aset tetap disusutkan dengan metode yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu UU Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Pengelompokan Harta Berwujud dan Bangunan. Besarnya penyusutan untuk tiap golongan aktiva tetap adalah sebagai berikut :

<b>Kelompok Aset</b>	<b>Penyusutan / Tahun (%)</b>
I. Bukan Bangunan	
Kelompok I	50
Kelompok II	25
Kelompok III	12,5
Kelompok IV	10
II. Bangunan	
Permanen	5
Tidak Permanen	10

Penyusutan dihitung dari nilai buku, kecuali untuk golongan bangunan yang dihitung dari nilai perolehan.

#### **5. Pengeluaran Barang Modal dan Biaya**

Pengeluaran yang dapat dikategorikan dalam pengertian pengeluaran barang modal/aktiva tetap adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian barang berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Barang-barang modal tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha yang normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan jumlah diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pembelian barang – barang tertentu yang harga satuannya di bawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam jumlah lebih dari 1 (satu) buah, sehingga melampaui nilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibukukan sebagai barang modal. Selanjutnya pembelian dikemudian hari untuk menggantikan satuan-satuan yang rusak, dibukukan sebagai pengeluaran biaya dan menjadi beban tahun berjalan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk penggantian komponen-komponen mesin/instalasi yang bersifat pemeliharaan rutin, dibukukan sebagai biaya. Namun apabila perbaikan/penggantian komponen tersebut memberi tambahan masa dan/atau nilai manfaat dari aktiva tersebut, dan nilainya melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti tersebut diatas, dibukukan sebagai pengurang (debit) akumulasi penyusutan.

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

---

Jika terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk memindahkan instalasi dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud agar instalasi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka biaya pemindahannya dibukukan sebagai beban biaya tahun berjalan. Khusus untuk pemindahan pipa-pipa distribusi yang harus dilakukan karena faktor-faktor di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya, maka nilai buku dari instalasi yang digantikan harus dikeluarkan dari harga perolehannya. Demikian juga untuk pengeluaran-pengeluaran renovasi, dianut perlakuan akuntansi yang sama.

**6. Cadangan Dana Meter**

Penerimaan dana meter dari pelanggan, yang dimaksudkan untuk pemeliharaan meter air pelanggan, diakui sebagai kewajiban dalam akun "Cadangan Dana Meter". Akun ini dibentuk sejak tahun 2001, sedangkan tahun sebelumnya penerimaan dana meter diakui sebagai pendapatan usaha.

**7. Beban Ditangguhkan dan Amortisasi**

Pengeluaran-pengeluaran yang belum diakui dan dilaporkan sebagai beban dalam periode terjadinya pengeluaran karena memberikan manfaat untuk masa yang akan datang, dibukukan kedalam akun "Beban yang Ditangguhkan" yang disajikan dalam kelompok "Aset Lain-Lain" dan diamortisasi menurut taksiran masa manfaatnya. Jika taksiran masa manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan secara pasti, maka ditetapkan berdasarkan taksiran yang layak, lazimnya selama 5 tahun.

**8. Modal Eks Hibah**

Penerimaan barang-barang, peralatan dan dana oleh PERUMDAM Tirta Senentang yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterkaitan apapun dibukukan sebagai modal eks hibah. Apabila barang dan peralatan (Pipa dan accessories) yang diterima tidak dilengkapi dengan harga maka barang dan peralatan tersebut akan dinilai berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri oleh PERUMDAM.

**9. Kewajiban**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun yang terdiri atas Utang Usaha, Utang Non Usaha, Beban Yang Masih Harus Dibayar, Utang Pajak, Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo pada tahun bersangkutan, dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya yang akan segera dibayar. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 (satu) Tahun Buku.

**10. Penerapan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan**

Penerapkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, yang mengungkapkan saldo pajak tangguhan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara (temporer) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan**

**3 Kas dan Setara Kas**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Bank		
Bank Kalbar Sintang No.Rek,4003002070	1,642,472,786.35	1,699,348,041.98
Bank Kalbar Sintang No.Rek,4003002077	3,807,931,640.74	2,559,297,448.11
Bank Negara Indonesia No.Rek,4003002074	2,227,302,799.00	3,209,702,453.00
Bank Rakyat Indonesia	160,390,790.40	160,746,222.40
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>7,838,098,016.49</b>	<b>7,629,094,165.49</b>

**4 Piutang Usaha**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Piutang rekening air	4,842,781,304.00	4,636,331,465.00
<b>Jumlah piutang usaha</b>	<b>4,842,781,304.00</b>	<b>4,636,331,465.00</b>

**5 Penyisihan Piutang Usaha**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Penyisihan Piutang Awal Tahun	(3,751,288,594.61)	(3,392,115,820.67)
Kurang : Penghapusan piutang	-	-
Tambah : Penyisihan tahun berjalan	(372,683,733.45)	(359,172,773.94)
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Akhir Tahun</b>	<b>(4,123,972,328.06)</b>	<b>(3,751,288,594.61)</b>

**6 Persediaan**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Persediaan Bahan Kimia	21,938,700.00	5,995,000.00
- Persediaan Bahan Instalasi / Suku Cadang	871,047,803.50	260,445,647.50
- Persediaan Alat Tulis dan Cetak	13,609,700.00	14,828,760.00
<b>Jumlah persediaan</b>	<b>906,596,203.50</b>	<b>281,269,407.50</b>

Berdasarkan analisis faktor eksternal dan internal yang terkait dengan persediaan tidak menunjukkan adanya kondisi yang berdampak terhadap penurunan nilai persediaan.

**7 Aset Tetap**

Akun ini terdiri dari :

Nilai Perolehan :	<b>2022</b>		
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Tanah	1,378,244,899.31	-	1,378,244,899.31
Instalasi Sumber Air	4,499,504,539.82	139,967,270.00	4,639,471,809.82
Instalasi Pompa	5,038,184,334.66	301,856,000.00	5,340,040,334.66
Instalasi Pengolahan	20,652,319,787.37	15,065,500.00	20,667,385,287.37
Instalasi Transmisi & Distribusi	52,225,333,734.07	6,357,853,848.00	58,583,187,582.07
Bangunan Gedung	6,183,370,948.09	49,766,000.00	6,233,136,948.09
Peralatan dan Perlengkapan	1,249,899,947.00	85,748,000.00	1,335,647,947.00

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan - Lanjutan**

Kendaraan dan Alat Angkutan	1,475,401,389.00	47,935,000.00	1,523,336,389.00
Inventaris Perabot Kantor	1,912,137,372.00	165,846,799.00	2,077,984,171.00
	<b>94,614,396,951.32</b>	<b>7,164,038,417.00</b>	<b>101,778,435,368.32</b>
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>			
Tanah	-	-	-
Instalasi Sumber Air	1,942,375,015.84	231,973,590.49	2,174,348,606.33
Instalasi Pompa	2,814,394,036.64	249,991,584.92	3,064,385,621.56
Instalasi Pengolahan	11,523,658,475.20	1,034,268,432.76	12,557,926,907.96
Instalasi Transmisi & Distribusi	27,036,256,789.43	4,655,853,788.83	31,692,110,578.26
Bangunan Gedung	2,048,836,408.74	311,656,847.40	2,360,493,256.14
Peralatan dan Perlengkapan	1,172,389,119.56	81,629,413.72	1,254,018,533.28
Kendaraan dan Alat Angkutan	1,446,849,083.77	38,243,652.61	1,485,092,736.39
Inventaris Perabot Kantor	1,760,290,841.08	158,846,664.96	1,919,137,506.04
	<b>49,745,049,770.26</b>	<b>6,762,463,975.70</b>	<b>56,507,513,745.96</b>
<b>Nilai Buku Bersih :</b>	<b>44,869,347,181.06</b>		<b>45,270,921,622.36</b>

	<b>2021</b>		
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Nilai Perolehan :</b>			
Tanah	1,378,244,899.31	-	1,378,244,899.31
Instalasi Sumber Air	4,368,182,911.82	131,321,628.00	4,499,504,539.82
Instalasi Pompa	4,887,682,307.66	150,502,027.00	5,038,184,334.66
Instalasi Pengolahan	20,632,223,789.37	20,095,998.00	20,652,319,787.37
Instalasi Transmisi & Distribusi	50,549,375,530.05	1,675,958,204.02	52,225,333,734.07
Bangunan Gedung	6,155,104,448.09	28,266,500.00	6,183,370,948.09
Peralatan dan Perlengkapan	1,249,899,947.00	-	1,249,899,947.00
Kendaraan dan Alat Angkutan	1,475,401,389.00	-	1,475,401,389.00
Inventaris Perabot Kantor	1,770,667,372.00	141,470,000.00	1,912,137,372.00
	<b>92,466,782,594.30</b>	<b>2,147,614,357.02</b>	<b>94,614,396,951.32</b>

<b>Akumulasi Penyusutan :</b>			
Tanah	-	-	-
Instalasi Sumber Air	1,717,399,788.85	224,975,226.99	1,942,375,015.84
Instalasi Pompa	2,572,321,408.27	242,072,628.37	2,814,394,036.64
Instalasi Pengolahan	10,487,770,518.99	1,035,887,956.21	11,523,658,475.20
Instalasi Transmisi & Distribusi	23,733,545,166.27	3,302,711,623.16	27,036,256,789.43
Bangunan Gedung	1,739,667,861.33	309,168,547.40	2,048,836,408.74
Peralatan dan Perlengkapan	1,094,878,292.12	77,510,827.44	1,172,389,119.56
Kendaraan dan Alat Angkutan	1,418,296,778.54	28,552,305.23	1,446,849,083.77
Inventaris Perabot Kantor	1,608,444,310.16	151,846,530.92	1,760,290,841.08
	<b>44,372,324,124.53</b>	<b>5,372,725,645.72</b>	<b>49,745,049,770.26</b>
<b>Nilai Buku Bersih :</b>	<b>48,094,458,469.77</b>		<b>44,869,347,181.06</b>

**8 Kewajiban Imbalan Kerja**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Dana Pensiun (DAPENMA PAMSI)	552,163,463.00	485,102,781.00
<b>Jumlah utang usaha</b>	<b>552,163,463.00</b>	<b>485,102,781.00</b>

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan - Lanjutan**

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menghitung kewajiban imbalan kerja per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai

Tabel mortalita	: GAM - 1951 Male
Tingkat Bunga	: 8 %
Tingkat Kenaikan PhDP	: 4,5 %
Uang pensiun normal	: 56
Maksimum manfaat pensiun peserta	: 80% PhDP
Maksimum manfaat pensiun Direksi	: 75% PhDP

Berdasarkan ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuarial pe 31 Desember 2022, struktur pendanaan untuk masing-masing kelompok

a. Kewajiban Aktuarial	8,782,126,663.00
b. Kekayaan yg diperhitungkan untuk pendanaan	8,229,963,200.00
c. Surplus(Defisit)	(552,163,463.00)
d. Rasio Pendanaan	93,68%

	<u>Direksi Baru</u>	<u>Pegawai</u>	<u>Pasif Pensiunan</u>
a. Kewajiban Aktuarial	173,279,229.00	5,078,056,144.00	3,530,791,290.00
b. Kekayaan yg diperhitungkan untuk pendanaan	188,815,281.00	4,510,356,629.00	3,530,791,290.00
c. Surplus(Defisit)	15,536,052.00	(567,699,515.00)	-
d. Rasio Pendanaan	109%	88,24%	100 %

Berdasarkan ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuarial pe 31 Desember 2021, struktur pendanaan untuk masing-masing kelompok

a. Kewajiban Aktuarial	8,161,659,539.00
b. Kekayaan yg diperhitungkan untuk pendanaan	7,676,556,758.00
c. Surplus(Defisit)	(485,102,781.00)
d. Rasio Pendanaan	94.06%

	<u>Direksi Baru</u>	<u>Pegawai</u>	<u>Pasif Pensiunan</u>
a. Kewajiban Aktuarial	137,794,858.00	4,482,507,118.00	3,541,357,563.00
b. Kekayaan yg diperhitungkan untuk pendanaan	151,780,665.00	3,983,418,530.00	3,541,357,563.00
c. Surplus(Defisit)	13,985,807.00	(499,088,588.00)	-
d. Rasio Pendanaan	110%	88.87%	100 %

**9 Modal Perusahaan**

Jumlah tersebut merupakan saldo modal PDAM Kabupaten Sintang Tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Berita Acara Terima Nomor 10/BA/W.15/95 Tanggal 3 Juni 1997 Tentang Penghibahan Status Tetap

Asset Eks PPSAB dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Sintang. Modal PDAM sebesar Rp 3.852.209.670,00 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan - Lanjutan**

1	Penyerahan Eks PPSAB	2,959,892,289.07
2	Penyerahan Eks PPSAB	379,714,257.00
3	Penyerahan Eks DAB	231,918,480.00
4	Penyerahan Eks Setneg	224,298,000.00
5	Penyerahan Eks Buyer Kredit	56,386,643.93
<b>Jumlah</b>		<b>3,852,209,670.00</b>

**10 Modal Hibah**

Sampai dengan 31 Desember 2022 Tanah yang dihibahkan oleh masyarakat yang berlokasi di wilayah Nanga Jetak dan Nanga Tempunak dimana nilai tanah tersebut di akui adalah sebesar Rp 1.500.000,00

Saldo Awal		1,500,000.00
1	Hibah Tanah yang diberikan Masyarakat yang berlokasi di wilayah Nanga Jetak dan Nanga Tempunak	
2	Hibah Tahun 2012	
	Bahan Instalasi	222,229,834.00
	Bahan Bakar Solar	47,497,482.00
	Bahan Kimia	21,691,890.00
		291,419,206.00
3	Hibah Tahun 2013	
	Bahan Kimia	18,397,590.00
4	Hibah Tahun 2014	
	Bahan Bakar Solar	27,000,000.00
5	Hibah Tahun 2016	
	Bahan Instalasi	1,763,607,875.00
	Bahan Bakar Solar	33,384,995.00
	Bahan Kimia	24,728,000.00
		1,821,720,870.00
6	Hibah Tahun 2017	
	Bahan Instalasi	273,043,350.00
	Bahan Bakar Solar	31,054,260.00
	Bahan Kimia	26,504,500.00
		330,602,110.00
7	Hibah Tahun 2018	
	Bahan Instalasi	146,177,600.00
8	Hibah Tahun 2019	
	Bahan Instalasi	509,311,600.00
<b>Jumlah Modal Hibah</b>		<b>3,146,128,976.00</b>

**11 Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya**

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah pusat dalam bentuk aktiva tetap yang belum ditetapkan statusnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Penyertaan Pemerintah Yang Belum Di Tetapkan Statusnya adalah sebagai berikut :



**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan - Lanjutan**

Saldo Awal		1,740,114,958.31
1	Penyertaan Pemerintah YBDS	
2	Penyertaan Pemerintah YBDS Tahun 2010	
	Penambahan Aset	117,406,888.85
	Pengurangan Aset	(181,311,048.16)
	(Penyesuaian Manajemen Aset)	1,676,210,799.00
3	Penyertaan Pemerintah YBDS Tahun 2012	
	Pembuatan IPA Baja Kap. 10 I/d IKK Tempunak	4,934,468,000.00
	Pemasangan Pipa di Sintang Pusat	4,634,498,000.00
	Pembuatan SPL Baning Sintang	<u>28,837,613,000.00</u>
		38,406,579,000.00
4	Penyertaan Pemerintah YBDS Tahun 2013	
	Pengurangan Aset	28,837,613,000.00
5	Penyertaan Pemerintah YBDS Tahun 2013	
	Pembuatan IPA Baja Kapasitas 5 I/d IKK Mengkurai	4,290,725,000.00
Jumlah Modal Hibah		<b>15,535,901,799.00</b>

- Untuk Tahun 2010 adanya penyesuaian aset di karenakan adanya Manajemen Aset sehingga ada penambahan serta
- Pada tahun 2012 mendapat bantuan proyek berupa pembuatan IPA Baja Kap. 10 I/d 1 unit oleh Pt. Wijaya Kusuma Emindo dengan Nomor.17/KU.08.08/PKPAM-CK/2011/10 Juni 2011, Nomor.17.A/ADD/VII/PKPAM-CK/2011/5 Juli 2011, Nomor.17.B/KU.08.08/PKPAM-CK/2011/7 November 2011. Lokasi pembuatan adalah di IKK Tempunak melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air Minum, Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 4.934.468.000,-
- Pada Tahun 2012 juga mendapat bantuan proyek pengadaan perpipaan oleh PT. Jaya Teknik Lestari Nomor.38/KU.80.80/PKPAM-CK/2011/29 JULI 2011 Nomor.38/ADD/X/PKPAM-CK/2011/21 Oktober 2011 yang berlokasi di PDAM Sintang Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air Minum, Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Barat dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp
- Selanjutnya pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memberikan bantuan Pembangunan Fisik Kabupaten Sintang dengan kontrak Nomor.602/01/PEM,FPDAM/SETDA/VII/2006 Tanggal 22 Agustus 2012 Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor.602/02/PEM.FPDAM/SETDA/III/2007 Tanggal 3 Maret 2007 dengan nilai kontrak terdiri atas 3 tahap

Tahap Pertama	9,675,253,800.00
Tahap Kedua	6,202,342,740.00
Tahap Ketiga	12,960,017,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>28,837,613,540.00</b>

Dengan adanya bantuan-bantuan proyek tersebut pada Tahun 2012 jumlah bantuan yang diberikan kepada PDAM Kabupaten Sintang adalah Sebesar **Rp 38.406.579.000,-**

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan - Lanjutan**

**12 Penyertaan Pemerintah Daerah**

Jumlah tersebut merupakan Penyertaan dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang berasal dari APBD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022 dengan perincian sebagai berikut :

<b>Saldo Awal</b>		<b>9,833,002,067.00</b>	
<b>1</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2007</b>		
	Penyertaan Pemerintah	1,643,329,756.00	<b>11,476,331,823.00</b>
<b>2</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2008</b>		
	Penyertaan Pemerintah	1,299,720,532.00	<b>12,776,052,355.00</b>
<b>3</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2009</b>		
	Penyertaan Pemerintah	3,120,008,720.00	<b>15,896,061,075.00</b>
<b>4</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2010</b>		
	Penyertaan Pemerintah	1,500,000,000.00	<b>17,396,061,075.00</b>
<b>5</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2011</b>		
	Penyertaan Pemerintah	1,000,000,000.00	<b>18,396,061,075.00</b>
<b>6</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2012</b>		
	Penyertaan Pemerintah	1,000,000,000.00	<b>19,396,061,075.00</b>
<b>7</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2013</b>		
	Penyertaan Pemerintah	3,500,000,000.00	
	Penyertaan Modal Dalam Bentuk Fisik	<u>28,837,613,540.00</u>	
		32,337,613,540.00	<b>51,733,674,615.00</b>
<b>8</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2014</b>		
	Penyertaan Pemerintah	2,500,000,000.00	<b>54,233,674,615.00</b>
<b>9</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2015</b>		
	Penyertaan Pemerintah	3,000,000,000.00	<b>57,233,674,615.00</b>
<b>10</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2016</b>		
	Penyertaan Pemerintah	9,487,209,809.00	<b>66,720,884,424.00</b>
<b>11</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2017</b>		
	Penyertaan Pemerintah	6,200,683,993.00	<b>72,921,568,417.00</b>
<b>12</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2018</b>		
	Penyertaan Pemerintah	4,397,370,216.00	<b>77,318,938,633.00</b>
<b>13</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2019</b>		
	Penyertaan Pemerintah	4,149,331,758.00	<b>81,468,270,391.00</b>
<b>14</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2020</b>		
	Penyertaan Pemerintah	4,100,000,000.00	<b>85,568,270,391.00</b>
<b>15</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah Tahun 2022</b>		
	Penyertaan Pemerintah	4,500,000,000.00	<b>90,068,270,391.00</b>
<b>Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah</b>			<b>90,068,270,391.00</b>

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan - Lanjutan**

**13 Surplus (Defisit)**

Akun ini terdiri dari :	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo Laba (Rugi) sampai dengan tahun lalu	(53,927,387,802.50)	(52,951,769,308.11)
Saldo Laba(Rugi) Tahun Berjalan	(3,497,389,488.15)	(975,618,494.40)
<b>Jumlah Surplus (Defisit)</b>	<b>(57,424,777,290.65)</b>	<b>(53,927,387,802.50)</b>

**14 Pendapatan Penjualan Air**

Akun ini terdiri dari :	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Harga Air	17,295,277,380.00	16,259,373,404.00
Beban Tetap	1,020,056,000.00	984,109,000.00
Air Tanpa Meter	2,376,000.00	2,766,000.00
<b>Jumlah pendapatan penjualan air</b>	<b>18,317,709,380.00</b>	<b>17,246,248,404.00</b>

**15 Pendapatan Non Air**

Akun ini terdiri dari :	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sumbangan Baru	811,415,440.00	818,399,740.00
Denda	329,690,249.00	290,593,014.00
Balik Nama	5,800,000.00	4,650,000.00
Pembukaan Kembali	45,000,000.00	37,687,500.00
Survey Atas Sumbangan Baru	2,740,000.00	3,780,000.00
<b>Jumlah pendapatan non air</b>	<b>1,194,645,689.00</b>	<b>1,155,110,254.00</b>

**16 Beban Usaha**

Akun ini terdiri dari :	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Beban Pegawai	8,233,967,734.00	7,222,594,139.00
Beban Listrik	2,221,559,048.00	2,187,298,118.00
Beban Pemakaian Bakar Bakar	1,182,882,000.00	748,950,000.00
Beban Pembelian Bahan Kimia	755,974,300.00	637,307,020.00
Beban Pemeliharaan	313,138,246.00	183,884,173.00
Beban Air Baku	73,356,000.00	82,682,200.00
Beban Kantor	803,043,413.98	777,421,531.03
Beban Hubungan Langganan	161,214,946.00	108,469,827.00
Beban Penelitian dan Pengembangan	435,185,019.00	378,070,223.00
Beban Pajak/Retribusi	14,902,657.00	15,129,610.00
Beban Penyusutan	6,762,463,975.70	5,372,725,645.54
Beban Penyisihan/Penghapusan Piutang	372,683,733.45	359,172,773.94
Beban Rupa Rupa Umum	2,862,798,988.00	2,193,559,338.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>24,193,170,061.13</b>	<b>20,267,264,598.51</b>

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Senentang Kabupaten Sintang  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)**

**III. Informasi Yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan - Lanjutan**

**17 Pendapatan Lain-lain**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jasa Giro	126,146,523.98	77,047,207.12
Lain-lain	215,378,469.00	1,314,601,020.00
Pendapatan Sampel Barang dari Suplier	-	7,700,000.00
Pendapatan Sisa Barang Proyek	695,163,710.00	-
Pendapatan Subsidi Pemerintah Daerah	712,071,164.00	-
<b>Jumlah pendapatan lain-lain</b>	<b>1,748,759,866.98</b>	<b>1,399,348,227.12</b>

**18 Beban Lain-Lain**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Biaya Administrasi Bank	3,720,900.00	3,708,000.00
Sumbangan dan Bantuan	9,450,000.00	20,250,000.00
Beban Imbalan Kerja	552,163,463.00	485,102,781.00
<b>Jumlah Beban Lain-lain</b>	<b>565,334,363.00</b>	<b>509,060,781.00</b>

**19 INFORMASI PENTING DAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diatas.

**20 TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2023.

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
KALIMANTAN BARAT**

**Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2022  
Dan Untuk Tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal tersebut  
Beserta  
Laporan Auditor Independen**

# PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

## DAFTAR ISI

### Halaman

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022,  
terdiri dari:

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN	I
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	ii
3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	iii
4. LAPORAN ARUS KAS	iv
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1 - 31

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

	Catatan/ Note	2022 Rp	2021 *) Rp	2020 *) Rp
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	4	47.096.273.400	5.576.683.876	7.107.692.901
Investasi jangka pendek	5	49.725.000.000	38.225.000.000	31.400.000.000
Pendapatan yang masih harus diterima	6	309.430.220	97.173.893	107.324.289
Beban dibayar di muka	7	22.174.573.335	13.837.761.220	12.402.554.175
Jumlah aset lancar		<u>119.305.276.955</u>	<u>57.736.618.989</u>	<u>51.017.571.365</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi jangka panjang	8	11.500.000.000	10.211.115.849	8.353.434.375
Aset tetap	9	158.247.052	81.463.034	69.322.126
Aset hak guna	10	422.686.019	549.491.824	--
Aset dalam penyelesaian	11	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Pajak tangguhan	13	173.009.935	298.264.955	45.546.927
Jumlah aset tidak lancar		<u>12.273.943.006</u>	<u>11.160.335.662</u>	<u>8.488.303.428</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>131.579.219.960</u></b>	<b><u>68.896.954.651</u></b>	<b><u>59.505.874.793</u></b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS LANCAR</b>				
Utang premi	12	22.663.896.075	--	--
Utang pajak	13	8.061.759	8.140.417	9.000.000
Utang lain-lain	14	92.036.028	--	--
Biaya yang masih harus dibayar	15	684.252.191	--	--
Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan -	16	8.007.663.635	3.860.362.451	76.621.128
Utang penjaminan ulang	18	2.434.144.917	1.367.558.533	1.042.536.018
Liabilitas dalam penyelesaian	19	161.745.580	974.152.525	139.064.610
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>34.051.800.185</u>	<u>6.210.213.926</u>	<u>1.267.221.756</u>
<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>				
Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan -	17	44.740.117.045	17.109.009.983	15.719.336.974
Cadangan klaim	20	353.694.307	996.127.709	462.145.709
Imbalan pasca kerja	21	118.331.737	191.424.134	806.160.446
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>45.212.143.089</u>	<u>18.296.561.826</u>	<u>16.987.643.129</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>79.263.943.274</u></b>	<b><u>24.506.775.752</u></b>	<b><u>18.254.864.885</u></b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal dasar perseroan Rp100.000.000.000,-	22			
Rp1.000.000,- Per lembar saham yang terdiri dari 100.000 lembar saham pada tahun 2022, 2021 dan 2020. Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp49.500.000.000,- atau 49.500 lembar saham pada tahun 2022, 2021 dan 2020		49.500.000.000	49.500.000.000	44.500.000.000
Saldo Surplus (defisit)	23	3.021.968.603	(5.190.572.009)	(3.453.868.033)
Penghasilan komprehensif lain - Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja - bersih	23	(206.691.917)	80.750.908	204.877.941
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b><u>52.315.276.686</u></b>	<b><u>44.390.178.899</u></b>	<b><u>41.251.009.908</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b><u>131.579.219.960</u></b>	<b><u>68.896.954.651</u></b>	<b><u>59.505.874.793</u></b>

\*) Disajikan Kembali dan Direklasifikasi, Catatan 31

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021 *)</u>	<u>2020 *)</u>
<b>PENDAPATAN PENJAMINAN</b>	23	11.708.733.690	2.629.569.323	1.675.605.695
<b>BEBAN KLAIM</b>	24	<u>(3.983.184.201)</u>	<u>(4.039.582.632)</u>	<u>(989.231.034)</u>
<b>PENJAMINAN BERSIH</b>		<b><u>7.725.549.489</u></b>	<b><u>(1.410.013.309)</u></b>	<b><u>686.374.661</u></b>
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	25	1.653.189.201	1.817.993.844	2.247.550.506
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban gaji dan pegawai	26	(2.921.175.198)	(2.093.495.216)	(1.828.802.076)
Beban umum dan administrasi lainnya	27	<u>(2.149.104.664)</u>	<u>(1.493.262.432)</u>	<u>(1.228.233.992)</u>
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b><u>(5.070.279.862)</u></b>	<b><u>(3.586.757.648)</u></b>	<b><u>(3.057.036.068)</u></b>
Pendapatan lain-lain	28	14.784.416.128	1.315.183.550	474.857.298
Beban lain-lain	29	<u>(11.123.515.749)</u>	<u>(90.818.253)</u>	<u>(67.737.839)</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b><u>7.969.359.206</u></b>	<b><u>(1.954.411.817)</u></b>	<b><u>284.008.557</u></b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				
Pajak kini	13	--	--	--
Pajak tangguhan	13	<u>116.375.600</u>	<u>217.707.840</u>	<u>28.573.996</u>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b><u>8.085.734.806</u></b>	<b><u>(1.736.703.977)</u></b>	<b><u>312.582.553</u></b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>				
<b>Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja - bersih	23	<u>35.082.806</u>	<u>3.601.223</u>	<u>127.728.256</u>
		<b><u>35.082.806</u></b>	<b><u>3.601.223</u></b>	<b><u>127.728.256</u></b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE TAHUN BERJALAN</b>		<b><u>8.120.817.612</u></b>	<b><u>(1.733.102.754)</u></b>	<b><u>440.310.809</u></b>
Laba Per Saham Dasar		136.885	(29.213)	7.422

\*) Disajikan Kembali, Catatan 31

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Pendapatan komprehensif lainnya	Saldo Laba		Total ekuitas
				Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	
<b>Saldo per 31 Desember 2020 sebelum penyajian kembali</b>		<b>44.500.000.000</b>	<b>(166.291.824)</b>	--	<b>(3.814.388.225)</b>	<b>40.519.319.950</b>
Penyesuaian penyajian kembali Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	371.169.766	--	360.520.192	731.689.958
<b>Saldo per 31 Desember 2020 setelah penyajian kembali</b>		<b>44.500.000.000</b>	<b>204.877.941</b>	--	<b>(3.453.868.033)</b>	<b>41.251.009.908</b>
Tambahan setoran modal	16	5.000.000.000	--	--	--	5.000.000.000
<b>Pendapatan komprehensif lainnya:</b>						
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		--	(103.434.375)	--	--	(103.434.375)
Agio/ disagio		--	(174.597.300)	--	--	(174.597.300)
Rugi bersih		--	--	--	(3.053.764.387)	(3.053.764.387)
<b>Saldo per 31 Desember 2021 sebelum penyajian kembali</b>		<b>49.500.000.000</b>	<b>(73.153.734)</b>	--	<b>(6.507.632.420)</b>	<b>42.919.213.846</b>
Penyesuaian penyajian kembali Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	153.904.642	--	1.317.060.411	1.470.965.053
<b>Saldo per 31 Desember 2021 setelah penyajian kembali</b>		<b>49.500.000.000</b>	<b>80.750.908</b>	--	<b>(5.190.572.009)</b>	<b>44.390.178.899</b>
<b>Penghasilan komprehensif lainnya:</b>						
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		--	--	--	--	--
Agio/ disagio		--	--	--	--	--
Penyesuaian penyajian kembali Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja - bersih		--	(287.442.825)	--	--	(287.442.825)
Laba bersih		--	--	--	8.085.734.806	8.085.734.806
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>49.500.000.000</b>	<b>(206.691.917)</b>	--	<b>3.021.968.603</b>	<b>52.315.276.686</b>

\*) Saldo laba termasuk keuntungan atau kerugian aktuarial dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021 *)</u>	<u>2020 *)</u>
<b>ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan dari penjaminan	23	11.708.733.690	2.629.569.323	1.675.605.695
Penerimaan lainnya	25	40.212.349.491	3.480.206.022	3.043.553.335
Pembayaran beban klaim	24	(8.130.485.385)	(12.275.728.621)	(3.956.163.241)
Pembayaran kepada karyawan	26, 27	(2.921.175.198)	(2.093.495.216)	(1.828.802.076)
Pembayaran pajak	13	(96.741.108)	(97.685.004)	(31.777.600)
Pembayaran aktivitas operasional lainnya		--	(316.846.286)	(356.734.027)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		<u>40.772.681.490</u>	<u>(8.673.979.782)</u>	<u>(1.454.317.914)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Perolehan aset tetap	9	(126.082.000)	(57.505.600)	(4.969.400)
Penerimaan dari investasi	6, 25	1.515.423.434	1.666.494.357	2.060.254.631
Aset dalam penyelesaian	11	--	--	20.000.000
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>1.389.341.434</u>	<u>1.608.988.757</u>	<u>2.075.285.231</u>
<b>ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Tambahan modal disetor	22	--	5.000.000.000	--
Cadangan klaim		(642.433.400)	533.982.000	(566.663.800)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(642.433.400)</u>	<u>5.533.982.000</u>	<u>(566.663.800)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>		41.519.589.524	(1.531.009.025)	54.303.516
<b>SALDO KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>		<u>5.576.683.876</u>	<u>7.107.692.901</u>	<u>7.053.389.385</u>
<b>SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN</b>		<u><b>47.096.273.400</b></u>	<u><b>5.576.683.876</b></u>	<u><b>7.107.692.901</b></u>
Kas dan bank pada akhir tahun terdiri dari:	3			
Kas		76.035	--	--
Bank		47.096.197.365	5.576.683.876	2.107.692.901
Deposito		--	--	5.000.000.000
<b>Jumlah</b>		<u><b>47.096.273.400</b></u>	<u><b>5.576.683.876</b></u>	<u><b>7.107.692.901</b></u>

\*) Disajikan Kembali dan Direklasifikasi, Catatan 31

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **1. UMUM**

#### **Pendirian**

PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT Jamkrida Kalbar, berdiri berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 19 Oktober 2015 oleh Notaris Rahmaniar Nurul Hidayat, S.H, M.Kn., di Pontianak dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-2462369.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015.

Modal disetor Perusahaan telah beberapa kali mengalami penambahan, perubahan terakhir kali berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 21 Mei 2019 oleh Notaris Sylvia Fransiska Tan, S.H., di Kota Pontianak. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0292874 tanggal 2 Juli 2019.

Kantor Pusat PT Jamkrida Kalbar, beralamat di Jl. Perdana Komplek Central Perdana No. A6, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan jumlah karyawan per 31 Desember 2020 sebanyak 9 orang. Untuk memenuhi kewajiban pajak, PT Jamkrida Kalbar telah terdaftar dengan nomor NPWP 74.250.829.4-701.000 di Kantor Pelayanan Pajak Pontianak.

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang Penjaminan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha antar lain:

1. Perseroan sebagai Penjamin, yaitu memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
2. Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud di atas, Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemberi Kredit berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati.
3. Selain melakukan kegiatan usaha penjaminan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha lain sebagai berikut:
  - 1) Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;
  - 2) Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
  - 3) Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
  - 4) Penjaminan atas surat utang;
  - 5) Penjaminan transaksi dagang;
  - 6) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
  - 7) Penjaminan Bank garansi (kontra bank garansi);
  - 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
  - 9) Penjaminan letter of credit (L/C);
  - 10) Penjaminan kepabeanan (custom bond);
  - 11) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - 12) Penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - 13) Penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
  - 14) Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah memperoleh persetujuan Menteri.

## PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 1. UMUM (*Lanjutan*)

### Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan akta notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2022 dan No. 03 tanggal 10 Maret 2021 dibuat oleh Notaris Basuki Raharjo, S.H., dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0107989.AH.01.11 Tanggal 10 Juni 2022 dan Nomor AHU.AH-01.03-0210022 Tanggal 7 April 2021. Susunan pengurus PT Jamkrida Kalbar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Komisaris Utama	: Timitius, ST., Cfc., CHRM, CRGP., ACA.	Timitius, ST., Cfc., CHRM, CRGP., ACA.
Komisaris Independen	: Muhammad Fahmi., SE., MM., Ak., CA., CPA.	Muhammad Fahmi., SE., MM., Ak., CA., CPA.
Direktur Utama	: Drs. Martinus Damamang., CRGP.	Drs. Martinus Damamang., CRGP.
Direktur Administrasi dan Keuangan	: Gusti Nuzulhan., SP.	Teguh Wahyudi, S.Sos., QRGP.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING

### a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

### b. Pernyataan dan Interpretasi atas Standar Baru

Berikut adalah standar baru, Amendemen, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.
- Amendemen PSAK 25 : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang definisi "estimasi akuntansi" dan "penjelasannya".
- Penyesuaian tahunan PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa".

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

**b. Pernyataan dan Interpretasi atas Standar Baru (*lanjutan*)**

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar dan Tidak Lancar".
- Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi".
- Amandemen PSAK No.16, "Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang diintensikan".
- Amandemen PSAK No.46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal".
- PSAK No.74, "Kontrak Asuransi".
- Amandemen PSAK No.74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No.71 - Informasi Komparatif".

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Amandemen PSAK No.16 dan Amandemen PSAK No.46 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No.74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**c. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

**c. Transaksi dengan Pihak Berelasi (*lanjutan*)**

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (*lanjutan*)
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor (atau entitas induk dari entitas pelapor); dan
  - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dan entitas pelapor.

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**d. Kas dan Setara Kas**

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

**e. Beban Dibayar di Muka**

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk biaya dibayar dimuka fee based yang diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

**f. Aset Tetap (Operasional)**

Aset operasional dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset operasional disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aset operasional sebagai berikut:

	<b>Tahun</b>	<b>Tarif Penyusutan</b>
Bangunan	20	5%
Kendaraan	5	20%
Peralatan Komputer	4	25%
Peralatan Kantor:		
Terbuat dari besi	4	25%
Terbuat dari kayu	2	25%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya-biaya perbaikan dan pengeluaran signifikan yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

Apabila aset operasional tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan aset neto pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

#### **g. Instrumen Keuangan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan di amortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lainnya tidak diungkapkan.

#### **Aset Keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

#### Aset Keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kategori ini meliputi kas dan setara kas, investasi, piutang hasil investasi, piutang penjaminan ulang, piutang penjaminan bersama, aset penjaminan ulang, deposito yang dibatasi penggunaannya yang dimiliki oleh Perusahaan

#### **Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

#### **g. Instrumen Keuangan (*lanjutan*)**

##### **Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (*lanjutan*)**

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Kategori ini meliputi utang penjaminan ulang, utang penjaminan bersama, beban akrual, cadangan klaim, liabilitas lain-lain dalam penyelesaian yang dimiliki oleh Perusahaan.

##### **Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

##### **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrument keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrument keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.



## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut

(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

### **g. Instrumen Keuangan (*lanjutan*)**

#### **Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas**

- 1) Aset Keuangan  
Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:
  - a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir
  - b. Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
  - c. Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.
- 2) Liabilitas Keuangan  
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

### **h. Pengukuran Nilai Aset Non Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

### **I. Pengakuan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a) Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi berdasarkan metode jumlah angka tahun sepanjang jangka waktu penjaminan.

Biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental. Biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, yang diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas risiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Komisi diterima dari penjamin ulang diakui sebagai pendapatan komisi pada saat risiko dialihkan. Penerimaan dari pelanggan atas risiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

#### **j. Beban Klaim**

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Pengukuran cadangan klaim mengacu pada konsep perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 71 instrumen keuangan yang dihitung dengan melakukan estimasi variabel makro yang berkorelasi dengan probabilitas klaim dan didasari total saldo penjaminan bruto. Estimasi klaim atas risiko yang dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset penjaminan ulang dan diukur dengan pola pembentukan cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan neto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

#### **k. Imbalan Kerja**

##### **Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

##### **Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang**

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

#### **l. Pajak Penghasilan**

##### **Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku

##### **Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikompensasikan.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING (*Lanjutan*)**

#### **i. Pajak Penghasilan (*lanjutan*)**

##### **Pajak Tangguhan (*lanjutan*)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

#### **m. Hasil investasi**

Hasil investasi dari deposito berjangka dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu sesuai dengan jumlah pokok dan suku bunga yang berlaku.

---

### **3. PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

##### **a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

##### **b. Cadangan Kerugian Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (*Lanjutan*)**

#### **b. Cadangan Kerugian Nilai Aset Keuangan (*lanjutan*)**

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

#### **c. Komitmen Sewa**

Komitmen sewa operasi - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No.73, Sewa.

#### **d. Pajak penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi

### **Estimasi dan Asumsi Manajemen**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

#### **a. Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (*Lanjutan*)**

#### **Estimasi dan Asumsi Manajemen (*lanjutan*)**

##### **b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap**

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut (Catatan 9).

##### **c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

##### **d. Imbalan Pasca Kerja**

Penentuan cadangan dan imbalan pasca kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut.

Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 21 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Dana Pensiun diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah cadangan imbalan pasti pasca kerja.

Nilai tercatat cadangan imbalan pasti pasca kerja diungkapkan pada Catatan 21.

##### **e. Aset Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2022  
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
*(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (*Lanjutan*)**

**Estimasi dan Asumsi Manajemen (*lanjutan*)**

**f. Cadangan Klaim dan Aset Penjaminan Ulang**

Cadangan klaim dan aset penjamin ulang diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71, dan estimasi yang dibentuk dengan mempertimbangkan pertumbuhan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor makro ekonomi yang relevan dan terkorelasi, serta profitabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

**4. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Kas</b>		
Kas kecil	76.035	--
Jumlah Kas Kecil	<u>76.035</u>	<u>--</u>
<b>Bank</b>		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	43.081.247.651	3.548.691.581
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	1.452.166.134	874.972.123
Pihak Ketiga		
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	2.010.546.489	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	397.290.978	1.151.017.861
PT Bank Permata Syariah	152.919.401	--
PT BPR Duta Niaga	2.026.712	2.002.311
Jumlah Saldo Bank - Rupiah	<u>47.096.197.365</u>	<u>5.576.683.876</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>47.096.273.400</u></b>	<b><u>5.576.683.876</u></b>

**5. INVESTASI JANGKA PENDEK**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak Berelasi		
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	48.875.000.000	37.375.000.000
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	850.000.000	850.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>49.725.000.000</u></b>	<b><u>38.225.000.000</u></b>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**5. INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

Investasi jangka pendek merupakan investasi berupa deposito yang ditempatkan perusahaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sejumlah Rp37.375.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan diperpanjang secara otomatis dengan tingkat bunga deposito mulai dari 3% hingga 4,25% pada tahun 2021 dan 2022, pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pasar Pontianak sejumlah Rp850.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan diperpanjang secara otomatis dengan tingkat bunga sebesar 6,25% hingga 7% pada tahun 2021 dan 2022.

**6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang bunga deposito	282.182.534	54.319.726
Piutang bunga obligasi	27.247.686	42.854.167
<b>Jumlah</b>	<b><u>309.430.220</u></b>	<b><u>97.173.893</u></b>

**7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Reasuransi dari penjaminan ulang	16.362.075.955	10.285.258.371
Biaya akuisisi	5.789.595.180	3.529.600.649
Beban dibayar dimuka lainnya	22.902.200	22.902.200
<b>Jumlah</b>	<b><u>22.174.573.335</u></b>	<b><u>13.837.761.220</u></b>

Biaya re-asuransi dan penjaminan ulang merupakan biaya yang dibayarkan kepada perusahaan penjaminan ulang sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra perusahaan penjaminan ulang dan penjaminan ulang yang dibebankan secara akrual.

Biaya akuisisi merupakan biaya perolehan atas polis yang akan dibebankan secara akrual.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit, Beban Dibayar Dimuka diklasifikasikan menjadi Beban Dibayar Dimuka Lancar dan Beban Dibayar Dimuka Tidak Lancar, sampai dengan saat ini, Perusahaan masih belum mengklasifikasikan sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran tersebut.



**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**8. INVESTASI JANGKA PANJANG**

Akun ini terdiri dari:

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	2022	
			Nilai Nominal Rp	Nilai Tercatat Rp
Sukuk ritel seri 013	6,05%	10/09/2023	10.000.000.000	10.005.000.000
Sukuk ritel seri 015	5,10%	10/09/2024	500.000.000	495.000.000
Sukuk ritel seri 016	4,95%	10/03/2025	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>11.500.000.000</b>	<b>11.500.000.000</b>

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	2021	
			Nilai Nominal Rp	Nilai Tercatat Rp
Sukuk ritel seri 013	6,05%	10/09/2023	10.000.000.000	10.211.115.849
<b>Jumlah</b>			<b>10.000.000.000</b>	<b>10.211.115.849</b>

**9. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

	31Desember 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	445.469.328	126.082.000	--	571.551.328
	<u>445.469.328</u>	<u>126.082.000</u>	<u>--</u>	<u>571.551.328</u>
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	364.006.294	49.297.982	--	413.304.276
	<u>364.006.294</u>	<u>49.297.982</u>	<u>--</u>	<u>413.304.276</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b>81.463.034</b>			<b>158.247.052</b>

	31Desember 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	387.963.728	57.505.600	--	445.469.328
	<u>387.963.728</u>	<u>57.505.600</u>	<u>--</u>	<u>445.469.328</u>
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	318.641.603	45.364.691	--	364.006.294
	<u>318.641.603</u>	<u>45.364.691</u>	<u>--</u>	<u>364.006.294</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b>69.322.125</b>			<b>81.463.034</b>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

*(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***9. ASET TETAP (Lanjutan)**

Biaya penyusutan aset tetap yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komperhesif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp49.297.982 dan Rp45.364.691.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

**10. ASET HAK GUNA**

	<b>31 Desember 2022</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<u>Harga Perolehan</u>				
Gedung	634.029.028	--	--	634.029.028
	<u>634.029.028</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>634.029.028</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Gedung	84.537.204	126.805.805	--	211.343.009
	<u>84.537.204</u>	<u>126.805.805</u>	<u>--</u>	<u>211.343.009</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>549.491.824</u></b>			<b><u>422.686.019</u></b>
	<b>31 Desember 2021</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<u>Harga Perolehan</u>				
Gedung	--	634.029.028	--	634.029.028
	<u>--</u>	<u>634.029.028</u>	<u>--</u>	<u>634.029.028</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Gedung	--	84.537.204	--	84.537.204
	<u>--</u>	<u>84.537.204</u>	<u>--</u>	<u>84.537.204</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>--</u></b>			<b><u>549.491.824</u></b>

Biaya penyusutan aset hak guna yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komperhensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp126.805.805 dan Rp84.537.204.

Tidak terdapat liabilitas hak guna dikarenakan seluruh sewa gedung dibayarkan sekaligus diawal masa kontrak.

**11. ASET LAIN-LAIN**

Aset dalam penyelesaian sebesar Rp20.000.000 merupakan uang muka atas pekerjaan pembuatan aplikasi Jamkrida Mobile. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 aplikasi masih dalam uji coba.

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**12. UTANG PREMI**

Utang premi sebesar Rp22.663.896.075 merupakan utang premi kepada Perusahaan Reasuransi. Utang premi tersebut telah dibayarkan pada bulan Januari 2023.

**13. PERPAJAKAN**

## a. Utang Pajak

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21	8.061.759	8.140.417
<b>Jumlah</b>	<b>8.061.759</b>	<b>8.140.417</b>

## b. Beban Pajak Penghasilan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak Kini	--	--
Pajak Tangguhan	116.375.600	217.707.840
<b>Jumlah</b>	<b>116.375.600</b>	<b>217.707.840</b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak	7.969.359.206	(2.038.949.021)
Perbedaan waktu:		
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	(642.433.400)	533.982.000
Imbalan kerja jangka panjang	(73.092.397)	(614.736.312)
	<u>(715.525.797)</u>	<u>(80.754.312)</u>
Perbedaan Tetap:		
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(1.653.189.201)	(1.817.993.844)
Beban PPh 21	42.064.811	58.761.250
Beban yang tidak diperkenankan	736.288.219	261.475.975
	<u>(874.836.171)</u>	<u>(1.497.756.619)</u>
Taksiran laba (rugi) fiskal	6.378.997.238	(3.617.459.952)
Kompensasi akumulasi rugi fiskal		
Tahun 2018	(3.455.766.611)	(3.455.766.611)
Tahun 2019	(3.209.679.239)	(3.209.679.239)
Tahun 2020	(1.660.480.303)	(1.660.480.303)
Tahun 2021	(3.617.459.952)	--
	<u>(11.943.386.105)</u>	<u>(8.325.926.153)</u>
Akumulasi Rugi Fiskal - Saldo Akhir	(5.564.388.867)	(11.943.386.105)
Taksiran laba (rugi) fiskal		
Dikurangi:		
Pajak penghasilan dibayar dimuka:	--	--
<b>Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan badan</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**13. PERPAJAKAN (Lanjutan)**b. Beban Pajak Penghasilan (*lanjutan*)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2022 dan 2021.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah dihitung menggunakan tarif pajak 22%, serta akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

## c. Aset Pajak Tangguhan

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Tahun Berjalan</u>	<u>Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	256.151.646	(109.174.693)	--	146.976.954
Imbalan Kerja Jangka Panjang	42.113.309	(7.200.907)	(8.879.421)	26.032.981
<b>Nilai Buku</b>	<b>298.264.955</b>	<b>(116.375.600)</b>	<b>(8.879.421)</b>	<b>173.009.935</b>
	<u>31 Desember 2020</u>	<u>Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Tahun Berjalan</u>	<u>Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(131.808.371)	387.960.018	--	256.151.647
Imbalan Kerja Jangka Panjang	177.355.298	(170.252.178)	35.010.188	42.113.308
<b>Nilai Buku</b>	<b>45.546.927</b>	<b>217.707.840</b>	<b>35.010.188</b>	<b>298.264.955</b>

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban.

**14. UTANG LAIN-LAIN**

Utang lain-lain merupakan utang *Corporate Social Responsible* yang dibentuk berdasarkan perhitungan dari laba di tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.018/KEP-DIR/JKB/XII/2022 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) tanggal 30 Desember 2022.

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

*(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Biaya yang masih harus dibayar merupakan bonus atau jasa produksi yang dibentuk berdasarkan laba di tahun 2022, sesuai dengan Keputusan Direksi No.017/KEP-DIR/JKB/XII/2022 tentang Pembagian Bonus Tahun Buku 2022 tanggal 19 Oktober 2022.

**16. IMBAL JASA PENJAMINAN YANG DITANGGUHKAN - LANCAR**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PDDIKU - Jasa penjaminan Mutiguna	3.188.609.177	947.263.621
PDDIKU - Jasa penjaminan konstruksi	1.023.714.646	1.101.676.131
PDDIKU - Jasa penjaminan kapuas	994.669.531	1.228.506.504
PDDIKU - Jasa penjaminan kredit pensiun	853.797.443	445.370.601
PDDIKU - Jasa penjaminan kepemilikan rumah	562.191.902	--
PDDIKU - Jasa penjaminan kapuas plus	518.661.259	--
PDDINB - Surety Bond	379.523.413	817.389
PDDIKU - Jasa penjaminan bank garansi	245.546.595	1.659.646
PDDIKU - Jasa penjaminan kredit umum	90.765.333	16.375.000
PDDIKU - Jasa penjaminan usaha mikro	83.732.601	39.476.300
PDDIKU - Jasa penjaminan kusema	49.985.100	52.707.012
PDDIKU - Jasa penjaminan kreatif	7.373.158	7.193.734
PDDIKU - Jasa penjaminan kredit kecil	6.858.477	14.686.722
PDDIKU - Jasa penjaminan investasi	2.235.000	2.915.625
PDDIKU - Jasa penjaminan modal kerja	--	1.714.166
<b>Jumlah</b>	<b>8.007.663.635</b>	<b>3.860.362.451</b>

Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan - lancar merupakan pendapatan imbal jasa penjaminan yang telah diterima, Sertifikat Penjaminannya telah terbit dan telah disetujui oleh pihak penerima jaminan yang akan diakui pendapatannya sesuai dengan jangka waktu realisasi kredit tersebut.

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**17. IMBAL JASA PENJAMINAN YANG DITANGGUHKAN - TIDAK LANCAR**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PDDIKU - Jasa penjaminan Mutiguna	24.266.728.432	5.866.208.327
PDDIKU - Jasa penjaminan kapuas plus	7.109.388.660	--
PDDIKU - Jasa penjaminan kredit pensiun	7.080.490.289	2.984.016.172
PDDIKU - Jasa penjaminan kapuas	5.466.531.981	7.734.701.799
PDDIKU - Jasa penjaminan kusema	327.484.593	392.128.496
PDDIKU - Jasa penjaminan kepemilikan rumah	250.022.498	--
PDDIKU - Jasa penjaminan kredit umum	109.380.333	24.145.833
PDDIKU - Jasa penjaminan usaha mikro	74.041.664	26.694.404
PDDIKU - Jasa penjaminan kreatif	24.222.014	31.259.339
PDDIKU - Jasa penjaminan konstruksi	18.745.566	1.305.214
PDDIKU - Jasa penjaminan kredit kecil	12.875.182	19.444.552
PDDIKU - Jasa penjaminan investasi	205.833	2.265.833
PDDIKU - Jasa penjaminan bank garansi	--	16.887.398
PDDINB - Surety Bond	--	9.952.616
<b>Jumlah</b>	<b><u>44.740.117.045</u></b>	<b><u>17.109.009.983</u></b>

Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan - tidak lancar merupakan pendapatan imbal jasa penjaminan yang telah diterima, Sertifikat Penjaminannya telah terbit dan telah disetujui oleh pihak penerima jaminan yang akan diakui pendapatannya sesuai dengan jangka waktu realisasi kredit tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Bulan Perumahan Penjaminan Kredit, bahwa Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ditangguhkan dicatat secara terpisah yang dibagi menjadi Imbal Jasa Penjamin (IJP) ditangguhkan kategori lancar dan tidak lancar.

**18. UTANG PENJAMINAN ULANG**

Merupakan saldo utang imbal jasa penjaminan yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim kepada mitra re-asuransi dan mitra *co-guarantee* per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.434.144.917 dan Rp1.367.558.533.

**19. LIABILITAS DALAM PENYELESAIAN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penampungan sementara jasmin kredit umum	161.745.580	969.052.525
Penampungan sementara jasmin kredit lainnya	--	5.100.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>161.745.580</u></b>	<b><u>974.152.525</u></b>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut

*(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***20. CADANGAN KLAIM**

Cadangan klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo. Cadangan klaim dihitung berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 cadangan klaim Perusahaan masing-masing sebesar Rp353.694.307 dan Rp996.127.709.

**21. IMBALAN PASCA KERJA**

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Biaya jasa kini	14.548.234	9.521.317
Biaya bunga bersih	33.244.159	36.913.401
<b>Jumlah</b>	<b><u>47.792.393</u></b>	<b><u>46.434.718</u></b>

Mutasi kewajiban imbalan pasca kerja pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal tahun	191.424.134	806.160.446
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	(112.984.550)	--
Biaya jasa kini	14.548.234	9.521.317
Biaya bunga	33.244.159	36.913.401
Biaya jasa lalu dan penyelesaian	--	(628.031.260)
Biaya jasa lalu	--	(25.578.425)
Pembayaran manfaat	--	(25.500.000)
(Keuntungan) / Kerugian aktuarial	(7.900.240)	17.938.655
<b>Nilai kini kewajiban akhir</b>	<b><u>118.331.737</u></b>	<b><u>191.424.134</u></b>

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan dan penghargaan masa kerja, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen PT Bestama Aktuarial pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tingkat diskonto	7,40% Per tahun	7,60% Per tahun
Tingkat kenaikan gaji	6% Per tahun	6% Per tahun
Tingkat mortalitas	TMI 3-2019	TMI 3-2019
Tingkat Kecacatan	5% OF TMI-IV	10% mortality table
Umur Pensiun Normal	57 tahun	55 tahun

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**22. MODAL**

Berdasarkan Akta Notaris Rahmaniar Nurul Hidayat, SH., M.Kn, No. 06 tanggal 19 Oktober 2015, modal dasar Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Notaris Basuki Raharjo, S.H No. 08 tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp44.500.000.000 (empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pada tahun 2021 terdapat tambahan modal disetor oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 254/BKAD/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), atas penambahan modal disetor ini belum diaktakan oleh perusahaan. Sehingga komposisi pemegang saham per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2022 dan 2021		
	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan %	Jumlah Modal Disetor Rp
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	35.000	71	35.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	3.500	7	3.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Sintang	2.625	5	2.625.000.000
Pemerintah Kabupaten Bengkayang	1.750	4	1.750.000.000
Pemerintah Kabupaten Sangau	1.000	2	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Melawi	1.000	2	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Ketapang	1.000	2	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Sekadau	1.000	2	1.000.000.000
Pemerintah Kota Pontianak	875	2	875.000.000
Pemerintah Kota Singkawang	875	2	875.000.000
Pemerintah Kabupaten Landak	875	2	875.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>49.500</b>	<b>100</b>	<b>49.500.000.000</b>

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan dengan lingkup provinsi diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp 50.000.000.000 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan belum memenuhi ketentuan tersebut.

**23. EKUITAS**

	2022	2021
Modal disetor	49.500.000.000	49.500.000.000
Saldo laba (rugi) awal tahun	(5.063.766.203)	(3.453.868.033)
Penambahan saldo laba (rugi) tahun berjalan	8.085.734.806	(1.736.703.976)
Jumlah saldo laba	52.521.968.603	44.309.427.991
Pengukuran imbalan paska kerja	(206.691.917)	80.750.908
<b>Jumlah</b>	<b>52.315.276.686</b>	<b>44.390.178.899</b>



**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**24. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Imbalan jasa penjaminan - bruto</b>		
- kredit kepemilikan rumah	44.245.483.750	--
- kredit Multiguna	9.539.571.587	700.648.526
- kredit Konstruksi	3.023.776.092	2.290.610.664
- kredit Mikro kusema pensiun	2.779.077.448	586.661.470
- kredit Kapuas	2.163.468.020	1.678.567.894
- Non bank - surety bond	284.881.387	42.319.198
- Bank garansi	279.274.550	127.344.540
- kredit Kapuas plus	147.521.271	--
- Usaha mikro	91.660.544	40.588.113
- kredit kusema	63.344.335	69.345.673
- Kredit umum	46.154.470	12.053.412
- Kredit kecil	14.397.615	25.963.740
- Kredit kreatif	7.260.400	7.892.058
- Kredit Investasi	2.740.625	4.424.604
- Kredit modal kerja	2.637.639	4.670.209
- Beban IJP re-asuransi dan penjaminan ulang	(52.840.526.129)	(2.285.067.377)
<b>Jumlah imbalan jasa penjaminan - bruto</b>	<b>9.850.723.604</b>	<b>3.306.022.724</b>
Pendapatan/(beban) komisi		
- Pendapatan komisi re-asuransi dan penjaminan ulang	7.893.407.054	396.234.892
- Beban fee akuisisi	(6.035.396.968)	(1.072.688.293)
Jumlah beban komisi	1.858.010.086	(676.453.401)
<b>Jumlah imbalan jasa penjaminan - bersih</b>	<b>11.708.733.690</b>	<b>2.629.569.323</b>

**25. BEBAN KLAIM**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Beban klaim - bruto</b>		
Kredit umum - klaim kredit:		
multiguna	3.069.033.571	381.275.601
kapuas	1.457.794.154	2.537.955.541
konstruksi	753.562.833	974.425.550
kepemilikan rumah	673.500.358	--
kusema pensiun	582.399.243	930.594.003
umum	289.073.051	842.214.671
kusema	120.000.000	92.547.123
bank garansi	84.500.000	--
surety bond	--	193.021.564
usaha mikro	--	68.066.389
Jumlah beban klaim - bruto	7.029.863.210	6.020.100.442

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**25. BEBAN KLAIM (Lanjutan)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jumlah pindahan	7.029.863.210	6.020.100.442
Penerimaan klaim re-asuransi dan penjaminan ulang		
Pendapatan klaim penjaminan ulang:		
Kredit usaha mikro	(1.495.792.952)	(165.195.041)
Kredit kapuas	(706.802.779)	(910.388.896)
Kredit kusema	(135.419.123)	(434.249.700)
Kredit umum	(66.230.755)	(899.666.173)
Kredit multiguna	--	(105.000.000)
Jumlah	<u>(2.404.245.609)</u>	<u>(2.514.499.810)</u>
(Penurunan) kenaikan cadangan klaim		
Beban kenaikan cadangan klaim	595.456.600	2.233.016.000
Beban penurunan cadangan klaim	(1.237.890.000)	(1.699.034.000)
Jumlah	<u>(642.433.400)</u>	<u>533.982.000</u>
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b><u>3.983.184.201</u></b>	<b><u>4.039.582.632</u></b>

**26. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pendapatan bunga deposito	1.109.265.758	1.216.471.753
Pendapatan bunga obligasi	543.923.443	510.308.942
Pendapatan bunga investasi lainnya	--	91.213.149
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.653.189.201</u></b>	<b><u>1.817.993.844</u></b>

**27. BEBAN USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Beban gaji dan pegawai</b>		
Kepegawaian	2.488.315.226	1.533.930.673
Perjalanan dinas	229.141.498	68.327.304
Premi BPJS	67.371.663	48.638.439
Promosi	52.215.200	72.737.900
Pendidikan dan latihan	42.335.611	37.720.900
Cuti	33.296.000	26.102.000
Seleksi karyawan	5.000.000	67.063.250
Reward marketing	3.500.000	238.974.750
Jumlah beban gaji dan pegawai	<u>2.921.175.198</u>	<u>2.093.495.216</u>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**27. BEBAN USAHA (Lanjutan)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jumlah pindahan	2.921.175.198	2.093.495.216
<b>Beban umum dan administrasi lainnya</b>		
Fee agen	1.074.632.771	--
Imbalan kerja	158.561.214	730.595.972
Penyusutan aset hak guna	126.805.805	84.537.204
Pemeriksaan	97.975.422	51.839.385
Komuenergi	81.947.209	114.534.389
Kantor	76.079.400	49.090.300
Penyusutan aset tetap	49.297.982	45.364.691
Rumah tangga kantor	48.105.371	53.443.572
RUPS	47.890.000	29.668.050
Pemeliharaan	13.271.350	--
Fee lainnya	9.482.505	24.334.600
Rapat kerja	9.005.664	--
Komisi	7.775.000	67.346.200
Sewa	--	81.166.667
Asuransi	--	138.000.000
Kesehatan	--	16.341.400
Lain-lain	348.274.971	7.000.002
Jumlah beban umum dan administrasi lainnya	<u>2.149.104.664</u>	<u>1.493.262.432</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.070.279.862</u></b>	<b><u>3.586.757.648</u></b>

**28. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Pendapatan lain-lain</b>		
Pendapatan KSP/ CU	12.506.519.458	--
Pendapatan subrogasi	1.841.981.933	765.455.037
Pendapatan Bunga jasa lainnya	265.292.650	500.522.249
Pendapatan jasa giro	119.240.672	32.809.916
Lain-lain	51.381.415	16.396.347
Jumlah Pendapatan Lain-lain	<u>14.784.416.128</u>	<u>1.315.183.550</u>
<b>Beban Lain-lain</b>		
Beban KSP/ CU	(10.337.235.119)	--
Administrasi bank	(40.167.322)	(15.654.484)
Beban pajak fee base income	(449.555.368)	(75.163.769)
Lain-lain	(296.557.939)	--
Jumlah Beban Lain-lain	<u>(11.123.515.749)</u>	<u>(90.818.253)</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>7.321.800.759</u></b>	<b><u>2.448.730.593</u></b>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2022  
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

a. Rincian saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<b>Jumlah</b>		<b>Persentase terhadap Aset</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>ASET</b>				
<b>Bank</b>				
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	43.081.247.651	3.548.691.581	32,84	5,28
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	1.452.166.134	874.972.123	1,11	1,30
<b>Investasi jangka pendek</b>				
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	48.875.000.000	37.375.000.000	37,25	55,66
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	850.000.000	850.000.000	0,65	1,27
<b>Pendapatan yang masih harus diterima</b>				
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	281.207.034	53.347.123	0,21	0,08
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	975.500	972.603	--	--
<b>Jumlah</b>	<b>94.540.596.320</b>	<b>42.702.983.430</b>	<b>0,721</b>	<b>63,59</b>

b. Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<b>Jumlah</b>		<b>Persentase terhadap Liabilitas</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas jasa penjaminan yang ditangguhkan				
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	52.747.780.680	20.969.372.434	0,67	0,86
<b>Jumlah</b>	<b>52.747.780.680</b>	<b>20.969.372.434</b>	<b>0,67</b>	<b>0,86</b>

c. Hubungan dan sifat saldo akun/ transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Sifat Hubungan</b>	<b>Transaksi</b>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Entitas sepengendali	Giro, deposito dan imbalan jasa penjaminan
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	Entitas sepengendali	Giro, deposito dan imbalan jasa penjaminan

**30. MANAJEMEN RISIKO**

**Analisa Manajemen Risiko**

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **30. MANAJEMEN RISIKO (*Lanjutan*)**

Sejauh ini perusahaan telah mengidentifikasi empat kategori risiko yang harus dihadapi:

#### **1. Risiko Teknis yang Menyangkut Bidang Penjaminan dan Klaim**

Dalam bidang penjaminan, terdapat potensi timbulnya kerugian yang berkaitan dengan proses akseptasi risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, Perusahaan selalu konsisten menerapkan kebijakan akseptasi yang wajar dan berhati-hati, melakukan survey risiko sebelum akseptasi, meningkatkan kualitas para *underwriternya* dan memiliki prosedur baku yang tertuang dalam manual akseptasi yang diperbaharui secara berkala.

Perusahaan melakukan evaluasi atas semua potensi kerugian yang ada dan meminimalkan dengan proteksi reasuransi yang tepat dengan limit yang memadai dari perusahaan-perusahaan reasuransi yang berkualitas untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi tersebut.

Risiko dalam hal klaim mungkin terjadi apabila beberapa klaim besar yang terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Nilainya bisa sangat besar. Untuk mengantisipasi hal ini, selain program reasuransi yang baik, Perusahaan juga melakukan sebagian besar investasinya dalam bentuk yang likuid sehingga liabilitas Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat terpenuhi.

#### **2. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan dan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas di bank, deposito berjangka dan piutang. Jumlah eksposur maksimum risiko kredit sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Perusahaan mengelola risiko dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank.

#### **3. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

#### **4. Risiko Keuangan yang Menyangkut Pengelolaan Dana**

Risiko pengelolaan dana dilakukan dengan dua pendekatan, yang pertama adalah manajemen cash flow dengan mempersingkat waktu penagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sehingga dana dapat lebih cepat diinvestasikan. Kedua, untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global dan lokal, perubahan situasi politik, perubahan peraturan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi keamanan investasi.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **30. MANAJEMEN RISIKO (*Lanjutan*)**

4. Risiko Keuangan yang Menyangkut Pengelolaan Dana (*lanjutan*)

Perusahaan menerapkan penempatan investasi dengan portfolio yang berimbang dalam berbagai instrumen seperti deposito berjangka, obligasi dan menghindari investasi yang berisiko tinggi.

5. Risiko Hukum Menyangkut Kemungkinan Adanya Tuntutan Secara Hukum

Sebagai perusahaan penjaminan, perusahaan tidak terlepas dari kemungkinan adanya tuntutan-tuntutan secara hukum. Hal ini bisa terjadi akibat ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung permasalahan atau adanya kelemahan dalam kontrak.

Upaya perusahaan dalam mengantisipasi risiko ini adalah dengan memiliki tenaga yang handal di bidang hukum, menyempurnakan kontrak-kontrak yang ada, melengkapi semua persyaratan sesuai peraturan yang ada dan bekerja sama dengan konsultan hukum untuk membenahi perangkat administrasi hukum di perusahaan.

6. Risiko Teknologi dan Informasi yang Menyangkut Potensi Kerugian dari Sistem Informasi

Sangat cepatnya perkembangan teknologi informasi membuat suatu peristiwa internal maupun eksternal berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Kejadian seperti serangan virus, pembajakan informasi, bencana alam, gangguan jaringan atau sistem dapat menimbulkan kerugian melalui biaya restorasi data yang cukup besar dan menurunnya kualitas pelayanan.

Untuk mengendalikan risiko ini, Perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan sistem keamanan untuk proteksi, melakukan *back up support* yang lebih teratur, menyiapkan *Contingency Plan* untuk mengatasi keadaan darurat, mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan keamanan sistem informasi dengan konsekuen.

---

#### **31. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan kesalahan pencatatan dan perhitungan kembali terhadap beberapa akun agar sesuai dengan penyajian dalam laporan keuangan tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manajemen PT Jamkrida Kalbar menghitung dan melakukan evaluasi kembali terhadap beberapa beban administrasi dan umum pada pos beban akuisisi yang seharusnya merupakan biaya di bayar di muka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 232.622.562 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.006.271.593.
2. Manajemen PT Jamkrida Kalbar menghitung dan melakukan evaluasi kembali terhadap pencatatan liabilitas estimasi manfaat karyawan atas penyajian keuntungan/ kerugian aktuarial dan menghitung kembali terhadap pajak penghasilan termasuk akrual utang pajak dan pos pajak tangguhan yang dihitung kembali antara perbedaan temporer dan fiskal, sehingga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 46.
3. Manajemen PT Jamkrida Kalbar menghitung dan menyesuaikan penyajian surat-surat berharga sesuai dengan klasifikasi serta intensi manajemen serta reklasifikasi terkait dengan penyajian akun lainnya.

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**31. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	2021		2020	
	Sebelum Disajikan Kembali	Setelah Disajikan Kembali	Sebelum Disajikan Kembali	Setelah Disajikan Kembali
Aset				
Aset Lancar				
Beban Dibayar di Muka	13.148.358.888	13.837.761.220	12.169.931.612	12.405.554.175
Aset Tidak Lancar				
Investasi Jangka Panjang	10.000.000.000	10.211.115.849	8.353.434.375	8.353.434.375
Aset Hak Guna	--	464.954.620	--	--
Pajak Tangguhan	--	298.264.955	--	45.546.927
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas Lancar				
Utang Pajak	--	8.140.417	--	9.000.000
Ekuitas				
Pendapatan Komprehensif				
Lainnya	(238.173.500)	80.750.000	(134.739.125)	204.877.941
Agio/Disagio	(206.150.002)	--	(31.552.702)	--
Tidak Ditentukan				
Penggunaannya	(6.405.632.143)	(5.275.109.213)	(3.351.867.756)	(3.453.868.033)
Pendapatan Penjaminan	1.623.297.731	2.629.569.323	1.442.983.130	1.675.605.695
Pendapatan Investasi	1.726.780.694	1.817.993.844	2.247.550.506	2.247.550.506
Beban Investasi				
Beban Umum dan Administrasi				
Lainnya	(1.613.165.130)	(1.577.799.636)	(1.295.074.489)	(1.228.233.992)
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Pendapatan Lain-lain	1.501.537.387	1.315.183.550	374.636.326	474.857.298
Beban Lain-lain	--	(90.818.253)	--	(67.737.839)
Beban Pajak Penghasilan				
Pajak Tangguhan	--	217.707.840	--	28.573.996
Penghasilan Komprehensif Lainnya				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi				
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja - bersih	(159.137.221)	3.601.223	163.754.174	12.772.826

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

## **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

*(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

### **32. KOMITMEN DAN PERJANJIAN MATERIAL**

- **Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat**

Pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 03/DIR/JKB-PKS/X/2020 dan Nomor DIR/PKS-UMM/31/2020 tentang Penjaminan Bank Garansi, dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 2 Oktober 2020, dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023.

- **Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat**

Pada tanggal 10 Juni 2022, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 116/JKB/PJK-PKS/VI/2022 dan Nomor DIR/PKS-UMM/16/2022 tentang Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Kreatif, dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 10 Juni 2022, dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 9 Juni 2025.

- **Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat**

Pada tanggal 31 Agustus 2022, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 234/JKB/PJK-PKS/2022 dan Nomor DIR/PKS-UMM/26.A/2022 tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 7 Oktober 2022, dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 6 Oktober 2025.

- **Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat**

Pada tanggal 14 Maret 2022, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 043/JKB/PJK-PKS/III/2022 dan Nomor DIR/PKS-UMM/12/2022 tentang Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil, dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 25 Maret 2022, dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 24 Maret 2025.

- **Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin**

Pada tanggal 14 Agustus 2017, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dengan Nomor 0001/JKB/PKS-AA/VIII/2017 dan Nomor 013/PKS-AL AMIN/DIR/VIII/2017 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Pembiayaan, dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 15 Agustus 2020 dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023.

- **Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia**

Pada tanggal 6 September 2019, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia dengan Nomor 49A/SPK/NR/IX/2019 dan 09/DIR/PKS/IX/2019 tentang Penempatan Pertanggungjawaban Ulang (Reasuransi) untuk Produk Penjaminan PT Jamkrida Kalbar, dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 1 September 2020, dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.



**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

*(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

**33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 13 Maret 2023.



# PT JAMKRIDA KALBAR

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT**

No. 005/JKB/ADM/III/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Drs. Martinus Damamang, CRGP.  
Alamat kantor : Jl. Perdana Komplek Central Perdana Blok C No 16 RT 001  
RW 010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78121  
Alamat Domisili sesuai KTP : Komplek Pondok Pangeran 2 Blok J No 10 Pontianak  
Nomor Telepon Kantor : 0561-810 4094  
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Teguh Wahyudi, S.Sos., QRGF  
Alamat kantor : Jl. Perdana Komplek Central Perdana Blok C No 16 RT 001  
RW 010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78121  
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Sambas Barat Blok 15 No 125 Perum 4 Pontianak  
Nomor Telepon Kantor : 0561-810 4094  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
- Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pontianak, 13 Maret 2023  
Atas nama dan mewakili Direksi



**Drs. Martinus Damamang, CRGP**  
Direktur Utama

**Teguh Wahyudi, S.Sos., QRGF**  
Direktur

***dbsd&a***

**Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & All**  
Registered Public Accountants  
License No. : 42/KM.1/2013

Menara Kuningan 11<sup>th</sup> Floor  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5  
Jakarta 12940 Indonesia  
Phone : (62-21) 300 15702 – 05  
Fax : (62-21) 300 15701  
E-mail : [dbstda@kapdbstda.co.id](mailto:dbstda@kapdbstda.co.id)  
Website : [www.kapdbstda.com](http://www.kapdbstda.com)

**B K R**

**INTERNATIONAL**

An independent member of BKR International,  
with offices throughout the World

Nomor : 00006/2.0936/AU.1/08/0396-1/1/III/2023

## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini kami.

### **Penekanan Suatu Hal**

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 31 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2021/ 31 Desember 2020, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sehubungan dengan salah saji dan koreksi atas penyesuaian kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini kami tidak di modifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

**Hal Lain**

Laporan keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya No.00062/3.0408/AU.1/08/1032-1/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022, yang menyatakan opini wajar dengan modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit perusahaan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

### **DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI**

Izin Usaha No.42/KM.1/2013



**Doli Diapary Siregar, CPA**

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0396

Jakarta, 13 Maret 2023



00006

